# POLITIK BAHASA

9

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000

# POLITIK BAHASA

## Risalah Seminar Politik Bahasa

Editor
Hasan Alwi
Dendy Sugono

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2000

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA
Klasifikasi
No. Induk :
Tgl
Ttd.

**Penyunting Penyelia**
Alma Evita Almanar

**Penyunting**
Jumariam

**Pewajah Kulit**
Gerdi W.K.

PROYEK PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH-JAKARTA
TAHUN 2000

Utjen Djusen Ranabrata (Pemimpin), Tukiyar (Bendaharawan),
Djamari (Sekretaris), Suladi, Haryanto, Budiyono, Radiyo, Sutini (Staf)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

306-449
SEM
s

Seminar Politik Bahasa
Jakarta: Pusat Bahasa, 2000
xviii + 246 hlm.; 21 cm

ISBN 979-685-098-2

1. Bahasa Indonesia-Politik Bahasa
2. Bahasa Indonesia-Sosiolinguistik

# SAMBUTAN
# KEPALA PUSAT BAHASA

Meskipun sekurang-kurangnya sejak Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 di kalangan para pakar dan pemerhati bahasa sudah ada pemahaman dasar tentang masalah kebahasaan di Indonesia yang terjalin dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, masih harus tetap diakui bahwa yang paling utama adalah segala permasalahan yang menyangkut bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sama pentingnya dengan kedudukannya yang lain sebagai bahasa negara.

Ketika fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu boleh dikatakan masih belum seratus persen mantap karena penduduk Indonesia di atas usia sekolah masih banyak yang belum mampu berbahasa Indonesia, pada saat yang sama bahasa Indonesia juga dituntut untuk tetap mantap dapat digunakan baik sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern maupun sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional.

Apa yang dikemukakan di atas jangan dipandang sebagai pertentangan kepentingan antara fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara--apalagi sebagai kontroversi--, tetapi harus dipahami sebagai fenomena yang merefleksikan sebagian saja dari keseluruhan masalah kebahasaan yang harus kita hadapi dengan porsi perhatian yang sama. Fenomena seperti itu secara substansial tidak memperlihatkan perbedaan selama kurun waktu antara penyelenggaraan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Perbedaan yang terjadi lebih bertumpu pada perubahan dalam hal intensitasnya, sesuai dengan keperluan dan tuntutan kelompok masyarakat terhadap bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaiannya. Perubahan itu akan terus berlangsung seirama dengan perkembangan linear dari setiap fungsi yang melekat pada bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara.

Proses perkembangan itulah yang harus selalu kita pantau dan kita cermati. Dalam hubungan itu, Pusat Bahasa, selaku instansi Pemerintah

yang ditugasi menangani masalah kebahasaan di Indonesia, telah menyelenggarakan Seminar politik Bahasa pada tanggal 8--12 November 1999 untuk menelaah dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975, sesuai dengan perkembangan masalah kebahasaan yang telah terjadi di Indonesia selama seperempat abad.

Hasil Seminar tahun 1999 itu, berikut seluruh makalah yang dibahas oleh para peserta Seminar, disajikan dalam buku ini. Mudah-mudahan isinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang, karena keprofesiannya atau paling tidak karena perhatian dan kecintaannya, akan senantiasa memantau dan mencermati berbagai kasus yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia.

Jakarta, November 2000

**Hasan Alwi**

# DARI POLITIK BAHASA NASIONAL KE KEBIJAKAN BAHASA NASIONAL

ISI buku ini, yang merupakan risalah sidang *(proceedings)* Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan pada tanggal 8--12 November 1999 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dapat dibedakan dalam tiga bagian. Laporan Kepala Pusat Bahasa, yang antara lain mengemukakan pandangan tentang perlunya diadakan seminar itu, dan sambutan Menteri Pendidikan Nasional (yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan) terdapat pada bagian pertama. Penyajian makalah yang berjumlah tiga belas buah berikut transkripsi tanya-jawabnya masing-masing tersaji pada bagian kedua. Rumusan hasil Seminar dikemukakan pada bagian ketiga atau bagian akhir sebelum Lampiran.

Ketigabelas makalah itu, berdasarkan pokok bahasan, nama penyaji dan judul makalahnya, adalah sebagai berikut.

1. **Kedudukan dan Fungsi Bahasa** (5 makalah)
   a. *Fungsi Politik Bahasa* (Hasan Alwi)
   b. *Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa* (Eep Saefulloh Fatah)
   c. *Bahasa Daerah Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah* (Mahsun)
   d. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing* (Nuril Huda)
   e. *Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah* (Edi Sedyawati)

2. **Mutu dan Peran Bahasa** (3 makalah)
   a. *Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa* (Dede Oetomo)
   b. *Hal-hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajarannya* (Yus Rusyana)
   c. *Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana Pembangunan Bangsa* (Sugiyono dan A. Latief)

3. **Mutu Pemakaian Bahasa** (4 makalah)
   a. *Pengajaran Bahasa Asing: Gambaran Nyata dan Beberapa Gagasan Kebijakan* (Fuad Abdul Hamied)
   b. *Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa* (Bambang Kaswanti Purwo)
   c. *Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra* (Budi Darma)
   d. *Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh* (Djafar H. Assegaff)

4. **Kelembagaan** (1 makalah)
   *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional* (Hans Lapoliwa)

PERUMUSAN hasil Seminar, yang disusun oleh Panitia Perumus, didasarkan pada hasil sidang yang secara khusus membahas berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu diangkat untuk dirumuskan sebagai hasil Seminar. Akan tetapi, karena persoalan teknis yang sulit diatasi, transkripsi risalah sidang perumusan itu tidak dicantumkan dalam buku ini.

Bagaimanapun patut disadari bahwa *Seminar Politik Bahasa* tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari *Seminar Politik Bahasa Nasional* tahun 1975. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila kalau dalam menyimak hasil Seminar 1999, setiap kali kita harus menghubungkan dan membandingkannya dengan hasil Seminar 1975. Perbedaan di antara keduanya dapat ditelusuri pada uraian berikut. (*Politik Bahasa Nasional*, hasil Seminar 1975, selanjutnya disingkat PBN dan *Kebijakan Bahasa Nasional* yang dirumuskan dalam Seminar 1999 disingkat KBN.)

**1. Bahasa dan Sastra**

Masalah sastra di dalam KBN memperoleh porsi perhatian yang sama dengan bahasa sehingga keduanya harus dipandang sebagai dua sisi mata uang yang kadar kepentingannya setara. Itulah sebabnya perumusan tentang sastra di dalam KBN menjadi eksplisit. Dengan demikian, ada enam komponen yang saling menjalin di dalam KBN, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada satu pihak serta sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing pada pihak yang lain. Bandingkan dengan

PBN yang masih terpaku hanya pada masalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Pengakuan terhadap sastra yang disetarakan dengan bahasa itu dengan sendirinya berimplikasi pada perumusan dua butir bahasan yang lain, yaitu yang menyangkut **kedudukan dan fungsi** serta yang berhubungan dengan paparan tentang **pembinaan dan pengembangan**. Hal itu berarti bahwa di dalam KBN, setelah rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa (Indonesia, daerah, dan asing), ada pula rumusan tentang kedudukan dan fungsi sastra (Indonesia, daerah, dan asing). Demikian pula halnya dengan topik pembinaan dan pengembangan; ada yang berkenaan dengan bahasa dan ada pula yang secara khusus berkaitan dengan sastra.

**2. Bahasa Nasional dan Bahasa Indonesia**

Sebutan **bahasa nasional** pada PBI acapkali menimbulkan silang pendapat yang cukup tajam. Pertentangan pandangan itu bersumber pada rumusan yang menggambarkan pencampuradukan antara pemahaman terhadap substansi dan pemahaman terhadap kedudukannya. Rumusan tersebut menyebutkan bahwa "Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan yang dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara, dan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954".

Pada rumusan itu jelas ketersuratan dan ketersiratannya bahwa bahasa nasional adalah **bahasa Indonesia**, baik sehubungan dengan Sumpah Pemuda 1928 maupun dengan Pasal 36 UUD 1945, padahal bagian yang disebutkan terakhir kita pahami sebagai sumber rujukan bahasa Indonesia dalam hal kedudukannya, yaitu sebagai bahasa persatuan menurut Sumpah Pemuda 1928 dan sebagai bahasa negara menurut UUD 1945. Oleh karena itu, KBN membedakan bahasa Indonesia sebagai substansi dari bahasa nasional sebagai kedudukan. Hal itu secara jelas terlihat dalam rumusan KBN yang menyebutkan bahwa "bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan".

**3. Status Bahasa Melayu**

PBN dan KBN sama-sama menyebutkan bahasa Melayu, tetapi berbeda

dalam hal penamaan dan statusnya. Mengenai penamaan, PBN menggunakan sebutan **bahasa Melayu**. Adapun dalam KBN, sebutan yang digunakan ialah **bahasa rumpun Melayu**.

Dalam kaitannya dengan bahasa daerah, PBN menempatkan bahasa Melayu sebagai bagian dari bahasa daerah, sedangkan KBN secara tegas mengisyaratkan bahwa bahasa rumpun Melayu dipandang sebagai bahasa tersendiri. Artinya, bahasa rumpun Melayu bukan merupakan bagian dari bahasa daerah. Pandangan seperti itu dapat dipahami karena pada saat kelahiran dan dekade awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia memiliki keterkaitan sejarah yang sangat erat dengan bahasa Melayu. Bukankah yang diterima sebagai bahasa Indonesia dan yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 itu adalah bahasa Melayu?

Perbedaan dalam hal status itu terdapat dalam rumusan tentang bahasa asing. Menurut PBN, "Bahasa asing untuk Indonesia ialah semua bahasa kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu". Sementara itu, di dalam KBN dinyatakan bahwa "Bahasa asing di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu".

**4. Bahasa Asing**

Di kalangan masyarakat sudah cukup lama dikemukakan pandangan, kadang-kadang bahkan terungkapkan dalam bentuk harapan atau keinginan, tentang perlu dipertimbangkannya bahasa Cina, yang digunakan oleh para penuturnya di Indonesia, diperlakukan sama dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pandangan seperti itu pasti didasarkan pada berbagai hal, antara lain yang berkenaan dengan jumlah penutur serta perannya yang selama ini dimainkan oleh kelompok etnis yang bersangkutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dasar pemikiran yang sepintas lalu tampak meyakinkan itu ialah dikaitkannya keinginan tersebut dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup". Tanpa memahami asal-muasal

bahasa Cina di Indonesia dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, kita akan dengan mudah terjebak di dalam alur pernalaran yang melatarbelakangi keinginan itu sehingga kita pun akan beranggapan bahwa penjelasan Pasal 36 UUD 1945 itu berlaku pula bagi bahasa Cina di Indonesia.

Harapan atau keinginan tersebut tidak mungkin dapat dipertimbangkan karena bagaimanapun bahasa Cina secara genetis bukan bahasa yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia, apalagi di kawasan Nusantara. Lagi pula, andaikata keinginan seperti itu "diluluskan", hal itu akan membuka peluang bagi golongan masyarakat Indonesia yang berasal dari kelompok etnis (asing) lain untuk mengajukan tuntutan yang sama.

Di dalam menghadapi kasus tersebut, KBN secara tegas mengatakan bahwa "Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing". Dengan demikian, bahasa Cina yang digunakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina tetap merupakan bahasa asing.

**5. Fungsi Bahasa**

Dalam kurun waktu seperempat abad antara Seminar 1975 dan Seminar 1999, fungsi bahasa Indonesia memperlihatkan kecenderungan perubahan dibandingkan dengan fungsi bahasa yang telah dirumuskan dalam PBN, terutama fungsi yang bermuara pada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perubahan fungsi bahasa Indonesia tersebut pada gilirannya berdampak pula baik pada fungsi bahasa daerah maupun pada fungsi bahasa asing.

Fungsinya sebagai bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan (mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, termasuk pendidikan pascasarjana), sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional (untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan), dan sebagai bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan iptek modern benar-benar telah mengakibatkan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara berpacu dalam menata dan mengembangkan dirinya agar ia tetap berperan sebagai sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai ranah pemakaiannya, seperti dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri. Yang tidak kalah penting dan strategis-

nya—dan hal ini harus dicatat secara khusus—ialah tuntutan yang berkaitan dengan media massa, terutama yang menyangkut kepustakaan, penerbitan, dan informasi.

Untuk menjawab tuntutan yang demikian, secara eksplisit KBN menyebutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Selain itu, sebagai akibat dari dinyatakannya sastra sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia, KBN merumuskan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung sastra Indonesia.

Mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu, ada satu hal penting lainnya yang perlu dilihat secara proporsional, yaitu yang berkenaan dengan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Selama ini pandangan kita mengenai hal itu hanya terpaku pada hubungan satu arah, yaitu hubungan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang terekam dalam PBN memang hanya bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional. Hal yang sebaliknya mengenai peran bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah boleh dikatakan terluput dari perhatian kita, padahal di dalam kenyataannya bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat dominan dalam memperkaya kosakata bahasa daerah. Contohnya sangat banyak dan pasti akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya kosakata bahasa Indonesia sehingga contoh tersebut pada uraian ini tidak perlu ditampilkan. Itulah sebabnya masalah itu ditampung di dalam KBN melalui rumusan yang menyebutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai pemerkaya bahasa dan sastra daerah.

Seperti telah disebutkan di atas, perubahan fungsi bahasa Indonesia itu berpengaruh pula terhadap fungsi bahasa daerah dan bahasa asing. Tiga fungsi bahasa daerah yang disebutkan dalam PBN--yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di lingkungan keluarga dan masyarakat daerah--disebutkan pula dalam KBN dengan rumusan yang sama. Ada dua fungsi lain yang ditambahkan di dalam KBN, yaitu fungsi bahasa daerah sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Kedua fungsi bahasa daerah tersebut seharusnya sudah tercantum dalam rumusan PBN karena ketika sastra daerah dan sastra Indonesia masing-masing tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, maka ketika itu pula apa yang dirumuskan

dalam dua butir terakhir tentang fungsi bahasa daerah itu berproses dengan serta-merta secara alamiah.

Mengenai fungsi bahasa asing, PBN dan KBN memiliki rumusan yang sama untuk bahasa asing sebagai alat perhubungan antarbangsa dan bahasa asing sebagai alat pemanfaatan iptek modern untuk pembangunan nasional. Satu fungsi lainnya yang tercantum di dalam PBN ialah bahasa asing sebagai alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Fungsi ini di dalam KBN dirumuskan menjadi dua butir, yaitu yang berkaitan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris diutamakan sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama untuk pengembangan tata istilah keilmuan. Adapun bahasa Arab merupakan bahasa asing yang ditempatkan sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam. Akhirnya, perlu ditambahkan bahwa bahasa Jerman, Perancis, dan Belanda, yang disebutkan di dalam PBN, tidak dicantumkan di dalam KBN. Akan tetapi, hal itu tidak perlu dipersoalkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa asing di Indonesia, kecuali kalau ketiga bahasa asing itu dibicarakan dalam hubungannya dengan pengajaran.

**6. Bahasa Pengantar dan Pengajaran**

Pada KBN, ihwal bahasa pengantar dalam dunia pendidikan hanya secara sepintas lalu dikemukakan sehubungan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa daerah dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Lain halnya dengan PBN yang memaparkan masalah bahasa pengantar tersebut dalam porsi yang lebih dari memadai. Namun, pada dasarnya paparan itu lebih merupakan penjelasan terhadap fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, uraian tentang bahasa pengantar di luar konteks kedudukan dan fungsi tersebut boleh dikatakan hanya merupakan pengulangan.

Perbedaan penyajian tentang bahasa pengantar antara PBN dan KBN itu dapat dicermati melalui dua hal. Pertama, PBN dihasilkan sebelum ada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional (Pasal 41). Bahasa daerah dan bahasa asing juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu (Pasal 42). Kedua, soal bahasa pengantar dalam KBN hanya terdapat dalam konteks

mengingatkan kita akan perlunya kebijakan bahasa nasional diatur dalam undang-undang.

Perlunya Pusat Bahasa menjadi lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan rekomendasi beberapa kali Kongres Bahasa Indonesia, tercantum dalam butir Organisasi. UKBI diperlukan sebagai sarana untuk mengukur tingkat kemahiran atau keterampilan seseorang, termasuk tenaga kerja asing, dalam berbahasa Indonesia yang dikaitkan dengan, antara lain, tuntutan pekerjaan, jabatan, atau profesi. Keperluan akan sarana uji seperti UKBI dicetuskan pertama kali di dalam Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988.

Jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang mudah diakses oleh masyarakat yang didukung oleh perpustakaan yang modern dan canggih dikemukakan dalam butir Jaringan Informasi. Sementara itu, perlunya Pemerintah atau masyarakat memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dalam bidang bahasa dan sastra, perlunya Pusat Bahasa bekerja sama dengan berbagai pihak, serta perlu dikembangkannya sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme peneliti bahasa dan sastra merupakan butir permasalahan yang dicatat dan digarisbawahi oleh KBN sehubungan dengan komponen Sarana.

**8. Kelembagaan**

Komponen yang tidak terdapat pada PBN, tetapi tercantum dalam KBN, adalah masalah kelembagaan. Yang dimaksudkan ialah badan atau organisasi--berdasarkan cakupan tugasnya--bertanggung jawab dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Dalam pengertian yang demikian, ada lembaga Pemerintah dan nonpemerintah.

Lembaga Pemerintah, berdasarkan hierarki dan lokasinya, dirinci lebih lanjut menjadi lembaga tingkat Pusat dan daerah serta lembaga di luar negeri. Mengenai lembaga nonpemerintah, berdasarkan wadah keprofesiannya, ada yang langsung berkaitan dengan bidang kebahasaan dan kesastraan serta ada yang tidak secara langsung berkaitan.

Untuk semua jenis kelembagaan itu, dikemukakan cakupan tugasnya masing-masing sehingga jelas terlihat seberapa jauh keterlibatan setiap lembaga itu di dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Faktor yang paling penting di atas kesemuanya itu ialah masalah koordinasi agar setiap lembaga dapat berperan dan melaksanakan

fungsinya yang berkenaan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan secara lebih efektif dan efisien.

**9. Sastra dalam KBN**

Telah disebutkan bahwa bahasa dan sastra dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang yang memiliki kadar kepentingan yang sama (lihat butir *Bahasa dan Sastra*). Dalam konteks seperti itu dapat ditambahkan bagaimana kebermaknaan sastra yang diposisikan sebagai bagian dari keudayaan nasional (periksa rumusan Pasal 32 dan 36 UUD 1945 berikut penjelasannya).

Mengenai sastra itu sendiri, agaknya hampir tidak mungkin dapat dibayangkan keberadaannya tanpa dikaitkan dengan keberdadaan dan peran bahasa sebagai sarana komunikasi verbal dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Artinya, tidak mungkin ada sastra tanpa bahasa. Cara pandang yang demikian akan membawa kita ke arah pemahaman tentang interdependensi berikut peran interaksinya antara bahasa dan sastra.

Ketika bahasa dan sastra yang diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang itu diperhadapkan dengan kebudayaan, pertanyaan yang layak dijawab ialah sisi yang mana yang berhadapan dengan atau yang menghadap ke arah kebudayaan. Jawabannya ialah sastra. Jadi, sastralah yang merupakan bagian dari kebudayaan, sedangkan bahasa tetap berada di sebelahnya, baik sebagai pihak yang menyediakan bahan baku bagi pertumbuhan dan perkembangan sastra, maupun sebagai pihak yang terkena oleh dampak pertumbuhan dan perkembangan sastra tersebut.

Pernalaran yang demikian menjadi amat signifikan di dalam melihat hubungan antara bahasa dan sastra pada satu pihak dan kebudayaan pada lain pihak. Pada gilirannya pola hubungan itu dapat pula digunakan untuk menemukan makna yang tersirat di balik penjelasan pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa itu (maksudnya bahasa-bahasa daerah) merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Dengan demikian, bahasa-bahasa daerah yang menjadi bagian dari kebudayaan itu ialah bahasa-bahasa daerah dalam bentuk karya sastranya.

Dalam konteks pernalaran seperti itu pulalah KBN merumuskan bahwa "sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkap pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia". Dengan rumusan itu KBN menambahkan bahwa sastra Indonesia harus berperan sebagai media eks-

presi berbagai gagasan modern dan sekaligus sebagai pencerminan dan pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru. Hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa "usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang tidak dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa sendiri".

Jiwa dan semangat seperti itu tergambarkan dengan jelas melalui rumusan fungsi sastra Indonesia dalam KBN, yakni (1) menumbuhkan rasa kenasionalan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) merekam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Akhirnya, patut dikemukakan peran sastra daerah dan sastra asing di dalam KBN. Pada satu sisi sastra daerah berperan sebagai fondasi kebudayaan daerah (bahkan kebudayaan Nusantara), sebagai alat memperkukuh budaya masyarakat di daerah, dan sebagai cermin pencarian jati diri masyarakat yang bersangkutan. Pada sisi yang lain sastra asing merupakan salah satu sumber inspirasi bagi pengarang dan salah satu sumber untuk mengenal kebudayaan asing.

**10. Bahasa Daerah dan Pemerintahan Otonomi**

Pentingnya peran bahasa daerah sudah dirumuskan di dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan, antara lain, bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara dengan baik oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom disebutkan, antara lain, dua hal yang masing-masing berkenaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Menurut peraturan pemerintah itu, secara jelas disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia merupakan kewenangan Pusat. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan bahasa dan budaya daerah termasuk ke dalam kewenangan Daerah. Dengan demikian, negara yang dimaksudkan di dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 itu adalah Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya di

dalam KBN dikemukakan bahwa dalam hubungannya dengan perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia ke arah pemerintahan otonomi daerah serta pentingnya pembinaan dan pelestarian budaya daerah, bahasa daerah perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memainkan peranan yang lebih besar. Untuk itu, KBN menggarisbawahi perlunya memberikan perhatian yang lebih luas dan mendalam terhadap bahasa daerah.

ITULAH beberapa hal yang menurut kami selaku editor perlu disampaikan sehubungan dengan perbedaan antara *Politik Bahasa Nasional* (hasil Seminar 1975) dan *Kebijakan Bahasa Nasional* (hasil Seminar 1999) yang keduanya sama-sama membahas dan merumuskan berbagai masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani. Selama belum ada undang-undang tentang kebahasaan, yang layak dijadikan sumber rujukan adalah yang terakhir, yakni hasil Seminar 1999.

Jarum waktu akan terus berputar. Perubahan zaman akan senantiasa terjadi, terlebih-lebih dalam era globalisasi pada ke-21 ini. Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dengan tingkat kecepatan yang begitu tinggi pasti akan secara langsung berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan. Kesemuanya itu pada gilirannya akan melahirkan tuntutan dan tantangan baru bagi keberlangsungan kehidupan kebahasaan di Indonesia. Siapa tahu, sebagai akibatnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama apa yang telah tercantum dalam KBN itu harus ditinjau dan dirumuskan kembali. Untuk itu, marilah kita sama-sama menunggu sambil berdoa dan berupaya agar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien serta sekaligus tetap mantap sebagai lambang jati diri keindonesiaan kita.

Jakarta, November 2000

**Hasan Alwi**
**Dendy Sugono**

# DAFTAR ISI

**Sambutan Kepala Pusat Bahasa** . . . . . iii
**Dari Politik Bahasa Nasional ke Kebijakan Bahasa Nasional** . . v
**Daftar Isi** . . . . . xvii

**1. Laporan Kepala Pusat Bahasa** . . . . . 1
**2. Sambutan Menteri Pendidikan Nasional** . . . . . 3
**3. Makalah Seminar**
1) *Fungsi Politik Bahasa*
oleh Hasan Alwi . . . . . 6
2) *Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa*
oleh Eep Saefulloh Fatah . . . . . 21
3) *Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah*
oleh Mahsun . . . . . 38
4) *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing*
oleh Nuril Huda . . . . . 59
5) *Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah*
oleh Edi Sedyawati . . . . . 79
6) *Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa*
oleh Dédé Oetomo . . . . . 88
7) *Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajarannya*
oleh Yus Rusyana . . . . . 101
8) *Pengajaran Bahasa Asing: Gambaran Nyata dan Beberapa Gagasan Kebijakan*
oleh Fuad Abdul Hamied . . . . . 112
9) *Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana Pembangunan Bangsa*
oleh Sugiyono dan A. Latief . . . . . 145
10) *Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa*
oleh Bambang Kaswanti Purwo . . . . . 164

11) *Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra*
oleh Budi Darma . . . . . 183
12) *Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh*
oleh Djafar H. Assegaf . . . . . 195
13) *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional*"
oleh Hans Lapoliwa . . . . . 202

**4. Rumusan Seminar Politik Bahasa 1999** . . . . . 216
**Lampiran** . . . . . 269

# LAPORAN
# KEPALA PUSAT BAHASA

Direktur Jenderal Kebudayaan, Dr. I Gusti Ngurah Anom, yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak peserta Seminar Politik Bahasa,

*Assalamu 'alaikum warrohmatullahi wabarakatuh*
Salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak untuk datang mengikuti kegiatan ini karena kami tahu bahwa sebagian besar dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang berada di ruangan ini adalah orang yang sibuk. Kehadiran Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak di sini sekaligus menggambarkan perhatian dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan pada satu rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia VII yang diadakan pada bulan Oktober 1998, yang menyebutkan bahwa perlu diselenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 dalam rangka menyusun kebijakan nasional yang mutakhir dan menyeluruh dalam bidang bahasa dan sastra. Berdasarkan rekomendasi itu telah dirumuskan tujuan Seminar Politik Bahasa ini ialah meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak,

Peserta pertemuan ini berjumlah 63 orang meskipun kalau Pak Dirjen melihat peserta yang hadir belum lengkap 63 orang karena masih ada beberapa di antaranya baru akan datang siang ini dan besok. Akan tetapi, catatan penting yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di antara ke-63 peserta seminar ini 23 orang adalah guru besar. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya masalah ini. Ke-63 peserta ini berasal dari berbagai bidang, yaitu mewakili pertahanan keamanan, pakar sosiologi, pakar politik, pakar hukum, pakar kebudayaan, pakar sejarah, pakar ke-

dokteran, pakar pariwisata, sastrawan, serta pakar bahasa dan pakar sastra.

Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Ibu-Ibu, dan Bapak-Bapak,

Pada kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ini telah direncanakan akan dibahas lima pokok bahasan yang diuraikan lebih lanjut dalam tiga belas buah makalah. Pokok bahasan pertama adalah Politik Bahasa di Indonesia satu makalah. Pokok bahasan kedua adalah Kebudayaan dan Fungsi Bahasa empat makalah, yang terdiri atas Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah, Kedudukan dan Fungsi Sastra Indonesia dan Daerah, serta Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing. Pokok bahasan ketiga ialah Mutu dan Peranan Bahasa. Pada pokok bahasan ini dibicarakan Penelitian Bahasa, Penelitian Sastra, Pengajaran Bahasa Asing, dan Penyusunan Sarana Uji Kemahiran Berbahasa, dan Peningkatan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra. Yang terakhir ialah pokok bahasan mengenai Kelembagaan membahas satu makalah, yaitu tentang Kedudukan dan Fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Organisasi Pemerintahan, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kebahasaan.

Pada hari terakhir direncanakan akan diadakan empat sidang kelompok sehingga 48 peserta ini akan terbagi ke dalam tiga kelompok dan 15 peserta lainnya masuk pada kelompok terakhir. Keempat kelompok itu masing-masing akan membahas (1) Kedudukan dan Fungsi Bahasa, (2) Mutu dan Peran Pusat Bahasa, (3) Mutu Pemakaian Bahasa, dan (4) Kelembagaan.

Itulah Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Ibu-Ibu, dan Bapak-Bapak, beberapa hal yang akan dibahas di dalam Seminar Politik Bahasa ini dengan harapan kita akan membicarakannya dengan lebih tenang. Oleh karena itu, seminar ini tidak diadakan di Jakarta, tetapi dipilihkan di tempat ini.

Akhirnya, kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Dr. I Gusti Ngurah Anom, untuk memberikan sambutan dan sekaligus, atas nama Menteri Pendidikan Nasional, meresmikan kegiatan ini. Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

perkembangan ke depan, kehidupan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di luar Indonesia, rumusan kebijakan kebahasaan itu perlu ditinjau kembali dan dikembangkan agar kita memiliki suatu kebijakan nasional yang lebih mutakhir dan menyeluruh di bidang bahasa dan sastra.

Melalui seminar ini, Saudara-Saudara, para pakar dari berbagai bidang ilmu yang terhimpun dalam seminar ini, kami mohon bantuannya untuk meninjau kembali Politik Bahasa Nasional 1975 yang telah kita miliki itu dan merumuskan suatu kebijakan nasional tentang bahasa dan sastra yang lebih komprehensif. Kebijakan itu, antara lain, meliputi kedudukan dan fungsi bahasa serta sastra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demi memperkukuh kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra, diperlukan rumusan yang menyangkut peningkatan mutu daya ungkap bahasa agar memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat modern. Demikian juga di bidang sastra, perlu dirumuskan kebijakan yang dapat menciptakan iklim peningkatan mutu dan apresiasi sastra. Dengan demikian, kebijakan itu dapat memberikan ruang gerak yang lebih operasional dalam pengembangan bahasa dan sastra demi peningkatan peran bahasa dan sastra dalam menuju masyarakat Indonesia baru yang maju dan demokratis.

Dalam upaya peningkatan mutu SDM, diperlukan kebijakan nasional yang memungkinkan terciptanya iklim peningkatan mutu penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun bahasa daerah dalam kehidupan sosial dan budaya daerah. Kebijakan nasional itu juga diharapkan dapat menciptakan iklim penguasaan bahasa asing secara memadai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergaulan antarbangsa dalam memenuhi tuntutan global abad XXI atau milenium III.

Saudara-Saudara,

Rumusan kebijakan nasional tentang bahasa dan sastra yang komprehensif dan akurat tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak didukung oleh kelembagaan yang memadai. Untuk itu, diperlukan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu kita pikirkan dan kita rumuskan kembali aspek kelembagaan yang menangani masalah bahasa dan sastra tersebut serta bentuk kerja samanya dengan pihak-pihak terkait.

Peserta Seminar yang saya hormati,

Saya berharap, mudah-mudahan seminar ini dapat mencapai hasil yang kita harapkan dan selamat berseminar.

Dengan ini, saya nyatakan Seminar Politik Bahasa dibuka secara resmi. Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Menteri Pendidikan Nasional

**Dr. Jahja A. Muhaimin**

# FUNGSI POLITIK BAHASA

**Hasan Alwi**
Pusat Bahasa

1. Masalah kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Hal itu berkaitan erat dengan tiga aspek, yaitu yang menyangkut *bahasa, pemakai bahasa,* dan *pemakaian bahasa.* Aspek bahasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Dalam perilaku berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi juga sekaligus dapat diamati apa yang sering disebut sebagai *sikap* pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Adapun aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang-bidang kehidupan yang merupakan ranah pemakaian bahasa.

   Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu didasarkan pada *kehendak politik* yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa persatuan* yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara, secara jelas merupakan *pernyataan politik* yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa negara,* merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Selain itu, berbagai macam rekomendasi yang disepakati dalam setiap kali penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia perlu dicatat sebagai gambaran keinginan yang kuat dari para pesertanya agar segala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia ditangani melalui upaya *pembinaan* dan *pengembangan* bahasa yang lebih efektif dan efisien.

2. Kesimpulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu meliputi ketiga aspek yang telah disebutkan di atas (bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian ba-

hasa). Selain itu, secara khusus dikemukakan juga rumusan tentang *kedudukan* dan *fungsi* yang merupakan kerangka dasar dalam *perencanaan bahasa*.

Kerangka dasar yang mantap akan menjadi sumber acuan bagi upaya pengembangan korpus bahasa dan pengidentifikasian ranah pemakaian bahasa. Kedua hal itu pada gilirannya dapat dijadikan semacam tolok ukur untuk mengetahui mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, termasuk sikap bahasa yang bersangkutan. Sementara itu, rumusan hasil Seminar juga memberikan perhatian khusus pada *pengembangan pengajaran* dan *bahasa pengantar*. Keduanya masih merupakan bagian dari aspek pemakaian bahasa yang perlu memperoleh porsi perhatian yang sungguh-sungguh.

Seperti yang dirumuskan Seminar, pengembangan pengajaran ialah "usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan pengajaran bahasa agar dapat dicapai tujuan pengajaran bahasa itu sendiri, yaitu agar penutur bahasa itu memiliki keterampilan berbahasa, pengetahuan yang baik tentang bahasa itu, dan sikap positif terhadap bahasa itu, termasuk hasil sastranya." Mengenai bahasa pengantar disebutkan bahwa yang dimaksudkan ialah "bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan."

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia. Dalam undang-undang itu juga dirumuskan ihwal bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam tahap awal pendidikan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, bahasa daerah atau bahasa asing juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

3. Seperti sudah disebutkan di atas, hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 memuat rumusan dengan tiga macam tajuk, yaitu *kesimpulan, pendapat*, dan *usul*. Rumusan kesimpulan diawali dengan paparan tentang pengertian dasar mengenai *kebijakan nasional, bahasa nasional, bahasa daerah,* dan *bahasa asing*. Kebijakan nasional dirumuskan sebagai politik bahasa nasional "yang berisi perencanaan, peng-

arahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan." Ditambahkan bahwa penanganan masalah kebahasaan itu perlu diupayakan secara berencana, terarah, dan menyeluruh. Selanjutnya, berturut-turut disajikan rumusan tentang *kedudukan dan fungsi, pembinaan dan pengembangan, pengembangan pengajaran*, dan *bahasa pengantar* yang semuanya dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Perlu ditambahkan bahwa dalam rumusan tersebut bahasa asing hanya dikemukakan sehubungan dengan pemakaian dan pemanfaatannya di Indonesia yang bersama-sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjalin masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani secara berencana, terarah, dan menyeluruh dalam suatu kebijakan nasional seperti yang telah disebutkan di atas.

Rumusan yang bertajuk pendapat berisi delapan butir yang secara umum menyangkut pengajaran, ketenagaan, dan sarana. Salah satu butir yang amat penting ialah dikemukakannya pandangan bahwa Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran terhadap Penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Pandangan tersebut sudah tepat, tetapi hal itu dalam seminar ini masih perlu dimantapkan lagi, terutama mengingat adanya tuntutan dan tantangan baru yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama 24 tahun terakhir.

Tiga butir rumusan yang bertajuk usul masing-masing menyangkut pengindonesiaan nama-nama asing, penerjemahan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut digunakannya ragam baku tersebut. Pemberian sanksi ini tampaknya dihadapkan pada berbagai kendala sehingga usul ini masih belum mungkin dapat dilaksanakan. Apalagi dalam suasana dan semangat gerakan reformasi yang masih tetap bergelora seperti sekarang ini, usul tersebut akan dirasakan sangat tidak populer dan pasti memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi sehingga hal itu diperkirakan akan menyudutkan posisi Pemerintah pada umumnya dan posisi Pusat Bahasa pada khususnya.

Usul agar kegiatan penerjemahan dilaksanakan secara berencana telah diupayakan melalui berbagai cara. Akan tetapi, hasilnya amat jauh dari yang diharapkan. Dalam berbagai pertemuan yang secara khusus membahas masalah penerjemahan, persoalan yang sama selalu

kembali, yaitu bahwa imbalan yang dapat diberikan kepada penerjemah masih belum sesuai. Akibatnya, sampai saat ini penerjemahan merupakan lahan kegiatan yang kering dan tidak menarik. Kita menyadari bahwa penerjemahan itu sangat penting. Masalahnya ialah bahwa hal itu tidak sepenuhnya bergantung pada tersedianya tenaga penerjemah yang bermutu. Perlu dipertimbangkan sejumlah faktor penunjang, antara lain masalah imbalan seperti yang baru dikemukakan dan--ini sangat penting dan menentukan--adanya niat atau bahkan tekad yang mantap dari Pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain untuk secara bersungguh-sungguh menangani masalah penerjemahan ini.

Sehubungan dengan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu, masih ada tiga hal lagi yang perlu memperoleh catatan tersendiri, yaitu dua hal yang menyangkut upaya pembinaan dan pengembangan serta satu hal yang berkenaan dengan pengembangan pengajaran. Catatan tentang ketiga hal itu adalah sebagai berikut.

a. Upaya pembakuan bahasa Indonesia ragam lisan patut memperoleh perhatian yang berimbang dengan pembakuan bahasa Indonesia ragam tulis. Untuk itu, saatnya sudah tiba karena kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemungkinan yang amat luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk lebih mudah mengakses penggunaan bahasa lisan dibandingkan dengan bahasa tulis. Dalam bidang media massa, misalnya, masyarakat lebih mudah mendengarkan radio dan/atau "menonton" televisi daripada membaca surat kabar dan/atau majalah. Untuk keperluan itu, apa yang telah dirumuskan Seminar, yakni diperlukannya pembakuan lafal sebagai pegangan bagi para guru, penyiar radio/televisi, dan masyarakat umum, perlu benar-benar dilaksanakan karena sampai saat ini upaya pembakuan tersebut belum memperoleh perhatian dan upaya penanganan yang memadai. Yang telah dilakukan sangat bersifat sporadis karena masalah lafal ini hanya disinggung pada saat siaran Pembinaan Bahasa Indonesia lewat radio/televisi atau sekadar dikomentari dalam kegiatan penyuluhan bahasa.
b. Pelbagai ragam dan gaya bahasa seperti yang digunakan dalam perundang-undangan, administrasi pemerintahan, dan sarana komunikasi massa memang sudah diteliti. Namun, upaya penelitian itu bu-

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


kan saja belum tuntas dan belum meliputi seluruh bidang pemakaian bahasa, melainkan juga belum dikodifikasikan. Masalah ini perlu segera ditangani sebagaimana mestinya dan memperoleh prioritas yang sama dengan pembakuan lafal.

c. Penelitian pengajaran bahasa, baik yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing, perlu benar-benar dilaksanakan secara lebih berencana dan lebih terarah agar mutu dan keterampilan siswa dalam berbahasa secara lisan ataupun tertulis dapat ditingkatkan. Dalam berbagai pertemuan masih sering dilontarkan keluhan dan keprihatinan tentang penguasaan bahasa yang masih rendah di kalangan siswa.

4. Dengan beberapa catatan di atas, secara keseluruhan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 masih tetap relevan karena butir-butir rumusannya sudah tepat menggambarkan hal-hal mendasar dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Yang masih perlu diupayakan lebih banyak berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, rumusan tentang bahasa tertentu yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia perlu disesuaikan. Tanpa harus menghubungkannya dengan tuntutan keterbukaan dan transparansi dengan bidang politik, hukum, dan ekonomi, atau juga tanpa harus menyiasatinya dari keniscayaan global abad ke-21, bahasa Cina (juga bahasa Arab?) perlu diposisikan secara lebih cermat, apakah bahasa yang juga digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia itu akan tetap kita golongkan sebagai bahasa asing atau sebagai salah satu bahasa daerah karena para penuturnya, seperti sudah disebutkan, merupakan salah satu di antara sejumlah kelompok etnis yang sama-sama membangun masyarakat bangsa Indonesia. Kemungkinan perubahan tentang "status" itu akan berakibat pada adanya "pergeseran" tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa tersebut.

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa bahasa daerah yang dipelihara rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara, akan memperoleh dorongan dan tenaga baru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selama ini upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sas-

tra daerah, termasuk pengajarannya, dilakukan oleh Balai Bahasa yang sampai akhir tahun lalu (1998) hanya terdapat di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang. Pada tahun ini pelaksana teknis (UPT) Pusat Bahasa itu bertambah 14 buah lagi, yaitu di Surabaya, Semarang, Bandung, Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Manado, dan Jayapura. Bersama-sama dengan Balai Bahasa dan Proyek Pembinaan Bahasa yang ada di hampir semua provinsi, pemerintah daerah (tingkat I dan II) dapat menangani masalah kebahasaan dan kesastraan secara lebih terkoordinasi. Perlu ditambahkan bahwa sudah ada kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Pusat Bahasa dan Pemda Tingkat I seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia di daerahnya masing-masing dan, sebagai akibat dari Undang-Undang tentang Otonomi Daerah itu, cakupan tugas itu dapat dan harus diperluas dengan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa dan sastra daerah berikut pengajarannya.

Dalam rumusan tentang pengembangan pengajaran bahasa Indonesia, secara singkat disinggung perlunya menyiapkan program khusus pengajaran bahasa Indonesia, antara lain untuk orang asing. Sejak tahun 80-an telah berlangsung berbagai pertemuan di dalam dan di luar negeri yang secara khusus membicarakan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Kalau diperhatikan dari segi peserta yang menghadiri pertemuan itu, patut dicatat bahwa forum seperti itu ternyata mendapat perhatian yang cukup luas dan menggembirakan, terutama dari para pengajar BIPA di luar negeri. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kalau seminar ini memberikan perhatian khusus pada masalah pengajaran BIPA dengan merumuskannya secara lebih tegas dan lebih eksplisit.

Masalah kelembagaan yang dikaitkan dengan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia, baik yang berupa instansi pemerintah maupun institusi lainnya (termasuk lembaga swasta), juga perlu memperoleh porsi pembahasan yang memadai dalam seminar ini. Sejauh yang menyangkut keberadaan Pusat Bahasa berikut UPT-nya, momentum perubahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional perlu dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya untuk melakukan semacam revisi dan menyampaikan usul perubahan terhadap struktur instansi pemerintah ini berikut cakupan tugas dan wewenangnya. Tanpa hal itu, tampaknya instansi ini akan tetap menghadapi kendala birokratis di dalam melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya.

5. Dengan kedudukannya sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945), bahasa Indonesia harus berperan dan memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Politik bahasa di Indonesia harus jelas menggambarkan kebijakan nasional dalam bidang kebahasaan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang luas. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kebijakan nasional kebahasaan yang perlu dirumuskan secara berencana, terarah, dan menyeluruh itu harus menggambarkan rambu-rambu yang jelas mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai wahana modernisasi kebudayaan, khususnya sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa boleh dikatakan sepenuhnya bergantung pada peran bahasa Indonesia dalam memenuhi fungsi atau tuntutan ini.

Kebiasaan sebagian masyarakat kita dalam berbahasa, seperti yang terlihat pada kecenderungan generasi (cendekiawan) muda yang meng-gunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, belum dapat dikategorikan sebagai gejala yang membahayakan semangat persatuan bangsa. Dilihat dari sifat hubungan informal dan akrab, gejala kebahasaan yang demikian lazim terjadi dalam masyarakat dwibahasa dan dalam kasus tertentu bahkan mungkin dapat dipandang sebagai kreativitas ekspresif kelompok masyarakat yang bersangkutan. Namun, apabila pemakaian bahasa campuran itu lebih cenderung mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam berbahasa, gejala itu merupakan kecerobohan. Gejala "kebudayaan santai" tersebut juga bersumber pada kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat Indonesia secara umum, termasuk dalam konteks pembangunan bangsa. "Kebudayaan santai" itu bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan merupakan pola hidup yang lebih berorientasi pada kebudayaan asing. Kendurnya semangat nasional

pada sementara kalangan masyarakat itu pada hakikatnya merupakan masalah politik. Akan tetapi, hal itu tercermin dalam perilaku berbahasa.

Kalau pemakaian bahasa campuran itu bukan karena kecerobohan, melainkan karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia--seperti halnya yang diperlihatkan oleh sebagian besar dari mereka yang telah memperoleh seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia, tetapi penguasaan bahasa Indonesianya secara lisan apalagi tertulis masih jauh di bawah mutu yang seharusnya--, kalau tetap dibiarkan, hal itu dapat menjadi tendensi regresif dalam peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, politik bahasa harus mencakupi sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan.

Selain sebagai wahana modernisasi kebudayaan dan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam politik bahasa harus pula berfungsi sebagai wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat. Sejak awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia disepakati pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 karena cirinya sebagai bahasa yang demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakainya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia dapat diterima dan dengan mudah dipelajari oleh generasi muda bangsa dari seluruh kelompok etnik.

Egalitarianisme yang dimiliki bahasa Indonesia itu merupakan jawaban yang tepat atas keinginan yang bulat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan (sebelum kemerdekaan) dan untuk menikmati kehidupan yang lebih demokratis (setelah kemerdekaan). Dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ke arah terciptanya *bahasa tinggi* dan *bahasa rendah*, terutama dalam komunikasi lisan. Pemakaian kata dan ungkapan tertentu dalam jumlah yang makin lama makin besar, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, mencerminkan bangkitnya kembali sikap dan jiwa feodal atau neofeodal dalam strata masyarakat dan kebudayaan kita.

Gejala itu memperlihatkan eratnya hubungan antara perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan masyarakat pemakainya, sesuai dengan aspirasi sosial-politik dan sosial-budaya yang melatar-

belakanginya. Dalam batas-batas tertentu, hal itu dapat berdampak positif terhadap upaya pengembangan daya ungkap bahasa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya selama ini yang menggejala ialah *kerancuan semantik* yang lebih luas dan lebih dominan daripada berkembangnya daya ungkap tersebut. Selama kerancuan semantik ini masih melekat dalam perilaku berbahasa kelompok masyarakat tertentu, maka selama itu pula kerancuan semantik itu akan menjadi penghalang bagi masyarakat luas untuk meng-gunakan bahasa Indonesia secara lebih bebas dan lebih leluasa. Oleh karena itu, membebaskan bahasa Indonesia dari pengaruh neofeodal seperti itu dan mengembalikan ciri demokratis dan egalitarianisme yang dimilikinya merupakan kewajiban semua pihak yang harus terintegrasi dalam rumusan politik bahasa.

6. Sehubungan dengan beberapa butir pandangan di atas, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Selama 24 tahun telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang sosial-politik dan sosial-budaya, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap situasi dan kehidupan kebahasaan di Indonesia. Empat pokok bahasan dalam seminar ini diharapkan dapat menjaring dan mengidentifikasi perubahan-perubahan tersebut sebagai bahan masukan dan sekaligus bahan pertimbangan bagi para peserta Seminar dalam meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu.

   Keempat pokok bahasan itu masing-masing berkaitan dengan (1) kedudukan dan fungsi bahasa, (2) mutu dan peran bahasa, (3) mutu pemakaian bahasa, dan (4) kelembagaan. Kedudukan dan fungsi bahasa disoroti dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, sastra Indonesia dan daerah, dan bahasa asing. Adapun topik tentang penelitian bahasa, penelitian sastra, penelitian pengajaran bahasa dan sastra, serta penyusunan sarana uji kemahiran berbahasa tercakup dalam pokok bahasan tentang mutu dan peran bahasa. Sementara itu, masalah mutu pemakaian bahasa akan dipaparkan melalui tiga topik, yaitu peningkatan mutu pengajaran bahasa, peningkatan mutu pengajaran sastra, dan peningkatan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Akhirnya,

hal yang berkenaan dengan masalah kelembagaan secara khusus akan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi lembaga kebahasaan.

Melalui pemaparan dan pembahasan keempat pokok bahasan itu, seminar ini diharapkan dapat menyusun dan merumuskan suatu politik bahasa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam menangani berbagai masalah kebahasaan yang aktual di Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi pada abad ke-21, rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa perlu benar-benar lebih dimantapkan dalam seminar ini. Selain itu, masalah kelembagaan perlu ditata kembali sesuai dengan tuntutan perubahan yang timbul di dalam masyarakat sehingga mekanisme kelembagaan tersebut mencerminkan rambu-rambu yang jelas dalam mengelola setiap upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Halim, Amran (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Hassan, Abdullah (ed.). 1994. *Language Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim. "The Unique Context of Language Planning in Southeast Asia" dalam Abdullah Hassan (ed.): 1—51.

Moeliono, Anton M. 1994. "Indonesian Language Development and Cultivation" dalam Abdullah Hassan (ed.): 195—213.

Soedjatmoko. 1996. "Bahasa dan Transformasi Bangsa" dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.): 173—194.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Selasa, 9 November 1999
Pukul : 10.00--11.00
Penyaji Makalah : Hasan Alwi
Judul Makalah : Fungsi Politik Bahasa
Pemandu : Andi Mappi Sammeng
Pencatat : Junaiyah Hamid Matanggui

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Yus Rusyana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
   a. Perlu dipikirkan dan disusun kerangka baru mengenai fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kerangka itu hendaknya jangan diarahkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu yang diinginkan, tetapi diarahkan pada penggunaan prinsip-prinsip umum teori kebahasaan dan kenyataan empiris yang ada di masyarakat.
   b. Dalam menetapkan fungsi-fungsi itu, kita hendaknya lebih menghidupkan penghargaan pada keberagaman dan fungsi itu jangan dimutlakkan supaya tidak kaku.

2. Bambang Kaswanti Purwo, Universitas Katolik Atmajaya
   a. BIPA sudah merupakan lahan basah dan tidak perlu dibantu karena memang sudah tumbuh subur.
   b. Yang perlu dipikirkan ialah pengajaran bahasa Indonesia untuk berbagai kelompok etnis di Indonesia karena berbagai bahasa daerah memiliki sistem linguistik yang berbeda-beda. Hal itu penting demi memuluskan pengajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengajaran bahasa daerah itu memiliki kendala tidak adanya atau tidak banyaknya orang yang menguasai pengajaran bahasa daerah.

3. Dédé Oetomo, Universitas Airlangga, Surabaya
   a. Negara macam apa yang divisikan oleh pemerintah kita yang akan datang? Dugaan saya ialah negara kita pada masa yang akan datang adalah negara yang lemah, yakni negara yang hanya memfasilitasi atau negara yang hanya sekadar sebagai pendukung (*support system*).

b. Saya usulkan agar kata *pembinaan* dihilangkan dari nama Pusat Bahasa karena kata *pembinaan* terkesan adanya *pemaksaan*.
c. Tidak usah dirisaukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena hal itu sudah tercapai. Yang perlu diperhatikan adalah pengajaran bahasa daerah. Konsep persatuan itu sendiri bagaimana?

4. Asim Gunarwan, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia
a. Bapak mementingkan penerjemahan, apakah itu berarti bahwa implikasinya nanti diperlukan sekolah penerjemahan?
b. Apakah tolok ukur lafal baku yang dipakai? Saya kira di dalam bahasa Inggris hal itu juga sulit.
c. 1) Jika bahasa Cina diperlakukan sebagai bahasa daerah, bahasa itu perlu juga dibina dan dipelihara. Dalam kaitan itu, apakah hal itu tidak bertentangan dengan upaya pembauran.
2) Bahasa Cina apa yang akan dipakai? Hal itu penting dipertimbangkan karena bahasa Cina itu banyak macamnya.
3) Nama BIPA itu perlu dipertimbangkan. Mungkin perlu disisipkan kata *bahasa* sehingga menjadi *bahasa* Indonesia untuk penutur bahasa asing (BIPBA) atau *bahasa* Indonesia sebagai bahasa asing (BISBA) agar lebih universal. Istilah *penutur asing* adalah istilah imigrasi, seperti *penonton asing* atau *peninjau asing*.

5. D.P. Tampubolon, Universitas Sumatra Utara, Medan
a. Pertanyaan mengenai seberapa jauh bahasa Indonesia berfungsi sebagai wahana modernisasi kebudayaan dalam arti luas perlu direnungkan apakah kebudayaan nasional itu sudah ada atau masih berkembang. Menurut hemat saya, kebudayaan nasional itu masih berkembang dan pengaruhnya kepada bahasa Indonesia juga banyak.
b. Sebenarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu sudah tercapai. Akan tetapi, persatuan yang bagaimana yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Apakah persatuan dalam federal, otonomi luas, atau dalam otonomi khusus. Akan bersatukah kita dalam negara federal dan sebagainya itu?

c. Dalam masa 32 tahun yang lalu ternyata yang ada ialah bahasa Indonesia yang terkekang oleh kekuasaan. Demokratisasi bahasa yang bagaimana yang akan terjadi nanti? Dalam kaitan itu, bagaimana peran Pusat Bahasa dan apakah Pusat Bahasa tidak harus independen?

6. Soenardji, Universitas Negeri Semarang
   a. Saya usulkan agar fungsi bahasa Indonesia dalam ilmu dan teknologi menjadi konsiderans rumusan hasil seminar ini.
   b. Usul agar di samping kata *kebudayaan* digunakan juga kata *pembudayaan*.
   c. Perlu adanya penajaman konsep pendemokrasian bahasa agar kita tidak menghilangkan kesantunan berbahasa di sisi lain.

7. Amran Halim, Universitas Sriwijaya, Palembang

Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 diadakan tidak lama setelah Pusat Bahasa lahir. Seminar itu diadakan karena Pusat Bahasa pada waktu itu tidak memiliki pegangan atau acuan kerja. Ketika itu pada nama ada dua kata, yaitu *pembinaan* dan *pengembangan*. Sebenarnya, pembinaan masih perlu bagi pemakaian bahasa daerah sebab pemakai bahasa daerah di luar pulau Jawa ternyata ada yang merasa malu berbahasa daerah karena bahasa daerah itu disebut bahasa udik. Untuk itu, diperlukan pembinaan sikap mental pemakai bahasa dan diperlukan pengembangan bahasa daerah itu sendiri. *Pengembangan* pada waktu itu memang tidak dipikirkan ke arah otoriter, ini yang benar dan itu yang salah. Bagaimana pun kebakuan itu diperlukan, tetapi keberagaman memang tetap ada. Kalau tidak, bahasa Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pendukung kebudayaan dan penyampai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, lahirlah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jadi, keberagaman tetap dihargai dan kebakuan harus ada.

Mengenai BIPA, juga belum terpikirkan, bahasa Indonesia mana yang harus diajarkan. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang diajarkan adalah bahasa Indonesia gaya Jakarta. Dengan demikian, seorang asing yang belajar bahasa Indonesia dan untuk meng-

akrabkan dirinya dengan petugas pabean, dia bertanya *Apa yang kamu perlukan?* Ia menggunakan kata *kamu* karena itulah yang dianggapnya tepat yang pernah dipelajarinya.

Fungsi bahasa Indonesia juga belum lengkap, tetapi cukup untuk acuan kerja pada masa itu; yang juga belum terpikirkan adalah apakah fungsi bahasa Inggris di Indonesia; apakah bahasa Inggris dapat dipakai sebagai bahasa kerja, dan apakah tenaga kerja Indonesia kalah bersaing karena mereka tidak dapat berbahasa Inggris?

8. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta
   a. Yang harus diurus oleh pemerintah pusat ialah bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan bahasa Indonesia.
   b. Harap pengajaran bahasa Indonesia disesuaikan dengan daerah tempat pengajaran itu berlangsung. Jadi, jangan digunakan satu model untuk mengajarkan bahasa Indonesia pada seluruh orang Indonesia.
   c. Hendaklah diketahui dengan jelas kemampuan apa (*basic competence*) apabila seseorang belajar bahasa Indonesia.

**B. Jawaban**

1. Usul Pak Yus tentang kerangka fungsi bahasa Indonesia dan tentang penghargaan pada keberagaman serta usul Pak Bambang tentang perlunya pengajaran bahasa Indonesia untuk berbagai kelompok etnis di Indonesia perlu dimantapkan dalam sidang kelompok. Saya setuju bahwa diperlukan cara mengajar yang berbeda untuk daerah yang berbeda.

2. Kata *pembinaan* perlu didiskusikan di sidang kelompok.

3. Sopan santun berbahasa memang harus dijaga. Istilah *demokrasi bahasa* mungkin tidak tepat, tetapi yang saya maksudkan ialah perilaku berbahasa.

4. a. Ya, kita perlukan sekolah penerjemah di samping sarana lain.
   b. Pembakuan lafal memang belum ada tolok ukurnya yang tepat.
   c. Biarkanlah nama BIPA itu tetap dipakai karena sudah terlanjur

populer; yang penting adalah konsepsinya.

5. Pusat Bahasa masih diperlukan. Akan tetapi, jika Pusat Bahasa mengarahkan bahasa sebagai alat kekuasaan, tentu saja Pusat Bahasa itu tidak diperlukan.

6. Memang perlu diteliti bahasa daerah mana yang akan dikembangkan dan perlu dipertajam fungsi bahasa Inggris di tengah-tengah bahasa Indonesia.

# OTORITARIANISME DAN DISTORSI BAHASA

**Eep Saefulloh Fatah**
Universitas Indonesia

## 1. Orde Bohong

> Kalau larangan telah menjadi kebiasaan,
> untuk apakah akal sehat ...
> Kalau kekejaman telah menjadi kebijaksanaan,
> untuk apakah pengadilan ...
> Kalau penindasan telah menjadi sarapan,
> untuk apakah pembangunan ...
> Kalau penyelewengan telah menjadi kebudayaan,
> mengapa kita masih di sini?

Sajak *Kalau*-nya Noorca Marendra Massardi itu tiba-tiba saja muncul dalam ingatan saya, ketika beberapa pekan terakhir ini saya sangat kerap mendengarkan orang bicara tentang Orde Baru (Orba) sebagai sebuah masa lalu.

"Orba dibesarkan oleh kebohongan". Inilah kalimat yang sangat sering saya dengar. Dan saya bersetuju tentang itu. Terakhir, saya mendengarnya dari Prof. Dr. Maswadi Rauf dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Kamis, 25 Juni 1998.

Sajak Noorca itu--yang pernah dibacakan Pangdam Jaya (waktu itu) AM Hendropriyono dalam acara 40 Tahun Prokreasi Noorca dan Yudhis di TIM Jakarta (9/2/1994)--menggambarkan dengan baik karakter Orba. Orba itu sebetulnya adalah Orde Kebohongan (Orbo), sebuah Orba yang Orbo. Kekuasaan Orba--dengan meminjam bahasa "sekolahan"--dipraktikkan dengan "hegemoni", bukan "dominasi".

Hegemoni adalah membunuh, tetapi seolah merangkul. Manampar, tetapi seolah mengelus. Menginjak-injak, tetapi seolah memijati. Pendeknya, hegemoni adalah senyum drakula yang menyembunyikan taringnya. Penindas yang berbohong menjadi penolong. Sementara dominasi adalah praktik kekuasaan yang "jujur", membunuh dengan menusuk langsung ke jantung, menampar terang-terangan, menginjak-injak dengan akibat rasa sakit seketika. Dominasi adalah tertawanya drakula yang memper-

tontonkan taringnya. Penindas yang jujur yang mengaku sebagai penindas. Jika dominasi adalah otoritarianisme yang terang-terangan, hegemoni adalah otoritarianisme yang berbaju demokrasi. Inilah Orba yang Orbo itu.

Adalah sebuah "prestasi luar biasa" bahwa Orba yang Orbo itu bisa bertahan lebih dari tiga dekade. Salah satu penyokongnya adalah terlambatnya kesadaran banyak orang tentang adanya praktik hegemoni itu. Akibatnya, banyak orang yang melawan hegemoni kekuasaan dengan cara-cara dominatif. Ketika penguasa membunuh diam-diam, penentangnya melawan dengan menghunus pisau di tempat terang-benderang. Akibatnya, mereka yang melawan selalu terkambinghitamkan sebagai "musuh semua orang". Mestinya, hegemoni dilawankan dengan perlawanan hegemonik pula. Namun, kemungkinan perlawanan hegemonik rakyat terhadap kekuasaan Orba yang hegemonik, harus diakui, sulit dibayangkan di bawah kekuasaan Soeharto. Adalah instrumen kekuasaan ala Soeharto yang membuat sulitnya membayangkan kemungkinan itu.

Orba memakai dua instrumen utama untuk mengefektifkan kekuasaan: politik pengamanan dan politik logistik. "Politik pengamanan"--berbeda dengan "politik keamanan" yang menciptakan rasa aman--justru menciptakan/memproduksi rasa takut. Rasa takut rakyat inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai aset penguasaan. Sementara "politik logistik" adalah langkah-langkah pemenuhan kebutuhan ekonomi-dasar bagi rakyat. Rakyat yang takut dengan perut yang relatif tak terlampau bermasalah itu lalu menjadi penyokong napas panjang Orba yang Orbo.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah ketika orang ramai-ramai menyebut Orde Reformasi saat ini, karakter Orbo dari Orba serta merta akan menghilang? Apakah hegemoni akan berakhir dengan berhentinya Soeharto sebagai presiden dan maraknya tuntutan reformasi?

Bagi saya, jawabnya jelas: belum tentu. Penjelasan Mensesneg dan Kapuspen Hankam/ABRI yang melingkar dan tak transparan, juga Jaksa Agung dan beberapa pejabat tinggi ABRI beberapa hari terakhir ini, bisa menjadi "data kecil" untuk menyokong jawaban saya. Bahwa kita tidak akan mudah menemukan politik kejujuran atau transparansi yang serta merta. Bahwa Orbo akan menjadi tabiat lama yang sulit "kita" kikis. Bahkan saya membayangkan bahwa gembar-gembor reformasi bisa saja tetap berjalan sementara Orbo tetap menjadi gejala lain yang juga tetap

berjalan. Bahwa bisa saja akhirnya sistem politik kita memproklamasikan dan mempraktikkan sebuah moto, sekalipun diam-diam: "Sekali Orbo tetap Orbo." Apalagi, moto itu sebenarnya sudah terdukung oleh tiga fakta sekaligus. *Pertama*, kebohongan yang telah diberi kerangka sistemik yang cukup kuat oleh rekayasa politik Orba selama tiga dekade lebih. *Kedua*, pembudayaan kebohongan telah terinternalisasi sebagai bagian dari perilaku pejabat pada umumnya. *Ketiga*, masyarakat telah memiliki "resistensi"--dalam bahasa yang lebih tegas: "keakraban"--dengan kebohongan. Orang-orang, misalnya, tetap beranggapan bahwa koran sekalipun tidak dapat dipercayai beritanya. Sindrom ketidakpercayaan pada informasi dan sindrom ketidakpercayaan pada pejabat, misalnya, jangan-jangan saat ini tak lagi dipandang sebagai sindrom, melainkan kebiasaan. Kebohongan terlanjur diakrabi bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai keharusan rutin sehari-hari. Jika benar demikian, maka celakalah kita. Orba boleh jadi telah larut bersama sejarah kejatuhan Soeharto, sebagaimana Orla pernah larut bersama sejarah kejatuhan Soekarno. Namun, bisa juga semua orde itu tetap melanjutkan diri sebagai sebuah Orbo. Jika ini benar-benar terjadi, sulit dibayangkan kita bisa keluar dari kebobrokan-kebobrokan politik lama secara bermakna.

Saya pun teringat dengan peribahasa Sunda yang saya pelajari di SD: *Adean ku kuda beureum*. Menurut guru bahasa Sunda saya--ia bisa saja salah--peribahasa itu menunjuk orang atau kelompok yang kelihatan gaya, hebat, mentereng, dan serba unggul, tetapi sebetulnya dengan modal yang seluruhnya pinjaman. Sebuah fenomena "kebesaran dengan kebohongan". Jangan-jangan begitulah kita (*Republika, 28 Juni 1998*).

**2. Berkhianat pada Kata**

Sebuah siang yang terik di tengah Agustus 1998, saya berhenti di lampu merah Warung Buncit, Pasar Minggu. Di pembatas tengah jalan ada sebuah patung tangan yang memakai jam--benar-benar sebuah jam yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Menggantung di patung itu dua baris tulisan yang terbaca jelas: "Tepat waktu adalah cermin kepribadian bangsaku." Namun, ketika saya cocokkan dengan jam di tangan saya, jam di patung itu ternyata terlambat 35 menit.

Saya tiba-tiba saja teringat pada mantan Presiden Soeharto. Hanya beberapa bulan setelah secara tidak *fair* memberi fasilitas monopoli niaga

cengkeh kepada anaknya, Soeharto berpidato tentang perlunya bangsa Indonesia membentuk tata ekonomi nasional yang berkeadilan. Lalu, di tengah hujan kritik atas kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya yang menyengsarakan rakyat banyak, tiba-tiba saja, melalui sebuah pidato, Soeharto menyerukan: "Jangan sakiti hati rakyat."

Patung Warung Buncit, Pasar Minggu, dan pidato-pidato Soeharto memang dua hal yang tak berkaitan. Namun, sebetulnya keduanya mewakili sesuatu yang telah menggejala begitu lama di tengah kehidupan kita. Betapa telah terbiasanya kita untuk berkhianat, tak bersetia, pada kata-kata. Kerap kali, kata-kata dikhianati justru oleh sang pengucapnya sendiri. Celakanya, pengkhianatan itu dilakukan seolah tanpa perasaan berdosa dan diulang-ulang sebagai kebiasaan yang berpola. Dan, kata-kata pun menjadi tak lagi punya makna. Meminjam salah satu bait sajak Sapardi Djoko Damono: *Begitu cepat kata demi kata menjadi abu dan mulai bertebaran dan menyesakkan udara.*

Dalam konteks Orde Baru, pengkhianatan terhadap kata-kata bahkan telah mengalami pelembagaan; diberi dasar-dasar justifikasi hukum. Dan pengkhianatan terhadap kata-kata yang telah terlembagakan ini kemudian—sebagaimana digambarkan dalam beberapa studi Benedict R.O.G. Anderson, seorang ahli Indonesia terkemuka—telah diperlakukan sebagai salah satu senjata otoritarianisme.

Kita dapat menemukan setidaknya dua modus penggunaan kata-kata sebagai senjata otoritarianisme Orde Baru. *Pertama,* manipulasi dan eufemisme. Kata-kata dipakai sebagai bagian dari politik kebohongan. Menteri energi mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa pekan setelah itu harga BBM pun naik. Aparat keamanan menenangkan masyarakat bahwa keadaan kota aman. Tak lama kemudian terjadi kerusuhan besar. Menteri ekonomi mengumumkan bahwa fundamental ekonomi kuat. Beberapa bulan kemudian perekonomian ambruk hingga ke dasar-dasarnya hanya lantaran terpaan satu gelombang krisis.

Dalam bentuk yang lebih halus, modus manipulasi lewat kata-kata dilakukan melalui eufemisme. Hal-hal buruk dikaburkan sehingga tampak sebagai sesuatu yang tak terlampau buruk, bahkan berubah menjadi bagus. Kekasaran dipermak lewat kata-kata sehingga menjadi terasa lembut. Eufemisme bahkan begitu sukses dimassalkan sehingga tanpa kita sadari--

meminjam *jingle* iklan majalah *Ummat*--ia telah menjadi tiran yang ditanam di kepala kita. *Kedua*, melarikan diri dari pokok persoalan. Kata-kata dipakai untuk menjawab atau menenggelamkan kritik dan gugatan terhadap kekeliruan. Ketika orang dibikin pusing dengan kenaikan harga terus-menerus, rezim bukannya melakukan stabilisasi harga melainkan menghapus kata "kenaikan harga" dari kamus dan menggantinya dengan "penyesuaian harga". Ketika orang dicekam rasa takut karena tingginya ancaman penggarukan dan penahanan bagi aktivis oposisi politik, rezim bukannya mengakhiri praktik represif itu, melainkan mengganti kata "digaruk" dan "ditahan" dengan "diamankan".

Memperlakukan kata-kata sebagai senjata bagi sistem otoritarian atau totalitarian tentu bukan tanpa risiko. Risiko inilah antara lain yang digambarkan dengan baik oleh sebuah buku yang ditulis Zbigniew Brzezinski (asisten Presiden AS Jimmy Carter untuk urusan keamanan): *The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century* (1989). Salah satu sumber kegagalan sistem komunis yang totalitarian, tulis Brzezinski, adalah dipraktikkannya penyederhanaan berlebihan besar-besaran (*grand oversimplification*). Praktik ini disokong oleh proyek-proyek manipulasi makna, manipulasi melalui kata-kata, yang berpola dan sistemik. Lantaran itulah, antara lain, komunisme mengeropos lalu hancur, kata Brzezinski.

Brzezinski telah menunjukkan sebuah risiko dari pengkhianatan terhadap kata-kata: hancurnya sebuah sistem melalui pengeroposan internal. Brzezinski sebetulnya menggarisbawahi bahwa berkhianat pada kata-kata sebetulnya bisa berubah diam-diam menjadi upaya menggali lubang kubur sendiri.

Kita--setidaknya sampai hari ini--tampaknya belum menanggung risiko separah itu. Tapi, pengkhianatan pada kata-kata telah menjadi warisan Orde Baru yang mencemaskan. Ia telah menyebarkan sejenis virus berbahaya di tengah masyarakat kita dan menciptakan sebuah penyakit kronis: sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata. Diam-diam atau terang-terangan, hampir semua kita jangan-jangan telah mengidap sindrom ini beserta segenap konsekuensinya. Maka ketika Soeharto muncul di televisi, lengkap dengan wajah dan bahasa tubuhnya yang sepuh, mengatakan bahwa ia tak punya uang sesen pun yang tersimpan di luar negeri, dengan cepat kita terkekeh atau mengulum senyum dan memandangi wajah

tua itu seraya bergumam: kebohongan macam apa lagi yang sedang ditebarkan. Maka ketika Habibie mengatakan bahwa ia tak takut memeriksa Soeharto, umumnya koran justru segera menampilkan Habibie sebagai seorang presiden yang tak mungkin punya keberanian semacam itu sambil memasang gambar wajahnya yang mengekspresikan kegetiran dan rasa takut.

Sindrom ketidakpercayaan bahkan tak hanya menjangkau wilayah Soeharto-Habibie macam itu, melainkan diidap oleh siapa pun terhadap kata-kata siapa pun. Boleh jadi, banyak orang yang membaca berita koran setiap hari sambil tak mempercayai isinya. Boleh jadi, terhadap ucapan siapa pun--terlebih-lebih jika ia mewakili institusi formal-negara--kebanyakan orang menyambutnya dengan ungkapan ketidakpercayaan.

Soal ini adalah sebuah soal besar yang tak saja sangat layak diprihatini, tetapi juga dijadikan agenda masa depan. Bahwa di pundak kita terbeban sebuah tugas sejarah untuk mengeluarkan bangsa ini dari sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata. Dan hanya dengan membangun karakter sistem politik yang kredibel, responsif, kompeten, dan representatif--dengan aparatur yang berkarakter serupa--kita bisa keluar dari sindrom semacam itu dan tidak bernasib buruk seperti gambaran Brzezinski (*Republika, 20/09/1998*).

### 3. Pemimpin Berbudaya Timur

> Kertas yang kosong
> untuk kepala yang kosong
> dan janji yang kosong

Kata-kata itu tertera di sebuah kertas suara di Uusima, satu dari 15 wilayah pemilihan dalam Pemilu Parlemen Finlandia, 21 Maret 1999 lalu. Ia tertera di salah satu kertas suara yang bertumpuk bersama dengan kartu suara lain yang tidak sah karena pemilih tidak menulis nomor kandidat anggota parlemen di kertas itu. Pemilih justru melakukan protes dengan menuliskan kata-kata di atas, boleh jadi lantaran ia tak tahu isi kepala dan tak percaya janji kosong para kandidat.

Apa yang bisa kita pelajari dari soal yang kelihatan remeh temeh itu? Jawabnya: Setiap orang bebas memilih wakil mereka di parlemen

dengan rasional. Ketika yang didapati sang pemilih adalah "kepala yang kosong dan janji yang kosong", ia leluasa untuk tak menentukan pilihannya.

Soal remeh temeh itu pun memberi pelajaran lanjutan lain: Rakyat berhak tahu dulu isi kepala dan menakar dulu janji seorang calon pemimpin sebelum memutuskan pilihannya. Rakyat tak boleh dipaksa membeli kucing dalam karung. Pemimpin tak berhak meminta cek kosong dari rakyat. Itulah pelajaran Finlandia, sebuah negara Skandinavia yang makmur dengan kualitas demokrasi yang teruji, nun di utara Eropa sana. Apakah itu pelajaran tentang budaya utara atau budaya barat, dan bukan timur? Menurut saya, bukan.

Pelajaran Finlandia yang saya temukan ketika ikut meninjau pemilu di sana adalah pelajaran universal tentang kaidah elementer demokrasi bahwa pemilihan pemimpin mestinya dilakukan melalui mekanisme rasional. Para calon pemimpin memiliki kesediaan mengungkapkan gagasan-gagasannya--tentu jika ia punya--di depan publik. Publik berhak menilai kelayakan gagasan-gagasan itu sekaligus menakhodai bangsanya. Dan ini bukan soal budaya timur, barat, selatan, barat daya, tenggara atau budaya dari arah angin mana pun. Tak relevan mempersoalkan arah angin di situ. Persoalannya, kita harus mengakhiri periode kepemimpinan sopir bajaj ketika pemimpin sangat sok tahu dan tidak merasa punya tanggung jawab untuk bercerita kepada rakyat apa yang hendak ia perbuat. Pemimpin hanya duduk manis tak bergeming di atas singgasananya dan sangat hemat-pelit menyampaikan isi pikirannya. Pemimpin seperti itu tak ubahnya sopir bajaj yang seenaknya membawa penumpang--naik ke trotoar, berbelok mendadak, berbalik arah melawan arus jalan, menabrak lampu merah, menyerempet orang di pasar--tanpa memberi sinyal dan sedikit pun rasa tanggung jawab.

Sudahlah, kita akhiri model kepemimpinan seperti itu. Benar--seperti cerita Clifford Geertz ketika menjelaskan konsep *Theatre State*--pemimpin semacam itu bisa kelihatan sakral, kharismatik, dan membuat bulu kuduk orang berdiri. Namun, efektif untuk proyek pembodohan rakyat dan penguatan otoritarianisme.

Jadi--jika Anda belum puas juga--apakah perdebbatan publik di antara calon pemimpin merupakan pelanggaran atas budaya ketimuran? Jika Megawati Soekarno Putri yang diminta menjawab pertanyaan ini,

jawabannya jelas: Ya, merupakan pelanggaran. Jawaban itu saya tahu sebab ketika diundang ikut serta debat antarcalon presiden oleh Forum Salemba di Universitas Indonesia, Megawati menolak hadir. Berdebat di muka umum, menurut Megawati--dan tentu saja PDI Perjuangan--tak sesuai dengan budaya timur. Selain itu, berdebat di muka umum, menurut mereka tak diatur oleh satu pun aturan perundang-undangan.

Sebagai warga negara terus terang saja saya sangat sedih mendengar dua alasan itu. Saya tak habis mengerti bagaimana mungkin "budaya timur" dan "aturan perundangan" bisa ditafsirkan semena-mena seperti itu. Yang saya tahu, ketika sejumlah perempuan dipaksa membuka kaosnya--apa pun warna dan gambar di kaos itu--menjadi setengah telanjang, itulah pelanggaran budaya timur dan aturan perundangan yang sangat serius.

Saya sedih, bagaimana mungkin seorang tokoh publik--yang konon memiliki kans besar untuk menjadi presiden--justru sangat hemat mengungkapkan gagasan-gagasannya di depan publik dan menolak mendiskusikan gagasan-gagasan itu secara rendah hati. Bagaimana mungkin rakyat akan bisa membuat pilihan rasional atas para calon pemimpin mereka. Saya juga sedih bahwa tokoh-tokoh publik semacam itu dimanjakan oleh publik sendiri, termasuk oleh media massa. Saya sedih bahwa diam-diam masih banyak orang yang bersedia membeli kucing dalam karung bahkan dalam kotak kayu tebal yang terkunci. Saya sedih diam-diam masih banyak orang yang bersedia memberi cek kosong pada calon-calon pemimpin padahal rekening mereka sudah semakin tipis termakan krisis politik dan ekonomi. Dan juga saya sedih mengingat sebuah pepatah Inggris: *People will get the government they deserve*. Rakyat akan memiliki pemimpin yang memang layak untuk mereka. Dengan rakyat yang mau membeli kucing dalam karung, maka yang akan terbeli memang kucing yang hanya bisa berteriak merdeka; bukan meneladani dan memimpin reformasi.

Di tengah kesedihan itulah "datang" Benhard Dahm kepada saya membawa hasil penelitiannya di Jawa, Myanmar, dan Vietnam. Otoritarianisme, kata Dahm, memang bisa terus berlanjut di satu tempat manakala rakyat dan pemimpin kompak membangun model daulat raja bukan daulat rakyat.

Mudah-mudahan cerita sedih Dahm tidak benar-benar terjadi di Indonesia hari-hari ini dan esok. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang

penuh budaya ketimuran: rendah hati berhadapan dengan rakyat; mau menyapa rakyat dengan rencana masa depan yang masuk akal dan boleh diperdebatkan (Taman Mini, 24 April 1999/*Republika, 25/04/ 1999*).

**4. Budaya Mitos**

Berbahayakah sebuah mitos? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Nelson Mandela yang baru saja lengser dari jabatan Presiden Afrika Selatan, boleh jadi jawabannya adalah "Ya".

Nelson adalah legenda hidup bagi rakyat Afrika Selatan. Ia pejuang antiapartheid yang amat gigih sejak usia muda. Perjuangannya itu kemudian membawanya ke penjara selama 27 tahun. Nelson mendekam di penjara rezim apartheid dengan perlakuan yang sangat tak manusiawi.

Penjara, selain membuat Nelson harus mengidap sejumlah penyakit, membuat Nelson mengalami mitologisasi. Mandela terkurung jauh dari realitas. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, semakin hari namanya justru semakin membesar. Ketiadaan persentuhan Mandela dengan alam nyata justru membuat sosoknya makin menggelembung. Nelson pun kemudian dipahami banyak orang bukan sebagai sosok historis, tetapi sosok mitologis.

Media massa--terutama media massa internasional yang terus menyoroti pemenjaraannya sebagai kasus antidemokrasi dan menginjak-injak hak asasi--makin menyuburkan mitologisasi ini. Walhasil Nelson lebih dikenal banyak, dalam sosok mitologisasinya, sebagai seorang lelaki pahlawan yang melebihi manusia biasa; jiwa raganya semata-mata hanya dipenuhi oleh semangat perlawanan terhadap politik apartheid; tak pernah mengeluh; tahan teruji dalam segala cuaca.

Mandela mengalami mitologisasi di mata orang banyak, tak terkecuali juga di mata Winnie Mandela, istrinya yang senantiasa setia "menemani" Mandela dari luar tembok penjara, di alam nyata. Winnie memahami Mandela persis sama seperti pemahaman umumnya orang kulit hitam Afrika Selatan: tidak dalam sosok historisnya, tetapi sosok mitologisnya sebagai sang laki-laki pahlawan besar yang kehebatannya melewati batas-batas yang bisa dicapai manusia biasa.

Ketika Mandela akhirnya keluar dari penjara, bertemulah Mandela dan Winnie dengan bahaya sebuah mitos. Tak begitu lama setelah Mandela menghirup udara bebas di rumahnya dan Winnie tak lagi bersusah

payah untuk bertemu Mandela seperti 27 tahun sebelumnya, sosok Mandela justru mengalami perubahan. Mandela semakin historis sebagai laki-laki biasa. Mandela ternyata laki-laki yang sensitif, cepat marah, kerapkali memberantakkan meja makan secara "tak bertanggung jawab". Winnie yang terlanjur memahami Mandela dalam sosok mitologisnya sebagai pahlawan besar mengalami keterkejutan yang luar biasa, semacam *shock*. Baju-baju mitologis yang menyelimuti Mandela, perlahan, tetapi pasti, tanggal dan makin hari yang ditemukan Winnie di rumahnya adalah laki-laki biasa; bukan pahlawan besar tanpa cela yang sesekali dibesuknya di penjara. Menurut penuturan Mandela dalam biografinya, *Jalan Panjang Menuju Kebebasan*, itulah yang akhirnya membawanya ke perceraian dengan Winnie. Pasangan yang paling banyak disorot dengan puja-puji di seluruh dunia di paruh kedua abad ke-20, akhirnya bercerai justru tak lama setelah Mandela tak lagi dipenjarakan.

Mandela dan Winnie bertemu dengan bahaya sebuah mitos, yakni keterkejutan dan lunturnya ikatan emosional setelah sosok mitos makin lama makin menjadi historis. Bagitulah pula sebetulnya cerita tentang Pangeran Charles dan Putri Diana dari Inggris. Ketika dipahami sebagai "pasangan dari negeri dongeng" Charles-Diana dipuja-puji sebagai pasangan paling serasi abad ini. Namun, makin lama mitos ini luntur dan berganti dengan cerita-cerita historis tentang mereka. Setelah mereka bercerai, baik Charles maupun Diana mulai membuat pengakuan-pengakuan terbuka, tahulah kita bahwa perkawinan mereka mestinya bubar lebih cepat. Yang membuatnya lebih lama hanyalah kemauan Charles dan Diana untuk memahami dan mengenali satu sama lain dalam sosok mitologis dan bukan historis.

Pelajaran berharga dari Mandela, Charles, dan Diana adalah bahwa betapa nikmat memang hidup di alam mitologis. Namun celakanya, alam mitologis adalah alam yang amat sementara. Ketika ia berganti menjadi alam historis, kenikmatan itu ternyata hanyalah semacam gejala yang memabukkan. Di situ tak ada rasionalitas, yang ada hanya emosi.

Maka dilihat dari sisi itu, boleh jadi benarlah anggapan yang dikenal umumnya orang Indonesia "Orang baik selalu mati lebih awal". Benar, bukan lantaran hubungan sebab-akibatnya--karena orang itu baik maka mati cepat--memang teruji, tetapi lantaran orang yang cepat mati tidak sempat dikenali sosok historisnya secara luas dan dalam. Keburuk-

an--atau sosok historis--orang-orang yang mati muda tak sempat dikenali orang. Tengok saja R.A. Kartini, Panglima Besar Soedirman, atau tokoh intelektual-aktivis Angkatan 66 Soe Hok Gie. Tokoh-tokoh itu terasa bersih--antara lain--karena kurang historis. Selimut mitologisnya belum tersingkap banyak sejalan dengan waktu.

Pendeknya, setiap orang yang mengamankan diri dalam penjara mitologis memang cenderung mudah dipuja-puji sebagai orang besar. Namun, ketika ia menjadi semakin historis, maka makin mengerdillah sosoknya.

Begitulah halnya Soekarno. Mereka yang sezaman dengan Soekarno dengan mudah bisa mengenali Soekarno dari dimensi historisnya. Bagi mereka, Soekarno--selain orang besar yang punya jasa sangat besar bagi pendirian Republik--juga adalah Bapak Otoritarianisme. Bagi mereka, Soekarno adalah sosok historis dengan segala puja dan celanya. Dan Adnan Buyung Nasution perlu dicatat karena melalui disertasi doktornya mendokumentasikan dengan baik sosok historis Soekarno sebagai pemotong demokrasi konstitusional dan pendiri otoritarianisme bermerek Demokrasi Terpimpin. Namun, di depan anak-anak bangsa yang baru lahir atau melek politik setelah zaman Soekarno lewat, Soekarno hanya bisa dikenal dari sosok mitologisnya. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan mengapa anak-anak muda yang mengaku prodemokrasi secara ironis mengenakan kaos oblong bergambar Soekarno. Seolah-olah Soekarno adalah Bapak Demokrasi. Soekarno kembali membesar setelah ia kembali dipanggil pulang oleh Tuhan dan meninggalkan selimut mitos yang membungkusnya abadi.

Begitulah mitos bisa sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Mitos boleh jadi diperlukan--misalnya untuk memanfaatkan kepahlawanan mitologis sebagai energi pembangkit semangat kebangsaan--tetapi sejatinya masyarakat yang sehat adalah yang bisa meminimalisasi mitos sebagai instrumen rekayasa sosial.

Pada titik itulah kecemasan patut dilayangkan pada fenomena kemunculan pemimpin mitologis semacam Abdurrahman Wahid dan terutama Megawati Soekarno Putri. Wahid dan Mega lebih banyak tampil dan dikenali sebagai sosok mitologis, dan bukan historis oleh pendukung mereka. Wahid teramankan dalam baju-baju mitos yang dirajut dari primordialisme ke-NU-an. Mega teramankan dalam selimut mitos yang di-

jalin dari simbolisasi emosional-irrasional yang sangat personal. Jika patron-klienisme dalam NU mengamankan proses mitologisasi pada Wahid, maka berdiam seribu bahasa mengamankan proses mitologisasi pada Mega.

Dalam konteks itu, selama Mega tidak dipaksa tampil ke depan untuk berbicara dan melakukan kerja-kerja politik riil sebagai bangsa, maka selimut mitosnya akan semakin tebal. Mega menjadi sosok yang lebih besar dari postur sesungguhnya. Sebaliknya, manakala Mega diberi peluang untuk tampil sebagai pemimpin yang sesungguhnya, saya yakin baju-baju mitosnya akan tanggal satu per satu dan berganti dengan sosok historisnya yang sejati.

Pada titik itulah Mega akan benar-benar dapat diukur. Benarkah ia pemecah segala soal seperti yang dipahami pendukung fanatiknya? Benarkah ia lokomotif demokrasi seperti yang dipercaya para intelektual pendukungnya? Benarkah ia antistatus quo seperti yang ditulis pengamat yang loyal padanya? Benarkah ia punya pikiran-pikiran yang jauh ke depan? Benarkah ia bisa berfungsi efektif sebagai pemimpin yang bisa membawa Indonesia keluar dari krisis?

Saya terprovokasi oleh pertanyaan-pertanyaan genting itu. Mungkin, boleh jadi karena itu, saya sangat ikhlas jika orang seperti Mega (atau Wahid) menjadi pemimpin bangsa ini--tentu saja sejauh melalui proses yang sehat demokrasi dan dengan catatan ada oposisi yang kuat dan berwibawa terhadap mereka. Dan boleh jadi, pada saat itulah kita akan melihat bagaimana berbahayanya mitos yang dipelihara menjadi aset politik. Mungkin saja akan ada keterkejutan dan rasa sakit pada banyak orang, terutama pada pendukung mereka. Akan tetapi, pernahkah ada transisi demokrasi tanpa keterkejutan, kegagapan, dan rasa sakit? (Jakarta, 10 Juli 1999/*Republika 11/07/ 1999*).

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Selasa, 9 November 1999
Pukul : 11.00--12.00
Judul Makalah : Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa
Penyaji Makalah : Eep Saefulloh Fatah
Pemandu : Chaedar Alwasilah
Pencatat : Ebah Suhaebah

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia
   a. Bahasa sebagai alat, apakah itu selalu berasal dari penguasa terhadap yang dikuasainya ataukah itu bisa diamati sebagai suatu yang terbalik. Padahal, sekarang ini banyak sekali pejabat yang direpresi oleh rakyatnya.
   b. Tentang istilah *konsensus,* memang, pada dasarnya bahasa itu adalah konsensus walaupun sebenarnya "bahasa juga merupakan konsensus yang dipaksakan" karena pada waktu lahir kita harus menerima seperti yang digunakan oleh orang tua kita. Apakah untuk kata *konsensus yang dipaksakan* itu relatif? karena terhadap kata *dipaksakan* ini lama-lama orang menjadi ikhlas sehingga merasa tidak dipaksa lagi. Apakah hal ini dapat berkembang terus dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, kalau kita ikhlas walaupun dipaksa tidak soal.

2. Hasan Alwi, Pusat Bahasa

   Forum Seminar Politik Bahasa tidak dimaksudkan sebagai manipulasi untuk menghujat pemakaian bahasa di dalam zaman ini. Saya setuju dengan pandangan bahwa yang terjadi adalah birokratisasi bahasa; saya setuju bahwa yang terjadi adalah pengasingan masyarakat dari pemakaian bahasa. Akan tetapi, ketika Pak Eep memberikan contoh ketika berhadapan dengan para petani, para nelayan, untuk keperluan sesuatu, Pak Eep telah mencoba memahami para nelayan, Pak Eep telah mencoba sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia tanpa ada kata asing, tetapi masyarakat tidak kunjung mengerti. Saya pikir ini bukan karena birokratisasi bahasa, tetapi karena kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang be-

lum memahami bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masyarakat yang memang belum memahami bahasa Indonesia, kita perlu menurunkan tingkat bahasa kita agar bahasa kita dipahami oleh mereka. Mohon klarifikasi.

3. Zainuddin Taha, Universitas Negeri Makassar

Saya kurang sependapat dengan pemakalah. Kalau tadi dikatakan bahwa kerusakan bahasa itu terjadi karena birokratisasi bahasa, saya berpendapat bahwa kerusakan bahasa terjadi karena politisasi bahasa yang dilakukan oleh para politisi kita. Timbulnya eufemisme bukan karena birokrat yang banyak melakukan eufemisme, melainkan para politisi yang banyak melakukan eufemisme, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Saya khawatir, jika pernyataan tadi tetap dipertahankan, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa penghujat terus-menerus. Orde lama dihujat oleh orde baru, kemudian orde baru dihujat oleh orde reformasi, dan seterusnya. Bahasa Indonesia dipolitisasi sedemikian rupa dan dimanipulasi oleh politisi. Saya kira yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan bahasa adalah politisasi bahasa oleh politisi.

4. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Anggapan bahwa yang dilakukan di kelas itu sifatnya represif, akan bermakna pula bahwa pembakuan yang dilakukan sejak tahun 1975 akan dapat digolongkan ke dalam sesuatu yang represif. Banyak hal yang berlaku dalam masyarakat terpaksa harus diubah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru, misalnya *menyolok mata* menjadi *mencolok mata,* kata *maka* dahulu sering dipakai, sekarang sudah tidak ada tempat lagi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal-hal seperti ini.

5. Mulyo Seto, LKBN Antara

a. Birokratisasi bahasa terjadi di mana-mana. Sebagai contoh, terhadap wartawan baru sering diingatkan untuk berhati-hati dengan birokratisasi bahasa. *Economist* sering mendapat *press release*, baik dari Pentagon, Lembaga Pertahanan Israel, bahkan dari Inggris. Bahasanya memang bahasa birokrasi. Tidak berbeda dengan baha-

sa Mabes, bahasa Soeharto di Indonesia. Masalahnya, wartawan di Indonesia itu terlalu bodoh sehingga bahasa yang birokratis itu ditulis sebagaimana aslinya. Berbeda dengan wartawan *Economist* itu, yang membahasakannya kembali, menginterpretasi lagi. Bahasa diplomat itu adalah bahasa birokrasi, bahasa basa-basi. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi bahasa para birokrat?

b. Mengenai istilah "mengelabui realita dengan bahasa", ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat memindahkan realitas itu ke dalam kata-kata verbal sehingga dalam realitasnya sastra cerita-cerita yang lurus yang gampang ditangkap adalah sastra yang buruk, sastra yang tidak mudah dipahami adalah sastra yang bagus. Oleh sebab itu, orang yang mengelabui realita dengan bahasa, itu bukan mengelabui, melainkan memang tidak bisa membahasakan secara verbal realita itu.

**B. Jawaban**

1. a. Salah satu syarat konsensus adalah adanya lebih dari satu orang/pihak. Tidak ada konsensus yang dilakukan oleh satu pihak. Konsensus bahasa yang dipaksakan mencerminkan relasi atau hubungan yang memegang alat-alat kekuasaan dengan mereka yang tidak memegang alat itu sehingga harus dikuasai.

   b. Bahasa jangan digunakan sebagai alat untuk membiasakan kita pada situasi yang tidak sebenarnya. Bahasa harus diubah kembali fungsinya sehingga menjadi termometer bagi masyarakat. Bahasa sebagai alat ekspresi yang jujur dari satu satuan komunitas. Itu yang harus dilahirkan oleh era baru.

2. Saya sepaham dengan tanggapan Pak Hasan Alwi. Ketika saya bertemu dengan para nelayan, saya menyadari bahwa terjadi kompleksitas di sana. Saya menyadari ada kekurangan pada diri saya dalam hal berkomunikasi, apalagi jika dibandingkan dengan Bung Harmoko, yang dengan bahasa yang tidak saya mengerti dapat dekat dengan rakyat. Hal lain adalah adanya konteks yang menganggap saya sebagai elit yang menyebabkan terjadinya kesulitan berkontak bahasa.

3. Pendapat kita sebetulnya sama, ketika Bapak mengatakan politisasi dan bukan birokratisasi, politik yang dimaksud adalah yang dicirikan

oleh birokratik politik. Sistem politik yang birokratik yang dicirikan, antara lain, oleh beberapa kebijakan birokrasi: (1) birokrasi menjadi alat untuk mengawasi masyarakat atas penguasa atau negara. Birokrasi itu kemudian dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat dari proses politik. Politisasi yang berjalan sepanjang orde baru dengan politisi, termasuk birokrat yang menempatkan diri sebagai politisi. Banyak jabatan birokrat yang kemudian dipolitisasi. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh Pak Taha memperdalam apa yang saya sampaikan.

Ketika bahasa kita kritik karena menjadi alat dari birokrasi sehingga menjadi alat manipulasi, kita berhenti dari kekeliruan yang berulang-ulang. Bagaimana bahasa dipakai orde baru untuk menghujat masa lampau, bagaimana bahasa digunakan untuk menghujat orang yang tidak kita setujui, dan bagaimana politisi-politisi naik kariernya bukan karena kedekatan dengan rakyat, melainkan karena kepandaiannya bersilat lidah.

4. Ada yang berbeda antara *represi* dan *pembakuan*. Pembakuan dilaksanakan dengan mekanisme yang benar lewat konsensus yang benar sehingga pembakuan merupakan konsensus yang telah terjadi dalam masyarakat. Pembakuan yang mempertimbangkan individu, komunitas, lokalitas, dan keanekaan. Itu adalah pembakuan dan bukan represi, tetapi merupakan kristalisasi dari konsensus kebahasaan yang diambil oleh setiap masyarakat di mana pun. Kalau pembakuan itu juga memakai logika kerja birokrasi, mengenai kata *baku* ini terserah kepada pandangan Anda. Bahasa harus tumbuh dari masyarakatnya. Masyarakat jangan dipaksa untuk mengenal bahasa-bahasa yang asing dengannya.

5. a. Bentuk dan cara kerja birokrasi berbeda di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Bentuk birokrasi tidak universal, tetapi kontekstual. Bagaimana pengaruh birokrasi terhadap bahasa akan dipengaruhi oleh karakter yang mempengaruhinya. Masalahnya adalah demokratisasi tidak jalan sehingga birokrasi kita berjalan begitu rupa dan kerusakan bahasa pun ikut sejalan dengan kerusakan birokrasinya.

b. Dua faktor yang mempengaruhi birokrasi adalah
   1) birokrasi di tempat yang demokratis tidak menuntut sesuatu yang monolitik, dan
   2) komunikasi yang demokratis

# BAHASA DAERAH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PEMAHAMAN KONDISI KEBINEKAAN DALAM KETUNGGALIKAAN MASYARAKAT INDONESIA: KE ARAH PEMIKIRAN DALAM MEREPOSISI FUNGSI BAHASA DAERAH

**Mahsun**
Universitas Mataram, Lombok

## 1. Pendahuluan

Salah satu rumusan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 adalah bahasa-bahasa Sasak, Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Bahasa daerah, dalam Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah telah dirumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan melalui dua kegiatan, yaitu inventarisasi dan peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah. Untuk inventarisasi bahasa-bahasa daerah dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini telah dilakukan penelitian bahasa-bahasa daerah secara intensif, baik yang menyangkut jumlah maupun aspek kebahasaannya. Bahkan, dalam kurun lima tahun terakhir telah dilakukan penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia oleh Pusat Bahasa. Adapun untuk peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah telah dirumuskan kebijakan pengembangan pengajaran bahasa daerah melalui pelaksanaan program (a) penelitian masalah pengajaran bahasa daerah dan jalan pemecahannya, (b) perumusan kurikulum, (c) persiapan program khusus pengajaran bahasa daerah yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa daerah, (d) penentuan didaktik dan metodik bahasa yang paling cocok, dan (d) pengembangan kepustakaan. Namun, dalam kaitan dengan upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah, yang telah menjadi kebijakan politik bahasa nasional seperti dalam rumusan di atas, hasilnya belum dapat dirasakan. Bahkan, kekhawatiran akan terwujudnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Kraus (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori *moribund* dan *endangered*[1] semakin menjadi kenyataan. Kondisi ini di samping diperkuat oleh konsentrasi pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Ba-

hasa, yang cenderung lebih berat daripada pembinaan bahasa Indonesia (periksa Sudaryanto, 1991), juga disebabkan oleh sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya. Sikap ini di samping disebabkan oleh penutur bahasa daerah (sebagian besar bahasa daerah yang ada di Indonesia) yang relatif kecil jumlahnya, dan karena memandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise, juga semakin dominannya pemakaian bahasa nasional (BI) dalam berbagai aspek kehidupan (Mu'adz, 1998).

Kekurangefektifan upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah serta kemungkinan semakin banyaknya jumlah bahasa daerah di Indonesia yang akan masuk dalam kotak kategori bahasa *moribund* dan *endangered* tidak lepas dari kebijakan yang tertuang dalam rumusan fungsi bahasa daerah yang kurang memberi ruang gerak bagi bertumbuhkembangnya pemakaian bahasa daerah secara baik dan benar, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, yang hanya memandang bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain.

Selain itu, di balik kecenderungan munculnya kondisi yang dipaparkan di atas, diduga akan muncul kondisi yang sebaliknya sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang secara menyeluruh direncanakan akan berlaku mulai tahun 2001. Kondisi yang dimaksud terkait dengan kemungkinan munculnya semangat kedaerahan yang begitu mendalam sebagai akibat adanya apresiasi yang berbeda dan persaingan yang cukup tajam antardaerah dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah (termasuk pengembangan aspek pendidikan dan kebudayaan) dalam pembangunan daerah yang dimandatkan pemerintah pusat kepadanya. Oleh karena itu, persoalan yang terkait dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, khususnya yang terkait dengan fungsi bahasa daerah seperti disebutkan di atas, serta kaitannya dengan kondisi yang akan ditimbulkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan menjadi pusat paparan dalam makalah ini. Dengan kata lain, pokok-pokok pikiran yang ingin disumbangkan dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada upaya memberikan

masukan bagi kemungkinan mereposisi fungsi bahasa daerah pada masa-masa mendatang.

## 2. Fungsi Bahasa Daerah dalam Kaitan dengan Peningkatan Mutu Pemakainya

Salah satu keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 adalah ditentukannya fungsi bahasa daerah sebagai (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (c) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

Rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungan bahasa tersebut dengan bahasa Indonesia, pada butir kedua, mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar-mengajar tidak dibenarkan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu, misalnya daerah itu belum terjangkau sarana komunikasi seperti radio dan televisi sehingga sebagian besar penuturnya hanya mengenal bahasa daerah setempat. Kebijakan itu secara psikologis telah membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka. Di samping itu, secara tidak langsung kebijakan itu dapat membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Keadaan di atas jelas tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah seperti yang dirumuskan dalam kebijakan Politik Bahasa Nasional tersebut. Untuk keperluan itu, kiranya pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar (kelas I-III), di samping pemberian mata pelajaran bahasa daerah itu sendiri sebagai salah satu materi pelajaran di semua jenjang pendidikan patut dipertimbangkan. Berikut ini ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan usulan tersebut.

Dalam hubungan dengan pemakaian bahasa ibu (daerah) sebagai ba-

hasa pengantar pada tingkat permulaan, dapat dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Freeman dan Freeman (1992) yang menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (bahasa Inggris) sering mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran lain, seperti matematika, IPA, IPS, dan sejenisnya. Sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (lih. Cummins, 1989).

Selain alasan di atas, pemberian pelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu pada tingkat permulaan dapat menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri pada peserta didik. Mereka merasa dihargai karena bahasa yang mereka gunakan, yang sekaligus menjadi sarana sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka, digunakan sebagai sarana dalam penyampaian pengetahuan di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Secara psikologis mereka merasa aman berada di sekolah dan akan selalu siap untuk menerima pelajaran. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi jika pelajaran tertentu disampaikan dalam bahasa kedua yang belum dikuasai peserta didik. Selain mereka harus berjuang untuk memahami materi pelajaran, dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus mengerahkan segala potensinya untuk memahami bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi pelajaran tersebut. Rasa putus asa dapat saja membayangi peserta didik, yang karena itu pula dapat memunculkan rasa kurang percaya diri. Mungkin itu salah satu sebab mengapa nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pelajaran agama atau PPKN di sekolah-sekolah, misalnya, belum sepenuhnya dapat diaplikasikan peserta didik dalam kehidupan nyata karena sesungguhnya mereka hanya memahami konsep itu secara verbal bukan secara substansial.

Alasan lain sehubungan dengan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar berkait dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Mu'adz (1998) menyebutkan bahwa dengan digunakannya bahasa daerah sebagai pengantar maka dimungkinkan bahasa daerah itu terhindar dari kepunahan. Berbagai kosakata yang berhubungan dengan konsep-konsep dan terminologi dalam bahasa asing akan teradopsi ke dalam bahasa daerah dan seka-

ligus akan memperkaya kosakata bahasa daerah itu sendiri. Dicontohkannya, kata-kata dalam bahasa Sasak: *haram, halal, subhat, nikmat, nyalat jenazah, talak sekeq,* dan lain-lain merupakan terminologi yang diadopsi dari bahasa Arab bersamaan dengan upaya penutur mempelajari agam Islam. Dengan demikian, bahasa daerah itu akan menjadi fleksibel, dapat mengomunikasikan ide-ide dalam diri penuturnya dan, karena itu, tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh penuturnya.

Dalam hubungan dengan urgensinya pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dapat dikemukakan alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi) akan semakin memberi legitimasi bagi upaya pemeliharaan bahasa daerah yang secara yuridis formal memang dijamin UUD 1945. Langkah itu akan menjadi salah satu tindakan (preventif) dalam upaya mencegah bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Kedua, bahwa dijadikannya bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah akan semakin menggairahkan peserta didik dalam belajar sejarah dan budaya lokal. Ketiga, bahwa dengan belajar bahasa daerah (tentunya dengan model pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan, seperti yang dikembangkan penulis melalui Proyek Riset Unggulan Terpadu V, dari tahun 1997/1998 sampai tahun 1999/2000, akan menjadi bagian pembahasan dalam seksi 3 di bawah) dapat diperoleh pemahaman secara empirik tentang makna keanekaragaman dalam ketunggalikaan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Suatu pemahaman yang selama ini dapat dipandang sebagai pemahaman yang bersifat verbal atau semu, yang dikondisikan secara indoktrinatif tanpa diberi kesempatan untuk memikirkan kebenarannya melalui pengujian secara empiris.

Patut diingat bahwa dalam menyusun materi pengajaran haruslah dipertimbangkan latar belakang bahasa ibu peserta didik serta tingkat pendidikannya. Apabila peserta didiknya berlatar belakang bahasa ibu bahasa Indonesia, maka pengajaran bahasa daerah haruslah disasarkan pada upaya penguasaan keterampilan berbahasa (secara praktis) secara baik dan benar sebagai prioritas utama. Selanjutnya, apabila peserta didiknya berlatar belakang bahasa ibu bahasa daerah yang diajarkan, maka materi pengajaran hendaknya lebih diprioritaskan pada pengajaran dengan mak-

sud meningkatkan pemahaman akan sejarah dan budaya yang terdapat dalam masyarakat penutur bahasa tersebut di samping materi yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Apa yang diungkapkan di atas, merupakan konsep penyusunan materi untuk tingkat dasar, sedangkan untuk tingkat lanjutan sampai perguruan tinggi, materi yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan pemahaman akan sejarah, budaya, dan keanekaragaman dalam ketunggalikaan hendaknya menjadi prioritas. Muatan materi yang disebutkan terakhir ini akan menjadi salah satu fokus pemaparan pada subseksi-subseksi dalam seksi tiga berikut ini.

### 3. Fungsi Bahasa Daerah dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada Bab IV, Pasal 7, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara konkret, kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah (kabupaten dan kota), termaktub dalam Pasál 11, Ayat 2, yaitu kewenangan pada bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Salah satu di antara kewenangan tersebut adalah kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok masalah yang hendak menjadi paparan dalam seksi ini.

Apabila kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikaitkan dengan kebijakan Politik Bahasa Nasional yang dirumuskan tahun 1975, sebagai jabaran dari Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, maka dapatlah dikatakan bahwa kewenangan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari unsur kebudayaan Indonesia dilakukan oleh setiap daerah yang memiliki bahasa sendiri. Apresiasi terhadap konsep pemeliharaan dan pembinaan bahasa daerah oleh setiap daerah dapat muncul dalam bentuk yang beraneka ragam. Hal ini lebih-lebih jika dikaitkan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang seluas-luasnya bagi daerah untuk ber-

kembang dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah itu sendiri secara maksimal. Keadaan ini akan memunculkan kondisi saling menyaingi antardaerah dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah (daerah) masing-masing. Persaingan itu, termasuk pula persaingan dalam upaya merealisasikan apresiasi mereka terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah, yang di dalamnya termasuk bahasa (daerah) seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut.

Seiring dengan itu, suasana yang semakin memberi ruang gerak bagi berkembangnya semangat kedaerahan akan semakin terbuka. Itu artinya, bahwa apabila kondisi yang memberi otonomi yang seluas-luasnya pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri tidak dipahami dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, maka dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan akan terwujudnya kekhawatiran ini semakin didukung oleh angin reformasi yang mulai terembus dalam dua tahun terakhir ini dan arus globalisasi yang cenderung menuntut setiap komunitas, baik dalam lingkup kedaerahan maupun nasional, untuk memiliki jati diri yang kuat demi memenangkan persaingan yang begitu ketat. Kiranya masih segar dalam ingatan kita, beberapa kasus yang mengarah pada disintegrasi nasional--seperti kasus Aceh, Ambon, Irian Jaya, dan yang baru-baru ini mengemuka, yaitu kasus Makasar, berupa tuntutan bagi Indonesia Timur Merdeka--belum terselesaikan dengan baik dan akan menjadi pekerjaan rumah kita bersama pada masa-masa mendatang.

Sebenarnya kekhawatiran dan kasus-kasus di atas tidak harus terjadi selama potensi keanekaragaman budaya yang tercermin pada daerah-daerah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat dikelola secara baik. Pengelolaan yang dimaksud salah satunya adalah dalam bentuk memperkuat rasa kebersamaan dalam perbedaan melalui penumbuhan kesadaran secara suka rela berdasarkan pemahaman yang tidak bersifat memaksa, tetapi berdasarkan perenungan yang intens melalui justifikasi empirik yang memang dapat dicerna akal sehat (rasional). Pengelolaan yang demikian itu haruslah menjadi kebijakan nasional yang dimungkinkan untuk diterapkan di daerah-daerah. Untuk itu, diperlukan titik tolak yang sama, yang menjadi komitmen bersama.

Dalam konteks itu, keberadaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, yang tidak kurang dari 670 buah (lih. Mu'adz, 1998), dapat membantu

menyediakan bukti empirik guna memberi inspirasi bagi perenungan yang intens serta menjadi titik pijak yang sama untuk menumbuhkan komitmen bersama. Bukti yang dimaksud berupa data-data yang menunjukkan kekerabatan antarbahasa yang ada berupa kesepadanan kaidah-kaidah kebahasaan, baik kesepadanan pada tataran bunyi maupun kesepadanan pada tataran gramatika (morfologi dan sintaksis), dan tataran makna (semantik). Dengan memanfaatkan kajian linguistik, khususnya linguistik historis komparatif dan dialektologi diakronis, bentuk-bentuk yang berkesepadanan (berkorespondensi) itu dapat dijelaskan sebagai bentuk yang berbeda tetapi berasal dari satu bentuk yang sama. Kenyataan ini dapat dijadikan bahan bagi upaya menumbuhkan semangat kebersamaan. Hanya saja, bagaimana memanfaatkan bukti-bukti kesepadanan itu sehingga dapat menjadi bukti yang dapat memperluas wawasan (pemahaman) akan kondisi keanekaragaman dalam ketunggalikaan. Untuk itu, dalam makalah ini diusulkan salah satu fungsi bahasa daerah dalam era globalisasi dan era otonomi daerah sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman akan kondisi keanekaragaman dalam kesamaan (ketunggalikaan). Fungsi bahasa daerah yang demikian ini hanya mungkin diwujudkan melalui pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan untuk diajarkan di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi). Ihwal bagaimana wujud dan cara pengembangannya, serta pada tingkat mana pengajaran materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan tersebut akan menjadi bahan paparan dalam subseksi berikut ini.

### 3.1 Ke Arah Pengembangan Materi yang Berdimensi Kebinekaan

Materi muatan lokal bahasa daerah berdimensi kebinekaan merupakan muatan lokal bahasa daerah yang berbasis pada pengajaran dialek standar dengan memperkenalkan variasi dialektal lainnya yang terdapat dalam bahasa yang diajarkan dan/atau memperkenalkan variasi dialektal dalam bahasa lain yang memiliki relasi kekerabatan dengan bahasa yang diajarkan (lih. Mahsun, 1999).

Batasan di atas memberikan gambaran pada kita bahwa persyaratan yang pertama-tama harus dipenuhi dalam pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebinekaan adalah penyediaan bahan jadi pengajaran yang berupa bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat. Bentuk-bentuk

bahasa yang berkerabat yang dimaksud adalah yang terdapat pada level satu bahasa, berupa bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara dialek-dialek bahasa yang diajarkan, atau bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat dalam level antarbahasa, khususnya bentuk yang berkerabat antara bahasa yang diajarkan dan bahasa lain yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengannya. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pengembangan materi tersebut kajian yang pertama-tama dilakukan adalah kajian dialektologi diakronis dengan sasaran kajian identifikasi dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa itu dan penentuan bentuk yang berkerabat melalui rekonstruksi bahasa purbanya (protobahasa). Kajian selanjutnya adalah kajian historis komparatif dengan tujuan menentukan tingkat kekerabatan dan bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara bahasa yang akan diajarkan dengan bahasa lain yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengannya melalui rekonstruksi protobahasa dari bahasa-bahasa tersebut. Berdasarkan hasil kerja di atas dilakukan penentuan bahasa standar melalui kajian secara sosiolinguistis. Hasil kajian secara sosiolinguistis ini selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah antarpenutur bahasa yang akan diajarkan. Selanjutnya, menentukan secara formal dan atas dasar kesepakatan bersama, bagaimana sosok dialek yang akan dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar). Penyusunan materi dapat dilakukan dengan tetap berpijak pada bahasa standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, akan dipaparkan sebagian hasil penelitian yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka uji coba model pengembangan materi pengajaran yang dimaksud, yang dilakukan penulis melalui Riset Unggulan Terpadu V, Dewan Riset Nasional, dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 1999/2000, terhadap bahasa Sasak.

Dari pelaksanaan riset tahun pertama 1997/1998 dengan menggunakan pendekatan dialektologi diakronis diperoleh gambaran bahwa bahasa Sasak terpilah ke dalam tiga dialek, yang secara linguistis ketiga dialek itu disebut dengan dialek a-a, a-e, dan e-e. Di antara ketiga dialek itu telah diidentifikasi beberapa pola bentuk bahasa yang berkerabat.

1. Kata berkerabat dengan konstruksi a-a ≅ a-e ≅ e-e:

| | | | |
|---|---|---|---|
| apa | ≅ ape | ≅ epe | 'apa' |
| mata | ≅ mate | ≅ mete | 'mata' |

mama ≅ mame ≅ meme 'laki-laki' dll.

2. Kata berkerabat dengan konstruksi i/u-a ≅ i/u-e:
   lima ≅ lime 'lima'
   (k∂)tuma ≅ (k∂)tume 'kutu badan' dll.

3. Kata berkerabat dengan konstruksi a-i/u ≅ e-i/u ≅ E-i/u:
   ai(q,z) ≅ eiq ≅ Eiq 'air'
   ap(i,∂)(c,z,r) ≅ epi ≅ Epi 'api'
   tali ≅ teli ≅ tEli 'tali'
   ak(u,∂)(w,h) ≅ eku ≅ Eku 'aku' dll.

4. Kata berkerabat dengan konstruksi i ≅ e ≅ ic ≅ iz:
   kiri ≅ kire ≅ kiric ≅ kiriz 'kiri'
   gigi ≅ gige ≅ gigic ≅ gigiz 'gigi' dll.

5. Kata berkerabat dengan konstruksi u ≅ uw ≅ ∂w ≅ uh ≅ ue:
   b(a,E,â)tu ≅ batuw ≅ bat∂w ≅ batuh ≅ batue 'batu'
   bulu ≅ buluw ≅ bul∂w ≅ bulu ≅ bulue 'bulu' dll.

6. Kata berkerabat dengan konstruksi r ≅ h:
   akar ≅ akah 'akar'
   ti(p,k)(a,∂)r ≅ ti(p,r)ah 'tikar'
   biwir ≅ b(i,e)w(i,e)h 'bibir' dll.

7. Kata berkerabat dengan konstruksi l ≅ n:
   ŋ⊃mpal ≅ ŋ⊃mpan 'mengapung'
   t(o,⊃)k)o,⊃)l ≅ t⊃k⊃n 'duduk'
   t∂b∂l ≅ t∂b∂n 'tebal' dll.

8. Kata berkerabat dengan konstruksi r ≅ ∅:
   daraq ≅ daq 'darah'
   bar∂t ≅ bat/ba 'barat'
   urat ≅ uat 'urat' dll.

9. Kata berkerabat dengan konstruksi d ≅ r:
   b(E,i)d(∂,E)ŋ ≅ b(E,i)r(∂,E)ŋ 'hitam'
   pade ≅ par(i,e,E) 'padi' dll.

Selanjutnya, pada tahun kedua dilakukan kajian sosiolinguistik untuk penentuan bahasa Sasak standar. Kajian ini bertumpu pada upaya memperoleh keterangan para penutur dialek-dialek bahasa tersebut tentang masa lampau atau masa kini dari dialek yang mereka gunakan, pandangan, aspirasi, dan sikap penutur dialek tersebut terhadap dialek yang digunakan atau terhadap dialek lainnya yang terdapat dalam bahasa itu. Dengan mengadopsi teori ranah dan metode analisis kuantitatif yang berupa analisis skala implikasional bagi pilihan bahasa (*implicational scale for language choice*) telah berhasil ditentukan bahwa salah satu di antara ketiga dialek itu lebih dimungkinkan untuk diangkat sebagai bahasa standar karena domain tempat pemakaiannya lebih dominan dibandingkan dengan dua dialek lainnya. Dialek yang dimaksud adalah dialek a-e.

Hasil kajian secara sosiolinguistik ini selanjutnya diangkat dalam musyawarah penentuan bahasa Sasak standar. Dari musyawarah tersebut telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat bahwa dialek a-e dapat diterima sebagai bahasa standar.

Selanjutnya, untuk tahun ketiga (1999) sedang dilakukan penyusunan materi pelajaran bahasa Sasak yang berdimensi kebinekaan untuk siswa SLTP kelas I dan kelas II pada empat aspek kebahasaan, pemahaman, penggunaan, dan kesastraan. Keempat aspek tersebut merupakan jabaran isi per unit, yang direncanakan terdiri dari sepuluh unit untuk satu paket (per jenjang atau kelas).

Untuk materi yang mengandung dimensi kebinekaan akan dititipkan pada pembahasan aspek kebahasaan, khususnya pada subtopik pembahasan kosakata. Materi tersusun berupa teks bacaan dalam dialek bahasa Sasak standar (dialek a-e) yang di dalamnya sengaja dimasukkan unsur-unsur leksikal yang memiliki relasi kekerabatan dengan unsur-unsur leksikal dialek-dialek lainnya.

Pada pembahasan subtopik kosakata, unsur leksikal dialek standar yang memiliki relasi kekerabatan tersebut diangkat kembali untuk ditunjukkan padanannya dalam dialek-dialek bahasa Sasak lainnya. Pada

saat itulah guru menjelaskan hakikat perbedaan dari unsur-unsur leksikal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah bentuk asal yang sama. Bersamaan dengan itu pula, pesan keanekaragaman dalam ketunggalikaan dapat disampaikan. Patut ditambahkan bahwa penyusunan materi muatan lokal tersebut, untuk kelas I dan II, hanya akan memanfaatkan variasi kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Sasak itu sendiri, jadi memanfaatkan variasi dialektal yang memiliki relasi kekerabatan. Selanjutnya, buku pelajaran yang telah tersusun itu akan diuji coba kelayakannya, baik yang menyangkut materi maupun kelayakan metode pengajarannya. Untuk itu, akan dilakukan pelatihan bagi beberapa orang guru yang mewakili beberapa dialek yang ada dalam bahasa Sasak selama satu minggu. Selain itu, untuk mendukung proses belajar-mengajar materi muatan lokal tersebut akan dikembangkan model-model simulasi, yang disebut simulasi kebinekaan. Dalam simulasi ini, di samping dimuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah kebahasaan, juga akan dimuat hal-hal yang berhubungan dengan letak geografis penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat tersebut sehingga siswa selain belajar bahasa sekaligus belajar geografi. Ihwal gambaran secara terperinci tentang riset uji coba model ini dapat dilihat dalam Mahsun (1998 dan 1999).

### 3.2 Arti Penting Pengembangan Materi yang Berdimensi Kebinekaan

Mengingat dampak yang mungkin timbul sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 seperti dipaparkan di atas, pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kepribadian bangsa dan jati diri manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman akan dinamika makna yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran akan keanekaragaman dalam kemajemukan budaya bangsa itu diharapkan semakin diyakini mengingat pemahaman itu diperoleh melalui pengetahuan empirik yang berupa evidensi kebahasaan, bukan dalam bentuk "indoktrinasi".

Selain itu, materi muatan lokal tersebut dapat mencegah terbentuknya sikap primordial, sukuisme yang muncul sebagai akibat pemberian materi muatan lokal, yang nota bene berupa materi yang khas, sesuai dengan kondisi daerah tempat materi itu disajikan karena model ini di samping memperlihatkan kekhasan bahasa daerah yang diajarkan, juga

memperlihatkan keterhubungannya dengan bahasa lain yang berkerabat dengannya. Pada lingkup bahasa yang diajarkan, model ini dapat menghilangkan kecemburuan penutur dialek lain dalam bahasa yang diajarkan karena dialeknya tidak diangkat sebagai dialek standar yang menjadi basis pengembangan materi pengajaran. Kecemburuan itu sangat dimungkinkan karena pengangkatan dialek tertentu sebagai dialek standar berarti mengabaikan keberadaan dialek lain yang dalam pada itu, secara psikologis, penuturnya merasa lebih rendah daripada penutur dialek standar. Hal itu lebih-lebih didukung oleh pemahaman terhadap konsep dialek, secara etimologis, lahir dari pemahaman tentang pengaitan ragam tertentu sebagai ragam yang kurang berprestise. Kemudian, alat bantu pengajaran yang berupa simulasi kebinekaan dapat menjadi model bagi pengembangan metode pengajaran bahasa daerah lainnya, di samping dapat juga digunakan sebagai sarana justifikasi empiris bagi makna semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pada skala yang lebih luas model yang dikembangkan pada level daerah itu dapat ditingkatkan menjadi model yang dapat berlaku pada lintas daerah, misalnya setelah peserta didik mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pelajar kelas III SLTP ke atas, misalnya, dapat mengambil perbandingan pada lintas bahasa, bukan lagi lintas dialek dalam satu bahasa. Bahkan, lebih jauh dari itu dapat dijadikan model untuk level nasional; dalam arti, sistem pengajaran yang bersifat kekerabatan-kontrastif tersebut dapat diambil pada bahan-bahan bahasa lain yang penuturnya lebih dan memiliki tradisi tulis yang kuat. Misalnya, ketika mengajarkan materi muatan lokal bahasa Sasak di daerah yang berpenutur bahasa Sasak, bentuk yang berkerabat dapat dicarikan pada tingkat kekerabatan bahasa yang lebih tinggi, misalnya tingkat Austronesia Barat, seperti bahasa Bali dan bahasa Jawa karena bahasa Sasak, bahasa Bali, dan bahasa Jawa merupakan bahasa-bahasa yang berkerabat pada level tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin banyak bahasa daerah lain yang diketahui berkerabat dengan bahasa daerah misalnya nya, dan dalam pada itu akan semakin luaslah pemahamannya akan makna yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

### 3.3 Prospek Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebinekaan dalam Rangka Pengajaran Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia

Ada dua titik pandang yang dapat digunakan untuk menyoroti prospek pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan dalam pengajaran bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kedua titik itu menyangkut bahan baku dan bahan jadi bagi penyusunan materi pengajaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan bahan baku di sini adalah keberadaan bahasa daerah di Indonesia ditinjau dari segi pengelompokan bahasa secara diakronis, sedangkan yang dimaksudkan dengan bahan jadi adalah tinjauan dari ketersediaan bahan yang siap dirakit untuk pengembangan materi pengajaran. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bahan jadi adalah ketersediaan hasil-hasil kajian secara dialektologis diakronis dan linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia.

Tinjauan dari sudut pandang bahasa baku, menuntun upaya menjawab pertanyaan apakah bahasa-bahasa atau sebagian besar bahasa daerah yang terdapat di Indonesia merupakan bahasa yang serumpun atau tidak. Apabila sebagian besar bahasa daerah yang ada di Indonesia bukanlah bahasa yang berasal dari rumpun yang sama, maka gagasan pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebinekaan sebagai salah satu upaya memfungsikan bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman akan kondisi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia menjadi kurang prospektif. Sebaliknya, akan dipandang cukup prospektif jika sebagian besar bahasa daerah yang terdapat di Indonesia itu berasal dari satu rumpun bahasa yang sama. Berangkat dari titik pandang itu, dapat dikatakan bahwa pengembangan materi muatan lokal tersebut memiliki prospek yang cukup baik bagi pengajaran bahasa daerah di Indonesia karena berdasarkan studi yang dilakukan terhadap kelompok bahasa yang termasuk rumpun bahasa Austronesia, Indonesia merupakan tempat yang paling banyak memiliki bahasa rumpun Austronesia tersebut. Hanya saja, dalam kaitannya dengan konsep bahan jadi, rupanya kajian secara dialektologis dan historis komparatif belum banyak dilakukan terhadap bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Lauder (1997) melaporkan bahwa sampai 1997 penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah secara dialektologis baru mencapai 69 buah penelitian, suatu jumlah yang sangat

kecil jika dibandingkan dengan jumlah bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Belum lagi dari jumlah itu dikelompokkan atas penelitian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dialektologi diakronis, yang memang jenis penelitian yang terakhir inilah yang dapat menyiapkan bahan jadi untuk pengembangan materi muatan lokal tersebut. Hal yang sama terjadi pula pada penelitian dari sudut pandang linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Menurut Fernandez (1988), penelitian yang bertujuan melakukan pengelompokan bahasa-bahasa daerah di Indonesia masih sangat langka. Hal ini tercermin pula dari jumlah dialektolog dan komparativis yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa meskipun dari sudut pandang bahan baku bagi pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebinekaan itu cukup tersedia, tetapi dari sudut pandang bahan jadi sangatlah mengecewakan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus segera dilakukan untuk memfungsikan bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman kebinekaan dalam ketunggalikaan melalui pengajaran bahasa adalah melakukan kajian bahasa-bahasa daerah berdasarkan pendekatan dialektologi diakronis dan linguistik historis komparatif. Meskipun Pusat Bahasa dalam beberapa tahun terakhir ini telah dan sedang menggalakkan penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia, Pusat Bahasa tidak melakukan penelitian dalam kerangka kerja dialektologi diakronis (meskipun terdapat kajian dari sudut pandang linguistik historis komparatif). Oleh karena itu, penelitian itu belum dapat membantu menyiapkan bahan jadi bagi pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebinekaan.

## 4. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai catatan penutup berikut ini.

Peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah tidak dapat dicapai hanya melalui pemberian materi pelajaran bahasa daerah sebagai materi muatan lokal di sekolah-sekolah, tetapi haruslah disertai upaya yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki pada diri penuturnya. Rasa bangga dan rasa memiliki tersebut dapat ditimbulkan, salah satunya melalui pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada kelas permulaan di tingkat pendidikan dasar (kelas I--III). Oleh karena itu,

rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia butir (b) haruslah dipertimbangkan kembali karena rumusan ini mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar-mengajar (KMB) tidak dibenarkan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu. Kebijakan ini, secara psikologis dapat membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu (bahasa daerah) mereka. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Patut ditambahkan bahwa bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar hanya pada sekolah-sekolah yang peserta didiknya berlatar belakang bahasa pertama bahasa daerah.

Selain perlu dilakukan pertimbangan tentang rumusan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah juga perlu dipertimbangkan fungsi bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman kondisi kebinekaan dalam ketunggalikaan masyarakat Indonesia. Fungsi ini dipandang perlu mengingat kondisi yang mungkin timbul sebagai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang secara menyeluruh akan diberlakukan pada tahun 2001.

Kedua fungsi bahasa daerah yang diusulkan untuk mengganti dan menambah rumusan fungsi bahasa daerah yang telah dirumuskan berdasarkan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu satu sama lain saling mendukung dalam pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah. Apabila fungsi bahasa daerah yang pertama yang diusulkan itu dapat memberi dorongan agar penuturnya mau mempelajari bahasanya dengan baik, maka fungsi yang kedua dapat memberi pemahaman padanya bahwa bahasa daerah yang dikuasainya secara baik dan benar itu memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa daerah lain yang juga dikuasai oleh penutur secara baik dan benar. Kondisi ini tentunya akan sangat mendukung tumbuhnya semangat kebersamaan di antara berbagai warga masyarakat Indonesia. Suatu semangat yang sangat dibutuhkan dalam era otonomi daerah.

**Catatan**

[1] Kraus (1992) membuat pengelompokan bahasa berdasarkan gejala umum yang terjadi pada bahasa-bahasa di dunia--seperti jumlah penutur, prestise sosio-kultural, dan dukungan pemerintah terhadap pemakaiannya--atas tiga kelompok, yaitu kelompok bahasa yang tidak lagi dikuasai dan digunakan oleh anak-anak dari penutur suatu bahasa, kelompok bahasa yang dalam satu/dua generasi tidak lagi dikuasai dan dipelajari oleh keturunan penutur suatu bahasa, dan kelompok bahasa yang termasuk kategori aman, yang masing-masing disebut *moribund, endangered,* dan *safe*.

## Daftar Pustaka


Cummins, J. 1989. "Empowering Minority Student Sacramento CABE; The Sanitiged Curriculum: Educational Disempowerment in a Nation at Risk" dalam *Richness in Writing Empowering ESL Students*. D. Junction dan D. Roen (ed). Hlm. 19--38. New York: Long Man.

Freeman, Yvonne S. dan David E. Freeman. 1992. *Whole Language for Second Language Leaner*. Portsmouth, NH: Heinemann.

Krauss, Michael. 1992. "*The World's Language in Crisis*" dalam *Language*. Vol. 68, I: 4--10.

Lauder, Multamia RMT. *Tinjauan Pemetaan Bahasa Nusantara di Indonesia* dalam Mahsun (ed.). *Proseding Seminar Bahasa dan Budaya di Dunia Melayu*. Yogyakarta: Nadi Offset.

Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

------- 1998. "Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Bahan Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat (Variasi Dialektal Bahasa Sasak)". Laporan Penelitian Tahun I, RUT V, Dewan Riset Nasional.

------- 1999. "Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Bahan Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat (Bahasa Sasak Standar: Kajian dari Aspek Sosiolinguistik)". Laporan Penelitian II, RUT V, Dewan Riset Nasional.

Mu'ads, M. Husni. 1998. "Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VII, tanggal 26--30 Oktober 1998, di Jakarta.

Sudaryanto. 1991. "Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Tegangan antara Pesimisme dan Optimisme" dalam Sudaryanto (ed.) *Proseding Kongres Bahasa Jawa I*. Surakarta: Harapan Masa.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 9 November 2000 |
| Pukul | : | 13.00--14.00 |
| Penyaji Makalah | : | Mahsun |
| Judul Makalah | : | Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah |
| Pemandu | : | Yayah B. Lumintaintang |
| Pencatat | : | Sutiman |

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Yus Rusyana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

   Ada tiga hal yang diharapkan dari pembicaraan tentang fungsi dan kedudukan bahasa daerah di sini, yaitu

   a. kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi bahasa daerah di republik ini,
   b. bahasa daerah dalam konteks kedwibahasaan, dan
   c. keberagaman bahasa daerah.

   Berkaitan dengan konteks kedwibahasaan, bahasa daerah berfungsi komplementer dengan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia seiring dan sejalan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa bahasa daerah akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa, sebagaimana dikhawatirkan dalam seminar politik bahasa dua puluh lima tahun yang lalu, sampai saat ini tidak terjadi dan sampai saat ini bahasa daerah tetap berdampingan dengan bahasa Indonesia.

2. Husni Mu'adz, Universitas Mataram

   Selama ini bahasa daerah hanya sebagai muatan lokal dan sebagai mata pelajaran opsi di tiap-tiap daerah. Materi mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal hanya cocok untuk siswa di kota-kota dan terlalu mudah bagi siswa di desa-desa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk

menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di tingkat sekolah dasar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa pada sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa daerah memiliki kemampuan menyerap mata pelajaran lebih tinggi daripada siswa pada sekolah yang berbahasa pengantar bahasa kedua.

3. Dede Oetomo, Universitas Airlangga

Apakah sudah divalidasi bahwa pengetahuan dua bahasa yang berkerabat akan menciptakan kerukunan antaretnis.

4. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok

Yang perlu ditekankan adalah bahwa pelajaran bahasa daerah diberikan untuk melestarikan bahasa daerah dan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbahasa daerah itu, bukan pengetahuan bahasanya. Oleh karena itu, yang perlu disadari bersama adalah adanya fungsi bahasa daerah itu secara diglosik.

5. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
   a. Menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah tidak menjamin pelestariannya. Oleh karena itu, beranikah Anda mengusulkan agar bahasa daerah itu juga digunakan dalam lingkup yang lebih luas.
   b. Selama ada perlakuan yang tidak adil terhadap bahasa daerah, misalnya jika ada penelitian tentang interferensi, selalu bahasa daerah yang dijadikan biangnya.
   c. Perlu diambil kebijakan yang berskala nasional yang berkaitan dengan upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah itu.

**B. Jawaban**

1. Tidak ada keinginan untuk menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Pernyataan saya itu saya kaitkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, terutama tentang rencana adanya otonomi daerah.

2. Bukti-bukti tentang kekerabatan antara bahasa-bahasa daerah itu ha-

nya untuk menjustifikasi adanya kebinekaan itu, yang juga diharapkan untuk memperkokoh integrasi bangsa ini.

3. Tidak ada niatan untuk menjadikan siswa seorang linguis.
4. Bahasa daerah tidak diwajibkan sebagai mata pelajaran dan sebagai bahasa pengantar sehingga upaya untuk mencapai mutu penguasaan bahasa daerah secara verbal tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, perlu ditentukan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di tingkat sekolah dasar dari kelas I--III.

# KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA ASING

**Nuril Huda**
Universitas Negeri Malang

Dalam kurun waktu 24 tahun terakhir, sejak dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa di Indonesia dalam Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975, telah banyak perubahan dan perkembangan masyarakat yang berpengaruh terhadap pola penggunaan bahasa, khususnya bahasa asing di Indonesia. Perubahan paradigma hubungan internasional dan revolusi teknologi informasi telah menciptakan tatanan baru masyarakat global. Demikian pula kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan iptek di dalam negeri, serta perubahan sikap masyarakat terhadap orang asing juga ikut berpengaruh terhadap intensitas penggunaan bahasa asing tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tentang penggunaan bahasa asing yang dirumuskan 24 tahun yang lalu perlu ditinjau kembali.

Dalam makalah ini akan dikaji berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing untuk merumuskan kembali kedudukan dan fungsinya. Berturut-turut akan dibahas isu-isu yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, kedudukan bahasa asing di Indonesia, fungsi bahasa asing, perkembangan penggunaan bahasa asing, dan strategi nasional peningkatan penguasaan bahasa asing.

## 1. Perubahan dan Perkembangan Masyarakat

Runtuhnya pemerintah totaliter komunis dan bubarnya negara Sovyet Rusia pada tahun 1980-an telah berpengaruh kuat terhadap perubahan tatanan masyarakat internasional. Perang dingin antara blok Barat dan blok Timur telah berakhir. Blok Barat tidak punya saingan lagi, dan hubungan internasional yang semula lebih banyak didasarkan pada kepentingan memperjuangkan pandangan politik-ideologi telah beralih kepada kepentingan ekonomi. Isu perang dingin telah berganti dengan isu pasar bebas. Lahirnya kesepakatan AFTA, APEC, dan *European Common Market* merupakan perwujudan perubahan pola hubungan internasional. Maka lahirlah paradigma baru yang dikenal dengan istilah globalisasi.

Gejala penduniaan (globalisasi) hubungan ekonomi internasional didukung oleh revolusi teknologi informasi yang pada tahap berikutnya merambah ke bidang-bidang lain: sosial, budaya, dan politik. Kemajuan tek-

nologi informasi seperti faksimile, parabola, cetak jarak jauh, telepon seluler, CD-ROM, dan internet, serta kemajuan di bidang transportasi, telah memfasilitasi interaksi global secara amat signifikan. Batas-batas fisik antarnegara kurang berfungsi lagi, dan bangsa-bangsa di dunia telah berubah menjadi suatu masyarakat global.

Apa implikasi perubahan dan perkembangan ini? Terdapat dua implikasi pokok (lihat Huda, 1999a dan 1999b). *Pertama*, telah terjadi persaingan antarbangsa yang semakin ketat. Bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif, terutama penguasaan iptek tinggi, memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan tersebut. Persaingan ini telah melahirkan dua isu sentral, yaitu imperialisme iptek dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang lebih dahulu menguasai iptek cenderung melakukan lompatan-lompatan besar dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Sebaliknya negara-negara yang penguasaan ipteknya rendah, makin lama makin jauh tertinggal. Ada kecenderungan negara pemilik iptek tidak mau menularkan iptek canggih dan strategis kepada bangsa lain. Isu mobil nasional merupakan salah satu contoh gejala imperialisme iptek.

Persaingan itu sendiri serta imperialisme iptek telah mendorong masyarakat global untuk memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kualitas SDM ditujukan terutama untuk meningkatkan penguasaan iptek.

*Kedua*, peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Secara individual, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu modal utama keunggulan kompetitif. Penguasaan bahasa asing menjadi salah satu ciri SDM yang berkualitas. Dengan demikian, bahasa asing memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai salah satu indikator SDM yang berkualitas. Tidak semua penguasaan bahasa asing memiliki fungsi ini, tetapi khusus penguasaan bahasa asing yang menjadi wahana komunikasi global, yaitu bahasa Inggris, dapat menjadi unsur penting kualitas SDM.

Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi wahana komunikasi global (*language for wider communication*). Tampaknya bahasa yang dimiliki oleh bangsa unggul dalam bidang ekonomi, politik, dan iptek memiliki peluang menjadi wahana komunikasi global. Bahasa Inggris tampaknya akan keluar sebagai "pemenang" dalam persa-

ingan ini. Sementara itu, bahasa Jepang, ditopang oleh hegemoni ekonominya, tampaknya berkembang pesat terutama untuk komunikasi dalam bidang perdagangan. Sedangkan bahasa Arab tampaknya berkembang pada negara-negara yang penduduknya banyak yang beragama Islam. Gejala meninggalkan bahasa kolonial di sejumlah negara bekas jajahan Prancis di Indo Cina, tampaknya memberikan pertanda adanya penurunan penggunaan bahasa Prancis di luar benua Eropa.

Kemajuan spektakuler di bidang ekonomi di dalam negeri sebelum dilanda krisis moneter, telah menjadi penggerak kemajuan di bidang-bidang lain. Di bidang pendidikan, walaupun kita belum puas dengan hasil yang dicapai sekarang, tak dapat dipungkiri sudah banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah sekolah, dari TK sampai dengan sekolah menengah, meningkat tajam. Jumlah orang Indonesia yang berpendidikan tinggi telah pula meningkat, dan di antara mereka telah banyak yang menduduki posisi penting dalam jabatan pemerintahan atau perusahaan swasta. Sejumlah orang, karena tingkat pendidikannya (dalam arti luas), memerlukan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, baik untuk pemenuhan tugas-tugas profesional maupun untuk kebutuhan pribadi. Bidang komunikasi, transportasi, dan pariwisata meningkat tajam. Bidang iptek, walaupun tingkat kemajuannya masih jauh dibandingkan dengan negara-negara maju, di dalam negeri telah banyak dicapai keberhasilan. Keberhasilan kita memproduksi sendiri di dalam negeri berbagai jenis barang elektronik, kendaraan bermotor, komputer, dan pesawat terbang, merupakan indikator yang jelas kemajuan di bidang ini. Demikian pula bidang perdagangan internasional. Ini semua memerlukan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, baik untuk pemanfaatan dan pengembangan iptek, maupun untuk komunikasi dengan dunia luar untuk semua aspek kehidupan.

Meningkatnya jumlah program pendidikan bahasa asing di perguruan tinggi serta jumlah kursus bahasa asing yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan, lebih-lebih lagi, oleh lembaga swasta, menunjukkan perkembangan kebutuhan penguasaan bahasa asing yang pesat. Kursus-kursus bahasa Inggris diselenggarakan tidak hanya di kota besar, tetapi sudah menembus sampai tingkat kecamatan. Kursus bahasa Cina (Mandarin) dan bahasa Arab sudah merambah ke kecamatan untuk mempersiapkan tenaga kerja di luar negeri. Belum lagi kursus bahasa asing lain-

nya seperti bahasa Jerman, Jepang, dan Prancis. Dengan demikian, kebutuhan berbahasa asing tidak terbatas pada kalangan elit, tetapi sudah merambah kalangan bawah sampai dengan pembantu rumah tangga. Di masa yang akan datang kemampuan berbahasa asing akan lebih meningkat lagi seiring dengan pengiriman tenaga-tenaga profesional ke luar negeri untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan atau pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebelum resesi ekonomi melanda Indonesia, sejumlah perusahaan swasta nasional telah menginvestasikan modalnya ke luar negeri. Sejumlah perusahaan membuat kontrak kerja di luar negeri, di kawasan ASEAN, Cina, dan Timur Tengah. Dapat kita prediksikan bahwa seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan (terutama pendidikan tinggi) dan kemampuan yang lebih baik untuk mengelola perusahaan, Indonesia akan lebih banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, tidak terbatas tenaga kasar (seperti pembantu rumah tangga), tetapi sampai dengan jabatan manager. Ini semua memerlukan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa yang digunakan di negara yang bersangkutan.

**2. Kedudukan Bahasa (Asing)**

Pengertian bahasa asing dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu wilayah asal, pemerolehan bahasa, dan fungsi sosio-kultural-politis. *Pertama*, dari sudut asalnya dapat dirumuskan bahwa semua bahasa yang bukan berasal dari wilayah Indonesia adalah bahasa asing (Gunarwan, 1998). Berdasarkan kriteria ini, bahasa Indonesia dan semua bahasa daerah (Jawa, Sunda, Madura, Bali, Minang, dll.) jelas bukan bahasa asing. Sebaliknya bahasa-bahasa yang datang dari luar wilayah Indonesia, seperti bahasa Inggris, Arab, Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang adalah bahasa asing. Demikian pula bahasa Sanskerta, yang berasal dari India, adalah bahasa asing. Kriteria ini hanya berlaku di Indonesia, dan tidak dapat diterapkan secara luas pada negara-negara lain. Jelas bahasa Inggris bukan berasal dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Tetapi di negara-negara ini bahasa Inggris bukan bahasa asing, dan bahkan menjadi bahasa resmi-nasional. Di negara-negara lain seperti Singapura, India, dan Filipina, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua, dan bukan bahasa asing. Demikian pula bahasa Spanyol juga bukan bahasa asing di negara-

negara Amerika Latin seperti Brasilia dan Meksiko, tetapi menjadi bahasa resmi.

*Kedua*, dari sudut pemerolehan bahasa dapat dibedakan bahasa pertama (bahasa ibu), bahasa kedua (cenderung bahasa resmi/nasional), dan bahasa ketiga (bahasa asing) (lihat Huda, 1999f dan Croft, 1980). Di negara-negara yang penduduknya multietnis, yang menggunakan bahasa kedua yang berbeda dengan sebagian besar bahasa yang digunakan sehari-hari di keluarga, seperti Indonesia, Singapura, India, dan Filipina, bahasa ketiga adalah bahasa asing. Tetapi rumusan ini tidak berlaku bagi negara-negara yang beretnis tunggal (seperti negara Arab, Cina, dan Jepang) atau bagi negara yang walaupun banyak etnis, tetapi telah melebur menjadi satu bangsa yang besar seperti Amerika Serikat. Di negara-negara ini, bahasa "kedua"-nya adalah bahasa asing. Oleh karena itulah dalam kepustakaan pemerolehan bahasa, hanya dibedakan dua jenis bahasa, yaitu bahasa pertama (bahasa ibu) dan bahasa kedua. Bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam kajian pemerolehan bahasa dikategorikan sebagai bahasa kedua. Dengan demikian, rumusan ini pun tidak dapat menjangkau wilayah dan situasi yang bervariasi.

*Ketiga*, dari sudut fungsi sosio-kultural-politis, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari, tidak dipakai untuk pengantar mata pelajaran di sekolah secara nasional, dan tidak dipakai sebagai alat komunikasi politik dan pemerintahan. Dengan demikian, penetapan apakah suatu bahasa masuk kategori bahasa asing atau bukan (yaitu bahasa nasional bahasa kedua) ditentukan berdasarkan kriteria sosio-kultural-politis. Pertimbangan kepentingan nasional menjadi landasan utama, dan bukan asalnya atau bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh.[1] Atas dasar itu, bisa saja suatu bahasa dinaikkan kedudukannya dari bahasa asing menjadi bahasa kedua atau diberi predikat lain yang lebih "tinggi".

Oleh karena itu, di Indonesia bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, Rusia, dan Korea, adalah bahasa asing. Bahasa-bahasa ini tidak dipakai sebagai bahasa pergaulan sehari-hari secara luas. Orang menggunakan bahasa ini dalam situasi terbatas, atau dalam kelompok terbatas. Atas dasar alasan sosio-kultural-politis, ada bahasa yang mendapat predikat tambahan. Bahasa Inggris sejak tahun 1955 telah diangkat sebagai bahasa asing "pertama", sedangkan

bahasa Arab secara *de facto* telah diakui sebagai bahasa agama, khususnya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dari sudut persentase pemakainya, yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam (lebih dari 90%), maka bahasa Arab, baik secara *de facto* maupun secara *de jure* layak diberi predikat tambahan sebagai bahasa agama selain bahasa asing.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa seiring dengan arus globalisasi, selain pertimbangan ini, kini muncul kecenderungan untuk menggunakan alasan pragmatis-ekonomis dalam penetapan kedudukan bahasa, terutama perubahan dari kedudukan sebagai bahasa asing menjadi bahasa kedua, dan dari bahasa kedua menjadi bahasa resmi. Di Malaysia, misalnya, sejak tahun 1956 bahasa Malaysia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Pada tahun 1993 Perdana Menteri Mahathir Mohamad menginstruksikan agar bahasa Inggris dipakai lagi sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Di Singapura, bahasa Melayu adalah salah satu dari tiga bahasa resmi negara dan bahasa nasional; tetapi dalam percakapan sehari-hari kebanyakan orang Singapura menggunakan bahasa Inggris (Dardjowidjojo, 1997). Brunei Darussalam tampaknya kebijakannya tidak jauh berbeda dari Malaysia. Di sana bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara, tetapi bahasa Inggris diajarkan mulai di sekolah dasar (dengan mendatangkan antara lain guru-guru penutur asli) dengan sasaran siswa bisa berbicara bahasa Inggris. Di Saudi Arabia, semua penunjuk dan nama jalan ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris (termasuk di kota Mekkah yang dikhususkan untuk Muslim). Di Bangkok, walaupun semua nama jalan ditulis dengan huruf Thai, orang asing tidak mengalami kesulitan hanya dengan bekal bahasa Inggris (Huda, 1999a dan 1999b).

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar utama penetapan kedudukan suatu bahasa adalah alasan-alasan sosio-kultural-politis, di samping pertimbangan asalnya. Atas dasar pemikiran itu, maka jelas bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Minang berkedudukan sebagai bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kenegaraan, dan bahasa-bahasa Inggris, Arab, Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, dan Cina adalah bahasa asing. Atas dasar pertimbangan pragmatis-ekonomis, bahasa Inggris yang secara informal telah dinyatakan sebagai bahasa asing "pertama" dapat *dinaikkan kedudukannya* sebagai

**bahasa asing utama**, sedangkan atas dasar pertimbangan kultural-religius bahasa Arab dapat diberi predikat **bahasa agama**, selain berkedudukan sebagai bahasa asing.[2]

### 3. Fungsi Bahasa Asing

Kedudukan dan fungsi bahasa asing saling berkaitan. Dalam *Seminar Politik Bahasa Nasional* tahun 1975 fungsi bahasa dinyatakan sebagai "nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya" (Halim, 1976: 144—5). Secara universal "tugas pemakaian bahasa" itu sama, yaitu sebagai alat komunikasi (Bloomfield, 1933). Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi secara verbal. Dalam interaksi terjadi tindakan menyatakan dan memahami secara verbal. Dengan kata lain, bahasa berfungsi untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan sikap, serta sebagai alat untuk memberi informasi, melakukan persuasi, dan juga menyenangkan orang lain. Ini fungsi umum bahasa.

Dari sudut kebijakan nasional, fungsi bahasa dipersepsi dari segi sosio-kultural-politis serta alasan yang bernuansa emosi. Hal ini berlaku khususnya untuk fungsi bahasa daerah dan bahasa nasional, seperti fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan bahasa resmi (lihat Halim, 1976). Khusus untuk bahasa asing, fungsinya lebih banyak didasarkan pada alasan-alasan praktis-pragmatis, dan dalam era globalisasi sekarang ini ditambah lagi dengan pertimbangan manfaat ekonomis. Dari sisi prioritas penggunaannya, sebenarnya bahasa asing dipakai berdasarkan alasan "keterpaksaan" karena bahasa ibu dan/atau bahasa nasional tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan bahasa asing haruslah dilandaskan kepada kepentingan nasional (*for national interest*), sejauh mana penggunaan bahasa tersebut membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, lebih banyak mana manfaat daripada mudharatnya dalam penggunaan bahasa asing.

Apakah fungsi bahasa-bahasa asing yang dipergunakan di Indonesia? Fungsi tersebut dapat dirujuk kepada impliksi globalisasi seperti disebutkan di muka. *Pertama*, dalam era globalisasi sekarang kebergantungan suatu bangsa kepada bangsa lain cukup tinggi. Hubungan internasional tidak terbatas hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi dalam se-

gala bidang kehidupan. Fungsi ini mencakup fungsi membentuk persahabatan dengan bangsa-bangsa lain dan menjalankan *foreign policy* yang tertuang dalam Kepmendikbud nomor 096/1967. Oleh karena itu, bahasa asing *secara umum berfungsi sebagai wahana komunikasi global dalam semua aspek kehidupan*. Dengan kata lain, penguasaan bahasa asing memperlancar interaksi dan komunikasi dengan bangsa lain. Intensitas pemakaian bahasa asing bervariasi dari sisi bahasa dan bidang. Sebagai contoh, bahasa Inggris dipakai sebagai alat komunikasi pada hampir semua aspek kehidupan; bahasa Jepang dipakai sebagai alat komunikasi perdagangan dan iptek; bahasa Arab dipakai sebagai alat komunikasi agama dan budaya (Islam); dan bahasa Jerman dipakai sebagai alat komunikasi iptek.

*Kedua*, globalisasi memicu persaingan antarbangsa yang semakin ketat. Penguasaan iptek merupakan kunci utama untuk memenangkan persaingan itu. Searah dengan itu, maka bahasa asing hendaklah *berfungsi sebagai alat pemanfaatan dan pengembangan iptek untuk mempercepat proses pembangunan*. Fungsi ini mencakup fungsi penyerapan, pemanfaatan, penyebaran, dan pengembangan iptek dalam arti seluas-luasnya. Fungsi ini mencakup pula fungsi sebagai alat bantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Fungsi pengembangan iptek terutama dilaksanakan dalam komunikasi akademik untuk tukar-menukar informasi iptek dan pengalaman pengembangan iptek. Seperti halnya fungsi pertama, intensitas fungsi kedua ini bervariasi pada berbagai bahasa asing.

**4. Perkembangan Penggunaan Bahasa Asing**

Secara historis penggunaan bahasa asing di Indonesia dapat dilacak kembali mulai zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan zaman kemerdekaan. Barangkali bahasa asing pertama yang masuk ke Indonesia adalah bahasa Sanskerta pada zaman Kerajaan Sriwijaya (atau sebelumnya), bahasa Cina pada zaman Kerajaan Majapahit, bahasa Arab pada abad ke-7, dan kemudian bahasa-bahasa Eropa: Belanda, Portugis, Inggris, Prancis, dan Jerman.[3] Pada zaman Jepang diperkenalkan bahasa Jepang, dan sementara itu bahasa Belanda dilarang dipergunakan.

Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa Sanskerta tidak lagi dipergunakan dalam komunikasi agama ataupun komunikasi ilmiah, bahasa Cina terbatas pada penduduk etnis Cina, dan bahasa Arab berkembang

menjadi bahasa agama dan budaya Islam sampai sekarang. Di zaman penjajahan bahasa Belanda berkedudukan sebagai bahasa kedua bagi sebagian penduduk Indonesia, dan bahasa Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) menjadi mata pelajaran wajib di sekolah menengah. Sejak zaman penjajahan tampaknya bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa perdagangan dan bersaingan dengan bahasa Eropa lainnya, terutama bahasa Prancis (lihat Nasution, 1995).

Pada zaman kemerdekaan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Inggris yang pada tahun 1955 dinyatakan sebagai bahasa asing pertama. Sampai dengan akhir tahun 1980-an bahasa Inggris dipandang sebagai bahasa asing biasa walaupun memang dianggap penting. Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap bahasa asing (terutama bahasa Inggris) meningkat pada awal tahun 1990-an. Ini dapat dilihat dari dokumen resmi hasil-hasil Sidang MPR. Dalam GBHN 1983 dan 1988 bahasa asing tidak tercantum, baru pada GBHN 1993 kebijakan tentang peningkatan penguasaan bahasa asing secara eksplisit dicantumkan. Pada tahun 1998 terbit Peraturan Pemerintah No. 55, 56, dan 57 Tahun 1998 yang mengubah PP No. 28, 29, dan 30 Tahun 1990, antara lain berkaitan dengan pemakaian bahasa pengantar di sekolah. Isi PP No. 57 Tahun 1998 tentang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi kemudian dimasukkan dalam PP 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan itu, Mendikbud mengeluarkan keputusan tentang kerja sama perguruan tinggi yang memungkinkan penyelenggaraan program bersama dengan perguruan tinggi asing dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris (Keputusan Mendikbud nomor 223/U/1998).

Atas dasar pola kebutuhan penggunaan bahasa asing di Indonesia tersebut serta implikasi globalisasi, penggunaan bahasa asing di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu (1) bahasa Inggris, (2) bahasa Arab, dan (3) bahasa asing lainnya (bahasa Jepang, Jerman, Prancis, Cina, dll.).

**a. Bahasa Inggris**

Dalam persaingan global antarbahasa, tampaknya bahasa Inggris memiliki peluang menjadi pemenang. Ada 5 faktor yang bisa menjadikan bahasa Inggris sebagai wahana komunikasi global (*language for wider*

*communication*), yaitu (1) memiliki bobot internal yang baik sekali, (2) penutur bahasa dalam jumlah besar, baik sebagai bahasa pertama, kedua, maupun bahasa asing (berjumlah 1,3 miliar orang), (3) penyebaran geografis bahasa Inggris paling besar, (4) dipakai secara luas dalam komunikasi ilmu, teknologi, seni-budaya, dan politik, serta (5) negara pemakainya mendominasi perekonomian, politik, dan budaya (uraian lebih terperinci dapat dibaca dalam Graddol, 1997 dan Huda, 1999c).

Selain itu, kebutuhan di dalam negeri seperti diuraikan di atas menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama dan paling utama. Survei nasional pengajaran bahasa Inggris, antara lain menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMP dan SMA, orang tuanya, serta para guru menghendaki agar para siswa sekolah dapat berbahasa Inggris lisan (Huda, 1990 dan 1999d). Hasil penelitian lain bahkan menunjukkan adanya gejala bahwa bahasa Inggris memiliki nilai prestise lebih besar daripada bahasa Indonesia (Gunarwan, 1998). Oleh karena itu, ada yang berpikiran untuk menaikkan status bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia (lihat Gunarwan, 1998). Jika demikian, hal ini akan bertabrakan dengan kepentingan nasional lain, yaitu pengembangan bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai perekat bangsa. Oleh karena itu, maka tepatlah kiranya jika bahasa Inggris secara resmi diberi kedudukan sebagai **bahasa asing utama**, dan bukan sebagai bahasa kedua atau bahasa resmi kedua.

**b. Bahasa Arab**

Bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa pertama di 20 negara dengan jumlah penutur lebih dari 200 juta orang. Bahasa Arab berstatus sebagai bahasa resmi PBB sejak tahun 1973 dan bahasa resmi Konferensi Islam Internasional. Di dalam negeri bahasa Arab dipakai dalam peribadatan oleh tidak kurang dari 90 juta penduduk Indonesia. Bahasa Arab diajarkan di semua sekolah yang berbasis Islam mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, bahasa Arab juga diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Sebagai sampel, di Jawa Timur tidak kurang dari 350 SMU negeri dan swasta. Kebutuhan tenaga kerja dan hubungan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah meningkatkan kebutuhan penguasaan bahasa Arab. Selain itu, dalam bidang seni-budaya, banyak warisan karya sastra Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Dalam za-

man sekarang seni kaligrafi dengan huruf Arab berkembang dengan pesat, dan grup musik Arab (kasidah dan salawat) juga meningkat tajam akhir-akhir ini. Atas dasar ini kiranya tepat jika bahasa Arab diberi kedudukan sebagai **bahasa agama** dan **bahasa budaya (Islam)** selain sebagai bahasa asing.

**c. Bahasa Asing Lainnya**

Termasuk ke dalam kelompok ketiga ini ialah bahasa Jerman, Jepang, Prancis, Belanda, Cina, dll. Tingkat kebutuhan pemakaian bahasa asing ini tidak setinggi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Jerman tampaknya masih bertahan sebagai bahasa asing yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah menengah. Bahasa Prancis tampaknya turun peminatnya karena jumlah guru yang relatif sedikit. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahasa Jepang meningkat penggunaan dan intensitas pengajarannya di sekolah menengah (Huda, 1999e). Oleh karena itu, terhadap kelompok bahasa asing ini seyogianya juga diterapkan kebijakan nasional yang dapat mendorong peningkatan penguasaannya.

**4. Strategi Nasional Peningkatan Penguasaan Bahasa Asing**

Seiring dengan pengelompokan bahasa asing tersebut di atas, terdapat beragam kebijakan dan strategi nasional yang perlu diterapkan dalam rangka peningkatan penguasaannya.

**a. Penguasaan Bahasa Inggris**

Kebutuhan nasional penguasaan bahasa Inggris dalam masyarakat global sekarang sangat tinggi. Akan sangat ideal seandainya bahasa ini dapat dikuasai seperti penguasaan bahasa kedua. Tetapi hal ini akan bertabrakan dengan kepentingan nasional lainnya yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu pengembangan bahasa Indonesia sebagai alat persatuan dan kesatuan nasional. Telah dilakukan kajian, antara lain, untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, tetapi tampaknya hal ini tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala yang amat sulit diatasi (Dardjowidjojo, 1998). Jangankan sebagai bahasa pengantar di sekolah, diajarkan sebagai bahasa asing wajib saja tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan (lihat Huda, 1990 dan 1999d; Direktorat Dikmenum, 1990; Hamied, 1993; dan Depdikbud, 1997 dan 1998).

Kendala utama ketidakberhasilan pengajaran bahasa asing di sekolah terutama terjadi karena faktor SDM dan logistik: kualitas guru bahasa Inggris yang relatif masih rendah, tidak cukup dana untuk membuat kelas kecil dan menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai. Kelangkaan dana ini juga membuat sekolah tidak mampu menyediakan pengganti lingkungan linguistik yang kondusif untuk belajar bahasa asing (cf. Huda, 1999f).

Atas dasar kenyataan ini, populasi sasaran peningkatan penguasaan bahasa Inggris haruslah diperkecil dan dibatasi pada orang-orang yang potensial akan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa. Dalam keterbatasan dana seperti sekarang, dana yang ada tidak cukup untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris siswa sekolah (SD, SLTP, dan SMU). Lagi pula mereka masih harus memasuki tahap seleksi banyak untuk kelak dapat menduduki posisi strategis. Kelompok potensial itu adalah lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada lulusan SLTP dan SM (Huda, 1997).

Searah dengan pemikiran ini, dana yang terbatas itu seyogianya dialokasikan untuk peningkatan penguasaan bahasa Inggris lulusan perguruan tinggi. Beberapa kebijakan dasar yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1) Menetapkan penguasaan bahasa Inggris sebagai kemampuan persyaratan lulus *(exit requirement competency)* pada semua jenjang pendidikan tinggi. Pada dasarnya sebelum seorang lulusan suatu program pendidikan, seseorang calon lulus harus dapat menunjukkan tingkat kemampuan bahasa Inggris tertentu.[4]
2) Semua program di perguruan tinggi menyediakan kuliah dan kursus bahasa Inggris dengan fasilitas yang memadai: lab bahasa, perangkat lunak (buku, kaset, film, dll.).
3) Mengembangkan sistem penghargaan untuk mendorong mahasiswa belajar bahasa Inggris, baik dengan kuliah formal maupun dengan usaha sendiri melalui kursus, klub, dll.
4) Untuk mengimplementasikan ini, perlu dibentuk komisi pengajaran bahasa Inggris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertugas mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.
5) Di tingkat nasional, sebaiknya di Pusat Bahasa terdapat bagian yang mengurusi pembinaan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa

Inggris.

6) Kerja sama dengan perguruan tinggi asing dalam penyelenggaraan program pendidikan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris perlu ditingkatkan.
7) Kebijakan operasional pengajaran bahasa Inggris di SD, SLTP, dan SM yang berlaku sekarang diteruskan.

**b. Penguasaan Bahasa Arab**

Peningkatan penguasaan bahasa Arab disarankan ditempuh mengikuti langkah dan prosedur berikut.

1) Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama hendaknya meningkatkan posisi bahasa Arab dalam kurikulum sekolah dan madrasah.
2) Kemampuan berbahasa Arab dijadikan persyaratan dalam penyaringan tenaga kerja yang relevan.
3) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bahasa atau sastra Arab diberi kemudahan untuk menyelenggarakan program pascasarjana (S-2 dan S-3) bahasa Arab atau kajian Arab.

**c. Penguasaan Bahasa Asing Lainnya**

Untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing lainnya perlu diterapkan kebijakan yang dapat mendorong penguasaan bahasa asing ini. Di sekolah menengah bahasa asing tetap dijadikan salah satu mata pelajaran pilihan dan kegiatan ekstra-kurikuler. Masyarakat diberi kemudahan dan bimbingan untuk menyelenggarakan kursus bahasa asing.

**5. Kesimpulan**

Dari paparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, penetapan kedudukan bahasa sebagai bahasa asing terutama didasarkan pada alasan sosio-kultural-politis di samping asal bahasa tersebut. *Kedua*, penetapan fungsi bahasa asing terutama didasarkan pada pertimbangan praktis-pragmatis dan ekonomis. *Ketiga*, berdasarkan intensitas penggunaan serta alasan sosio-kultural, bahasa asing dibagi atas tiga kelompok, yaitu (a) bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing utama, (b) bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa agama dan bahasa budaya (Islam) di samping sebagai bahasa asing, dan (c) bahasa asing

biasa. *Keempat*, bahasa asing secara umum berfungsi (a) sebagai wahana komunikasi global dalam semua aspek kehidupan dan (b) sebagai alat pemanfaatan dan pengembangan iptek untuk mempercepat proses pembangunan. *Kelima*, upaya peningkatan penguasaan bahasa Inggris dilakukan dengan membatasi sasaran upaya pada kelompok yang potensial menduduki posisi strategis, yaitu lulusan perguruan tinggi. *Keenam*, searah kedudukan baru bahasa Arab yang diusulkan, pengajaran bahasa Arab perlu ditingkatkan di sekolah dan perguruan tinggi. *Terakhir*, upaya peningkatan penguasaan bahasa asing lainnya perlu diberi kemudahan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

## Catatan

[1] Atas dasar pemikiran ini, suatu bahasa yang dikuasai sejak lahir sebagai bahasa ibu, dan juga dipakai dalam pergaulan sehari-hari dalam keluarga (atau lingkungan sosial terbatas) adalah bahasa asing. Kriteria "terbatas" tentulah relatif dan bersifat politis. Secara statistik dengan ukuran yang konservatif bahasa kelompok ini yang belum mencapai 80%, atau secara lebih liberal belum mencapai 50%, dari jumlah penduduk suatu negara masih dianggap bahasa asing. Tetapi pertimbangan politis lebih berpengaruh sebagai dasar pertimbangan penetapan kedudukan suatu bahasa.

[2] Bahwa bahasa Inggris diakui sebagai bahasa asing pertama tidak dinyatakan dalam Keputusan Mendikbud nomor 096/1967 tertanggal 12 Desember 1967 yang dijadikan dasar kebijakan pengajaran bahasa Inggris selama bertahun-tahun. Akan tetapi, Mr. Frits Wachendrofff, Kepala (pertama) dari Inspektorat Pusat yang pada tahun 1955 menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama, dan tidak akan menjadi bahasa resmi kedua dalam pemerintahan (lihat Kartono, 1975 dan Sadtono, 1997). Dengan demikian, kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama tidak pernah dinyatakan dalam suatu keputusan resmi.

[3] Masuknya bahasa Cina bisa jadi lebih awal karena pada zaman Kerajaan Sriwijaya ada indikasi sejumlah sarjana Cina datang ke Sriwijaya untuk menerjemahkan buku-buku agama Budha. Demikian pula, datangnya bahasa Arab ke Indonesia, menurut sejumlah buku sejarah, dibawa oleh pedagang Gujarat dan Benggala pada abad ke-13. Tetapi temuan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik bertahun 475 H atau 1082 Masehi memberikan indikasi bahwa agama Islam dan bahasa Arab masuk ke Indonesia pada abad ke-7

yang dibawa langsung oleh pedagang Arab dan Persia (informasi tentang bahasa Arab ini diperoleh dari Drs. A. Fuad Effendy, dosen bahasa Arab, FBS, Universitas Negeri Malang).

[4] Sebagai perbandingan di Amerika Serikat ada *foreign language requirement* untuk persyaratan lulus pada program gelar.

## Daftar Pustaka


Bloomfield, L. 1993. *Language*. New York: Holt.

Croft, K. 1980. *Readings on English as a Second Language*. Cambridge, Mass.: Winthrop Publishers, Inc.

Dardjowidjojo, S. 1997. *"English Policies and their Classroom Impact in Some Asian/ASEAN Countries"* dalam Jacobs, G. (ed.), *Language Classroom of Tomorrow: Issues and Responses*. Singapura: SEAMEO Regional Language Centre.

Dardjowidjojo, S. 1998. "Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan" dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Depdikbud. 1997. "Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1996/1997" dalam *Rakernas Depdikbud*, Jakarta, 3—7 April 1997.

-------. 1998. "Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1994/1995 s.d. 1997/1998" dalam *Rakernas Depdikbud*, Jakarta, 2—4 Mei 1998.

Direktorat Dikmenum. 1990. *"Laporan Akhir Survai Pengajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA Seluruh Indonesia (Lanjutan)"*. Jakarta: Depdikbud.

*Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983, 1988, dan 1993.*

Graddol, D. 1997. *The Future of English?* London: The British Council.

Gunarwan, A. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Global" dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Halim, A. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Hamied, F.A. 1993. EFL "Program Surveys in Indonesian Schools: Towards EFL Curriculum Implementation for Tomorrow" dalam Jacobs, G.E. (ed.) *Language Classrooms of Tomorrow: Issues and Responses*. Singapura: SEAMEO RELC.

Huda, N. 1990. "A Survey of the Teaching of English in Secondary Schools in Eight Provinces". *TEFLIN Journal 3*, 1, 1990.

-------. 1997. "A National Strategy in Achieving English Communicative Ability: Globalization Perspectives", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan (The Journal of Education)*, Vol.4, Special Edition, December 1997.

-------. 1999a. "Penguasaan Bahasa Asing untuk Menghadapi Globalisasi Abad Ke-21" dalam *Diskusi Panel diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional*. Jakarta, 5 Januari 1999.

-------. 1999b. "Peningkatan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Menghadapi Globalisasi" dalam *Bahasa dan Seni*, 27, 1, Februari, 1—17.

-------. 1999c. "Strategi Pemantapan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Pengajaran Bahasa Asing (Inggris) dalam Menghadapi Globalisasi" dalam *Seminar Kebahasaan dan Kesastraan Majelis Bahasa Brunei-Darussalam-Indonesia-Malaysia*, Malang, 8—9 Maret 1999.

-------. 1999d. *Language Learning and Teaching: Issues and Trends*. Malang: IKIP Malang Publisher.

-------. 1999e. "Language Education Policy in Indonesia" dalam *Asian Conference on Language Education Policy*, Tokyo, 6-10 Agustus, 1999.

-------. 1999f. "Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing: Tinjauan Dari Sudut Kajian Pemerolehan Bahasa Kedua" dalam *Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA)*, IKIP Bandung, 11-13 Oktober 1999.

Kartono, G. 1976. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia" dalam Halim, A. (ed.), *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

*Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096/1967* tentang Fungsi dan Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris pada Lembaga-lembaga Pendidikan Tingkat Lanjutan dalam Lingkungan Departemen P dan K.

Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

*Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998* tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. (Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: http: //www.dikti.org/pp55.html).

*Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. (Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: http://www.dikti.org/pp56.html).

*Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998* tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. (Dokumen diambil dari situs internet Ditjen Dikti, Depdikbud: http://www.dikti.org/pp57.html).

*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999* tentang Pendidikan Tinggi.

Sadtono, E. 1997. ELT "Development in Indonesia: A Smorgasbord" dalam Sadtono, E. (ed.), *The Development of TEFL in Indonesia*. Malang: The English Department of IKIP MALANG and Bina Budaya Foundation.

*Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 223/U/1998* tentang Kerja sama antar-Perguruan Tinggi.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 9 November 1999 |
| Pukul | : | 14.00--15.00 |
| Judul | : | Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing |
| Penyaji Makalah | : | Nuril Huda |
| Pemandu | : | I Wayan Bawa |
| Pencatat | : | S.R.H. Sitanggang |

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Chaedar Alwasilah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

   Dalam Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 sama sekali tidak disentuh fungsi atau peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab. Wakil dari pesantren atau IAIN pun agaknya juga tidak diundang dalam seminar ini. Padahal, umat Islam, sebagai masyarakat terbesar di Indonesia, "berutang budi" pada pesantren di bidang pengajaran bahasa Arab. Namun, dalam hal ini, para kiai pada umumnya bisa berbicara, memahami, dan menjelaskan sesuatu dalam bahasa Arab, tetapi tidak bisa menulis. Oleh karena itu, jika para kiai itu meninggal dunia, tidak ada karya atau karangan yang ditinggalkan. Hal ini perlu dibenahi dan dibicarakan dalam Seminar Politik Bahasa 1999 ini

2. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

   Bahasa Inggris bukan *bahasa asing utama,* melainkan *bahasa asing pertama.* Saya usulkan agar bahasa Inggris berstatus sebagai *bahasa sekunder,* bukan *bahasa kedua.* Bahasa *pertama* dan *bahasa kedua* adalah istilah psikolingusitik yang mengacu pada urutan pembelajaran. Jika kita mengusulkan bahasa Inggris sebagai bahasa sekunder, tidak semua orang menguasai bahasa Inggris. Jika memungkinkan agar bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi.

   Adakah faktor psikologis mengapa banyak mahasiswa tidak me-

nguasai bahasa Inggris? Mengapa pembelajaran bahasa Inggris tidak berhasil? Apakah ada faktor psikologis, semacam *hidden reason* 'alasan tersembunyi', yang menyebabkan orang Indonesia sulit menguasai bahasa Inggris?

3. Soenardji, Universitas Negeri Semarang

Fungsi bahasa asing, selain sebagai pengembang iptek, saya usulkan, juga berfungsi sebagai sarana pengembang pembudayaan kinerja kebudayaan nasional dan budaya daerah ke arah dunia. Fungsi bahasa Arab, selain sebagai bahasa agama dan bahasa budaya, juga saya usulkan sebagai bahasa asing afektif. Misalnya, jika orang terkejut, dia akan mengatakan *masya allah*. Jadi, fungsi bahasa Arab perlu ditambahkan atau disempurnakan.

4. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta

a. Tampaknya makalah/topik yang disajikan dalam seminar ini, termasuk yang Saudara sajikan, lebih banyak bermuara pada masalah pengajaran bahasa. Topik itu sebenarnya cakupan tugas Pusat Kurikulum, bukan tugas Pusat Bahasa. Pusat Kurikulum seyogianya memanfaatkan hasil penelitian Pusat Bahasa dalam menentukan kurikulum bahasa (Indonesia). Misalnya, berapa jumlah kosakata bahasa Indonesia yang perlu atau yang harus dikuasai oleh anak Indonesia ketika akan masuk sekolah dasar mestinya dapat diupayakan oleh Pusat Bahasa.

b. Perlu saya kemukakan bahwa Pusat Kurikulum tidak menyusun kurikulum atau buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Inggris bagi murid sekolah dasar termasuk muatan lokal. Data yang diperlukan oleh Pusat Kurikulum dalam menyusun kurikulum bahasa Inggris sebaiknya juga disediakan oleh Pusat Bahasa.

5. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Saya tidak setuju jika peningkatan penguasaan bahasa Inggris hanya ditujukan pada mereka yang berada di perguruan tinggi. Bagaimana orang lain yang ingin belajar bahasa Inggris? Pendapat Anda ini sudah pernah kami cobakan di Universitas Syiah Kuala. Dalam

hal ini, calon mahasiswa diwajibkan lulus tes semacam TOEFL 450. Syarat ini saya protes karena banyak kendalanya.

**B. Jawaban**

1. Dalam Seminar Politik Bahasa 1975 memang tidak ada makalah yang secara khusus membicarakan kedudukan pesantren dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Arab di Indonesia. Saya kira, pada masa yang akan datang Pusat Bahasa perlu memikirkan hal ini.

2. Memang ada pakar berkebangsaan Belanda yang memunculkan istilah *bahasa asing pertama,* kemudian istilah itu menghilang dari peredaran. Ada pula yang menyebutkan *bahasa asing resmi.* Dalam dokumen resmi GBHN tidak ada disebutkan mengenai status bahasa Inggris apakah *bahasa kedua* atau *bahasa sekunder.*

3. Fungsi bahasa asing sebagai sarana pengembang pembudayaan dan fungsi bahasa Arab sebagai bahasa asing afektif, saya kira boleh juga. Tetapi, istilah itu masih asing bagi saya.

4. Perguruan tinggi yang saya maksudkan di sini adalah sasaran utama peningkatan penguasaan bahasa Inggris. Dalam praktiknya apakah wajib atau tidak terserah, SD, SLT, atau SLTA juga boleh. Tetapi, perguruan tinggi lebih memungkinkan untuk bersaing dengan negara/orang asing.

5. Jika Anda tidak setuju, silakan, terpulang kepada Anda. Anda dapat memprioritaskan yang lain, SD, SLTP, atau SLTA.

# DINAMIKA SASTRA INDONESIA DAN SASTRA DAERAH

**Edi Sedyawati**

Kebijakan kebahasaan yang diambil dalam suatu negara akan memberikan pengaruh kepada perkembangan sastranya. Kita bangsa Indonesia telah mempunyai suatu kebijakan kebahasaan bahkan sebelum mempunyai negara yang merdeka. "Sumpah Pemuda" yang terkenal itu adalah titik perkembangan yang amat menentukan bagi kehidupan berbahasa dan bersastra dari bangsa Indonesia untuk masa berikutnya. Di samping karya-karya susastra berbahasa Indonesia/Melayu telah berkembang pula esai-esai politik gerakan kebangsaan dengan menggunakan bahasa yang sama sejak sebelum tahun 1928 itu. Kedudukannya jelas sebagai bahasa kebangsaan, sedangkan fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi yang efektif karena, di samping telah dikenal dalam cakupan wilayah yang luas di Indonesia, juga sekaligus penggunaan bahasa ini menjadi pendorong pemupukan semangat persatuan bangsa.

## 1. Sastra Indonesia dan Sastra Daerah: Cakupan Pancarnya

Sastra Indonesia sudah tentu dimaksudkan untuk dibaca (atau didengar) oleh semua orang yang berbahasa Indonesia, jadi secara normatif sama dengan oleh seluruh bangsa Indonesia, ditambah dengan orang-orang berkebangsaan lain yang memahami bahasa Indonesia. Demikian pun sastra daerah, sudah tentu dimaksudkan untuk dibaca (atau didengar) oleh mereka yang memahami bahasa yang bersangkutan. Penikmatan yang paling penuh adalah oleh mereka yang dapat secara langsung menghayati suatu karya sastra dalam bahasa aslinya. Segala nuansa bunyi, serta segala nuansa makna yang terkait dengan pemahaman budaya akan dapat diserap tanpa perantara. Karya-karya sastra itu, baik yang berupa sastra murni, teks dalam pergelaran teater, atau teks dalam musik, sesungguhnya memerlukan apresiator yang paham akan berbagai kaidah sastra atau berbagai segi kebudayaan yang diacunya.

Dalam kenyataan, tidak semua pembaca sastra bersifat kritis, atau ilmuwan bidang-bidang sosial atau budaya yang terkait terikat dengan masalah kaidah dan konteks sehingga, dengan demikian, penerimaannya pun dapat mengandung kesenjangan pemahaman. Bahkan seorang penulis

lain pun dapat menerima suatu karya rekannya (baik dari masa yang sama ataupun berlainan) dengan pemahaman yang tidak lengkap, dan itu kemudian dapat menjelma ke dalam suatu ungkapan dalam karyanya sendiri. Proses pergeseran pemaknaan itulah, melalui kemandirian penuh dari seorang pengarang, yang dapat mengubah komponen-komponen pembangun kebudayaan. Resepsi yang mengubah substansi itu di satu sisi dapat disebabkan oleh ketidakcukupan pemahaman, tetapi di sisi lain juga dapat disebabkan oleh interferensi "bekal siap pakai" yang dibawanya dari kebudayaannya sendiri, yang telah tercetak kuat di dalam dirinya.

Pengalaman budaya seorang warga negara Indonesia dapat amat kaya, apabila ia memang mau memperkaya diri dengan bekal budaya yang ada di sekitarnya. Di samping mewarisi kebudayaan nasional yang masih amat muda ini, ia juga pada umumnya mewarisi salah satu atau dua warisan budaya lokal dari ibu dan bapaknya, atau kakek-neneknya. Di samping itu, masih terbuka pula kemungkinan seseorang belajar bahasa daerah lain di luar yang dipakai oleh keluarganya, sesuai dengan pilihannya sendiri. Ini dapat terjadi dengan mudah, misalnya, apabila penyediaan "bahasa daerah sebagai bahasa kedua" di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi telah terlaksana.

Perluasan daya pancar karya sastra dapat dilakukan melalui terjemahan. Dalam hal ini, khususnya untuk terjemahan karya-karya susastra, diperlukan kompetensi kesusastraan pada diri si penerjemah. Apabila kompetensi kesusastraan dari penerjemah memungkinkan, kualitas kesenibahasaan dari suatu karya dapat dialihkan ke dalam bahasa terjemahannya. Namun, yang terutama dapat dialihkan dengan lebih leluasa adalah arus pemikiran, pembentukan pencitraan, serta tawaran nilai-nilai yang disuguhkan oleh sang pengarang. Penerjemahan pun dapat dilihat sebagai salah satu sarana pembangun jembatan antarbudaya.

## 2. Segi Kelisanan dari Sastra

Pada awal sejarahnya, sastra adalah lisan, karena penemuan dan penggunaan tulisan baru muncul kemudian dalam sejarah kebudayaan manusia, setelah ia menciptakan berbagai teknik untuk menopang kemudahan hidupnya dalam segi-segi kehidupannya yang lain. (Periksa kajian-kajian tentang masa prasejarah). Akar kata *vac* dalam bahasa Sanskerta, yang menurunkan kata "baca" dalam bahasa Melayu/Indonesia, artinya "ber-

kata, mengucapkan". Sastra tradisi pada umumnya sangat bertumpu pada kelisanan karena di sanalah terletak aktualitasnya. Kaidah-kaidah irama bunyi serta bangunan-bangunan metrum pada puisi, sampai kepada kaidah-kaidah berkenaan dengan ragam suara (baik berkenaan dengan warna maupun kualitasnya) pada berbagai bentuk teater tradisi, semua itu hanya akan berarti ketika telah diwujudkan dalam ungkapan lisan. Penulisan hanyalah suatu media, suatu upaya penyimpanan, untuk menjembatani ruang dan waktu. Untuk keperluan itu telah diciptakan aneka teknik berkenaan dengan penyediaan dalam sistem aksara tertentu. Keanekaan dalam sistem aksara ini, serta keanekaan dalam medium dan/atau tulisnya, membuat penikmatan sastra lebih sulit diraih oleh orang dari kebudayaan yang berbeda karena harus lebih dahulu melewati lapis demi lapis penyingkapan hambatan pengenalan (naskah, aksara, bahasa, kaidah-kaidah sastra).

Penikmatan sastra dalam wujud lisan akan dapat dinikmati paling sempurna dalam kesempatan tatap muka. Namun, perantaraan media pun perlu diperhitungkan secara serius karena dengan itu cakupan penikmatnya akan dapat lebih luas. Dewasa ini sudah ada beraneka macam medium yang dapat digunakan: di samping piringan hitam dan kaset, sudah ada pula *compact disc*, dan untuk audiovisual, di samping film ada pula video dan VCD, bahkan semua itu juga dapat lewat internet.

Apresiasi sastra dalam ungkapan lisan juga akan membawakan penghargaan kepada ucapan yang benar dari suatu bahasa. Kita memang harus mengakhiri 'kesewenang-wenangan' kolonial, misalnya, dalam mengucapkan nama-nama dalam bahasa setempat. Perhatikan misalnya ucapan-ucapan salah-kaprah dari nama-nama seperti Cirebon (jadi Cheribon), Butun (jadi Buton), Sala (jadi Solo), Maluku (jadi Molucca), dan seterusnya.

### 3. Menuju Persatuan

Kekayaan khasanah sastra Indonesia, baik "sastra nasional" yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun "sastra daerah" yang ditulis dalam bahasa-bahasa suku bangsa, di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersatu, dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai milik bersama. Kita tak perlu lagi mempertahankan kotak-kotak pemilikan berdasarkan keturunan. Kalau kita tertarik pada sastra Bugis-Makassar, misalnya, mes-

kipun kita berasal dari Tapanuli, seharusnya tidak ada hambatan untuk mendekati, mempelajari dan kemudian merasakannya sebagai miliknya juga. Demikian pula daya pukau karya-karya sastra lama seharusnya terbuka bagi siapa pun yang berminat, tanpa mempersoalkan asal-usul kesukubangsaannya. Dengan demikian, sastra Jawa Kuna dan sastra Melayu Kuna adalah juga sastra Indonesia Kuna.

Sejumlah ungkapan yang mengandung nilai sastra, yang berasal dari lingkup kebahasaan suku-suku bangsa yang bermacam-macam ini di Indonesia perlu pula dipopulerkan sehingga dapat menjadi kutipan-kutipan cantolan, sebagaimana ungkapan-ungkapan dari bahasa Latin dan Yunani banyak digunakan dalam pembicaraan orang di Eropa. Kita pun bahkan telah banyak ikut menggunakan ungkapan Latin seperti *homo sacra res homini, homo homini lupus, sic transit gloria mundi, veni vidi vici*, dan lain-lain, di samping ungkapan dalam bahasa Sanskerta seperti *tat twam asi* (di sini terdapat penyempitan konteks dari wacana aslinya). Ungkapan-ungkapan dari bahasa daerah di Indonesia itu masih harus dicari dengan kesengajaan yang intensif. Buku kumpulan ***peribahasa*** (Melayu) yang pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka itu kiranya perlu diterbitkan ulang, dan himpunan ungkapan dari bahasa-bahasa lain harus menyusul. Sebagai contoh ungkapan yang dapat diusulkan untuk dipopulerkan adalah

*marsipature hutanabe* (Batak), yang artinya "membangun desa sendiri";

*riwawoki tennarumpu, riyawaki tennatetting* (Makassar), yang artinya "di atas tak terasapi, di bawah tak tertetesi";

*tennamaqdimEng ttuo apinna, nabaloboi auE mata* (Bugis), yang artinya "api tak kunjung menyala, disirami air mata";

*punjul ing apapak, mrojol ing akerep* (Jawa), yang artinya "menonjol pada yang rata, lolos pada yang rapat", maksudnya unggul dibandingkan dengan yang umum;

*labu rope labu wana* (Wolio, Butun), yang artinya "berlabuh haluan berlabuh buritan";

dan lain-lain yang masih harus dicari.

Demikianlah sekadar saran yang dapat saya sampaikan ke hadapan forum yang terhormat ini. Semoga sejumlah harapan ini dapat menjadi kenyataan di waktu mendatang.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Selasa, 9 November 1999
Pukul : 15.15--16.15
Judul : Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah
Penyaji Makalah : Edi Sedyawati
Pemandu : Nafron Hasjim
Pencatat : Sri Sayekti

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta
   a. Jika dilihat dari sudut kurikulum, peningkatan pengajaran sastra di sekolah masih perlu diperhatikan karena para sastrawan pun sulit menentukan bahan ajar yang dipilih dari hasil sastra puncak atau jenis sastra yang merupakan karya puncak untuk diajarkan di tingkat SD--SMU.
   b. Pengajaran sastra lewat video atau VCD jangan dianjurkan untuk dilaksanakan di sekolah.
   c. Perlu ditingkatkan pengenalan sastra lisan dari berbagai daerah agar sastra lisan itu dilestarikan atau dapat dinikmati secara nasional, seperti karya *Mahabarata* agar dapat dinikmati oleh orang Irian.
   d. Peribahasa Jawa sudah ada dan telah dibukukan, sebaiknya peribahasa dari daerah lain pun perlu disusun dan diterbitkan.

2. Chaedar Alwasilah, Univesitas Pendidikan Indonesia, Bandung
   a. Tampaknya selama ini ada hal yang tidak benar dalam membudayakan pengapresiasian sastra daerah ataupun sastra Indonesia di kalangan sekolah sehingga Ibu Edi mempunyai kecurigaan tentang karya sastra, baik yang berupa sastra murni, teks dalam pergelaran teater, maupun teks dalam musik memerlukan apresiator yang paham akan berbagai kaidah sastra atau berbagai segi kebudayaan. Mohon tanggapan Ibu Edi.
   b. Mengapresiasi sastra tidak hanya mengetahui kaidah-kaidah sastra, seperti Abdul Muis lahir di mana dan siapa pengarang novel

*Layar Terkembang?* Pendefinisian seperti itu yang telah biasa diajarkan di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan pengajaran di negara-negara Barat, kita telah ketinggalan cara mengajarkan apresiasi sastra. Karena negara-negara Barat telah mempunyai pemahaman yang baik, misalnya, Jerman memperkenalkan musik sedini mungkin sehingga anak didik mampu memiliki rasa sensitif pada bunyi-bunyi musik dan bukan mengajarkan kaidah-kaidah musik.

3. Dede Oetomo, Universitas Airlangga, Surabaya
   a. Karya-karya puncak itu siapa yang menentukan karena kalau yang menentukan salah seorang pengarang maka pengarang yang lain akan merasa karyanya tidak diperhatikan dan bahkan akan marah jika karyanya tidak terpilih.
   b. Dalam menentukan atau memilih karya-karya puncak sebaiknya mengacu pada pendapat Ariel Heryanto, yaitu karya sastra puncak adalah karya sastra yang dikanonkan atau karya sastra yang telah mendapat penghargaan/hadiah.
   c. Menyarankan/mengusulkan ke Jaksa Agung agar mencabut dan meninjau ulang larangan bagi sastrawan yang karyanya cukup baik untuk dibaca atau dipasarkan, misalnya buku-buku hasil karya Pramoedya Ananta Toer.
   d. Perlu ditinjau dan diperhatikan perkembangan sastra, yaitu sastra pop atau picisan yang berbahasa Melayu Tionghoa karena karya-karya sastra seperti itu mempunyai kaitan atau hubungan dengan perkembangan sastra Indonesia. Sastra pop atau sastra picisan berbahasa Tionghoa itu banyak diterbitkan dan berkembang di Medan pada tahun 1950-an.
   e. Peningkatan apresiasi sastra bisa dilafalkan lewat internet, misalnya suatu teks dapat diubah dan dilihat ditelusuri dari mana sumbernya.

4. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok
   a. Bagaimana realisasinya agar sastra daerah yang berasal dari suatu daerah dapat dinikmati oleh masyarakat dari daerah lain, seperti sastra Bugis dapat dinikmati oleh orang Tapanuli.
   b. Daya tarik karya sastra itu seperti apa? Kalau karya sastra itu ber-

mutu, pembaca akan tertarik membacanya/menikmatinya. Apa yang harus dilakukan agar hambatan itu tidak ada?

5. Koesnadi Hardjosoemantri
   a. Dari segi hukum, saya merasa tidak mengerti masalah sastra. Untuk itu, dalam kurikulum sebaiknya dicantumkan materi sastra.
   b. Bagaimana perkembangan dinamika sastra daerah, apakah perlu penyeleksian melalui tim dan setiap daerah mempunyai satu kumpulan sastra daerah yang baik.
   c. Penghargaan karya sastra *Rancaege* yang diselenggarakan oleh Ajip Rosidi perlu ditingkatkan ke semua sastra daerah, tidak hanya sastra Sunda, Jawa, dan Bali.
   d. Sewaktu menjabat Ditjen Dikti saya memelopori agar di perguruan tinggi diajarkan Ilmu Budaya Dasar sehingga mahasiswa mengenal berbagai budaya daerah.

6. Abdul Rozak Zaidan, Pusat Bahasa
   a. Seminar ini hendaknya mempertimbangkan peninjauan kembali pelarangan buku-buku.
   b. Kesan memahami bahasa merupakan peluang untuk memahami sastra, berarti bahwa setiap orang yang memahami bahasa bisa memahami sastra. Kesan seperti itu tidak benar. Bagaimana upayanya agar orang yang memahami bahasa itu juga memahami sastra?

7. I Wayan Bawa, Universitas Udayana, Denpasar
   a. Bagaimana interaksi antara dinamika sastra Indonesia dan sastra daerah dan kaitannya dengan undang-undang otonomi daerah karena daerah telah mengakuinya?
   b. Apa peran lembaga pusat mengenai sastra daerah, apakah lembaga pusat hanya membuat/menyusun patokan-patokan dan daerah yang merealisasikannya?

**B. Jawaban**

1 a. Penyebarluasan sastra lisan melalui TV ataupun VCD tidak harus dipaksakan atau diterapkan di sekolah. Maksudnya penyebaran

sastra lisan melalui TV dan VCD seperti itu agar masyarakat umum mendapatkan isi/materi-materi berbagai kebudayaan. Karena industri budaya kita telah dibanjiri industri budaya Barat, harus ada pembelaan untuk membantu warga negara Indonesia agar mendapatkan materi yang baik untuk diajarkan pada anak-anak.

b. Sebaiknya setiap pakar/sastrawan daerah mampu menentukan sendiri atau memilih sastra daerahnya yang menonjol dan diajarkan di sekolah, seperti *Serat Lagaligo,* ada teks asli dan ada terjemahannya.

c. Peribahasa dari berbagai daerah sebaiknya perlu disusun dan diterbitkan, baik oleh penerbit swasta maupun penerbit pemerintah.

2. Kecurigaan yang Saudara Chaedar Alwasilah lontarkan pada saya itu ternyata salah alamat. Maksud saya, dalam mengapresiasi sastra guru tidak hanya memperkenalkan definisi-definisi, tetapi perlu memperkenalkan metafora/hiperbola yang terkandung dalam karya sastra daerah. Bukankah sastra daerah mempunyai nilai estetis dan sastra daerah juga mempunyai gaya-gaya bahasa atau ungkapan yang sangat baik dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah.

3 a. Penentu karya-karya puncak sebaiknya adalah lembaga kepakaran seperti dalam undang-undang tentang kebudayaan. Untuk menentukan puncak kebudayaan selalu dilihat dan diperhatikan dari mana sumbernya. Selain itu, bisa diperhatikan juga dari segi historis.

b. Sastra picisan mewakili suatu sisi yang bisa berbeda dengan sisi orang lain. Kita mempunyai institusi pendidikan yang mampu memberikan landasan nilai-nilai. Apabila tidak ada landasan nilai, orang akan jatuh pada penilaian sesuka hatinya dan ada unsur suka tidak suka pada diri orang lain.

4. Hal itu sulit kita laksanakan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengatasinya. Langkah pemikiran bahasa daerah sebagai bahasa kedua diharapkan akan muncul dari ahli-ahli bahasa setempat, seperti

saudara Mahsun telah menulis bahasa Sasak dengan varian-varian dialek. Bahan ajar ini bisa diajarkan di daerah lain, seperti di Tapanuli atau di daerah yang lain sehingga ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi peserta didik mampu menulis dalam bahasa daerah.

5. Mengimbau masyarakat agar mengetahui bagaimana mengapresiasi sastra dan meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai sastra daerah. Satu bangsa yang telah memiliki apresiasi yang baik terhadap karya seni, termasuk sastra seni, adalah masalah gengsi, seperti melihat atau menyaksikan suatu opera berarti orang itu sudah berbudaya.

6 a. Larangan buku-buku perlu disampaikan pada lembaga yang berkaitan.
   b. Yang dikehendaki masyarakat saat ini adalah buku-buku bagus dan harganya dapat dijangkau (tidak terlalu mahal) sehingga merangsang untuk membaca dan mendiskusikan. Hal ini dapat dimulai dalam keluarga karena dasar pendidikan apresiasi bermula dari keluarga. Jika anak-anak sejak kecil sudah dibiasakan menonton wayang, setelah dewasa dapat mendiskusikan peran-peran tokoh dalam perwayangan.

7. Lembaga Pusat merupakan penggerak kebijakan atau strategi agar daerah tidak terjatuh ke dalam pandangan yang sempit tentang kedaerahan dan dapat saling mengaitkan dengan daerah lain.

# PENELITIAN BAHASA DALAM KERANGKA POLITIK BAHASA

**Dédé Oetomo**
dengan bantuan
**Luita Ariwibowo, S.S.**

## 1. Perkembangan Penelitian Bahasa Sejak 1974—1975

Sejak Praseminar dan Seminar Politik Bahasa Nasional terakhir, sebelum pertemuan serupa saat makalah ini dibentangkan, yang masing-masing diselenggarakan pada 29—31 Oktober 1974 dan 25—28 Februari 1975 (Halim, 1976a, 1976b), telah banyak dilakukan penelitian bahasa, baik yang terencana berdasarkan rumusan seminar maupun terlaksana berdasarkan inisiatif spontan dari peneliti atau lembaga penelitian. Di sini tidak akan diuraikan perkembangan itu secara terperinci, karena mengenai itu telah banyak disusun tulisan yang amat lengkap, seperti Sudaryanto (1993), Kaswanti Purwo (1994), Masinambow (1998), Kaswanti Purwo (1999), dan Wahab (1999). Yang akan dikemukakan di sini adalah apa-apa yang belum disampaikan dalam karya-karya terdahulu itu, dan kemudian apa-apa yang perlu dilaksanakan dalam penelitian bahasa di dalam kerangka politik bahasa yang akan dirumuskan ke depan.

Marilah kita tinjau dahulu apa-apa yang telah dikemukakan oleh beberapa penulis tadi. Wahab (1999), umpamanya, dengan menggunakan kerangka kategori aliran, aspek, pendekatan, dan cabang linguistik, membandingkan 99 laporan penelitian linguistik mikro (umum) dari 22 perguruan tinggi dan Pusat Bahasa antara tahun 1984 dan 1989 dengan 118 laporan penelitian dari lembaga-lembaga yang sama pada kurun waktu 1994—1999. Disimpulkan bahwa

> kajian linguistik di Indonesia tidak menunjukkan adanya perkembangan, ditinjau dari segi linguistik, aspek linguistik, maupun pendekatan yang dipakai untuk menganalisis fenomena bahasa. Dari sudut aliran linguistik, perhatian kajian linguistik di Indonesia masih terpaku pada Aliran Deskriptivis Struktural; dari segi aspek linguistik, kajian masih didominasi oleh minat

terhadap sintaksis; perhatian terhadap semantik yang kecil itu masih terbatas pada semantik leksikal, dan dari segi pendekatan, analisis bahasa masih belum beranjak dari pendekatan struktural yang behavioristis yang terkenal dengan miskinnya ketuntasan penjelasan (*explanatory adequacy*) itu (hal. 13—14).

Sudaryanto (1993) membatasi diri pada penelitian bahasa di dalam negeri serta mengambil kurun waktu dari awal abad ke-20 dan memusatkan perhatian kepada para peneliti berpendidikan formal kebahasaan (mengingat, menurut dia, jumlah peneliti yang bermodalkan ketekunan diri dan autodidak sedikit sekali sehingga dapat diabaikan). Untuk kurun sesudah Praseminar dan Seminar Politik Bahasa Nasional 1974 dan 1975, dia mencatat tahun 1975 sebagai awal tahapan baru dalam perkembangan penelitian bahasa di dalam negeri. Catatan ini didasarkan pada penelusuran perkembangan penelitian linguistik di Indonesia berdasarkan empat peristiwa penting, yakni (1) promosi doktor-doktor linguistik di dalam negeri (kelompok Leiden karena berpromotor profesor dari Universitas Negeri Leiden, dan juga kelompok di luar itu); (2) pendirian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974, yang selain mengorganisasi kegiatan penelitian bahasa, juga menyiapkan tenaga kebahasaan dalam jumlah cukup besar; (3) pendirian Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) pada 15 November 1975; dan (4) peluncuran seri *Nusa: Linguistic Studies on Indonesian and Languages in Indonesia*. Dalam kerangka empat institusi itu dan institusi lain semacam pertemuan tahunan Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya (PELLBA), menurut Sudaryanto penelitian bahasa di dalam negeri cenderung didorong oleh lembaga, bukan oleh inisiatif perseorangan. Dengan perkataan lain, para peneliti bahasa cenderung melaksanakan kegiatannya karena pancingan dari lembaga-lembaga yang ada.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Kaswanti Purwo (1999) yang menyebutkan Kongres Linguistik Nasional, acara nasional pokok MLI, sebagai momentum yang membuat orang menyusun dan menyerahkan makalah untuk dibentangkan. Dia juga menambahkan pentingnya program ILDEP (*Indonesian Linguistics Development Project*) yang lahir tahun 1974, dan menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku, pelatihan tenaga linguistik, dan pendidikan doktor. Kemudian, dari segi substansi

penelitian linguistik, berdasarkan makalah-makalah pada kegiatan MLI dan disertasi linguistik di Universitas Indonesia, Kaswanti Purwo menengarai sintaksis sebagai aspek yang secara mencolok menduduki peringkat paling atas walaupun, apabila ditengok, dalam dimensi perkembangan waktu, terjadi pemerataan antara sintaksis dan empat bidang besar lainnya, yakni sosiolinguistik, semantik, linguistik historis-komparatif, dan pengajaran bahasa. Yang penting dari uraian Kaswanti Purwo adalah usaha merekam kegiatan antardisipliner (linguistik dan neurologi, linguistik dan ilmu komputer) yang sempat dirintis.

Akhirnya, Masinambow (1998), kembali berdasarkan tinjauan terhadap disertasi-disertasi yang pernah ditulis selama ini, menyimpulkan bahwa rata-rata linguis Indonesia secara konsisten menggunakan paradigma teoretik Bloomfield dan neo-Bloomfieldian, walaupun para pendahulunya lebih menggunakan pendekatan berorientasi bahasa dan budaya. Dari segi bahasa yang dikaji, selain bahasa Indonesia sendiri, bahasa-bahasa etnik mayoritas lebih banyak dikaji, walaupun jumlah bahasanya jauh lebih sedikit daripada bahasa-bahasa etnik minoritas, yang jumlah bahasanya jauh lebih banyak. Dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain tadi, tulisan Masinambow ini berbeda secara signifikan karena diakhiri dengan prospek pengembangan linguistik ke arah keterkaitannya dengan ilmu-ilmu sosial (sosiolinguistik) di satu pihak, dan di pihak yang lain dengan ilmu-ilmu kognitif (antropologi kognitif). Dalam kaitannya dengan itu, dipersoalkan keterpaduan kajian terhadap bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah/etnik.

**2. Menengok Suatu Pendekatan yang Lebih Holistik dan Makro**

Tinjauan-tinjauan umum tadi cenderung memberikan gambaran perkembangan penelitian bahasa di Indonesia yang berat pada apa yang lazim disebut pada linguistik Mikro (Kridalaksana 1984: xxix). Dari linguistik makro, umumnya sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pengajaran bahasalah yang menonjol. Perlu dicatat bahwa rata-rata penelitian bahasa dengan pendekatan sosiolinguistik terbatas pada apa yang oleh Coulmas (1998) dinamakan sosiolinguistik mikro. Sementara itu, banyak pihak di luar kalangan linguis menulis juga karya-karya ilmiah mengenai bahasa dalam kaitannya dengan ekonomi, masyarakat, budaya, politik dan filsafat. Karya-karya ini dapat digolongkan dalam sosiolinguistik makro.

Dua antologi utama yang dapat disebutkan dalam kategori ini adalah Anderson (1990) dan Latif dan Ibrahim (1996).[1]

Yang patut dicatat adalah bahwa tulisan-tulisan seperti yang dikumpulkan dalam kedua antologi itu cenderung tidak dikenal oleh para linguis ataupun sosiolinguis mikro kita. Padahal dari segi penjaringan realitas kehidupan sosial-politik di negeri ini, terutama di bawah rezim Orde Baru, karya-karya seperti itu dengan jitu menganalisis bagaimana bahasa bukan cuma alat komunikasi belaka, melainkan merupakan sarana pembentukan realitas sosial dan monopoli kebenaran, pelestarian kekuasaan negara, dan kontrol terhadap bahasa dan penggunaan bahasa rakyat. Juga tampak bahwa rakyat tidak begitu saja menyerah di dalam kesesakan kehidupan bahasa seperti itu: rakyat dapat mengadakan pelawanan (resistensi) dengan mengatur sendiri bahasa dan penggunaan bahasanya, seperti melalui plesetan, untuk menyebut satu contoh saja.

Meminjam dari konseptualisasi dalam ilmu-ilmu sosial, para linguis kita kebanyakan menggunakan ancangan esensialis (hakiki) dalam mengkaji bahasa, yaitu mendekatinya seakan bahasa adalah sesuatu yang terberi (*given*), netral, tak terlibat dalam hubungan kuasa dan sarat dengan muatan sejarah. Yang terakhir ini lebih merupakan ancangan dari kubu konstruktivis. Ancangan inilah yang tampak dalam tulisan-tulisan dalam kedua antologi yang disebutkan tadi.

Apabila ditengok dari sudut pandang konstruktivis, dapatlah secara global dikatakan bahwa sebagian terbesar kajian bahasa dalam kerangka linguistik mikro mengandaikan suatu objek kajian yang utuh, stabil, dan berbatas. Kenyataan menunjukkan bahwa pengandaian itu memanglah merupakan pengandaian belaka. Keanekaragaman, kedinamisan, dan saling tumpang-tindih antarbahasa atau antarragambahasa, acapkali dikesampingkan sebagai hal-hal yang mengganggu kerapian deskripsi. Padahal kalau direnungkan, barangkali bahasa-bahasa dan penggunaannya dalam masyarakat dan komunikasi-komunikasi di Indonesia memerlukan pendekatan teoretik yang memperhitungkan sifat-sifat itu.

Sebagian dari pengandaian bahwa bahasa itu berbatas tegas dengan bahasa lain menghasilkan kajian-kajian yang amat terpengaruh oleh hegemoni nasionalisme negara. Sepatutnya dapat dipertanyakan apakah sudah benar adanya pembagian tegas antara "bahasa asing", "bahasa Indonesia", dan "bahasa daerah". Dalam ideologi politik negara mungkin hal

seperti itu pernah dan masih punya tempat, tetapi dalam ancangan penelitian kiranya perlu ditinggalkan jauh-jauh pembagian yang kaku seperti itu. Untuk memberikan contoh, dapat dipersoalkan status dialek atau bahasa-bahasa seperti bahasa (dialek?) Minang dan bahasa (dialek?) Palembang dan masih banyak dialek-dialek Melayu yang lain. Juga interaksi antara bahasa-bahasa Tionghoa dan bahasa-bahasa Austronesia yang digunakan oleh komunitas-komunitas di busur imajiner di seputar Singapura, mulai Medan dan sekitarnya, Riau daratan ataupun kepulauan, dan Kalimantan Barat. Bagaimana pula dengan bahasa dan penggunaannya di kalangan tenaga kerja migran kita di Malaysia, misalnya, yang menggunakan bahasa tempat asalnya (bahasa Jawa, Madura dsb.) dan bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia.

Kenyataan bahwa kebanyakan linguis yang berpendidikan formal adalah anggota kelas burjuis yang acapkali menyebabkan kita mempunyai pandangan yang elitis dalam memilih ragam mana yang akan kita teliti. Memang belakangan ini dalam diskursus di seputar pemetaan bahasa Nusantara, ada kesadaran akan perlunya mengenal sesama warga Indonesia yang tidak dari kelas kita sendiri, yang kiranya menuturkan dan menggunakan ragam bahasa yang berbeda, tetapi tetap sah untuk dikaji.

**3. Transisi Menuju Demokrasi: Pandangan dan Langkah ke Depan**

Tumbangnya rezim Orde Baru, yang merupakan tonggak penting dalam perjuangan merintis demokratisasi di masyarakat dan negeri kita, tampaknya juga berpengaruh di dalam membongkar hegemoni negara Orde Baru dalam pendekatan penelitian bahasa.

Dalam kerangka ini, patut dipertanyakan apa peran politik bahasa yang ditentukan oleh suatu badan negara seperti Pusat Bahasa. Apabila dalam suatu negara represif, lembaga seperti Pusat Bahasa secara struktural menjadi sarana kontrol hegemonik, dalam suatu negara yang lebih demokratik, peran apakah yang masih dapat dilakukannya?

Patut diingat bahwa lembaga ini sudah mulai dipertanyakan pada akhir tahun 1980-an, seiring dengan mulai melemahnya negara Orde Baru. Kinilah saatnya menata kembali lembaga ini kembali pada keperluan yang lebih menguatkan masyarakat kewargaan (*civil society*) dengan meletakkan negara pada proporsinya sebagai fasilitator, koordinator dan sistem penunjang belaka.

Dengan berpikiran demikian, maka makin pentinglah peran Pusat Bahasa (ataupun lembaga yang mungkin nantinya dibentuk menggantikannya) dalam melakukan penelitian bahasa, dengan pengertian bahwa penelitian merupakan usaha negara menjaring realitas di kalangan masyarakat kewargaan atau memberikan kesempatan untuk suatu usaha penyusunan wawasan kebahasaan yang lebih dari bawah.

Yang saya visikan adalah suatu badan independen yang terdiri dari komponen pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan dalam penelitian dan pengembangan bahasa, yang sebetulnya juga sudah muncul dalam rekomendasi Kongres Bahasa 1998. Mengikuti rekomendasi dari Konferensi Bahasa Nusantara di Jakarta, 18—19 Oktober 1999, dapat saja lembaga ini sekaligus memikul tanggung jawab menyediakan pustaka yang menguatkan masyarakat kewargaan dalam berbagai bidang kebahasaan (dan kiranya juga kesusastraan dan kesenian).

Peluruhan monopoli autoritas penelitian pada badan-badan negara kiranya akan mendorong para genius lokal untuk muncul dengan berbagai karya penelitian bahasa yang dapat saja dikonsultasikan kepada para pakar teori dan metode untuk menjaga kualitasnya.

Dalam hal kaitan bahasa dengan hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, patut kiranya diingat bahwa bahasa merupakan penyerta segala seluk-beluk rumit dari aspek-aspek itu dalam masyarakat dan komunitas. Penelitian penggunaan bahasa oleh media, yang sedang giat dilakukan oleh lembaga seperti Institut Studi Arus Informasi, dengan menggunakan teori dan metode dari analisis wacana, patut disambut gembira dan diperluas sehingga media massa benar-benar menjadi pilar keempat demokrasi (*the Fourth Estate*) yang menguatkan masyarakat kewargaan dengan menjadi alat kontrol pemerintah yang efektif.[2]

Karya-karya mutakhir macam Kuipers (1998) dan Errington (1999) perlu lebih banyak kita lakukan untuk memahami peliknya persoalan antargolongan dalam tingkatan yang paling mikro sekalipun, sesuatu yang merupakan tugas berat kita bersama dalam menuju Indonesia Baru yang penuh damai, saling pengertian dan saling penerimaan di antara berbagai golongan yang ada, yang sengaja dipecah-pecah dan direpresi oleh rezim Orde Baru.[3]

**4. Rekomendasi**

Dengan mempertimbangkan pokok-pokok di atas, dalam makalah ini saya ingin merekomendasikan hal-hal berikut, untuk pelaksanaan penelitian bahasa dalam kerangka politik bahasa di Indonesia.

a. Bahasa dan ragam bahasa sepatutnya dipandang bersifat dinamis, fleksibel, tidak senantiasa berbatas jelas, dan amat mungkin saling bertumpang-tindih dan mempengaruhi.
b. Bahasa dan ragam bahasa yang diteliti perlu diperlakukan secara holistik dalam kaitannya dengan penuturnya, serta konteks ruang, waktu, dan sosial penggunaannya.
c. Berbagai ragam bahasa yang ada, berdasarkan kelas, etnisitas, agama, generasi, dan afiliasi sosial lainnya, perlu diperhatikan semuanya, tanpa sektarianisme apa pun. Hal ini lebih penting lagi mengingat apa yang direkomendasikan pada Konferensi Bahasa Nusantara, yaitu bahwa bahasa-bahasa yang ada di negeri ini merupakan peta bagi kerumitan sosial-budaya-politik yang ada di berbagai komunitas.
d. Bahasa dan penggunaannya perlu diperhatikan dalam kerangka dinamika global, nasional, dan lokal, termasuk kian meningkatnya migrasi transnasional dan translokal pada masa kini.
e. Mengingat sejarah traumatik hegemoni negara pada masa Orde Baru, perlu dikhususkan suatu bidang kajian yang menguatkan masyarakat kewargaan dalam menghadapi penggunaan bahasa hegemonik di masa mendatang.
f. Peneliti bahasa tidak harus senantiasa berpendidikan formal linguistik. Lembaga yang mendapatkan mandat melaksanakan politik bahasa dapat merupakan suatu pusat sumber daya (*resource center*) di berbagai tingkatan untuk siapa pun yang tertarik pada penelitian bahasa, belajar dan berbagi pengalaman.
g. Perlu dijalin kerja sama inter- dan multidisipliner dengan berbagai ilmu lain, seperti ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kognitif.
h. Peran media cetak dan elektronik yang kian besar patut diakrabi sehingga penggunaan bahasa dalam media bukan lagi menjadi alat kontrol hegemonik negara, melainkan merupakan sarana penguatan masyarakat kewargaan.
i. Kian tersedianya sarana komunikasi elektronik (surat elektronik dan milis, situs web, dsb.) patut segera dimanfaatkan untuk menyusun

pangkalan data yang canggih dan menyeluruh, sehingga setiap saat keadaan penelitian bahasa dapat dipantau dan datanya dimanfaatkan oleh siapa pun yang memerlukan.

**Catatan:**

[1] Masih banyak lagi karya lain dalam kategori ini, misalnya Siegel (1997). Di sini tidak ada pretensi memberikan senarai yang lengkap dari karya-karya itu, mengingat keterbatasan ruang lingkup kita.

[2] Komunikasi pribadi, Hotman M. Siahaan.

[3] Khusus tentang butir ini, saya berutang budi pada James T. Collins yang menunjukkan ancangan yang digunakan oleh kedua penulis ini pada Konferensi Bahasa Nusantara, Jakarta, 18—19 Oktober 1999, dan dalam perbincangan sesudahnya.

## Daftar Pustaka


Anderson, Benedict R.O.G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca & London: Cornel Univ. Press.

Coulmas, Florian, Peny. 1998. *Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell.

Errington, J. Joseph. 1999. *Shifting Language: Interaction and Identity in Javanese Indonesia*. New York: Cambridge Univ. Press.

Halim, Amran, Peny. 1976a. *Politik Bahasa Nasional*, Jil. 1. Jakarta: Balai Pustaka.

-------, Peny. 1976b. *Politik Bahasa Nasional*, Jil. 2. Jakarta: Balai Pustaka.

Kaswanti Purwo, Bambang. 1994. "Penelitian Bahasa Indonesia". Makalah Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 28 November—1 Desember.

------- 1999. "Pidato Ilmiah Ketua MLI 1997—1999". Kongres Linguistik Nasional 1999. Jakarta, 28—31 Juli.

Kridalaksana, Harimurti. 1984. *Kamus Linguistik*, ed. ke-2. Jakarta; Gramedia.

Kuipers, Joel C. 1998. *Language, Identity, and Marginality in Indonesia: The Changing Nature of Ritual Speech on the Islam of Sumba*. New York: Cambridge Univ. Press.

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, Peny. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

Masinambow, E.K.M. 1998. "Linguistik di Indonesia: Perkembangan Studi terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa-Bahasa Nusantara," *Masyarakat Indonesia XXIV*: 2, hal. 175—204.

Siegel, James T. 1997. *Fetish, Recognition, Revolution*. Princeton: Princeton Univ. Press.

Sudaryanto. 1993. "Penelitian Bahasa Indonesia di Dalam Negeri: Kiprahnya dan Prospeknya: Sebuah Refleksi dan Tinjauan Selayang" dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*, hal. 609—617. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wahab, Abdul. 1999. "Perkembangan Kajian Linguistik di Indonesia" dalam *Buku Panduan Kongres Linguistik Nasional IX 1999*, Jakarta, 28—31 Juli.

# LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Selasa, 9 November 1999
Pukul : 15.30—16.30
Judul Makalah : Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa
Penyaji Makalah : Dede Oetomo
Pemandu : Husni Muadz
Pencatat : Slamet Riyadi Ali

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Zainuddin Taha, Universitas Negeri Makassar
   a. Penelitian sosiolinguistik yang bersifat holistik dan mikro, saya sependapat dengan pemakalah. Untuk itu, penelitian dengan menggunakan pendekatan itu sangat penting dan perlu mendapat perhatian.
   b. Paradigma/pendekatan penelitian ke depan perlu spektrum yang lebih luas. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana penelitian-penelitian bahasa dapat lebih terdesentralisasi, bagaimana agar penelitian-penelitian bahasa mengubah paradigma dari atas menjadi paradigma dari bawah yang sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat secara luas, serta bagaimana menjadikan objek bahasa sebagai objek yang dinamis.
   c. Kelembagaan kebahasaan, semacam Pusat Bahasa, berfungsi sebagai perumus kebijakan makro, lebih berfungsi sebagai fasilitator penelitian, pengajaran, dan pangkalan data. Pusat Bahasa tidak sebagai pelaku, sebagai peneliti bahasa, tetapi diserahkan kepada instansi-instansi di luar Pusat Bahasa.

2. Mansoer Pateda, IKIP Gorontalo
   a. Penelitian bahasa dalam rangka politik bahasa, dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama strategi penyiaran hasil penelitian dalam bentuk majalah dan kedua strategi penyiaran hasil penelitian bahasa dan sastra dalam bentuk buku.

b. Kelembagaan kebahasaan, seperti Pusat Bahasa, selain sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana penelitian.

3. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
   a. Format penelitian bahasa hendaknya ada keluwesan sehingga peneliti dapat mengeluarkan terobosan ide-ide yang berbeda.
   b. Jumlah halaman terbitan penelitian hendaknya ditinjau kembali.

4. Soenardji, Universitas Negeri Semarang
   a. Perlu dipertegas kedudukan penelitian bahasa dalam politik bahasa.
   b. Penelitian yang bersifat inter- dan multidisipliner saya dukung sepenuhnya karena mempunyai kedudukan yang penting.
   c. Perlu dipikirkan membangun konsep penelitian bahasa dan sastra khas Indonesia.

5. D.P. Tampubolon, Universitas Sumatera Utara, Medan
   a. Pertegas pengertian istilah linguistik mikro dan makro.
   b. Aspek penelitian bahasa pada umumnya lebih pada pendekatan rasional, kurang sekali pada pendekatan emosional. Untuk itu, penelitian yang ideal adalah penelitian lebih pada kecerdasan rasional sekaligus emosional.
   c. Kelembagaan Pusat Bahasa: (1) status sebagai lembaga independen; (2) fungsi: nara sumber kebahasaan dan kesastraan untuk warga negara dan lembaga negara; (3) tugas pokok: penelitian.

6. Mien A. Rifai, Herbarium Bogoriense, Bogor
   a. Penelitian Pusat Bahasa selama ini masih bersifat *in house*. Untuk itu, Pusat Bahasa perlu menawarkan penelitian masyarakat luas yang bersifat kompetitif dan nasional.
   b. Penelitian bahasa perlu diarahkan pada penelitian yang bersifat lintas bidang ilmu.
   c. Perlu membina sistem pengkajian ulang terhadap penelitian yang telah dilakukan, kemudian dimuat dalam majalah yang penyebarannya menjangkau seluruh dunia.

7. Soeseno Kartomihardjo, Universitas Negeri Malang

   Sependapat dengan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh pemakalah. Untuk itu, para linguis perlu mempelajari disiplin bidang ilmu lain sehingga tuntutan sosiolinguistik makro dapat terwujud.

8. Yus Rusyana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
   a. Menyeimbangkan dua paradigma, yaitu memandang bahasa sebagai sistem dari segi *language* dan memandang bahasa dari segi penggunaan yang penuh dengan kekacauan variasi. Dalam penerapan kedua pandangan dapat diseimbangkan, berangkat dari segi penggunaan bahasa yang penuh dengan kekacauan variasi ke arah penggunaan yang tertib sehingga menemukan sistem yang mencakup.
   b. Pusat Bahasa perlu melakukan deskripsi sederhana terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan informasi kebahasaan kepada masyarakat.

9. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta
   a. Penelitian sosiolinguistik tidak pernah jelas, tetapi memberlakukan kaidah secara variabel.
   b. Pengertian sektarian perlu dipertegas hubungannya dengan penelitian bahasa.

**B. Jawaban**

1. Pusat Bahasa setuju statusnya sebagai lembaga independen sesuai dengan keputusan kongres.

2. Fungsi Pusat Bahasa sebagai fasilitator dan koordinator penelitian atau *resource center*, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia.

3. Linguistik mikro tidak dihubungkan dengan ilmu lain, murni ilmu bahasa dan menempati dunianya sendiri.

4. *Emotional research* perlu dipertimbangkan sebagai pendekatan penelitian bahasa untuk mengimbangi pendekatan *rational research*.

5. Istilah *sektarian* untuk penelitian bahasa ditujukan pada penelitian bahasa di lingkungan etnis non-pribumi, seperti Cina, Arab, dan lintas negara.

# HAL-HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN PENELITIAN SASTRA DAN PENGAJARANNYA

**Yus Rusyana**
Universitas Pendidikan Indonesia

## 1. Kehidupan Sastra di Indonesia

Di Indonesia hidup sastra berbahasa Indonesia dan sastra berbahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak. Kedudukan sastra berbahasa Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sastra berbahasa daerah, antara lain karena kedudukan bahasa Indonesia. Jauh sebelum dijadikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* dalam perhubungan antarsuku di kepulauan Nusantara. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan dan dipahami oleh berbagai suku. Hal itu menyediakan kemungkinan bagi sastra berbahasa Melayu untuk dikenal pula oleh berbagai suku. Setelah terjadi ikrar tentang bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928, sastra berbahasa Indonesia (termasuk yang sebelumnya telah ditulis dalam bahasa Melayu) menjadi sastra berbahasa persatuan atau sastra berbahasa nasional, sehingga, karena bahasanya itu, menjadi pula sastra nasional. Dari segi itu pula kiranya sastra Indonesia mengandung fungsi sebagai lambang kenasionalan atau lambang persatuan. Demikianlah, sastra Indonesia merupakan bagian dari wacana persatuan atau wacana nasional.

Sastra daerah, yaitu sastra yang berbahasa daerah, yang karena bahasanya itu, sulit untuk dikenal dan dipahami di luar komunitas bahasa daerahnya masing-masing. Sastra daerah jadilah sastra yang berada dalam lingkungan lokal dan tidak masuk ke dalam percaturan nasional.

Hal tersebut perlu dikemukakan untuk menyadarkan kita bahwa "ketidaknasionalan" sastra daerah itu hanyalah karena bahasa yang digunakannya bukan bahasa nasional, dan sama sekali bukan karena sastra daerah itu bersifat "anasional" atau antipersatuan. Orang yang mengapresiasi sastra daerah akan menyadari bahwa isi dan semangat yang terkandung dalam sastra daerah itu sejenis saja dengan apa yang terkandung

dalam sastra Indonesia, lebih-lebih dalam hal semangat kenasionalannya. Oleh karena itu, sastra daerah itu hendaknya diakui sebagai milik bangsa Indonesia, yang bersama dengan sastra Indonesia, sebagai keseluruhan merupakan bagian dari kekayaan nasional.

Kekayaan nasional yang berupa sastra Indonesia dan sastra daerah itu sangat bermacam-ragam. Kemacamragaman yang segera tampak ialah dalam hal bahasa yang digunakannya, yaitu bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak. Kemacamragaman itu tampak pula dalam khazanahnya dan perkembangan yang dialami oleh setiap sastra itu, misalnya ada yang memiliki sastra lisan dan sastra tulis dan ada yang hanya memiliki sastra lisan; ada yang memiliki sastra lama dan sastra baru, ada yang hanya memiliki sastra lama. Sastra Indonesia dan sastra daerah itu juga mengalami kontak, baik dengan sesamanya maupun dengan sastra yang berasal dari luar, pada masa lalu hingga masa sekarang. Jenis dan intensitas kontak itu pun berbeda-beda, begitu juga hasil yang terjadi akibat kontak itu.

Di samping keragaman, dalam sastra Indonesia dan sastra daerah itu terdapat juga kesamaan. Kesamaan ini pun patut mendapat perhatian. Kesamaan dan keragaman ini terkait dengan kebudayaan Indonesia keseluruhannya, yang juga memiliki keadaan demikian.

Kehidupan sastra di Indonesia, di samping dipandang dan diperlakukan sebagai entitas yang masing-masing berdiri sendiri, hendaknya dipandang dan diperlakukan pula sebagai satu keseluruhan, yaitu sebagai komunitas sastra bangsa Indonesia, sebuah komunitas sastra yang majemuk.

Dengan penggunaan secara serempak dua pandangan ini, banyak hal yang dapat dijelaskan dengan lebih baik. Juga, cara pandang ini akan memperkuat kesadaran akan persatuan berdasarkan pemaknaan terhadap adanya kesamaan dan keragaman.

**2. Kondisi Umum Penelitian**

Penelitian yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tentang sastra dan pengajaran sastra dilakukan di fakultas sastra, fakultas pendidikan bahasa dan seni, dan di program pascasarjana, oleh para mahasiswa S-1, S-2, dan S-3, dalam kegiatan studi mereka berupa penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Melalui kegiatan tersebut banyak segi sastra atau peng-

ajaran sastra yang dijelaskan dan, khususnya dalam disertasi, juga diharapkan dihasilkan teori baru pada bidang ilmu sastra dan pengajaran sastra. Pokok masalah yang diteliti pada umumnya sesuai dengan perhatian mahasiswa itu masing-masing, tidak berdasarkan rencana penelitian yang menyeluruh yang menjadi payungnya.

Penelitian lainnya ialah penelitian yang diselenggarakan melalui proyek-proyek yang diadakan pada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau kerja sama lembaga pemerintah dan lembaga swasta, termasuk yayasan-yayasan asing. Perseorangan juga ada yang melakukan penelitian, biasanya dengan dukungan dana dari suatu lembaga swasta.

Dari segi tujuan penelitian itu pada umumnya untuk mengetahui berbagai segi kesastraan atau pengajarannya. Kurang banyak penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan teori baru dalam bidang sastra atau model-model baru dalam pengajaran sastra. Juga masih kurang dilakukan untuk memberikan pelayanan ilmu sastra bagi berbagai bidang kehidupan.

Pada umumnya penelitian itu dilakukan terhadap sastra tertentu secara terpisah dari sastra-sastra lainnya, dalam arti penelitian itu tidak berdasarkan kerangka kerja yang memperlihatkan sastra di Indonesia keseluruhannya sebagai satu bidang penelitian yang saling berkaitan. Karena penelitian itu tidak berdasarkan kerangka yang menyeluruh, hasilnya kurang dapat digunakan untuk menyusun pengetahuan kesastraan yang berkenaan dengan komunitas sastra di Indonesia secara keseluruhannya.

Adapun objek penelitiannya bermacam-macam, yaitu sastra lisan (berupa mite, legende, dongeng), hikayat, novel, cerita pendek, sajak, sastra lakon, naskah lama yang berisi sastra, biografi sastrawan, dan nilai budaya dalam sastra.

Penelitian tentang cerita rekaan (lama dan baru, lisan dan tulisan) dan sastra lakon umumnya berupa analisis struktur yang menghasilkan deskripsi tentang unsur-unsur intrinsik narasi, sedangkan penelitian tentang naskah berupa inventarisasi naskah serta gambaran wujud dan isi naskah disetai dengan analisis tentang isinya atau tidak. Dalam penelitian itu jarang dikemukakan problematika teoretisnya sehingga penelitian itu tidak memberikan jawaban terhadap masalah teori, melainkan berhenti pada tahap deskripsi.

Penelitian itu baru dilakukan pada beberapa cabang ilmu sastra.

Untuk cabang lainnya, seperti pada perbandingkan sastra, sosiologi sastra, dan sejarah sastra masih kurang.

Penelitian tentang pengajaran sastra yang berkenaan dengan materi pengajaran, pelaksanaan pengajaran, dan evaluasinya, biasanya dideskripsikan saja atau dilakukan penyusunan model-model yang dieksperimenkan. Yang mendapat banyak perhatian ialah pengajaran sastra Indonesia, mengingat pengajaran sastra Indonesia dilaksanakan di semua jenjang sekolah hingga ke perguruan tinggi (di FS dan FPBS), sedangkan sastra daerah hanya diajarkan di SD dan SLTP, dan beberapa saja yang diajarkan di FS dan FPBS.

Tenaga peneliti berasal dari lulusan FS dan FPBS yang kebanyakan lulusan S1, kemudian berangsur-angsur terlibat pula tenaga magister dan doktor. Mereka umumnya bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi dan staf di Pusat Bahasa, di balai bahasa, dan di lingkungan kantor wilayah Departemen Pendidikan. Jadi, jarang yang tugasnya khusus sebagai peneliti, kecuali yang berasal dari lembaga penelitian. Oleh karena itu, pekerjaan meneliti bukanlah sebagai pekerjaan penuh waktu. Juga kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seseorang jarang berkesinambungan.

Publikasi dan penyebaran hasil penelitian sebagian diselenggarakan oleh proyek, yang produknya tidak boleh diperjualbelikan sehingga hasil penelitian mungkin tidak sampai kepada orang yang memerlukan.

Hasil penelitian tentang sastra dan pengajaran sastra diharapkan dibaca dan dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penelitian yang dilakukan kemudian. Juga diharapkan dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai penunjang perkuliahan dan penulisan karya ilmiah. Begitu pula, hasil penelitian itu dapat diolah sebagai bahan pengajaran di sekolah atau sebagai bahan bacaan umum agar pengetahuan tentang sastra dan pengajaran sastra itu menjadi milik masyarakat luas.

### 3. Arah Penelitian Sastra dan Pengajaran Sastra

Untuk menjawab tantangan dan peluang di masa datang perlu dilakukan penelitian pada bidang sastra yang bermutu, kreatif, dan produktif, serta relevan dengan tuntutan kehidupan yang mengandung persaingan dan kerja sama.

Penelitian yang bermutu mensyaratkan penguasaan dan penerapan teori secara benar. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang baik di

perguruan tinggi dengan menyiapkan calon peneliti yang menguasai teori sastra dan mampu memilih serta menggunakannya, sesuai dengan masalah yang nyata yang terdapat di lapangan.

Peneliti dituntut punya kreativitas; dalam arti ia mampu menemukan realitas baru dalam kehidupan sastra dan kehidupan masyarakat dan budaya, mampu merumuskan masalahnya, dan mampu menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah itu.

Penelitian sastra juga dituntut untuk produktif, yaitu dilakukan dengan giat mengingat persoalan dan kebutuhan juga akan muncul terus-menerus dan bermacam-macam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang banyak jenisnya dan tinggi tingkat keseringannya.

Kehidupan sastra berubah sebab kehidupan masyarakatnya pun berubah dengan irama yang makin cepat. Penelitian sastra harus dapat mengimbangi timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru sebagai akibat dari perubahan itu. Terjadi persaingan antara berbagai bidang kehidupan dan antara bangsa-bangsa. Bersamaan dengan itu, terjadi kemungkinan untuk melakukan kerja sama. Penelitian sastra harus mampu memberikan pelayanan dan sumbangsih bagi kehidupan masyarakatnya.

Mengingat keadaan seperti itu, penelitian sastra dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang kehidupan sastra, untuk pengembangan ilmu sastra, untuk pembinaan watak bangsa, dan untuk pelayanan bagi berbagai bidang kehidupan.

Mengingat kenyataan kehidupan sastra di Indonesia bersifat majemuk, dalam penelitian, sastra yang bermacam ragam itu diperlakukan sebagai satu komunitas sastra sehingga terjelma menjadi satu bidang penelitian.

Tema sentral penelitian sastra ialah mengetahui konvensi-konvensi yang terdapat dalam sastra di Indonesia sebagai sebuah komunitas sastra dan mengetahui unsur-unsur yang bersifat lentur yang menimbulkan inovasi, berupa saling pengaruh, transformasi, dan variasi. Demikianlah sastra di Indonesia diperlakukan sebagai sebuah komunitas sastra yang mengandung kesamaan dan keragaman. Selanjutnya, keberadaan komunitas sastra di Indonesia diperlakukan pula sebagai bagian dari komunitas sastra yang lebih luas, di Asia Tenggara, di Asia, dan di seluruh dunia, yang saling berhubungan.

**4. Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajaran Sastra**

Penelitian yang perlu dilakukan ialah sebagai berikut.

a. Penelitian untuk mengumpulkan, merekam, menyalin, menerjemahkan, dan mendeskripsikan karya sastra terus dilanjutkan mengingat masih banyak bahan yang belum digarap. Urutannya didasarkan pada keperluan penelitian se-Indonesia, misalnya dengan memilih jenis-jenis tertentu pada semua daerah yang diteliti.
b. Penelitian untuk menyusun pengetahuan yang lengkap tentang setiap sastra daerah dan untuk menyediakan bahan bagi kegiatan pada butir c.
c. Penelitian untuk menyusun pengetahuan yang lengkap tentang sastra seIndonesia sebagai sebuah komunitas sastra, seperti penelitian perbandingan, kesejarahan, dan tipologi sastra.
d. Penelitian untuk pengembangan teori sastra berdasarkan kehidupan sastra di Indonesia, seperti dikemukakan dalam hasil kegiatan pada butir b dan c.
e. Penelitian untuk memberikan pelayanan ilmu sastra bagi berbagai bidang kehidupan sehingga ilmu sastra memiliki relevansi bagi kemajuan bangsa.
f. Penyusunan materi bagi keperluan pengajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi berkenaan dengan sastra tertentu (berdasarkan hasil kegiatan pada butir b) dan berkenaan dengan komunitas sastra se-Indonesia (berdasarkan hasil kegiatan pada butir c).
g. Penelitian berkenaan dengan berbagai komponen dalam pengajaran sastra untuk tujuan apresiasi sastra, ekspresi sastra, dan pengetahuan sastra.

## Daftar Pustaka

*Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional*, Jakarta, 25—28 Februari 1975.

*Hasil Seminar Pengembangan Sastra Indonesia*, Jakarta, 1—4 September 1975.

Rusyana, Yus. 1980. "Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Penelitian dalam Bidang Sastra Daerah Selama Lima Tahun", makalah dalam rapat Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Penelitian Sastra Daerah yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan di Jakarta, 8—9 Januari 1980, dimuat dalam Yus Rusyana, 1984 *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan*, Bandung: Diponegoro, hlm. 281—293.

-------. 1987. "Perlu Dilakukan Telaah Perbandingan terhadap Sastra Nusantara", makalah dalam Konferensi Nasional I Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski), 2—4 Februari 1987 di Jakarta; dimuat dalam I Gusti Ngurah Bagus. 1987. *Punya*. Denpasar: Pustaka Siddhanta, h. 213—218.

-------. 1994. "Keadaan Penelitian Dewasa Ini tentang Sastra Daerah", makalah disampaikan dalam *Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni*, Ditjen Pendidikan Tinggi, di Cisarua, 28 November—1 Desember 1994.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 9 November 1999 |
| Pukul | : | 19.15--20.15 |
| Judul Makalah | : | Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajarannya |
| Penyaji Makalah | : | Yus Rusyana |
| Pemandu | : | A. Rozak Zaidan |

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Budi Darma, IKIP Surabaya
   a. Seperti Pak Yus katakan tadi, banyak penelitian sastra yang tidak diakui sebagai penelitian yang baik karena beberapa faktor--mungkin formatnya, acuannya, dan sebagainya--tidak memenuhi syarat. Ini memang suatu kenyataan. Akan tetapi, dunia sastra juga memperlihatkan kenyataan lain, yaitu dengan sejumlah karya sastra yang tidak lahir dari sebuah penelitian formal (tidak ditunjang dengan teori dan segala macam format yang lain), tetapi dapat diterima masyarakat karena memiliki kandungan yang dalam, inovatif, dan mencerminkan wawasan yang luas, misalnya karya Abdul Hadi. Bagaimana dengan kenyataan seperti ini.
   b. Pada umumnya penelitian sastra itu mengarah ke deskripsi yang disebabkan, antara lain, oleh problematika teorinya yang tidak jelas. Misalnya, menurut saya bukan karena masalah teori atau non-teori, melainkan peneliti itu sendiri kurang mencintai sastra sehingga wawasannya tidak begitu tajam. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus menguasai sastra lebih dahulu kemudian mencari teori yang cocok, bukan sebaliknya.

2. Abdul Hadi W.M., Universitas Paramadina Mulya, Jakarta
   a. Kondisi pengajaran sastra di perguruan tinggi sangat memprihatinkan karena tidak ditunjang oleh disiplin ilmu. Disiplin bantu itu adalah sejarah kebudayaan (Islam, Hindu, Barat), sejarah sastra India, teori sastra Asia yang berkembang, antropologi, agama,

bahasa Jawa Kuno, Sanskerta, Arab, dan Parsi. Akibatnya, kita mengeluh orang Indonesia tidak boleh berbuat seperti orang Cina yang membuat film *Judge Bao* atau seperti orang India yang membuat film Ramayana atau Mahabarata. Kita hanya sanggup membuat film *Jin dan Jun*.

b. Sastra daerah itu memperlihatkan lintas daerah, misalnya antara Bugis dan Minangkabau. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sastra pesisir juga luput dari pengamatan kita, seperti sastra suluk Sunan Bonang dan suluk Sunan Gunung Jati di Cirebon. Demikian juga sastra kaum peranakan Cina yang ditulis pada abad XIX. Ini juga perlu diperhatikan.

c. Kondisi pengajaran sastra daerah secara umum perlu diperbaiki.

3. Sabarti Akhadiah, Universitas Negeri Jakarta

a. Dalam makalah ini belum tersentuh sastra untuk anak, padahal masalah ini sangat penting. Oleh karena itu, perlu ada penelitian khusus mengenai masalah ini.

b. Perlu dikembangkan di perguruan tinggi penelitian sastra yang mengarah kepada pengembangan metodologi penelitian sastra dengan rambu-rambu ilmiah.

c. Apakah butir (c) pada kebijakan penelitian sastra dan pengajaran sastra termasuk di dalamnya nilai-nilai yang dapat digali dari karya sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah.

4. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta

a. Penelitian karya sastra itu untuk apa dan untuk siapa hasil penelitian itu?

b. Penelitian tentang minat baca sastra itu sangat penting. Ini dimaksudkan demi kepentingan pengajaran bahasa di sekolah.

c. Bagaimana sastra daerah itu bisa dibaca dan diminati peminat sastra daerah yang lain.

d. Dalam penelitian sastra tidak perlu menggunakan teori tipologi sastra karena hal itu tidak diperlukan masyarakat. Yang diperlukan masyarakat adalah bagaimana sastra itu dapat diapresiasi.

5. Chaedar Alwasilah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Sebagian pembahas esai dan sajak-sajak pengarang tertentu menggunakan kerangka sintaksis dan sosiolinguistik. Dalam kaitan ini saya mendapat kesan bahwa sastrawan/seniman itu adalah orang-orang yang sangat sombong.

6. H. Suparno, Universitas Negeri Malang
   a. Sastra dalam berbagai aspeknya belum mendapat sorotan secara memadai dari segi penelitian. Apakah ini memerlukan perjuangan yang dikumandangkan melalui seminar ini, yang akan menjadi kebijakan bahasa dan sastra. Jika hal ini berhasil, kehidupan sastra dan sastrawan di masa depan akan cerah.
   b. Apresiasi sastra perlu dikembangkan melalui kegiatan bengkel sastra.

**B. Jawaban**

Hal-hal yang disampaikan tadi tidak perlu saya komentari lagi, tetapi semuanya itu dihimpun saja untuk dibicarakan dalam kelompok.

Saya setuju dengan Pak Budi bahwa seorang peneliti sastra harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Seorang peneliti sastra harus mempunyai pengalaman apresiasi sastra. Di samping itu, dia juga harus mempunyai sikap terhadap sastra itu.

2. Langkah memahami sastra dengan memperlihatkan konteks kulturalnya kemudian ditunjang dengan ilmu bantu, seperti sejarah, saya kira memang betul. Hal ini juga sangat berharga, terutama untuk mendidik para mahasiswa di fakultas sastra dalam melaksanakan penelitiannya. Konteks kebudayaan masyarakat dan historisnya juga perlu dipahami, mengapa, misalnya, ada karya sastra begini di Bugis dan juga ada di Minangkabau, dan seterusnya. Ini hanya dapat diketahui setelah ditelusuri hubungan historisnya.

3. Sastra untuk anak-anak memang harus menjadi perhatian kita walaupun ada kesulitan dalam pengajaran di SMP, misalnya langsung membawakan karya-karya yang sudah jadi atau bagaimana? Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan, misalnya dalam aspek bahasanya, karena jarak waktu yang begitu jauh.

4. Mengenai minat baca sastra masyarakat, menurut hemat saya yang penting itu bukan minat bacanya, melainkan bagaimana menumbuhkan pengalaman siswa itu sendiri dalam bersastra. Yang perlu disiapkan adalah sarana, kemungkinan-kemungkinan, serta kondisi yang menunjang sehingga siswa mempunyai minat baca. Pemilihan karya sastra untuk bahan ajar harus dilakukan. Yang penting juga diperhatikan adalah aspek pendidikan dalam sebuah karya.

   Pak Parera, janganlah merasa berjuang sendiri, kami di daerah juga tetap mengadakan pendekatan terhadap guru-guru mengenai hal ini.

5. Saya kira keberadaan sastra di tengah masyarakat itu penting dan penelitian sosiologi sastra, antara lain, berbicara mengenai masalah ini. Saya kira tidak hanya sebatas itu, tetapi perlu diciptakan model-model tertentu untuk penelitian sastra.

6. Kesan Pak Chaidar tentang kesombongan para sastrawan atau seniman itu hanya di permukaan. Kalau kita sudah biasa bergaul dengan mereka, hal seperti itu biasa saja.

# PENGAJARAN BAHASA ASING: GAMBARAN NYATA DAN BEBERAPA GAGASAN KEBIJAKAN

**Fuad Abdul Hamied**
Universitas Pendidikan Indonesia

Makalah ini akan mencoba menguak beberapa hal yang terjadi dalam pengajaran bahasa asing di Indonesia dan mengetengahkan gagasan berkenaan dengan kebijakan yang tampaknya perlu ditata dalam upaya peningkatan mutu pengajaran bahasa asing tersebut. Untuk memberi tempat yang jelas bagi kedua pokok bahasan tersebut, kerangka fundamental yang bertemali dengan pengajaran bahasa asing akan ditampilkan terlebih dahulu.

Pembicaraan mengenai pengajaran bahasa tidak bisa dilepaskan dari konteks pembelajaran bahasa. Keduanya berkait erat dan melibatkan berbagai variabel yang jumlahnya banyak. Intinya adalah bahwa proses belajar-mengajar bahasa itu bukan hal yang sederhana dan tidak bisa diamati sekadar sebagai potongan-potongan kegiatan menjajakan dan menimba bahan pengajaran saja.

Banyaknya variabel yang terlibat dalam belajar-mengajar bahasa menuntut kerangka landasan kegiatan itu sendiri. Kerangka itu bisa dipandang sebagai teori yang oleh guru bahasa sering "dihujat." Sering kali guru bahasa melahirkan ungkapan seperti "teori itu bagus tapi sukar dipraktikkan." Contoh lain dapat disimak manakala guru ditawari pendekatan pengajaran yang beraneka dan berganti-ganti. Di antara mereka menanggapi tawaran semacam itu dengan pernyataan "berikan pendekatan apa saja kepada saya, dan saya akan mengajar dengan cara saya."

## 1. Kerangka Fundamental

Pengajaran bahasa asing sebagai kegiatan profesional telah melahirkan berbagai kerangka fundamental yang melibatkan berbagai disiplin. Dalam alur sejarah antara tahun 1940--1960 telah menyeruak ke permukaan pandangan yang kokoh bahwa penerapan linguistik dan psikologi akan menjadi landasan terbaik guna memecahkan masalah pengajaran bahasa. Namun, perkembangan dalam kedua disiplin itu yang terjadi sekitar tahun

60-an menunjukkan bahwa kaitan antara pengajaran bahasa sebagai suatu kegiatan praktis dan perkembangan teoretis dalam ilmu kebahasaan tidak sesederhana seperti yang diperkirakan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan disiplin yang menjembatani kedua lahan itu. Jembatan itu dikenal dengan linguistik terapan. Dari sini lahirlah berbagai model yang melihat faktor-faktor berpengaruh dalam menelurkan pedagogi bahasa, seperti model dari Campbell, Spolsky, Ingram, dan Mackey (baca Stern, 1983).

Kaitan antara linguistik dan pengajaran bahasa dilukiskan oleh Campbell secara jelas dan sederhana. Modelnya diterima secara meluas dengan memperlihatkan hubungan antara linguistik, linguistik terapan, dan pedagogi. Kemudian, Spolsky mengembangkan kerangka konseptual yang lebih terperinci. Dalam modelnya diperikan bahwa pengajaran bahasa bersumber pada tiga hal: pemerian bahasa, teori belajar bahasa, dan teori penggunaan bahasa. Pada gilirannya teori belajar bahasa didasarkan pada teori bahasa dan teori belajar. Pengajaran bahasa bertopangan dengan teori bahasa. Sementara itu, disiplin yang memberi dasar teoretis adalah psikologi untuk teori belajar, psikolinguistik untuk teori belajar bahasa, linguistik umum untuk teori bahasa dan pemerian bahasa, serta sosiolinguistik untuk teori penggunaan bahasa. Keempat disiplin ini berembuk dalam menangani masalah pendidikan bahasa dan karena itulah lahir satu disiplin yang berorientasi pada masalah pendidikan bahasa secara keseluruhan. Spolsky menyebutnya linguistik pendidikan; para ahli lain menyebutnya linguistik terapan.

Model dari Ingram melukiskan hal-hal yang belum terliput di kedua model tadi. Disiplin yang ditampilkannya sama dengan tambahan adanya ranah khusus bagi teoretikus, linguis terapan, dan pelaksana lapangan. Umpan balik dan pelaksanaan pengajaran diperhatikan. Hanya dalam model ini tampak bahwa peranan pelaksana sangat terbatas dibandingkan dengan linguis terapan. Begitu juga patut dipertanyakan tentang metodologi dan pelaksanaan pengajaran yang dipertautkan secara eksklusif pada ilmu-ilmu yang teoretis.

Model lain adalah apa yang diketengahkan oleh Mackey. Ia menempatkan pembelajaran bahasa dalam konteks sosiopolitis. Terdapat lima variabel besar yang diidentifikasi: metode dan materi, apa yang dilakukan guru, apa yang diperoleh siswa, pengaruh sosiolinguistik dan sosiokultural dan lingkungan, dan apa yang dilakukan oleh siswa. Ke-

rangka konseptual ini menunjukkan bahwa variabel pengajaran dan pembelajaran terikat pada faktor politis, sosial, dan pendidikan. Kendatipun dalam model ini Mackey tidak memasukkan disiplin yang mendasarinya, ia memaparkan bahwa model ini adalah kerangka interdisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, pendidikan, pemerintahan, linguistik, dan disiplin lainnya.

Keempat model yang ditampilkan di atas mempunyai kesamaan-kesamaan. Semuanya menunjukkan ciri yang interdisipliner. Ciri ini memungkinkan siapa pun, yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa, untuk tidak terperangkap dalam sikap yang kompartemental, baik dalam menangani masalah maupun dalam meningkatkan nilai jangkauan pengajaran itu sendiri.

Untuk melihat aspek kajian lebih luas lagi kita akan menelurusi variabel lain yang telah diidentifikasi dalam literatur melalui kajian dan penelitian, termasuk variabel masukan dalam proses pengajaran bahasa dan faktor lingkungannya.

Tatkala berbicara tentang pengajaran bahasa, sering kita menoleh ke sistem pendidikan formal yang diharapkan akan mampu membentuk pemakai bahasa yang baik. Urusan kebahasaan seolah-olah merupakan sesuatu yang ditangani hanya oleh sistem sekolah. Namun, dalam kenyataan, sekolah sering tidak menangani kepentingan pembelajaran bahasa secara utuh karena berbagai kendala yang dipunyai oleh sekolah itu. Pembelajaran bahasa sering hanya memusatkan perhatian pada tingkah linguistik saja dengan mengabaikan tingkah non-linguistiknya. Dalam konteks ini Bloomfield (1933: 499) menyatakan bahwa

> *Whoever is accustomed to distinguish between linguistic and non-linguistic behavior, will agree with the criticism that our schools deal too much with the former, drilling the child in speech response phases of arithmetic, geography, or history, and neglecting to train him in behavior toward his actual environment.*

Sistem pengajaran formal di sekolah dalam konteks pembelajaran bahasa hanya merupakan salah satu saja dari sekian banyak variabel terkait. Variabel lain yang patut dilihat adalah variabel pajanan (*exposure*),

usia si pembelajar, dan tingkat akulturasi (Krashen, 1982: 330).

Menurut Krashen (1982: 37), pengajaran di kelas itu tentu akan membantu sesuai dengan fungsi pokoknya untuk memberikan masukan yang terpahami bagi mereka yang tidak bisa memperoleh masukan itu di tempat lain. Kendalanya adalah oleh situasi karena bahasa sasaran tidak dipakai di luar kelas, atau karena kemampuan berbahasanya yang tidak mampu memahami bahasa di luar kelas. Pengajaran di kelas juga akan mampu memasok pembelajaran sadar terhadap kegunaan pemantauan yang optimal, dan untuk memberikan alat yang akan membantu si pemeroleh menggunakan lingkungannya di luar kelas secara penuh guna pemerolehan lebih lanjut.

Dalam berbagai penelitian yang dilaporkan oleh Krashen (1982: 37—43), pajanan itu terkadang berkorelasi positif dan berarti dengan kemahiran berbahasa, tetapi terkadang juga tidak. Ini memberikan petunjuk untuk kembali berhipotesis tentang pentingnya masukan yang terpahami dan saringan afektif yang rendah. Dalam hal variabel usia yang sering diasumsikan sebagai suatu penduga kemahiran B2, Krashen, Long dan Scarcella, yang dikutip oleh Krashen (1982: 43), mengetengahkan generalisasi berikut berdasarkan hasil penelitiannya: (1) orang dewasa bergerak lebih cepat daripada anak-anak dalam melampaui tahapan dini perkembangan B2-nya; (2) dengan waktu dan pajanan yang sama, anak yang lebih tua, melalui proses pemerolehan bahasa, lebih cepat daripada anak yang lebih muda; dan (3) pemeroleh yang memulai pajanan alamiah terhadap B2 pada masa anak-anak pada umumnya mencapai kemahiran B2 lebih baik daripada pemeroleh yang memulai pajanan alamiahnya sebagai orang dewasa. Dalam hal ini, faktor masukan terpahami dan saringan afektif kembali dihipotesiskan sebagai variabel penyebabnya.

Tingkat akulturasi si pembelajar terhadap kelompok bahasa sasaran akan mengontrol tingkat pemerolehan bahasanya. Menurut Schumann yang diuraikan Larsen-Freeman (Bailey, Long, dan Peck (penyunting), 1983), akulturasi itu meliputi dua kelompok faktor: variabel sosial dan variabel afektif. Yang termasuk variabel sosial adalah pola dominasi sosial, strategi integrasi, ketertutupan, keterpaduan dan besarnya kelompok belajar bahasa, kongruensi atau kemiripan antarbudaya bahasa sasaran dengan budaya kelompok pembelajar bahasa, sikap antarkelompok, dan jangka waktu tinggal di daerah bahasa sasaran. Variabel afektif meliputi

kejutan bahasa, kejutan budaya, motivasi, dan permeabilitas ego.

Sedikit berbeda dengan Krashen, Titone (Alatis, Altman, dan Alatis (penyunting), 1981: 74—75) menduga bahwa motivasi, bakat bahasa, dan jumlah waktu yang dipakai dalam belajar bahasa merupakan tiga faktor yang paling menonjol yang memberikan ciri pada pembelajaran B2. Variabel motivasional, antara lain, meliputi motivasi integratif dan instrumental, kontak dengan budaya bahasa sasaran, faktor sosio-ekonomik, perbedaan jenis kelamin, situasi kelas, hubungan guru-siswa, dan penyuguhan bahan. Bakat bahasa meliputi kemampuan mengode stimulus fonetik, sensitivitas gramatikal, dan kemampuan gramatis. Dalam hal waktu yang dipakai belajar dinyatakan bahwa makin banyak waktu yang dipakai makin baik hasil proses pembelajaran itu.

Selain variabel di atas, variabel masukan menduduki posisi yang juga sangat penting dalam pemberhasilan upaya pengajaran bahasa asing itu. Ada beberapa karakteristik masukan agar masukan itu bisa diperoleh secara cepat dalam konteks pemerolehan bahasa. Keterpelajaran masukan tersebut, antara lain, ditentukan oleh karakteristik (1) keterpahaman, (2) kemenarikan dan/atau relevansi, (3) keteracakan gramatikal, dan (4) kuantitas yang memadai (Krashen, 1982: 62—73).

Karakteristik keterpahaman bisa diamati dari perkembangan pemerolehan B2 atau bahasa asing lewat bahan yang tidak bisa dipahami. Proses pemerolehan bahasa seseorang yang masih sangat rendah tingkat bahasa yang dikuasainya akan berkembang secara lambat jika ia belajar bahasa sasaran misalnya lewat TV atau film tanpa teks dalam B1-nya.

Karakteristik kemenarikan dan/atau relevansi diharapkan bisa mendorong si pemeroleh untuk lebih memusatkan perhatian pada isi ketimbang pada bentuk. Masukan yang menarik dan relevan diharapkan mampu menciptakan kondisi bagi si pemeroleh sedemikian rupa sehingga ia "lupa" bahwa apa yang sedang diresepsinya diproduksi dalam bahasa kedua atau asing. Dalam situasi belajar-mengajar di kelas karakteristik ini sukar dipenuhi karena keterikatan waktu dan keharusan meliput bahan yang sudah tertera dalam silabus. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pengajaran lewat latih runtun pola, misalnya,—satu bentuk pengajaran yang lebih memperhatikan bentuk ketimbang isi—sering menjadi ciri utama kegiatan kelas.

Dalam hal karakteristik keteracakan gramatikal, diketengahkan bah-

wa manakala masukan itu terpahami dan makna dinegosiasi secara berhasil, masukan yang diistilahkan oleh Krashen sebagai i+1 itu akan secara otomatis hadir. Dengan demikian, usaha sengaja untuk memunculkan i+1 itu mesti dihindarkan. Seandainya kita mengurut bahan dan setiap bahan itu berfokus pada satu atau sekelompok butir struktur, ini berarti kita berasumsi bahwa setiap pembelajar dalam kelompok tersebut mempunyai i+1 yang sama dan juga tahap perkembangan pemerolehan yang sama. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Perbedaan individu selalu merupakan ciri sebuah kelompok pembelajar bahasa. Begitu juga tatkala kita mencoba menyuguhkan urutan yang diatur rapi, ada kecenderungan penyuguhan satu butir struktur itu hanya satu kali saja. Si pembelajar yang tidak bisa menangkap butir struktur tersebut tatkala dimunculkan kehilangan kesempatan untuk memperolehnya lagi.

Karakteristik kuantitas yang memadai didasarkan pada hipotesis bahwa masukan komunikatif yang alamiah bisa memasok i+1 bagi si pembelajar jika memenuhi dua kriteria, yaitu masukan itu tidak secara artifisial terkendala dan masukan itu dipasok dalam kuantitas yang memadai. Kendatipun masalah sebanyak apa kuantitas yang memadai itu masih merupakan pertanyaan empiris, bisa diketengahkan di sini bahwa si pembelajar akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak jika mereka membaca untuk makna dan dalam jumlah yang banyak ketimbang melalui analisis paragraf yang sukar. Begitu juga si pembelajar akan mendapatkan perolehan yang lebih baik jika berpartisipasi dalam percakapan yang banyak dibandingkan dengan hanya bergumul pada latihan pemahaman mendengarkan yang terfokus (Krashen, 1982: 73).

Dari sisi lain dalam membicarakan pengajaran dan pembelajaran bahasa, lingkungan, dalam pengertian *everything the language learner hears and sees in the new language*, (Dulay, Burt, dan Krashen, 1982: 13), merupakan sesuatu yang sangat penting sekaitan dengan keberhasilan pembelajaran bahasa itu. Faktor lingkungan makro meliputi (1) kealamiahan bahasa yang didengar; (2) peranan si pembelajar dalam komunikasi; (3) ketersediaan rujukan konkret untuk menjelaskan makna; dan (4) siapa model bahasa sasaran (Dulay, Burt dan Krashen, 1982: 14). Adapun faktor lingkungan mikro mencakup (1) kemenonjolan (*salience*), yaitu mudahnya suatu struktur dilihat atau didengar; (2) umpan balik, yaitu tanggapan pendengar atau pembaca terhadap tuturan atau tulisan si

pembelajar; dan (3) frekuensi, yaitu seringnya si pembelajar mendengar atau melihat struktur tertentu (Dulay, Burt, dan Krashen, 1982: 32).

Lingkungan bahasa alamiah tampak memperkokoh perkembangan keterampilan komunikasi di dalam B2, baik di lingkungan tempat B2 itu digunakan maupun di lingkungan yang tidak memakai B2 tersebut. Jelas bahwa pajanan alamiah itu memicu pemerolehan keterampilan komunikasi dalam bahasa sasaran secara ambang sadar. Ada tiga jenis peranan komunikasi yang dimainkan oleh pembelajar bahasa: (1) satu arah; (2) dua arah terbatas; dan (3) dua arah sepenuhnya. Di dalam komunikasi satu arah si pembelajar mendengarkan atau membaca bahasa sasaran tetapi tidak menanggapi. Komunikasi hanya satu arah, yaitu kepada si pembelajar, bukan dari si pembelajar. Dalam komunikasi dua arah terbatas, si pembelajar menanggapi seseorang secara lisan, tetapi si pembelajar itu tidak menggunakan bahasa sasaran. Tanggapan itu bisa di dalam bahasa ibunya atau bisa juga hanya bersifat non-verbal. Di dalam komunikasi dua arah sepenuhnya, si pembelajar bertutur di dalam bahasa sasaran dengan bertingkah sebagai penerima ataupun pengirim pesan verbal. Perbedaan tiga jenis peranan ini penting karena masing-masing mempunyai andil dalam pemerolehan B2. Hampir semua penelitian empiris menekankan bergunanya komunikasi satu arah dan dua arah terbatas pada tahapan dini dalam proses belajar dan menekankan baiknya menunggu hingga si pembelajar siap untuk memproduksi bahasa sasaran sebelum memulai komunikasi dua arah sepenuhnya (Dulay, Burt, Krashen, 1982: 20—21).

Keberadaan faktor ekstra-linguistik akan membantu si pembelajar untuk menangkap makna. Ada semacam kesepakatan bahwa kemajuan kemampuan berbahasa seseorang ditandai oleh pemahaman atau produksi bahasa sedikit di luar lingkup yang dimilikinya. Oleh karena itu, konteks ekstra-linguistik harus dijadikan konteks yang mampu membuat jelas makna dan unsur-unsur bahasa yang baru. Alat bantu visual, kegiatan motorik, dan jenis dukungan nyata lainnya sering digunakan sebagai faktor ekstra-linguistik yang merupakan rujukan konkret dalam membantu proses pemerolehan bahasa itu (Dulay, Burt, Krashen, 1982: 26).

Si pembelajar itu tidak serta-merta mempelajari segala yang dipajankan kepadanya. Lebih jauh lagi, si pembelajar itu tidak serta-merta memperhatikan semua yang dipajankan kepadanya. Hasil belajar yang tak

diharapkan bila muncul bisa merupakan akibat dari perhatian yang selektif terhadap model penutur yang berbeda-beda. Berbagai hasil penelitian belajar bahasa memberikan contoh nyata tentang adanya preferensi model penutur pada situasi tertentu. Preferensi ini tampaknya mempunyai pengaruh yang jelas terhadap kualitas tuturan si pembelajar. Preferensi model penutur itu ada tiga jenis: teman sebaya memperoleh preferensi lebih dari guru, teman sebaya memperoleh preferensi lebih dari orang tua, dan kelompok etnis sendiri memperoleh preferensi lebih daripada kelompok etnis lain (Dulay, Burt, Krashen, 1982: 29).

Dalam hal faktor lingkungan mikro, faktor yang pertama adalah kemenonjolan (*salience*). Kemenonjolan ini merujuk pada kemudahan suatu struktur dilihat atau didengar. Ia adalah ciri tertentu yang tampaknya membuat suatu butir secara visual atau auditoris lebih menonjol daripada yang lain. Termasuk dalam karakteristik ini adalah jumlah substansi fonetik, tingkat tekanan, dan posisi dalam kalimat. Faktor lingkungan mikro yang kedua adalah umpan balik. Salah satu jenis umpan balik adalah pembetulan, yang lainnya adalah persetujuan atau umpan balik positif. Selain itu, memperluas atau memodifikasi tuturan si pembelajar tanpa sadar bisa juga mengundang perhatian si pembelajar itu terhadap modifikasi tadi. Banyak temuan yang tak begitu menunjang pembetulan terhadap kesalahan si pembelajar karena hal itu sering melahirkan rasa frustrasi. Begitu juga pengaruh dari perluasan tuturan tak begitu jelas ditunjang oleh hasil penelitian. Faktor lingkungan mikro yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi telah diasumsikan sebagai faktor berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa. Makin banyak si pembelajar mendengar suatu struktur, makin cepat proses pemerolehan struktur itu. Akan tetapi, penelitian lain ternyata telah menelurkan hasil yang berbeda (Dulay, Burt, Krashen, 1982: 32—37).

## 2. Gambaran Nyata

### a. Kasus Pengajaran Bahasa Inggris

1) *Kondisi Pengajaran*

Kondisi pengajaran dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang menyentuh proses ataupun hasil pembelajaran. Dalam konteks ini, Hamied (1993) melakukan kajian tentang pengajaran bahasa Inggris yang berskala nasional. Kajian itu telah berumur sekitar setengah dekade, te-

tapi berdasarkan pengamatan dan interaksi dengan persekolahan dan personalia terkait, informasi yang dikandungnya masih terasa relevan. Data yang ditampilkan dikumpulkan dari 26 provinsi di Indonesia yang diwakili oleh 358 SMU Negeri. Variabel belajar-mengajar dikaji dengan melihat aspek pelaksanaan program pengajaran, kegiatan belajar-mengajar, kemampuan guru, ketersediaan dan penggunaan buku, serta ketersediaan dan penggunaan alat dan sumber belajar lainnya; sedangkan hasil pembelajaran dikaji dengan menggunakan berbagai instrumen seperti NEM, tes sumatif, dan tes bahasa Inggris yang dikembangkan khusus untuk penelitian tersebut.

2) *Pelaksanaan program*

Pelaksanaan program pengajaran diamati dengan menggunakan indikator keterpahaman dan penggunaan tujuan, keteraturan tes formatif, keterliputan dan keterserapan materi GBPP, penyiapan sampel, proporsi tuturan guru-siswa, dan kemudahan bahan ajar. Dalam hal pelaksanaan program pengajaran bahasa lnggris ditemukan proporsi yang cukup besar (38,5%) jumlah sekolah yang masuk dalam kategori memerlukan perbaikan dengan kategori "sedang", "kurang", dan "kurang sekali". Cukup besar jumlah sekolah yang teridentifikasi berada pada kriteria baik (57,0%). Sementara itu, hanya 4,5% sekolah yang mutu pelaksanaan program pengajarannya baik sekali.

Tatkala mutu pelaksanaan program pengajaran ini dilihat dari sisi kategori sekolah--yaitu "kurang", "sedang", dan "baik" ditemukan perbedaan-perbedaan yang menarik. Perbedaan yang menonjol dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pengajaran terletak di antara kelompok sekolah dengan kategori "kurang" dan "sedang" saja, sedangkan antara kelompok sekolah berkategori sedang dan baik perbedaannya tidak begitu menonjol. Dalam hal jumlah persentase yang mutu pelaksanaan program pengajarannya "baik sekali", terlihat kenyataan menarik. Kelompok sekolah berkategori "sedang" lebih baik daripada kelompok "baik" dengan perbandingan 5,1% : 3,7%. Kondisi seperti itu dapat terpahami manakala kita melihat sekolah yang berkategori "sedang" masih berupaya terus mencapai posisi yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan program pengajarannya. Sementara itu, kelompok sekolah yang sudah mendapat predikat baik, memiliki kecenderungan mandek.

3) *Kegiatan Belajar-Mengajar*

Aspek kegiatan belajar-mengajar (KBM) berindikatorkan penjabaran TIK dan TIU, kesesuaian materi ajar dan latihan, pengelompokan siswa, interaksi guru-siswa, penciptaan suasana kondusif, pemberian balikan, pemantauan, dan perangkuman pelajaran. Secara nasional terlihat bahwa sekolah-sekolah yang ditelaah itu hanya 0,6% yang bermutu KBM "kurang sekali". Yang mutu KBM-nya "kurang" ada 5,9%, sedangkan yang mutu KBM-nya "sedang" terdapat 30,4%. Bila ditaksir dari segi perlunya perbaikan, maka mutu "sedang", "kurang", dan "kurang sekali" membentuk persentase yang cukup tinggi, yaitu 36,9%. Berdasarkan kriteria penilaian KBM, ditemukan 43% sekolah yang "baik" mutu KBM-nya, dan hanya 20,1% yang mutu KBM-nya "baik sekali".

Tatkala mutu KBM diamati berdasarkan mutu sekolah sebagaimana ditunjukkan oleh pengelola, dalam hal ini Kanwil, ternyata banyak hal yang menarik. Dalam kategori mutu KBM yang "baik sekali" terlihat jelas perbedaan antara sekolah "baik", "sedang", dan "kurang" itu dengan urutan persentase 29,4%, 19,1%, dan 10,9%, tetapi tatkala kategori mutu KBM itu pada kategori "baik", justru kelompok sekolah "kurang" hampir menyamai sekolah yang "baik" dengan persentase yang kecil sekali bedanya, 45,7% dan 45,9%. Hal ini pun tampaknya masih merupakan penanda adanya dinamika pada kategori sekolah yang mendapat posisi papan bawah untuk bergerak ke atas, dan adanya stagnasi pada sekolah-sekolah yang telah berpredikat lebih baik.

4) *Kemampuan Guru*

Kemampuan guru dikaji dengan mengamati penguasaan bahasa Inggrisnya, kekerapan pemakaian bahasa Inggris di kelas, dan persepsi siswa terhadapnya. Secara nasional, terdapat 9,8% sekolah dengan kemampuan gurunya "kurang sekali". Guru yang berkemampuan "kurang" dalam bahasa Inggrisnya mencakup 4,2%. Yang masuk kategori "cukup" persentasenya sebesar 17%. Bila dikelompokkan kategori "cukup", "kurang", dan "kurang sekali" kemampuan guru ini masih perlu diperbaiki, dengan persentase yang cukup besar, yaitu 31%. Dalam kategori "baik" terdapat 39,4%, sedangkan sekolah yang mempunyai kemampuan guru "baik sekali" hanyalah 29,6%.

Teramati juga adanya gejala dinamis serta upaya gigih dalam hal

meningkatkan mutu kemampuan guru pada sekolah yang berkategori "kurang baik". Bila kategori mutu guru yang "baik" dan "baik sekali" digabung menjadi satu, maka urutan persentase mutu kemampuan guru sekolah "kurang", "sedang", dan "baik" itu adalah 71,7%; 63,0%, dan 75,2%. Gejala ini adalah gejala yang positif dalam konteks perbaikan mutu pengajaran, kendatipun hal ini bisa dijadikan pula petunjuk adanya kemandekan pada sekolah-sekolah yang telah baik.

5) *Penggunaan Buku*

Dengan penggunaan kriteria pemakaian, ketersediaan serta proporsi pemakaian buku wajib dan buku penunjang, secara nasional dapatlah dikatakan bahwa dalam hal penggunaan buku, masih terdapat proporsi sekolah yang cukup besar (24,1 %) dengan kondisi yang perlu perbaikan, yaitu terletak pada kategori "cukup", "kurang", dan "kurang sekali".

Mutu penggunaan buku wajib dan penunjang ini, bila diamati secara lintas provinsi, akan terlihat cukup bervariasi. Bila dilihat dari kaca mata perlunya perbaikan, Kalimantan Barat menduduki posisi yang terendah dengan 50% dari sekolah yang diteliti terletak pada kategori "cukup" dan "kurang" dalam hal mutu penggunaan buku wajib dan penunjangnya. Posisi berikutnya diduduki oleh Lampung dengan kenyataan adanya 41,7% dari sekolahnya yang berada dalam kategori "cukup" saja dalam hal penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Setelah itu, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Maluku masing-masing dengan 33,3% sekolahnya masih memerlukan perhatian dalam penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Provinsi berikutnya yang memerlukan perhatian adalah Bali yang menunjukkan adanya 30,8% sekolahnya berada pada kategori "cukup" dan "kurang" dalam hal penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Pada posisi berikutnya adalah Sulawesi Tengah (27,3%), Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara dengan masing-masing berada dalam kondisi memerlukan perhatian dalam hal penggunaan buku wajib dan buku penunjang dengan 25% di antara sekolahnya berada dalam kategori "cukup" saja.

6) *Sumber Belajar dan Lab Bahasa*

Dari sudut variabel keberadaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasa, bila dilihat sebagai satu kesatuan utuh akan tampak

kondisi nasional yang masih bertumpuk (44,4%) pada posisi "kurang sekali". Bila persentase ini digabung dengan yang masuk dalam kategori "kurang" (11,5%) dan kategori "cukup" (15,1%), dengan pertimbangan perlunya upaya perbaikan, maka persentase yang memerlukan perhatian ini cukup besar (71%). Sisanya 22,9% dalam kondisi mutu penggunaan lab dan sumber belajar yang "baik sekali".

Bila dilihat gambaran nasional dari perspektif provinsi secara melintas, akan tampaklah gambaran yang bervariasi. Ada provinsi yang 100% masuk dalam kategori "kurang sekali" dalam hal ketersediaan dan penggunaan sumber belajar dan laboratorium bahasanya, yaitu Kalimantan Timur. Posisi ini disusul oleh Sulawesi Selatan yang mutu ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya tergambar pada posisi "kurang sekali" dengan 95% jumlah sekolahnya. Nusa Tenggara Timur menduduki posisi berikutnya, dengan 81,8% jumlah sekolahnya berada pada kategori mutu ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasa yang "kurang sekali". Selain itu, terdapat pula provinsi yang antara 50--75% jumlah sekolahnya bermutu "kurang sekali" dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya. Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Utara menunjukkan keberadaan 58,3% sekolahnya bermutu kurang sekali dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya. Posisi ini disusul oleh Bali dengan 53,8% sekolahnya bermutu "kurang sekali", dan kemudian Kalimantan Tengah dengan 50% sekolahnya berada pada kategori bermutu "kurang sekali" dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya itu.

7) *Ebtanas*

Data yang diperoleh Ebtanas murni secara nasional dibagi dalam dua kategori untuk setiap provinsi. Kategori pertama nilai terendah selama *5* tahun terakhir dan kategori kedua nilai tertinggi selama *5* tahun terakhir. Dalam kedua kategori ini, data terperoleh menunjukkan hahwa nilai tertinggi pada kategori nilai Ebtanas terendah ialah 6,44, sedangkan nilai tertinggi pada kategori nilai tertinggi ialah 9,60.

Secara keseluruhan nilai Ebtanas masih memprihatinkan. Nilai di bawah 6,00 dalam skala 0-10 masih berproporsi besar, yaitu 66,7%. Hal

itu menunjukkan perlunya pembenahan di kedua jihad, baik dalam proses belajar-mengajar maupun dalam pengembangan alat ukur dalam Ebtanas itu sendiri. Kenyataan memprihatinkan ini terlihat dalam data terdahulu, yaitu dengan dikelompokkan < = 1,90 sebagai kategori 1; 1,91-3,80 sebagai kategori 2; 3,81-5,70 sebagai kategori 3; 5,71-7,60 sebagai kategori 4; dan = >7,61 sebagai kategori 5, pada NEM provinsi tertinggi terdapat 26,8% kategori 1, 0% kategori 2, 39,9% kategori 3, 26,8% kategori 4, dan 6,5% kategori 5.

*8) Kemampuan Bahasa Inggris Siswa*

Berdasarkan perolehan nilai tes bahasa Inggris pada penelitian ini, kemampuan siswa itu masih relatif rendah. Nilai di bawah 6,00 dalam skala 0-10 masih dipunyai oleh 31% dari sekolah yang ditelaah, sebuah kenyataan yang masih memerlukan perhatian cukup serius dalam upaya perbaikan mutu hasil belajar itu. Data secara terperinci menunjukkan bahwa setelah nilai rata-rata sekolah dikategorisasi sebagaimana nilai ebtanas, secara nasional 4,5% masuk kategori 2, 12,0% masuk kategori 3, 59,2% masuk kategori 4; dan sisanya 22,6% masuk kategori 5.

*9) Keterkaitan Hasil Belajar dengan Variabel yang Diamati*

Dalam penelitian ini, hasil belajar diamati dengan empat alat ukur yang berdiri sendiri: NEM tertinggi (1) dan NEM terendah (2), hasil tes sumatif (3), dan tes kemampuan bahasa Inggris (4). Semua jenis alat ukur hasil belajar ini satu sama lain berkorelasi positif dan signifikan.

Tatkala hasil belajar dibatasi dengan nilai tes bahasa Inggris yang dikembangkan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa korelasi yang positif dan signifikan. Dalam hal yang bertemali dengan hasil tes kemampuan berbahasa Inggris tersebut, hanya variabel Kegiatan Belajar-Mengajar dan Kemampuan Guru saja yang berkorelasi positif dan signifikan. Hal itu menunjukkan kepada kita betapa signifikan aspek kegiatan belajar-mengajar di kelas yang di dalamnya kemampuan guru turut tercerminkan guna memberi kontribusi pada hasil belajar. Program pelaksanaan pengajaran, penggunaan buku, ketersediaan sumber belajar dan pemakaian laboratorium bahasa malahan berkorelasi negatif dengan hasil tes tersebut. Namun, koefisien korelasinya pun tidak signifikan.

**b. Kasus Pengajaran Bahasa Jepang**

1) *Rujukan Kurikuler*

Pengajaran bahasa Jepang di perguruan tinggi di Indonesia diasumsikan merupakan kelanjutan dari apa yang telah dikembangkan pada sekolah menengah umum. Sebagaimana dimaklumi, GBPP Mata Pelajaran Bahasa Jepang memberikan arahan bahwa mata pelajaran bahasa Jepang merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagai alat pembinaan hubungan dengan bangsa lain pemakai bahasa Jepang. Dengan pelajaran bahasa Jepang siswa SMU diharapkan memiliki keterampilan awal menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Jepang dengan tingkat penguasaan kosakata dasar lebih kurang 600 kata, penggunaan aksara Kana, pengenalan aksara Kanji sederhana, serta tata bahasa yang sesuai guna menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya dan hubungan antarbangsa melalui tema berdasarkan tingkat perkembangan minat siswa.

Fungsi dan sasaran pengajaran bahasa Jepang tersebut melahirkan kerisauan di kalangan praktisi pengajaran bahasa Jepang, misalnya bagi Ramlan (1999) dan Iskandar (1999), terutama bila dikaitkan dengan tawaran pengajaran bahasa Jepang menurut Kurikulum 1994. Pengajaran bahasa Jepang hanya ditawarkan pada program bahasa kelas III. Kebijakan kurikuler ini tidak hanya akan mempersempit kemungkinan pengembangan keterampilan berbahasa, tetapi menutup penjangkauan tujuan pengajaran bahasa sebagai alat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) *Kebijakan Nasional*

Dalam berbagai bahasan, baik tersirat maupun tersurat, dikemukakan bahwa kedudukan bahasa Jepang sangat penting mengingat hubungan Indonesia dan Jepang terus meningkat dalam berbagai bidang (Ibrahim, 1999). Peran guru bahasa Jepang di SMU sangat strategis karena pada umumnya siswa mempelajari bahasa Jepang itu untuk pertama kali. Penawaran bahasa Jepang hanya pada tahun ketiga SMU program bahasa akan melahirkan kekurang-optimalan pemanfaatan tenaga pengajar bahasa Jepang. Hal itu bisa diatasi, antara lain, dengan mempersiapkan guru dengan kompetensi tambahan lainnya. Dalam hal ini sekolah memperoleh

kewenangan untuk menambah atau mengadakan mata pelajaran bagi siswa yang berminat sesuai dengan kebutuhan sekolah.

3) *Bahasa Jepang di SMU*

Dalam penelitian yang melibatkan 37 sekolah di empat provinsi di Indonesia, Danasasmita (1999) menampilkan temuan-temuan yang menarik. Di sekolah-sekolah yang diteliti, bahasa Jepang cenderung berposisi sebagai mata pelajaran intrakurikuler (66%-94%). Kemenarikan dan kesesuaian bahan bervariasi antara 44%-88%. Data menunjukkan bahwa guru-guru bahasa Jepang berlatar pendidikan bahasa Jepang dengan variasi hanya dalam hal kependidikan dan non-kependidikan.

Dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar bahasa Jepang, 100% guru mengakui menggunakan pendekatan komunikatif. Akan tetapi, ada hal yang menarik dan seperti berseberangan dengan pengakuan sebelumnya, yaitu penggunaan *drill* atau "latih runtun" sebagai teknik yang paling umum digunakan dan adanya sebagian besar guru yang menggunakan metode terjemahan. Di balik temuan bahwa siswa memandang proses belajar-mengajar bahasa Jepang sangat kondusif dan terbuka (80%), guru jarang memberikan umpan balik kepada siswa.

**3. Gagasan Kebijakan**

Keterkaitan global bangsa dalam segala kiprahnya menempatkan bahasa asing pada salah satu posisi yang sangat strategis. Sebagai akibatnya, dalam pengajaran bahasa asing dituntut adanya upaya perbaikan dan pembaharuan kebijakan yang pada gilirannya diharapkan akan mendorong mutu keluaran proses pembelajaran yang lebih baik. Upaya ini akan lebih signifikan lagi tatkala diletakkan pada konteks upaya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa kita. Satu hal yang sangat perlu digarisbawahi di sini ialah bahwa upaya pembaharuan itu hendaknya dilihat sebagai percepatan upaya menjangkau hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki dan pencapaian yang telah diperoleh sampai saat ini. Dengan kata lain, pembaharuan ini bukan langkah yang dimulai dari nol.

Kebijakan yang perlu ditempuh dalam upaya perbaikan pengajaran bahasa asing dapat dikaitkan dengan berbagai variabel yang terkait pada pembelajaran ataupun pemerolehan bahasa. Dengan mengacu pada kon-

disi pengajaran yang dikenal dalam konteks Indonesia, rumusan kebijakan di bawah ini diformulasikan hanya dalam nuansa kontekstual terpilih saja. Formulasi ini diketengahkan, tentu saja, tidak dengan mempradugakan adanya kekomprehensifan hasil pengamatan.

Sebagaimana diutarakan di atas, pilihan-pilihan kebijakan di bawah ini pun tetap menggambarkan potensi dan perolehan yang telah ada dalam konteks pembelajaran bahasa asing, terutama pada sistem persekolahan. Dalam konteks inilah, diketengahkan beberapa di antara kebijakan tersebut, kemudian diiringi oleh berbagai isu yang terkait dengannya.

**Kebijakan pertama** berkenaan dengan perlunya pertimbangan faktor sosiokultural dalam pemerolehan bahasa. Faktor ini meliputi usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan identitas etnis beserta variabel yang terkait erat dengannya. Dalam kaitan dengan faktor usia, Ellis (1994: 201—211) mengetengahkan bahwa pembelajar bahasa yang masih muda pada umumnya lebih berhasil daripada pembelajar yang lebih tua. Salah satu kemungkinan penyebabnya ialah identitas pembelajar yang lebih muda tidak begitu terancam oleh norma bahasa sasaran. Berkenaan dengan jenis kelamin, pembelajar wanita pada umumnya mengungguli pembelajar pria di kelas bahasa dan mereka cenderung mempunyai sikap yang lebih positif. Akan tetapi, pembelajar pria lebih baik dalam menyimak kosakata. Dampak dari kelas sosial secara khusus bergantung pada tatanannya.

Sehubungan dengan identitas etnis, dampak 'jarak kultural' terhadap pembelajaran bahasa asing diyakini sebagai sesuatu yang penting diperhatikan. Pembelajar yang dekat dengan budaya bahasa sasaran kemungkinan akan mengungguli pembelajar yang jauh dari budaya sasaran. Pada umumnya, pembelajar yang mempunyai sikap positif terhadap identitas etnisnya sendiri dan terhadap budaya sasaran dapat diharapkan bisa mengembangkan motivasi yang kuat dan tingkat kemahiran berbahasa asing yang tinggi sambil mempertahankan B1-nya sendiri. Akan tetapi, pembelajaran bahasa asing bisa juga berhasil bagi pembelajar yang mempunyai sikap non-integratif terhadap budaya sasaran.

Hubungan antara keempat faktor sosial di atas dan pembelajaran bahasa bersifat sangat musykil. Ellis (1994: 211) mengingatkan,

> *... it is not age, sex, social class, or ethnic identity that determine L2 proficiency, but rather the social conditions and attitudes associated with these variables. Also, the factors interact among themselves, and their effect on learning depends to a large extent on the setting.*

Terlihat dalam pernyataan itu bahwa di lingkungan faktor sosial yang empat itu, segala kondisi serta sikap sosial akan menentukan kemahiran berbahasa asing, baik dari sisi setiap variabel itu maupun dari hasil interaksi antarvariabel itu sendiri.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, terdapat berbagai isu yang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya, antara lain masalah pengajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini, perhatian atas peran gender, kepedulian terhadap kelas sosial, perbedaan latar belakang bahasa etnis, pandangan tentang kapan pelajaran bahasa Inggris harus dimulai, dan tahapan sistem persekolahan mana yang harus segera dituntaskan. Kajian serta uji-coba untuk hal ini perlu segera dilakukan. Selain itu, masalah gender serta kelas sosial perlu dimasukkan dalam pertimbangan penataan pengajaran bahasa asing, baik pada tingkat makro (pada pengembangan kurikulum dan silabus) maupun mikro (dalam implementasi di ruang kelas). Bahwa pembelajar wanita mempunyai kesukaan dan kelebihan tertentu dalam pemerolehan bahasa merupakan kenyataan yang perlu selalu diperhitungkan.

**Kebijakan kedua** berkenaan dengan penataan faktor masukan bahasa sasaran dan intensitas interaksi dalam proses pembelajaran dengan tetap menempatkan posisi pembelajar sebagai variabel penentu keberhasilan. Tatkala berbicara tentang masukan dan interaksi dalam konteks pemerolehan dan pembelajaran bahasa, Chomsky (1965: 33) memberikan penegasan yang berhubungan dengan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut

> *... (the learner's) knowledge of the language, ..., goes far beyond the presented primary linguistic data and is in no sense an "inductive generalization" from these data. ... certain kinds of data and experience may be required in order to set the language-acquisition device into operation,*

> *..., it would not be at all surprising to find that normal language learning requires use of language in real-life situations, in some way. But this, if true, would not be sufficient to show that information regarding situational context ... plays any role in determining how language is acquired, once the mechanism is put to work and the task of language learning is undertaken by the child.*

Sekurang-kurangnya ada empat hal penting yang bisa dipetik dari paparan di atas. Pertama, pengetahuan bahasa itu tidak sekadar hasil generalisasi induktif dari data kebahasaan saja. Kedua, data dan pengalaman tertentu diperlukan untuk mempelatuk pemerolehan bahasa. Ketiga, penggunaan bahasa dalam situasi nyata diperlukan. Keempat, peran pembelajar sangat menentukan pemerolehan itu.

Terdapat berbagai isu yang berkaitan dengan strategi ini: profisiensi guru, kemampuan metodologis, konkurensi dalam pendidikan guru, dan masalah kefasihan versus kecermatan. Untuk memberikan masukan bahasa sasaran secara baik, profisiensi bahasa sasaran dari guru merupakan prasyarat yang sangat fundamental. Begitu juga kemampuan guru untuk menjalankan proses pembelajaran. Kemampuan metodologis yang dimiliki guru akan berkontribusi terhadap efisiensi pemanfaatan masukan oleh siswa itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah penguatan prinsip konkurensi dalam lembaga pendidikan tenaga kependidikan: penguatan kemahiran bahasa sasaran dilakukan relatif bersamaan dengan pelatihan metodologis dan pedagogik yang relevan. Dalam hal ini lembaga pendidikan guru bahasa tidak lagi hanya memprioritaskan salah satu di antara prinsip fluensi dan akurasi, yaitu prinsip pentingnya kefasihan dan pentingnya kecermatan pembelajar dalam bahasa targetnya.

**Kebijakan ketiga** berkaitan dengan manfaat transfer positif dan perlunya penghindaran interferensi. Istilah transfer digunakan secara meluas pada belahan pertama dari abad kedua puluh ini. Istilah ini digunakan secara meluas di dalam aliran behavioris dengan merujuk ke proses psikologis yang di dalam proses itu pembelajaran terdahulu dialihkan ke situasi pembelajaran yang baru. Secara lebih spesifik, transfer sejenis ini disebut dengan transfer proaktif sebagai lawan dari transfer retroaktif. Tatkala seseorang telah rampung belajar tentang suatu tugas, maka pem-

belajaran ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran berikutnya. Proses ini melahirkan perbedaan yang biasa dikenal dengan transfer positif dan transfer negatif. Transfer positif dikenal pula dengan istilah fasilitasi, sedangkan transfer negatif sering disebut dengan interferensi. Pada pokoknya kedua istilah ini dipakai dalam kaitan dengan akibat dari transfer itu sendiri: apakah melahirkan sesuatu yang berterima atau yang tidak berterima.

Transfer adalah suatu proses. Akan tetapi, dalam melihat kedua jenis transfer di atas ada semacam pencampuradukan antara proses transfer itu sendiri dan hasil transfer itu dalam bentuk produk yang salah atau yang benar. Sehubungan dengan kekisruhan ini, Gass dan Selinker (1994: 56) memperingatkan agar kita berhati-hati dalam menggunakan kedua kategori transfer itu karena *the terminology suggests a confusion between product and process*.

Sehubungan dengan konsep interferensi, interferensi itu terbagi atas dua jenis: hambatan retroaktif *(retroactive inhibition)* dan hambatan proaktif *(proactive inhibition)*. Hambatan retroaktif merujuk pada situasi pembelajaran baru yang berdampak negatif terhadap apa yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam hal pembelajaran bahasa, hambatan ini akan mengakibatkan pupusnya atau rusaknya bahasa yang telah dimiliki. Sementara itu, hambatan proaktif sebaliknya.

Istilah interferensi, menurut Dulay, Burt, dan Krashen (1982: 98—99), telah dipakai untuk merujuk pada dua fenomena kebahasaan yang berbeda. Fenomena pertama pada dasarnya bersifat psikologis, sedangkan yang lainnya bersifat sosiolinguistik. Fenomena psikologis merujuk ke pengaruh kebiasaan lama terhadap kebiasaan baru yang sedang dipelajari, sedangkan fenomena sosiolinguistik merujuk ke interaksi bahasa seperti pinjaman dan pengalihan bahasa yang terjadi manakala terjadi sentuhan antara dua masyarakat bahasa. Fenomena sosiolinguistik sebagaimana yang ditemukan oleh Weinreich (1953) dan Haugen (1953) digunakan secara tidak tepat oleh para pendukung analisis kontrastif sebagai dukungan empiris terhadap fenomena psikologis dari transfer negatif. Weinreich (1953) sebagaimana dikutip Dulay, Burt, dan Krashen (1982) memberikan definisi interferensi sebagai akibat dari *familiary with more than one language,* sedangkan Haugen (1953) tatkala berbicara tentang pinjaman bahasa menegaskan bahwa *it is the language of the learner that*

*is influenced, not the language he learns*. Pandangan ini bersilangan dengan hipotesis analisis kontrastif yang menyatakan bahwa interferensi itu disebabkan oleh ketidakkenalan terhadap B2 dan bahwa interferensi itu dimanifestasikan dalam bahasa yang dipelajari, bukan pada B1 pembelajar bahasa itu.

Terdapat beberapa isu terkait yang harus diselesaikan untuk menerapkan kebijakan ini. Isu pertama yang perlu digarap berkenaan dengan apakah pendekatan alami harus diadopsi atau tidak. Dengan kata lain, diperlukan penentuan apakah siklus dengan urutan menyimak, berbicara, membaca dan menulis harus diikuti secara ketat atau apakah prioritas dapat dikenakan kepada salah satu atau beberapa di antara keterampilan berbahasa tersebut. Isu berikut yang perlu memperoleh perhatian itu berkaitan dengan pertanyaan apakah kesalahan dalam berbahasa sasaran itu merupakan akibat interferensi atau justru merupakan akibat alami kemusykilan bahasa sasaran itu sendiri. Dalam menjawab secara tuntas permasalan ini diperlukan kajian dan telahan khusus yang serius.

**Kebijakan keempat** berkaitan dengan pengembangan maksimal daya kognitif serta tingkat kreativitas pembelajar bahasa. Menurut Ellis (1994), teori pemerolehan bahasa itu dilandasi oleh asumsi mengenai penguasaan bahasa yang bersifat bertahap *(gradable)* dan terkait unsur "mengetahui" (*knowing*). Oleh karena itu, dalam pengertian inilah teori-teori dalam pemerolehan bahasa tersebut bersifat kognitif. Kerangka teoretis yang didukung Ellis (1994: 349) dengan sedikit tambahan adalah apa yang diketengahkan oleh Gass. Perkembangan pemerolehan bahasa itu meliputi (1) masukan teramati *(noticed input)*, (2) masukan terpahami *(comprehended input)*, (3) pungutan *(intake)*, dan (4) integrasi *(integration)*. Masukan teramati yang merupakan tahap pertama dari pemerolehan terdiri atas berbagai bentuk masukan bahasa dengan sifat dan karakteristik yang mudah dicerna karena ke*ebreh*annya *(saliency)* dan juga karena pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar bahasa itu sendiri. Tidak semua masukan teramati secara otomatis menjadi masukan terpahami. Demikian juga selanjutnya, tidak semua masukan terpahami secara otomatis menjadi pungutan, yaitu proses yang menjembatani masukan bahasa sasaran dengan perangkat kaidah yang diinternalisasi oleh pembelajar bahasa. Sebelum diintegrasikan, pungutan itu belum menjadi bagian dari

pengetahuan implisit pembelajar bahasa itu, pengetahuan yang dikenal dengan sebutan sistem bahasa-antara *(interlanguage)* sebagaimana diperkenalkan oleh Selinker di awal tahun 70-an.

Selinker, sebagaimana dikutip Ellis (1994: 351), mengidentifikasi lima proses kognitif yang utama dan bersangkutan dengan pemerolehan bahasa kedua: (1) transfer bahasa—beberapa tetapi tentu saja tidak semua butir kaidah dan sub-sistem bahasa-antara bisa ditransfer dari bahasa pertama; (2) transfer pelatihan—beberapa unsur bahasa-antara bisa berasal dari cara pengajaran terhadap pembelajar; (3) strategi pembelajaran bahasa kedua—pendekatan pembelajar terhadap bahasa yang dipelajari berkontribusi terhadap pemerolehan itu sendiri; (4) strategi komunikasi bahasa kedua—pendekatan pembelajar terhadap komunikasi dengan penutur asli dalam bahasa sasaran; (5) overgeneralisasi bahan bahasa sasaran—beberapa unsur bahasa-antara jelas-jelas merupakan hasil dari overgeneralisasi dari kaidah bahasa sasaran dan sifat-sifat semantiknya.

Bahasa-antara yang dihipotesiskan oleh Selinker itu pada dasarnya merujuk ke pergeseran gradual dari bahasa ibu ke bahasa sasaran melalui serangkaian bahasa-bahasa-antara. Sebagaimana dikutip Beebe dan Zuengler (1983), Corder (1971) menyebut bahwa bahasa-antara itu dialek transisional *(transitional dialects)*, sedangkan Nemser (1971) menggunakan istilah sistem aproksimatif *(approximative systems)*. Hipotesis Selinker ini sejalan dengan hipotesis Dulay, Burt, dan Krashen (1982) yang dikenal dengan sebutan hipotesis konstruksi kreatif. Konstruksi kreatif merujuk ke proses bawah sadar yang dengan proses itu pembelajar bahasa secara bertahap mengorganisasi bahasa yang didengarnya menurut *rules that they construct to generate sentences* (Dulay, Burt, Krashen, 1982: 11). Dirumuskan dalam hipotesis ini bahwa pemerolehan bahasa kedua itu sebagai reformulasi kognitif yang bersifat gradual dari hipotesis kebahasaan yang dibuktikan oleh tuturan pembelajar bahasa sasaran itu.

Pemerolehan bahasa pada anak, dan sering dianalogikan bagi pemerolehan orang dewasa, ditandai dengan tarik-menariknya dengan kreativitas dan imitasi. Tatkala mencoba melihat pandangan romantisis dan realis, Jakobson (1968: 13—14) melihat cercah butir kebenaran pada keduanya dengan mengatakan yang berikut.

*... on the one hand, the creativity of the child is obviously not pure creativity, or invention out of nothingness; on the other hand, however, neither is his imitation a mechanical and involuntary adoption. The child creates as he borrows.*

Isu yang terkait dengan strategi ini ada di seputar permasalahan kebermaknaan isi dan interaksi, pengajaran bahasa Inggris intensif versus ekstensif dan peluang pemanfaatan bahasa sasaran.

**Kebijakan kelima** berkenaan dengan pemanfaatan bahasa ibu secara efektif dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Seberapa jauh peran bahasa ibu dalam belajar bahasa kedua atau asing, Jesperson (1922: 148) sejak lama telah mengetengahkan sudut pandang yang lain tatkala ia berkata berikut.

*... the child in question hardly learns either of the two languages as perfectly as he would have done if he had limited himself to one ... Secondly the brain effort required to master two languages instead of one certainly diminishes the child's power of learning other things.*

Setelah mengkaji berbagai hipotesis serta temuan penelitian, Larsen-Freeman dan Long (1991: 106—107) berkesimpulan bahwa peran B1 dalam pemerolehan bahasa sasaran itu jauh lebih musykil dan tidak senegatif sebagaimana diduga semula oleh para pendukung hipotesis analisis kontrastif. Sebagaimana disinggung terdahulu, hipotesis analisis kontrastif itu mengemukakan bahwa tatkala dua bahasa itu serupa, transfer positif akan tejadi; manakala berbeda transfer negatif atau interferensi akan muncul. Perbedaan antara B1 dan B2 belum tentu berarti kesulitan bagi pembelajar B2 itu. Bahkan, kesamaan antara B1 dan bahasa sasaran cenderung memunculkan banyak masalah dalam pembelajaran. Begitu juga, identitas struktural yang mirip dalam kedua bahasa itu tidak selalu berbuntut tumbuhnya transfer positif.

Temuan Larsen-Freeman dan Long di atas merupakan penguatan terhadap apa yang telah dirumuskan kira-kira satu dekade sebelumnya oleh Dulay, Burt, dan Krashen (1982: 97). Rumusannya antara lain bahwa mayoritas kesalahan gramatikal tidak menggambarkan gramatika

bahasa ibu, baik pada anak-anak maupun dewasa; pembelajar B2 membuat banyak kesalahan dalam struktur gramatika yang serupa di B1 dan B2—kesalahan yang semestinya tidak dibuat bila transfer positif berjalan; penentuan kebenaran gramatikal B2 oleh pembelajar B2 lebih bertemali dengan jenis kalimat B2 ketimbang dengan struktur B1-nya sendiri; dan kesalahan fonologis memperlihatkan pengaruh B1 secara lebih kuat ketimbang kesalahan gramatis, meskipun jumlah yang cukup besar dari kesalahan fonologis B2 mirip dengan kesalahan yang dibuat oleh pembelajar B1 monolingual, dan hanya sejumlah kecil kesalahan fonologis dalam membaca dapat diusut sampai ke B1 pembelajar.

Isu yang terkait dengan kebijakan terakhir ini ialah kemungkinan dikembangkannya ragam bahasa Inggris yang mungkin akan disebut bahasa Inggris-Indonesia. Dengan melihat cukup dominannya peran B1, logat kental yang mengindonesia merupakan ciri linguistik yang secara realistik memang harus diterima. Untuk itulah, gagasan pengembangan bahasa Inggris-Indonesia bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau yang harus dihindari. Selain itu, isu lain adalah jawaban yang sangat diperlukan tentang apakah pengajaran B2 bagi pembelajar dewasa itu harus berpijak dari bagaimana pembelajar dewasa itu tatkala mereka anak-anak bereksperimen dengan penggunaan bahasa yang telah mendominasi kehidupannya.

**4. Simpulan**

Ringkasnya, terdapat beberapa kebijakan yang bertemali dengan pengajaran bahasa asing dan perlu dirumuskan dan dikembangkan dalam menanggapi kondisi-kondisi pengajaran serta menjawab tuntutan kebutuhan lingkungan yang ada. Pertama, perlu dilakukan pengkajian yang cermat terhadap faktor-faktor sosial dalam pemerolehan bahasa, yaitu usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan identitas etnis beserta variabel yang terkait erat dengannya. Hal ini terkait dengan berbagai isu yang perlu dituntaskan berkenaan dengan pengajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini; perhatian sosial akan peran gender; kepedulian terhadap kelas sosial; dan perbedaan latar belakang bahasa etnis. Kedua, perlu dikembangkan perhatian atas faktor masukan bahasa sasaran dan intensitas interaksi dalam proses pembelajaran dengan tetap menempatkan posisi pembelajar sebagai variabel penentu keberhasilan. Faktor masukan bahasa sasaran akan men-

syaratkan guru yang berprofisiensi bahasa sasaran memadai dan berkemampuan metodologis yang terandal.

Kebijakan ketiga yang digagas di sini berkenaan dengan perlunya perhitungan manfaat transfer positif dan pengkajian cara penghindaran interferensi. Kebijakan ini perlu dikembangkan karena pembelajaran bahasa Inggris dalam persekolahan kita, khususnya SMU, terjadi dengan melibatkan pembelajar dewasa. Dalam hal ini muncul berbagai isu terkait seperti persoalan pendekatan alami dan masalah interferensi yang diperhadapkan dengan kemusykilan bahasa sasaran. Gagasan kebijakan keempat lebih bersifat psikologis-pedagogis, yaitu perlunya pemanfaatan semaksimal mungkin daya kognitif serta tingkat kreativitas pembelajar bahasa. Karena pembelajar bahasa Inggris dan pembelajar bahasa asing pada umumnya itu adalah pembelajar dewasa, pertimbangan pemanfaatan daya kognitif dan daya kreatif itu menjadi sangat relevan. Upaya ini tentu saja akan menyentuh berbagai isu terkait seperti masalah kebermaknaan isi dan interaksi, pengajaran bahasa asing intensif versus ekstensif dan peluang pemanfaatan bahasa sasaran. Berkaitan dengan kebijakan ini adalah strategi pemanfaatan bahasa ibu secara efektif dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa asing. Dalam konteks ini muncul pendapat perlunya pengembangan bahasa Inggris ala Indonesia, seperti halnya muncul berbagai ragam bahasa Inggris di berbagai penjuru bumi ini.

Begitulah, bahasan makalah ini masih menyisakan banyak aspek, lingkungan, dan tataran yang belum tersentuh. Gagasan kebijakan yang diketengahkan masih dalam format gagasan strategis yang memerlukan penjabaran operasional lebih lanjut. Bahasan ini juga belum secara utuh menerawang pengajaran bahasa asing dalam nuansa demokratisasi yang merebak dan semangat persaingan bebas dalam keseluruhan kehidupan saat ini. Gambaran nyata yang diketengahkan di muka hanya merasuk khusus ke sistem pendidikan formal yang lazimnya ditata dan dikelola oleh institusi formal. Permasalahan yang selanjutnya patut dikaji berkaitan dengan posisi, fungsi, dan kewenangan serta tingkat kemerdekaan lembaga nonformal dalam upaya peningkatan pengajaran bahasa asing itu. Keterbatasan yang dimiliki institusi pendidikan formal jangan-jangan membuka peluang untuk adanya distribusi kekuasaan dalam penanganan pengajaran bahasa asing itu. Misalnya, distribusi fokus penanganan kompetensi komunikatif—kompetensi gramatikal reseptif di institusi formal

dan kompetensi komunikatif produktif di institusi nonformal.

Dalam hal persaingan bebas, kebijakan yang tampaknya perlu dikembangkan berkelindan dengan dimungkinkannya lembaga asing menjarah kawasan pengajaran bahasa asing di Indonesia. Di satu sisi kemungkinan ini diduga akan mampu mempercepat peningkatan mutu, di sisi lain bisa mengubur lapangan kerja dalam jumlah yang banyak.

## Daftar Pusataka


Abdul-Hamied, F. 1999. *Pendidikan Bahasa Asing di Perguruan Tinggi: Sudut Pandang Linguistik Terapan dalam Kasus Bahasa Jepang*. Makalah Kunci Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Jepang, UGM UC 29—31 Oktober.

-------. 1998. *Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26-30 Oktober.

-------. 1998. Strategi Pembaharuan Pengajaran Bahasa Asing. *Mimbar Pendidikan Jurnal Pendidikan*. No.3 Tahun XVII, hlm. 19-23.

-------. 1997. *Faktor Pembelajaran dan Pemerolehan Bahasa: Kerangka dan Realita*. Makalah Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Unika Atmajaya.

-------. 1993. *Laporan Nasional Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tema Pengajaran Bahasa Inggris/di SMA Negeri*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Depdikbud.

-------. 1988. *Keterpelajaran dalam Konteks Pemerolehan Bahasa*. Makalah Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa II Unika Atmajaya, Jakarta, 23—24 Agustus.

Alatis, J. E., H.B. Altman, dan P.M. Alatis (penyunting). 1981. *The Second Language Classroom: Directions for the 1980's*. New York: Oxford University Press.

Bailey, K.M., M.H. Long, dan S. Peck (penyunting). 1983. *Second Language Acquisition Studies*. Rowley: Newbury House Publishers.

Beebe, L.M. dan Zuengler, J. 1983. *Accommodation Theory: An Explanation for Style Shifting in Second Language Dialects*, dalam N. Wolfson dan E. Judd (penyunting), *Sociolinguistics and Language*

*Acquisition*. Rowley: Newbury House Publishers, Inc.

Bloomfield, L. 1933, 1966. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Coleman, H. (penyunting). 1996. *Society and the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.

Danasasmita, W. (1999). *Rangkuman Hasil Penelitian Survey Pengajaran Bahasa Jepang SMU se-Indonesia*. Seminar Nasional Bahasa Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang di IKIP Bandung, 23-24 Februari 1999.

Dulay, H., M. Burt, dan S. Krashen. 1982. *Language Two*. New York: Oxford University Press.

Ellis, R. 1994. *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.

Gass, S.M., dan L. Selinker. 1994. *Second Language Acquisition: An Introductory Course*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Ibrahim, M.D. 1999. *Kurikulum 1994 SMU Mata Pelajaran Bahasa Jepang*. Seminar Nasional Bahasa Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang di IKIP Bandung, 23-24 Februari.

Iskandar, T. 1999. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bahasa Asing*. Seminar Nasional Bahasa Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang di IKIP Bandung, 23-24 Februari.

Jakobson, R. 1968. *Child Language Aphasia and Phonological Universals*. The Hague: Mouton.

Jesperson, O. 1922. *Language Its Nature, Development and Origin*. London: George & Unwin.

Krashen, S.D. 1982. *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon Press.

Larsen-Freeman, D. dan M.H. Long. 1991. *An Introduction to Second Language Acquisition Research*. London: Longman.

Ramlan, E. 1999. *Permasalahan PBM Bahasa Jepang di Indonesia (SMU)*. Seminar Nasional Bahasa Jepang dan Pendidikan Bahasa Jepang di IKIP Bandung, 23-24 Februari.

Richards, J.C. 1998. *Beyond Training*. Cambridge: Cambridge University Press.

Stern, H.H. 1983. *Fundamental Concepts of Language Teaching*. London: Oxford University Press.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Rabu, 10 November 1999
Pukul : 08.00--09.00
Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Asing
Penyaji Makalah : Fuad Abdul Hamied
Pemandu : Soeseno Kartomihardjo
Pencatat : Junaiyah Hamid Matanggui

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
   a. Keluhan guru mengenai metode dalam berbagai penataran yang ada selama ini adalah bahwa sering penataran yang satu menghapus penataran yang lain. Bagaimana pendapat Bapak?
   b. Apa benar wanita pada umumnya lebih pandai berbahasa daripada pria. Kalau benar, mengapa tidak dipisahkan saja kelas wanita dari kelas pria?

2. H. KMA. M. Usop, Universitas Palangka Raya
   a. Menurut kesan saya, pengajaran bahasa masih didominasi oleh pengajaran secara gramatikal dan masih kelihatan sekali digunakannya proses penerjemahan.
   b. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *mother tongue theory*?

3. Nuril Huda, Universitas Negeri Malang
   a. Saya ingin mengajukan tiga isu. Pertama, pemasyarakatan bahasa asing sejak dini, misalnya sejak kelas 3 atau kelas 4, sebagai muatan lokal. Menurut saya, hal itu dapat menjadi masalah karena dengan guru, metode, materi seadanya; bahkan di sekolah yang lebih atas belum tentu ada. Hal itu tentu saja disayangkan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Sementara itu, di Malaysia anak-anak sudah fasih berbahasa Cina karena sejak kecil diajari.

b. Saya merasa tidak ada masalah dengan "penjarahan" pengajaran bahasa asing karena siapa pun boleh. Saya pikir tidak ada larangan mereka beroperasi di sini. Oleh karena itu, harus ada standar pengajaran yang ditetapkan. Bahkan, perguruan tinggi boleh bekerja sama dengan pihak asing dalam pengajaran dengan menggunakan bahasa asing sampai 50%; kerja sama itu dapat dilakukan bahkan tanpa izin menteri. Akan tetapi, kerja sama itu harus dalam rambu-rambu tertentu.

c. Kemudian, bagaimana status bahasa asing yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Cina dan bahasa Arab, karena pemakaian itu cukup banyak? Saya ingin menganalogkan hal itu dengan apa yang terjadi di negara lain, misalnya di Amerika Serikat. Di sana juga terdapat bahasa Cina yang dipakai oleh banyak penuturnya. Di Inggris terdapat bahasa Urdu oleh orang India dan Pakistan serta di Melbourne banyak orang Indonesia berbahasa Indonesia. Akan tetapi, statusnya tetap sebagai bahasa asing. Untuk itu, **saya usulkan agar bahasa Cina dan bahasa Arab di Indonesia itu tetap berstatus sebagai bahasa asing**. Apakah kita perlu membinanya?

4. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok

a. Apakah tujuan resmi pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah di Indonesia? Kalau tidak salah, tujuannya ialah agar siswa dapat memahami bahasa tulis secara fasih. Artinya, mereka dapat memahami bacaan. Karena itu, saya kira kita perlu menyusun apa sebenarnya tujuan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Tujuan sekarang ini sudah tidak tepat lagi.

b. Saya usulkan agar tujuannya ialah tujuan maksimalis, yaitu siswa menjadi bilingualis, dapat berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia; dan tujuan minimalis, yaitu siswa pandai membaca teks bahasa Inggris. Jika ingin pandai berbicara, mereka harus kursus atau belajar di tempat lain. Saya kira tujuan minimalis ini dapat kita capai asalkan kita banyak memperkenalkan kosakata.

5. A. Latief, Pusat Bahasa

a. Mengenai kebijakan bahasa, bagaimana hubungannya dengan kebijakan pendidikan, pada bagan Anda, **kebijakan bahasa** berada

di bawah kebijakan pendidikan dengan akibat bahwa kebijakan pendidikan mempengaruhi kebijakan bahasa. Apakah tidak mungkin kebijakan bahasa mempengaruhi kebijakan pendidikan atau setidak-tidaknya terdapat saling pengaruh di antara keduanya sehingga paling tidak ada saling komunikasi antara pejabat pembuat keputusan di bidang pendidikan dan pembuat kebijakan bahasa. Dengan demikian, kebijakan bahasa hendaknya ditampung oleh Pemerintah untuk dijabarkan di bidang pendidikan.

b. Siapakah yang berhak menentukan bahasa apa saja yang diperlukan dalam bidang pendidikan, apakah bergantung pada keperluan sesaat, apakah perlu dirumuskan secara umum, bagaimana mekanisme untuk menentukan bahasa yang diperlukan itu. Pengalaman menunjukkan bahwa bahasa utama Eropa diajarkan, tetapi kemudian dihapuskan. Oleh karena itu, hal seperti itu perlu dipertimbangkan di dalam kebijakan yang akan disusun nanti.

6. H. Suparno, Balai Bahasa Surabaya

a. Ada satu hal yang belum disebutkan di dalam makalah ini, yaitu kelembagaan. Kebijakan apa yang harus ditempuh di dalam menghadapi semaraknya pertumbuhan lembaga-lembaga kursus dewasa ini, yang memasuki kawasan pendidikan. Hal itu dapat menjadi mitra atau menjadi rival.

b. Dalam dunia pendidikan terdapat aspek internal siswa, yang sering terlupakan, yaitu motivasi belajar. Masih banyak siswa yang belajar hanya untuk memperoleh nilai baik atau untuk lulus, bukan untuk menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Kalau belajar bahasa, belum sampai pada tahap menguasai bahasa itu. Akibatnya, penguasaan materi untuk memenuhi syarat ujian lebih menonjol daripada untuk menguasai bahasa. Bagaimana hal ini dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mempelajari bahasa asing?

7. Yus Rusyana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

a. Yang kita bicarakan hendaknya ialah bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa asing dalam hubungannya dengan pendidikan nasional. Kita tidak usah sampai menyentuh penentuan bidang-bi-

dang materi, seperti metode dan teknik pendidikan.

b. Kita harus mewaspadai akan adanya hal-hal yang menjadi "ancaman" bagi pengajaran bahasa asing.

Komentar Pemandu (Soeseno Kartomihardjo)

Orang asing atau lembaga asing yang mengajar atau menyelenggarakan pendidikan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang memadai.

**B. Jawaban**

1. a. Penataran memang perlu dikaji ulang secara serius karena penataran itu tidak berhasil baik, banyak guru yang justru tidak mempraktikkan hasil penataran. Bagi mereka, mungkin berlaku pendapat bahwa semua teori akan diterima, tetapi **saya akan tetap mengajar dengan cara saya**.

   b. Ada kajian di luar negeri yang menunjukkan bahwa wanita lebih menonjol pada aspek fonologis dan pilihan-pilihan leksikal tertentu, tetapi dalam hal analisis gramatikal pria pada umumnya lebih baik. Pemisahan kelas pria dan wanita dapat dipertimbangkan menurut kebutuhan.

2. a. Bahwa pengajaran secara terjemahan dan gramatikal cenderung terjadi, mudah-mudahan hal itu hanya terjadi di tempat tertentu saja. Akan tetapi, jika masih terjadi juga, memang hal itu beralasan karena para pengajar lebih merasa "enak" di situ; itulah yang "dikuasainya". Untuk apa ia mengajarkan bahasa komunikatif, sedangkan ia merasa tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa itu.

   b. Dalam teori pengajaran, ada dua hal yang berkaitan dengan bahasa ibu, yaitu interferensi dan fasilitasi. Agaknya fasilitasi itu yang dapat dijadikan modal agar seseorang dapat mempelajari dengan baik.

3. a. Ya atau tidaknya pengajaran bahasa Inggris di SD bergantung pada syarat tertentu. Jika diajarkan, bahasa Inggris harus diajarkan dengan bersungguh-sungguh. Dalam pertemuan guru-guru

bahasa Inggris di Bandung beberapa tahun yang lalu terdapat satu rumusan yang cukup baik, yaitu karena variabel yang akan diajarkan banyak dan bahasa Inggris itu akan menjadi dasar bagi anak-anak dalam pengembangan berikutnya, persyaratan pengajaran yang diterapkan harus lebih ketat. Janganlah pengajaran bahasa Inggris hanya untuk menaikkan gengsi sekolah.

b. Saya sependapat dengan Pak Gani bahwa lembaga asing atau orang asing boleh beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, bersiap-siaplah para guru bahasa asing yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu untuk tergusur. Saya sependapat dengan Prof. Soeseno bahwa siapa pun yang mengajar harus memenuhi kualifikasi itu.

c. Fokus pengajaran yang paling mutakhir di sekolah adalah pelajaran membaca. Itulah yang realistis yang dapat dilakukan guru karena tidak dibebani dengan beban yang berat.

4. Saya setuju dengan tujuan maksimalis dan minimalis yang diajukan Pak Asim Gunarwan, tetapi persoalannya adalah saya bukan pembuat kebijakan pendidikan pada tingkat makro.

5. Saya sepakat dengan Pak Nuril bahwa suatu bahasa harus jelas kedudukannya; apakah ia termasuk bahasa asing atau bukan.

6. Saya setuju dengan usul Pak Latief agar kebijakan bahasa jangan menjadi akibat dari kebijakan pendidikan yang lebih makro. Mungkin pada masa yang akan datang usul itu akan mudah terwujud karena adanya perubahan sistem pemerintahan kita ke arah yang lebih demokratis.

7. Saya setuju jika kita hanya berbicara pada tingkat kebijakan bahasa, bukan pada aspek teknis.

8. Tentang lembaga-lembaga nonformal, pada hemat saya, akan terjadi persaingan guru-guru asing itu. Oleh karena itu, keadaan itu menjadi serius bagi para penghasil tenaga guru. Mereka harus menyiapkan

guru yang berkualitas tinggi sehingga para guru itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih baik dan lebih terbuka.

9. Aspek internal tampaknya merupakan gambaran nyata motivasi yang ada pada masyarakat kita, yaitu lebih mementingkan motivasi formal ketimbang motivasi esensi atau substansi.

# SARANA UJI KEMAHIRAN BERBAHASA SEBAGAI SALAH SATU PRASARANA PEMBANGUNAN BANGSA

**Sugiyono** dan **A. Latief**
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

## 1. Pengantar

Sejak diresmikannya *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD) pada tahun 1972 berbagai program kebahasaan dan kesastraan telah direncanakan dan dilaksanakan. Dengan segala kekurangannya, program itu telah menghasilkan, antara lain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kamus ilmu dasar, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, sejumlah besar istilah bidang ilmu, organisasi profesi kebahasaan, kegiatan berkala berskala nasional dan regional (Bulan Bahasa, Kongres, Majelis Bahasa) dan sejumlah kegiatan pemasyarakatan bahasa dan sastra dari hari ke hari. Hasil ini dimungkinkan, antara lain, karena adanya politik bahasa nasional 1975 yang kemudian didukung oleh rumusan dalam "Garis-Garis Besar Haluan Negara" pada tahun-tahun selanjutnya. Puaskah kita terhadap hasil ini?

Jawaban terhadap pertanyaan di atas tentu akan sangat beragam, mulai dari yang sangat puas sampai yang sangat kecewa; tentu dengan alasannya masing-masing. Oleh karena itu, apa pun jawabannya tidak perlu merisaukan kita. Yang lebih penting untuk dipikirkan ialah bagaimana memadukan hasil dalam bidang kebahasaan yang telah dicapai selama ini--dengan hasil dari program lintas sektoral, seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial--untuk meningkatkan mutu program pembangunan bangsa.

Seperti telah kita ketahui bersama, Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 itu adalah suatu tekad politik yang mengandung pernyataan kebahasaan yang sangat penting. Tekad ini ternyata dapat terwujud melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan perangkat utamanya yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). Teks Proklamasi Kemerdekaan dan UUD tidak akan mungkin

ada sekiranya para pahlawan, perintis, dan pejuang kemerdekaan itu tidak memiliki kemahiran berbahasa Indonesia (KBI).

Sebelum kita terlibat lebih jauh dalam diskusi tentang kebenaran pernyataan di atas, ada baiknya kalau kita melihat dahulu ketentuan-ketentuan atau pernyataan di dalam UUD yang erat kaitannya dengan butir-butir dalam Sumpah Pemuda itu dan mungkin ada relevansinya dengan masalah kemahiran berbahasa Indonesia.

Pasal 1, ayat (1) : "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik"

Pasal 36 : "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"

Pasal 26, ayat (1) : "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Ayat (2) : "Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang."

Alinea 4 : "Kemudian daripada itu ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...."

Keterkaitan Pasal 1, ayat (1) dan Pasal 36 dengan butir-butir Sumpah Pemuda tampaknya sudah sangat jelas, tetapi Pasal 26, ayat (1) dan (2) membuat kita bertanya apakah syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang itu mencakup segi bahasa Indonesia dan berlaku juga bagi bangsa Indonesia asli? Sulit kita membayangkan jika ada suatu negara atau bangsa yang memiliki bahasa negara tertentu, seperti bahasa Indonesia, tetapi penduduknya tidak mahir berbahasa Indonesia. Mungkinkah bangsa ini mampu mencapai tujuan pembangunan nasionalnya, seperti yang tercantum pada alinea 4 di atas?

Pernyataan tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kalau penduduk suatu negara itu sudah mahir berkomunikasi dalam bahasa resmi atau bahasa nasionalnya bangsa itu pasti berhasil mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Yang dapat dikatakan ialah makin mahir penduduk itu berkomunikasi dalam bahasa nasionalnya makin utuh pesan pembangunan itu dapat diterima dan makin sedikit kemungkinan terjadinya kesenjangan komunikasi. Keadaan yang demikian

ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pendidikan, tetapi sekaligus juga akan menjamin partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan.

Situasi bangsa dan negara yang amat memprihatinkan saat ini sangat jelas tergambar dengan munculnya istilah-istilah seprti krisis kepercayaan, krisis ekonomi, dan gejala disintegrasi. Kalau kenyataan ini kita kaji sungguh-sungguh bukan mustahil--sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung--malapetaka ini juga bersumber dari tingkat kemahiran berbahasa rakyat Indonesia yang belum ideal (termasuk penghayatan makna Sumpah Pemuda). Lalu, apa yang harus diperbuat?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mungkin ada baiknya kalau kita mencermati situasi yang kita hadapi ini dalam konteks yang lebih luas. Peristiwa yang dialami bangsa Indonesia ini mungkin tidak akan separah yang sekarang seandainya hal itu terjadi tidak dalam era global dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, pembangunan bangsa pada waktu yang akan datang harus pula memperhitungkan kenyataan tersebut.

Seperti diketahui salah satu ciri era global itu ialah hilangnya batas-batas negara dalam hal penyebaran dan penerimaan informasi, baik melalui bahasa nasional masing-masing maupun melalui bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik dalam berbagai dimensi--termasuk bahasa--dan yang sedang berjuang keras mengatasi berbagai masalah lain yang mungkin lebih penting sangat rentan terhadap pengaruh pemakaian bahasa Inggris. Oleh karena itu, wawasan, konsep, atau program baru sangat diperlukan untuk memungkinkan kita berbuat sesuatu agar bahasa Indonesia tetap menjadi tuan setidak-tidaknya di rumahnya sendiri.

Di samping upaya untuk mempertahankan peran bahasa Indonesia sebagai tuan di rumahnya sendiri, peluang juga terbuka lebar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai aktor di pentas luar negeri. Dari informasi yang dapat dikumpulkan ternyata cukup banyak negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan formal dengan jumlah siswa yang tidak sedikit. Selain itu, masih ada kelompok lain yang memerlukan bahasa Indonesia, yaitu tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia, mahasiswa asing yang akan belajar di sini, dan mungkin sejumlah wisatawan.

Berdasarkan uraian di atas masalah kemahiran berbahasa Indonesia

ini tampaknya perlu dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu pokok bahasan dalam politik bahasa yang akan datang. Sebelum kita menentukan sikap atas masalah ini, informasi tambahan mengenai situasi kebahasaan di Indonesia mungkin akan lebih memperjelas masalah yang kita hadapi dan langkah apa yang perlu diambil.

## 2. Situasi Kebahasaan di Indonesia

Situasi kebahasaan di Indonesia amatlah menarik. Selain penggunaan bahasa Indonesia yang terapit oleh penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing, ternyata komposisi bahasa ibu penutur bahasa Indonesia itu menunjukkan perbedaan yang menarik pula. Komposisi penduduk atas bahasa ibunya adalah 86,45% berbahasa ibu bahasa daerah, 12,11% berbahasa ibu bahasa Indonesia, dan 0,64% berbahasa ibu bahasa asing. Jumlah penutur yang berbahasa ibu bahasa Indonesia menunjukkan kecenderungan naik. Demikian juga dengan jumlah mereka yang berbahasa ibu bahasa asing. Hal itu ditunjukkan oleh dominasi penutur yang berusia muda.

| Rentang Usia | Bahasa Indonesia | Bahasa Asing |
|---|---|---|
| 5—24 | 11.423.539 | 445.935 |
| 25—49 | 6.251.239 | 380.826 |
| 50— ... | 1.490.551 | 182.571 |
| Jumlah | 19.165.329 | 1.009.332 |

Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar, tampak bahwa di Indonesia bahasa asing juga tumbuh bersama-sama dengan bahasa-bahasa lain. Dalam tabel tampak ada generasi baru yang tetap memilih bahasa asing itu sebagai bahasa ibunya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa himpitan bahasa asing ternyata tidak hanya terjadi akibat pemakaian bahasa asing sebagai bahasa kedua, tetapi juga pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pertama oleh sebagian penduduk Indonesia. Melihat gejala makin bertambahnya jumlah penutur, himpitan itu akan makin berat selama bahasa ibu itu tetap diberi label bahasa asing.

Di antara penutur bahasa di Indonesia yang seperti itu, terdapat tidak kurang dari 13,41% (24.041.574 jiwa) penduduk Indonesia yang

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bisa berbahasa Indonesia–mulai dari yang baru saja bebas dari buta bahasa Indonesia sampai ke penutur yang paling tinggi tingkat kemahirannya, jumlah itu amatlah kecil. Hingga kini tercatat lebih dari 84,87% penduduk Indonesia yang dapat berbahasa Indonesia. Di balik itu, dari 15,13% yang tidak dapat berbahasa Indonesia, 36,33% di antaranya berusia antara 5—24 tahun, 27,77 % di antaranya berusia 25—49 tahun, dan 39,91 % sisanya berusia di atas 49 tahun. Komposisi buta BI itu menolak dugaan bahwa jumlah buta bahasa Indonesia makin lama akan makin sedikit. Data itu membuktikan bahwa memang ada penurunan jumlah buta BI sekitar 12,14% dari generasi pertama ke generasi kedua, tetapi ada kenaikan 8,56% dari generasi kedua ke generasi ketiga. Mengapa hal itu bisa terjadi? Meskipun bukan satu-satunya, jawabannya mungkin dapat ditemukan dari pelaksanaan program-program seperti **kejar** dan **wajar**.

Bagaimanakah kualitas kedwibahasaan penutur bahasa Indonesia itu? Bertolak dari batasan Haugen, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah dwibahasawan.[1] Tidak kurang dari 131.108.151 jiwa (74,14%) penduduk Indonesia dapat digolongkan ke dalam kelompok dwibahasawan itu.[2] Jika diukur dengan batasan Weinreich atau lebih-lebih batasan Bloomfield,[3] misalnya, jumlahnya pasti tidak sebesar itu. Dari sini tampaklah bahwa penguasaan bahasa Indonesia penutur bahasa daerah dan penutur bahasa asing amatlah beragam tingkatnya. Tercakup di dalamnya, orang yang disebut-sebut telah bebas dari buta bahasa Indonesia sampai ke penutur bahasa Indonesia yang "hampir lupa" bahasa ibunya.

Data-data di atas menunjukkan bahwa penutur bahasa Indonesia yang jumlahnya sekitar 85% penduduk negeri ini mempunyai tingkat kemahiran yang bermacam-macam. Adalah amat mustahil menyamakan kemahiran orang yang berpuluh-puluh tahun mempelajari bahasa Indonesia dengan orang yang baru mendapat status bebas buta BI. Belum dapat dipastikan apakah seseorang dapat digolongkan sebagai penutur yang mahir berbahasa Indonesia–sehingga layak atau dapat mengemban tugas-tugas tertentu–ataukah sekadar orang yang hanya dapat mengucapkan satu atau dua kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam ukuran ekstrem seperti itu secara mudah tingkat kemahiran berbahasa seseorang dapat ditentu-

kan, tetapi dalam skala yang lebih terperinci kemahiran itu lebih sulit dideskripsikan.

### 3. Bahasa Indonesia dan Dunia Kerja

Selain tantangan dari dalam, bahwa tidak mudah mengidentifikasi kemampuan berbahasa Indonesia dan mengidentifikasi tingkat kedwibahasaan seseorang, juga muncul tantangan yang datang dari banyaknya tenaga kerja asing–pada umumnya menduduki posisi penting–yang mau tidak mau memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pemakaian bahasa Indonesia di dalam dunia kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja dalam hubungan dengan pekerja-pekerja asing itu dihadapkan pada dua pilihan: harus tersisih dari peluang kerja yang umumnya menjanjikan atau harus menguasai bahasa asing–yang biasanya juga disertai dengan "menanggalkan" bahasa Indonesia dalam ranah pekerjaan–sehingga dapat meraih peluang itu. Dalam posisi yang dominan itu, dapat diduga dari puluhan ribu tenaga kerja asing di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang mampu berbahasa Indonesia, dan dari sebagian kecil itu pun hanya sebagian kecil lagi yang menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasinya sehari-hari.

Posisi dominan seperti itu tidak dimiliki tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini, antara lain, dibuktikan oleh terlalu kecilnya jumlah dolar yang bisa dibawa pulang tenaga kerja Indonesia dibandingkan jumlah dolar yang dapat dibawa pulang tenaga kerja asing dari Indonesia, betapa pun tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu berlipat-lipat jumlahnya, dibandingkan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia.[4] Berapa pun banyaknya, karena posisinya tidak dominan, tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidaklah mungkin memunculkan fasilitas verbal bahasa Indonesia. Dalam keadaan yang demikian, kemahiran berbahasa Indonesia tidak mempunyai nilai manfaat seperti halnya bahasa asing di Indonesia. Dengan demikian, dalam dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, banyak hal yang tidak mendukung keterpajanan penutur terhadap kemahiran berbahasa Indonesia.

Kepentingan penguasaan bahasa asing telah lama menjadi pertimbangan perusahaan-perusaahaan swasta dalam merekrut tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, akan tersisih dari bursa kerja swasta. Bagi perusahaan swasta, pe-

nguasaan bahasa Indonesia karyawan dianggap telah memadai, tanpa menyadari bahwa kemahiran berbahasa Indonesia tenaga kerja Indonesia itu amat beragam. Tampaknya, pemerintah pun juga beranggapan demikian. Pemerintah memang telah menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia seseorang sebagai syarat penerimaan dan kenaikan golongan PNS, tetapi umumnya hanya sebagai proforma saja. Seorang calon PNS, yang karena pertimbangan tertentu, amat diperlukan, maka nilai bahasa Indonesianya dapat "diatur" atau bahkan tidak diperhitungkan betapa pun amat rendahnya nilai itu.

Dua hal yang dapat disimpulkan dalam kondisi dunia kerja itu. Pertama, masih ada anggapan bahwa bahasa Indonesia itu hanya memiliki satu varian tunggal. Tidak disadari bahwa bahasa Indonesia itu memiliki banyak varian yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Asumsinya adalah setiap orang Indonesia dapat berbahasa Indonesia. Inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja merasa tidak perlu mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia calon karyawannya, kecuali mungkin untuk posisi tertentu di perusahaan penerbitan. Kedua, kemahiran berbahasa Indonesia tidak dianggap bernilai lebih. Seorang pencari kerja merasa tidak perlu atau tidak mau mencantumkan bahwa ia mahir berbahasa Indonesia dalam lamarannya, betapapun ia adalah lulusan jurusan bahasa Indonesia.[5]

Dalam beberapa hal, bahasa Indonesia sebenarnya juga mempunyai daya tarik bagi bangsa-bangsa lain. Banyak data yang menunjukkan banyaknya lembaga pendidikan di berbagai negara (tidak kurang dari 15 negara) yang telah menyelenggarakan BIPA dan bagaimana minat warga negara itu untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk keperluannya masing-masing. Dan, melihat keseriusan mereka yang tercermin dalam tulisan-tulisan mereka baik dalam setiap Kongres Bahasa Indonesia maupun KIPBIPA, pengajaran BIPA di luar negeri itu tidak menunjukkan kecenderungan berakhir. Keatraktifan bahasa Indonesia juga ditunjukkan oleh minat perusahaan asing yang merasa perlu menguji kemampuan berbahasa Indonesia.

**4. Mutu Pemakaian Bahasa Indonesia**

Harus diakui bahwa mutu pemakaian bahasa Indonesia belumlah memuaskan. Ini terbukti oleh amat mudahnya kita menemukan kesalahan ba-

hasa di media massa, media cetak, serta tulisan siswa dan mahasiswa kita. Meskipun karena bukan satu-satunya, pengajaran bahasa Indonesia bisa ditunjuk sebagai penyebab rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia. Mungkin metodenya, mungkin pengajarnya, mungkin materinya, mungkin pula kurikulumnya.[6] Pengajaran tidak mempunyai alat untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia yang standar. Ebtanas mungkin memang dapat menggambarkan posisi tingkat kemampuan berbahasa Indonesia siswa yang satu di atas atau di bawah kemampuan siswa yang lain, tetapi itu menunjukkan kemampuan hasil belajar. Kebermaknaan ebtanas bahkan menjadi berkurang ketika ada ketentuan tentang "nilai mati" untuk bahasa Indonesia. Akibatnya, yang dinilai bagus bahasa Indonesianya oleh ebtanas sebenarnya juga meliputi siswa yang berada di bawah nilai mati itu. Persoalan utama yang dihadapi dalam hal ini adalah tidak adanya deskripsi yang jelas tentang "nilai mati" atau standar minimumnya.

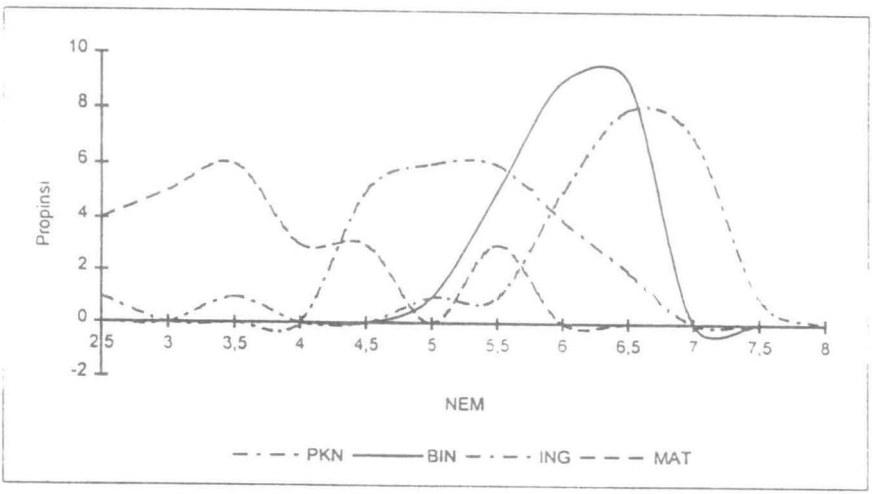


Grafik 1: Kecenderungan NEM Siswa SMU Program Studi Bahasa Tahun 1997/1998

Di atas tampak bahwa kurva NEM bahasa Indonesia cenderung bergerak ke arah positif dengan puncak angka 6,0. Ini berbeda benar dengan kurva NEM matematika yang berpuncak pada 3,5. Ini menjadi bukti telah ada kesepakatan bahwa NEM bahasa Indonesia tidak boleh kurang

dari 5,5 betapapun NEM matematika amat rendah. Pastilah bukan sekadar karena kebetulan kalau keadaan seperti itu juga tampak pada NEM siswa SMU program studi bahasa tahun ajaran sebelumnya dan NEM siswa SD yang tergambar dalam grafik-grafik berikut.

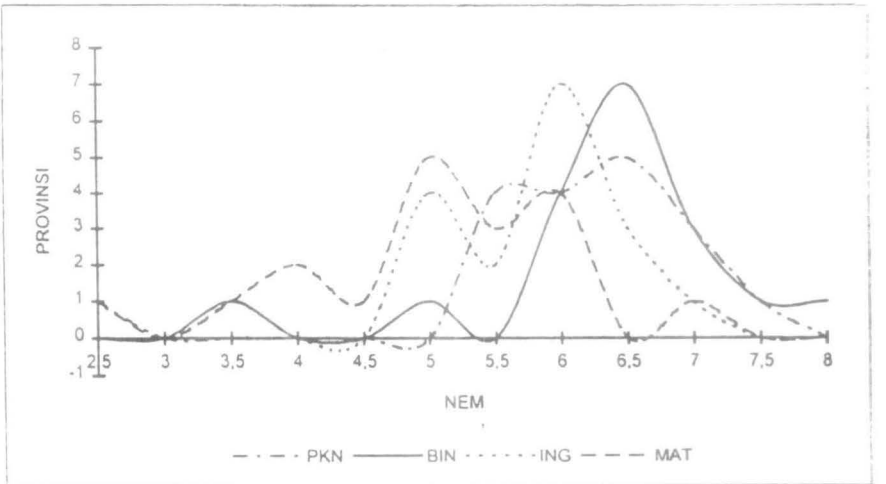


Grafik 2: Kecenderungan NEM Siswa SMU Program Studi Bahasa Tahun 1994/1995

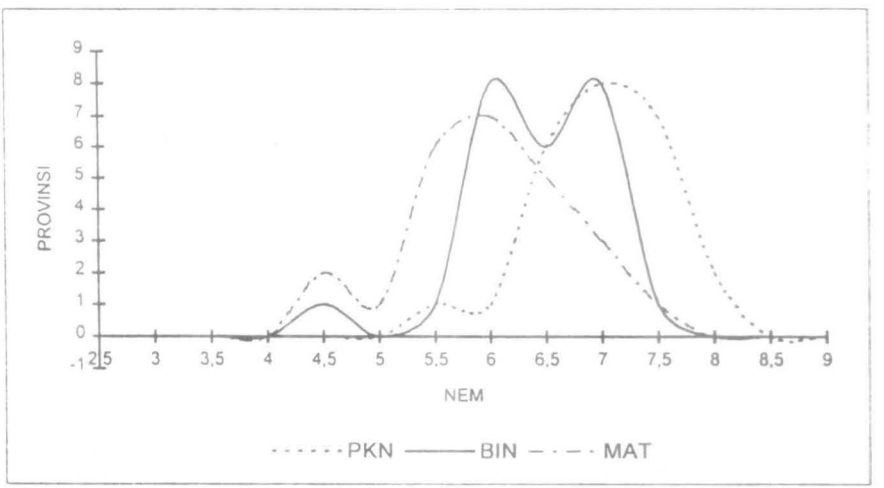


Grafik 3: Kecenderungan NEM Siswa SD Tahun 1997/1998

Dari segi pengukurannya, masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam sistem pengujian bahasa. Umar (1998) menyebutkan tidak kurang dari enam hal yang menjadi kelemahan sistem pengujian bahasa, antara lain adalah bahwa sistem pengujian itu belum memungkinkan untuk membandingkan skor dari tahun ke tahun.

**5. Kemahiran Berbahasa dalam Politik Bahasa Nasional**

Pasal 36 UUD 1945 mencantumkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa dalam kegiatan bernegara, penggunaan bahasa Indonesia diwajibkan. Akan tetapi, hal itu tidak menjamin bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai tingkat kemahiran tertentu dalam berbahasa Indonesia. Bahkan, juga tidak menyiratkan bahwa setiap orang Indonesia harus dapat berbahasa Indonesia sebab tidak setiap warga negara Indonesia harus terlibat langsung dalam kegiatan bernegara itu. Upaya pemberantasan buta bahasa Indonesia–dan buta aksara–tampaknya baru merupakan upaya awal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, pemberantasan buta bahasa Indonesia lebih cenderung merupakan upaya pemerataan pembangunan.[7]

Meskipun begitu, kalau kembali dicermati, Sumpah Pemuda-lah yang menuntut setiap orang Indonesia untuk mampu berbahasa Indonesia. Menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah kewajiban setiap pemuda Indonesia. Jika kata "menjunjung" itu diberi pengertian menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi antaretnis, maka tersirat pula tuntutan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mampu berbahasa Indonesia. Dengan tafsir seperti itu, dapat diterima apabila pemberantasan buta bahasa Indonesiaa sebagai upaya pengindonesian warga negara. Upaya pembahasa-Indonesiaan warga Timtim ketika itu--dengan dana yang tidak sedikit--dapat diterima sebagai suatu keharusan, tidak saja karena dengan bahasa Indonesia mereka bisa bersatu dengan etnis lain di Indonesia, tetapi juga karena memang itulah salah satu syarat menjadi orang Indonesia. Sekaranglah saatnya untuk menegaskan penguasaan bahasa Indonesia sebagai salah satu syarat kewarganegaraan Indonesia.

Beberapa peraturan untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia juga telah diterbitkan, mulai dari jenjang tertinggi berupa keputusan presiden atau instruksi presiden sampai ke surat atau imbauan di tingkat pelaksana pemerintah daerah. Tidak kurang dari 27 kebijakan

tertulis yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia.[8] Tidak sedikit kebijakan yang menjadikan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia sebagai sasaran, tetapi tidak sedikit pun menyebut-nyebut perlunya evaluasi untuk mengetahui seberapa baikkah mutu pemakaian bahasa Indonesia setelah kebijakan itu diterbitkan dan dilaksanakan selama periode tertentu. Akibatnya, juga tidak sedikit orang yang menganggap kebijakan dan peraturan seperti itu hanya sebagai rambu administratif yang cukup dilewati secara administratif pula.

Di atas itu semua, hingga saat ini belum ada negara yang mencantumkan perlunya kemahiran berbahasa dalam politik bahasa nasionalnya. Akan tetapi, Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988 secara tersirat telah mengidentifikasi perlunya mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Kongres itu mengamanatkan untuk segera menyusun bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional untuk keperluan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.

**6. Masalah**

a. Hingga saat ini masalah kemahiran berbahasa Indonesia belum pernah digarap oleh siapa pun karena baik dalam Politik Bahasa Nasional 1975 maupun dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tidak tercantum ketentuan tentang kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia (WNI) walaupun dalam Pasal 36, UUD 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau sampai saat ini masih terdapat 15,13% penduduk yang buta bahasa Indonesia. Pertanyaan yang perlu diajukan ialah apakah mereka diharuskan untuk mencapai tingkat kemahiran tertentu?

b. Ketentuan tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang tercantum dalam GBHN sejak tahun 1988. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 secara berangsur-angsur kita dapat menyaksikan adanya peningkatan mutu pemakaian BI, terutama ragam tulis, baik dalam media massa maupun dalam terbitan. Akan tetapi, tingkat kemahiran seperti apakah yang telah dapat dicapai melalui peningkatan mutu tersebut?

c. Ketentuan harus lulus ujian bahasa Indonesia sebagai syarat penerimaan dan kenaikan golongan pegawai negeri sipil memang ada dan diterapkan sampai sekarang. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan pada umumnya hal tersebut lebih bersifat proforma belaka. Demikian

pula halnya dengan ketentuan nilai minimal 6 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia bagi siswa pendidikan dasar dan menengah. Apa yang dijadikan acuan untuk menentukan nilai minimal tersebut?

d. Jika sekarang pemakaian bahasa Indonesia--terutama di wilayah pemakaian yang bersinggungan dengan penutur bahasa asing--sudah mengkhawatirkan, akan lebih mengkhawatirkan lagi di era global dan pasar bebas. Sebagai akibat disepakatinya perdagangan bebas mulai awal milenium ketiga (AFTA dan APEC) dan makin dominannya peran bahasa Inggris dalam dunia kerja internasional, mungkinkah kemahiran berbahasa Indonesia dapat menyelamatkan sebagian lapangan kerja bagi WNI? Bagaimanakah kemungkinannya kalau hal ini didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Politik Bahasa Nasional?

e. Sampai saat ini belum ada sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia yang dapat digunakan secara profesional, baik untuk kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri. Siapakah yang harus bertanggung jawab mengemban tugas raksasa itu?

7. Ulasan/Saran

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan masalah di atas, tampaknya kita perlu mempertimbangkan dengan seksama hal-hal berikut ini.

a. Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki penduduk yang jumlahnya cukup besar--tetapi sangat majemuk dalam berbagai segi, termasuk bahasa dan pendidikan--serta memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa kalau kita tidak ingin melihat negara ini makin terpuruk dalam menghadapi persaingan bebas yang semakin keras dalam era global ini maka kita tak mempunyai pilihan lain kecuali "menyulap" kemahiran berbahasa mereka sedemikian rupa sehingga mampu membangun diri, lingkungan, dan negaranya. Kemahiran berbahasa Indonesia perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, bukan hanya untuk menjadikan mereka sebagi warga negara Indonesia yang utuh, tetapi juga sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak berarti bahwa setiap warga negara harus memiliki kemahiran yang sama karena ranah (fasilitas verbal) yang mereka masuki berbeda satu sama lain. Akan tetapi, per-

lu disadari bahwa ranah tertentu hanya dapat dimasuki seseorang dengan kemahiran berbahasa tingkat tertentu pula.

b. Salah satu kekurangan pemasyarakatan bahasa Indonesia selama ini adalah bahwa kita tidak tahu pasti titik kemahiran awal dan titik kemahiran akhir masyarakat yang dibina. Akibatnya, upaya pembinaan bahasa Indonesia seperti meraba-raba dalam gelap. Pembinaan bahasa Indonesia kemudian dilakukan dengan mengklasifikasi kelompok sasaran atas bidang tugasnya atau dengan "analisis kebutuhan" sesaat. Tanpa disadari bahwa pengelompokan sasaran atas bidang tugas, apalagi jabatan, tidak sepenuhnya dapat digunakan mengingat penempatan orang ke dalam bidang tugas dan jabatan itu tidak didasari kriteria kemahiran berbahasa Indonesia. Sementara ini kemahiran orang yang berbidang tugas sama masih amat bervariasi.
c. Ketentuan harus lulus ujian bahasa Indonesia atau harus mempunyai kemahiran berbahasa Indonesia sampai tingkat tertentu harus dijadikan syarat setiap perekrutan tenaga kerja, bukan hanya dalam penerimaan dan kenaikan golongan pegawai negeri sipil. Ini tentu saja menuntut identifikasi lebih terperinci atas kebutuhan kemahiran berbahasa di berbagai bidang tugas dan jabatan. Perekrutan tenaga kerja dapat dihubungkan dengan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang tepat. Dengan kata lain, harus ada deskripsi kemahiran yang tepat untuk dijadikan acuan menentukan tuntutan kemahiran minimum yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki bidang tugas atau jabatan tertentu.
d. Bahasa Indonesia di era global dan pasar bebas akan dapat menggeser atau mengurangi dominasi bahasa asing apabila ada fasilitas-fasilitas verbal tertentu yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kalaupun tidak dapat menjamin, kemahiran berbahasa Indonesia dapat memperbesar peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Peluang itu tentu akan semakin mantap apabila ada dukungan undang-undang atau politik bahasa nasional.

Untuk mengembangkan dan melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia Pusat Bahasa mempunyai posisi yang amat strategis. Pertama, karena Pusat Bahasa adalah satu-satunya instansi yang paling berkepentingan dengan pembinaan masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Kedua, karena sasaran Pusat Bahasa memang meliputi seluruh warga negara In-

donesia. Dengan alasan kedua itu Pusat Bahasa jauh lebih leluasa memasuki sasaran di luar dunia pendidikan. Satu-satunya hambatan yang dihadapi Pusat Bahasa barangkali hanyalah sumber daya. Akan tetapi, kendala itu akan dapat diatasi dengan pengembangan sumber daya yang terencana dan membuat jalinan kerja sinergis.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, kami menyarankan agar isu sarana kemahiran berbahasa Indonesia ini dimasukkan dalam politik bahasa nasional yang akan datang. Rumusan kebijakan kebahasaan yang menyangkut masalah sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia itu, kami usulkan sebagai berikut.

Untuk mendukung kedudukan dan fungsinya dalam komunikasi di era global yang penuh tantangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk budaya, bahasa Indonesia harus dilengkapi sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam rangka itu, pengembangan dan pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia harus segera dilembagakan.

## Catatan

[1] Menurut Haugen (1972) orang yang dapat memahami ujaran orang dalam bahasa lain, selain bahasanya sendiri, termasuk seorang dwibahasawan meskipun ia tidak dapat berbicara dalam bahasa itu (*understanding with-out speaking*)

[2] Mereka itu adalah orang yang berbahasa ibu bahasa daerah tertentu dan yang sudah tidak tergolong buta bahasa Indonesia. Angka itu pasti akan semakin besar apabila ternyata mereka yang mengaku berbahasa ibu bahasa Indonesia itu ternyata juga menguasai bahasa lain.

[3] Weinreich (1970) memberi batasan bahwa seorang dwibahasawan harus dapat menggunakan bahasa-bahasa yang dikuasai secara bergantian. Bloomfield (1961) memberi batasan dwibahasaan sebagai seorang penutur yang menguasai dua bahasa atau lebih sebaik penutur asli bahasa-bahasa itu. Dengan demikian, penutur yang hanya dapat mengerti tuturan dalam bahasa lain tidak termasuk dwibahasawan.

[4] Sebagai gambaran dari 78 ribu tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, mereka bisa mengeruk dolar sampai 3,29 miliar dolar AS per tahun. Sementara

tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di berbagai negara, yang jumlahnya 20 kali lipat dari jumlah tenaga asing di sini, mereka cuma membawa pulang 600 juta dolar AS per tahun (*Republika, 8 Oktober 1999*).

[5] Pengamatan terhadap kurang lebih 200 iklan bursa kerja menunjukkan bahwa 45,3% iklan mensyaratkan kemahiran berbahasa Inggris, 2,8 % mensyaratkan kemahiran bahasa asing lain, dan 51,8% tidak mensyaratkan kemahiran berbahasa apa pun. Termasuk ke dalam kelompok terakhir iklan-iklan yang ditulis dalam bahasa Inggris.

[6] Suparno (1998) menengarai beratnya tugas guru bahasa Indonesia, besarnya jumlah siswa per kelas, kurangnya buku ajar, belum terlaksananya pelatihan yang terfokus pada setiap aspek keterampilan berbahasa sebagai penyebab itu.

[7] Salah satu butir tindak lanjut putusan Kongres Bahasa Indonesia V disebutkan bahwa bahasa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam jalur pemerataan (kalau perlu menjadi jalur kesembilan) dalam GBHN. Pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu digalakkan supaya tidak ada lagi kelompok yang belum menikmati pemerataan pembangunan.

[8] Sugiyono (1999) mencatat tidak kurang dari 60 kebijakan, berupa keputusan, instruksi, dan persepakatan kerja sama yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia. Kebijakan diterbitkan pada tahun 1959 oleh Pemerintah DKI Jakarta yang mewajibkan masyarakat kota Jakarta menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf latin untuk papan-papan nama (*uithang board*) dalam wilayah Jakarta Raya.

## Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik. 1998. "Beberapa Gagasan ke Arah Perumusan Kembali 'Politik Bahasa'". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Alwasilah, A. Chaedar. 1998. "Pengajaraan Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Alwi, Hasan. 1998. "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000" dalam Alwi, Hasan (ed.). 1998. *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun*

*2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gunarwan, Asim. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia dalam Era Globalisasi". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Halim, Amran. 1998. "Kesinambungan dalam Kebijakan Bahasa Nasional" dalam Alwi, Hasan (ed.). 1998. *Bahasa Indonesia menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Muhadjir *et al.* 1988. *Bahasa Indonesia Tahun 2000*. Depok: Fakultas Sastra Univ. Indonesia.

Nugroho. [1987]. *Indonesia Sekitar Tahun 2000*. Jakarta: Rajawali.

Sudarsono, Juwono. 1998. "Kebinekaan Bahasa, Pembangunan Bangsa, dan Era Globalisasi". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Sugiyono. 1999. "Kebijakan Kebahasaan di Indonesia". Laporan Penelitian.

Suparno. 1998. "Pengajaraan Bahasa Indonesia di Sekolah". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

Umar, Jahja. 1998. "Pengembangan Pengujian Bahasa di Sekolah". Makalah *Kongres Bahasa Indonesia VII*, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 10 November 2000 |
| Pukul | : | 10.15--11.15 |
| Judul Makalah | : | Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana Pembangunan Bangsa |
| Penyaji Makalah | : | Sugiyono dan A. Latief |
| Pemandu | : | Soenardji |
| Pencatat | : | Amris Nura |

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Yus Rusyana
   a. Sudah perlu diambil kebijakan.
   b. Ini salah satu wujud hegemoni.
   c. Hubungan dengan sekolah harus hati-hati supaya tidak terjadi hal yang negatif, misalnya, sastra sangat sulit dilaksanakan.

2. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

   Harus membatasi diri dalam melakukan penelitian karena sudah ada lembaga lain. Gagasan ini merupakan tantangan untuk mengembangkan alat ukur tersebut. Diharapkan kerja sama dengan lembaga lainnya. Jangan memaksakan sistem sehingga menimbulkan hal yang tidak baik. Alat ukur ini dapat dipergunakan untuk bidang lainnya.

3. H. Suparno, Balai Bahasa Surabaya

   Gagasan ini baik, tetapi yang lebih baik dilakukan adalah yang sesuai dengan kebijakan. Kemahiran berbahasa juga dapat diterapkan pada lembaga dan realisasinya.

4. Soeseno Kartomihardjo, Universitas Negeri Malang

   Tes bahasa ini sudah lama dilaksanakan (lihat hasil penelitian Sdr. Mujiyanto). Mohon jangan dimulai dari awal karena sudah ada yang memulainya (Sdr. Mujiyanto).

5. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Darussalam

   Uji kemahiran sangat setuju, tetapi saya khawatir bagi pencari kerja sehingga disalahgunakan. Jangan disamakan dengan kemampuan seseorang, tetapi disesuaikan dengan tingkat dan lapangan pekerjaan.

6. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta

   Di Departemen Pendidikan Nasional sudah ada alat uji kemahiran berbahasa untuk semua tingkat dan juga bidang-bidang lapangan pekerjaan.

7. Nuril Huda, Universitas Negeri Malang

   Perlu dipertimbangkan alat uji, untuk tenaga asing yang bekerja di Indonesia dan disesuaikan dengan bidangnya.

8. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok

   Dengan asumsi bahwa alat uji ini sudah teruji keterandalan dan kesahihannya, beranikah Saudara mengusulkan sebagai keluaran seminar ini agar kenaikan pangkat pegawai negeri diberi tes ini?

9. Husni Mu'adz, Universitas Mataram, Lombok

   Apakah gunanya tes kemahiran bahasa Indonesia itu? Mau jadi pengusaha, ahli politik, dan sebagainya, tidak memerlukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembicaraan politik bahasa, yang perlu dipikirkan ialah bagaimana membuat bahasa Indonesia menjadi instrumen atau syarat orang yang akan berkuasa. Dengan menguasai bahasa Indonesia, orang dapat menjadi pengusaha, dapat menjadi ilmuwan dan sebagainya. Jangan dulu berpikir tentang detail tes, tetapi tes ini untuk apa? Kita di sini payah-payah berpikir tidak akan bermanfaat atau tidak jalan. Kita barangkali tidak dapat memaksakan kehendak, tetapi hanya persuasif.

**B. Jawaban**

1. Suatu saat mungkin diperlukan ujian bahasa daerah bagi keperluan tertentu. Misalnya, jika seseorang akan menjadi bupati, orang itu harus juga diuji kemampuannya dalam berbahasa daerah. Bahasa Inggris

memang tidak kita bicarakan karena bahasa asing sudah mengembangkan tes itu sendiri-sendiri.

2. Acuan yang digunakan oleh tes ini adalah tingkat kemahiran. Oleh karena itu, acuannya bukan hasil belajar atau bukan kurikulum.

3. Memang kesulitannya ialah merumuskan batas atau tingkat kemahiran yang harus dicapai oleh orang pada tingkat tertentu. Misalnya, seorang *pengetik* harus mencapai kemahiran seberapa dan seterusnya.

4. Pusat Bahasa sampai sekarang belum memiliki tenaga yang mampu di bidang itu, tetapi kami memberanikan diri mengawalinya dengan harapan ada orang atau ada pihak yang mau mempedulikan pekerjaan seperti itu. Dengan demikian, nanti kita secara bersama-sama mengerjakannya.

5. Tentang pertanyaan Pak Asim, saya belum berani menjawab karena tes ini memang belum andal dan belum sahih. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat bertemu lagi untuk sama-sama mengevaluasi hasil kerja kami bagaimanakah sarana dan sistem pengujiannya, apakah Pusat Bahasa yang mengerjakan atau pihak lain, dan sebagainya. Yang penting adalah jika tes ini menjadi perhatian kita bersama, maka pengembangannya akan terencana. Kongres Bahasa Indonesia Ke-5 telah mencantumkan bahwa kita perlu memiliki bahan uji tingkat nasional. Untuk itu, pekerjaan ini tidak perlu diundur-undur lagi walaupun kami tahu bahwa pekerjaan ini terlalu berat.

6. Kami tidak akan "menginjak" wilayah Ebtanas atau wilayah kerja Puslitbang Departemen Pendidikan Nasional karena kami telah membatasi diri bahwa yang diuji itu bukan hasil belajar.

# PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN BAHASA

**Bambang Kaswanti Purwo**
Unika Atma Jaya, Jakarta

## 1. Pengantar

Jika kita berbicara mengenai "peningkatan mutu pengajaran bahasa" di Indonesia, khususnya apabila itu menyangkut bahasa Indonesia, pembicaraan in--tidak dapat tidak--mengait pada peranan atau lebih tepatnya "kiprah" (tindak kerja) Pusat Bahasa semenjak 1970-an sampai sekarang. Jika kita berbincang mengenai "peningkatan mutu", menuju ke yang lebih baik daripada yang kita miliki setakat ini, perbincangan ini--mau tidak mau--akan menyoroti segi-segi yang kurang, ihwal-ihwal yang terbuka untuk diperbaiki. Oleh karena itu, makalah ini diawali dengan pemaparan yang berupa penilaian kembali mengenai dua kegiatan berikut: pembinaan bahasa oleh Pusat Bahasa dan pengajaran bahasa di sekolah setakat ini. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai tantangan pengajaran bahasa di Indonesia ke masa depan, dan ditutup dengan perenungan.

## 2. Kilas Balik Pembinaan Bahasa

Pada masa-masa awal setelah proklamasi kemerdekaan RI--sebelum lahirnya Pusat Bahasa--pada banyak tempat dapat dijumpai papan bertuliskan "Gunakanlah Bahasa Indonesia". Imbauan ini dirasakan perlu waktu itu supaya orang mulai membiasakan diri menggunakan bahasa nasional, dan tidak lagi memakai bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari. Pada masa orde baru, selama beberapa dekade terakhir ini--setelah Pusat Bahasa lahir--imbauan berganti menjadi "Pakailah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar", dan belakangan ini diperbarui menjadi "Berbahasa Indonesialah dengan Baik dan Benar". Imbauan ini dilandasi oleh keinginan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang memiliki sistem yang lebih mantap: bahasa baku. Seiring dengan itu, para penuturnya pun diharapkan mau dan mampu menguasai penggunaan bahasa baku itu.

Sudah hampir dua puluh lima tahun Pusat Bahasa bergigih memasyarakatkan imbauan itu, melakukan berlaksa-laksa penyuluhan ke ber-

bagai penjuru. Kamus besar sudah sampai pada edisi kedua. Buku tata bahasa baku pun sudah terbit, bahkan sampai disusul dengan dua edisi berikutnya. Akan tetapi, jika direfleksikan: sudah berhasilkah usaha itu? Dari perencana bahasa, juga penyuluh bahasa, tidak jarang terdengar keluhan, misalnya, di banyak gerbang setiap kali menyambut hari kemerdekaan RI, masih banyak dijumpai penulisan secara salah: "Dirgahayu HUT RI ke ..." Belum lagi kesalahan penulisan istilah, penulisan ejaan, tanda baca, dan yang lain lagi. Terekam, antara lain, di majalah *Femina* 43.XXV (30 Oktober s.d. 5 November 1999), hlm. 76, "dalam nada prihatin", ucapan Anton M. Moeliono: "Padahal sudah hampir 25 tahun Pusat Bahasa telah mengoreksi dan meluruskan bahwa arti kata 'dirgahayu' adalah 'Selamat Hari Ulang Tahun' ...."

Jika usaha itu dikatakan "belum berhasil", apa kiranya langkah yang dapat menjadi alternatif lain? Pendekatan "penyuluhan", apalagi yang bernada "instruktif", sudah saatnya ditinggalkan, pada era reformasi ini. Bersamaan dengan itu pula, imbauan "Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar" itu, yang lahir pada masa orde baru, tidak perlu dipakai lagi.

Ada dua alasan mengápa imbauan itu perlu ditinggalkan. Pertama, telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti "bahasa yang baik dan benar". Khalayak menganggap bahwa "bahasa yang baik dan benar" identik dengan "bahasa baku"; padahal, menurut perencana dan penyuluh bahasa, "baik" dan "benar" merupakan dua hal yang terpisah (TBBI, edisi kedua, 1993: 22).

(1) Berapakah Ibu mau menjual bayam ini? [tidak baik, benar]
(2) Berapa nih, Bu, bayemnya? [baik, tidak benar]

Kalimat (1) adalah ragam baku, tetapi itu bahasa yang "tidak baik dan benar". Kalimat (2) adalah ragam tak baku, dan itu dapat disebut sebagai bahasa yang "baik dan tidak benar". Akan tetapi, apa jawabannya jika ditanyakan kepada guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah: mana kalimat yang merupakan bahasa yang "baik dan benar"? Mereka akan mengatakan kalimat (1). Kalimat (2) adalah contoh kebalikannya.

Hal kedua yang merupakan persoalan ialah pengertian "benar" dan "tidak benar". Pengertian "benar" dan "tidak benar"--menurut Pusat Ba-

hasa--yang terdapat pada contoh (1) dan (2) berbeda dengan yang terdapat pada contoh (3) dan (4).

(3) dididik [benar]
(4) di didik [tidak benar]

Pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (1) dan (2) merupakan tipe-tipe kalimat, yang masing-masing memiliki konteksnya sendiri-sendiri; yang pertama konteks formal dan yang kedua konteks informal. Adapun pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (3) dan (4) merupakan contoh kasus yang mengikuti atau tidak mengikuti kaidah baku (atau yang dibakukan).

Kecampuradukan pengertian ini, sekalipun selama ini belum tentu disadari sebagai sesuatu yang campur aduk, membingungkan para pemakai bahasa Indonesia, termasuk para pengajarnya, terutama di peringkat pendidikan dasar dan menengah. Suasana kebingungan dan pembingungan ini sudah barang tentu tidak merupakan daya dukung positif bagi "misi baik" yang dicanangkan sekitar dua puluh lima tahun yang lalu oleh Pusat Bahasa.

Keadaan diperumit lagi oleh apa yang tersirat dari penamaan "benar" dan "tidak benar" pada contoh (1) dan (2). Untuk contoh (3) dan (4) hal itu tidak menjadi masalah karena berkenaan dengan "penguasaan bahasa"; tidak ada sangkut pautnya dengan konteks pemakaian. Namun, untuk contoh (1) dan (2), penamaan itu menyiratkan bahwa pengertian "benar"--oleh Pusat Bahasa--hanya diberlakukan untuk kalimat yang menyandang sebutan "baku". Kalimat (2), yang dijumpai pada konteks informal, tidak "layak" memperoleh sebutan "benar", sekalipun benar-benar dipakai dan dijumpai sebagai bahasa yang hidup.

Jadi, meskipun kalimat seperti pada (1)--dalam perbincangan linguistik--dapat disebut "ragam tinggi" dan kalimat seperti pada (2) "ragam rendah", itu hanyalah istilah atau penamaan saja. Kalimat seperti pada (2) tidak perlu "direndahkan" sebagai kalimat yang tidak pernah dapat disebut sebagai kalimat yang "benar". Istilah "benar" dan "tidak benar" dapat tetap dipakai pada contoh (3) dan (4) karena tidak ada sangkut-pautnya dengan ragam formal dan informal. Seyogianya istilah itu--demi kesetaraan perlakuan--tidak lagi diterapkan pada contoh (1) dan (2).

Kalimat tipe (2) dan kalimat tipe (1) sama-sama merupakan bahasa yang "hidup". Perbedaannya terletak pada konteks pemakaiannya. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi (*complementary*), dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, keduanya layak memperoleh perlakuan yang setara. Kalau yang satu dilimpahi banyak perhatian (banyak diteliti, dibuatkan buku tata bahasanya, kamusnya) yang satu juga samalah perhatiannya, tanpa pilih kasih.

Pilih kasih pun terjadi di sekolah. Guru, termasuk penulis buku teks, merasa takut memakai teks seperti pada contoh (5) ini pada proses pemelajaran bahasa Indonesia. Alasannya sederhana: bukan contoh teks yang "baik dan benar" dan dapat "mengganggu" pengajaran bahasa baku.

(5) Oom Bagito **yang** rada cakep. Oom, **saya banyak** punya **persoalan**, nih. **Saya** punya **pacar**, **namanya** B. Iih, **itu anak** cakepnya **bukan main**, deh. Tapi **yang saya pikirkan begini. Si B itu kadang-kadang mesra dan kadang-kadang** cuek. **Di sekolah** emang nyapa, tapi pas **pulang sekolah** cuek **lagi**. Doi **ini satu kelas** sama **saya**. Gimana nih, Oom? (Surat Kepada Redaksi, *HAI* 1-7 Agustus 1989, 33).

Jika teks seperti itu dikembangkan sebagai bahan ajar di kelas, apa yang lazim terjadi? Teks itu akan disunting, misalnya, menjadi seperti pada (6) ini, baru dapat menjadi bahan ajar di kelas.

(6) Oom Bagito yang baik, saya mempunyai banyak persoalan, antara lain soal pacar. Pacar saya bernama B. Ia berparas amat tampan. Namun, yang satu ini selalu mengganggu pikiran saya. Si B itu pada suatu saat besar sekali perhatiannya tetapi pada kesempatan lain sama sekali tidak ada perhatian. Di sekolah memang selalu menyapa, tetapi ketika pulang sekolah tidak lagi ada perhatian. Pacar saya ini satu kelas dengan saya. Bagaimana nasihat Oom?

Berikut ini perhatikan contoh teks percakapan yang terdapat pada sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia, sebuah teks yang dipaksakan demi pengajaran bahasa baku. Akibatnya, teks tampil tidak wajar, tidak alami, dan tidak komunikatif. Perhatikanlah Teks A, dikutip dari buku

pelajaran susunan Sulaeman dkk. (1994); percakapan antara dua anak seusia itu tidak mungkin dengan ragam seperti itu.

**Teks A**

Andri : Hai, kawan! Tahukah kamu sekolah kita akan bertanding renang besok?
Jufi : Oh, ya? Siapa lawannya?
Andri : Sekolah "Bintang Timur" dari Bandung.
Jufi : Pasti kamu ikut bertanding, Dri.
Andri : Oh, tentu! Berenang adalah kesukaanku.
Jufi : Selamat bertanding, Dri. Semoga menang.
Andri : Terima kasih, Jufi.

Bandingkan Teks A (yang terasa kaku itu) dengan Teks B (yang lebih hidup dan dinamis), yang dicuplik dari salah satu cerpen pada majalah *Gadis* (8—18 Januari 1994, 15).

**Teks B**

Andre : Hei, apa kabar? Ini Andre. Kamu lagi ngapain?
Dara : Lagi nggak ngapa-ngapain. Lagi santai saja.
Andre : Wah, kalo gitu kebetulan. Aku pingin ngajak kamu jalan-jalan sore ini ke PIM. Aku pingin nonton, cuma nggak ada temen. Kamu mau, kan, nemenin aku?

Penyodoran teks seperti pada Teks A itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tindak pemaksaan dari "atas" terhadap usaha mengajarkan bahasa yang "baik dan benar". Pendekatan "otoriter" seperti ini menampilkan kesan akan adanya semacam gerakan ragam baku menggusur, menggantikan ragam yang lebih dulu telah dikuasai oleh para siswa, sejak masa kanak-kanak, dari lingkungan di luar sekolah.

Gambaran serupa terungkap sebagai anekdot tentang siswa di sebuah SMP, yang terekam pada cerita pendek di majalah *Kawanku* 19.XXIII (November 1993), 8—9).

> Dalam peraturan baru itu Bu Afni [guru bahasa Indonesia] mewajibkan anak-anak yang bercakap-cakap, ngobrol, mengajukan pertanyaan, berte-

> riak, atau menangis supaya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau tidak, anak-anak akan didenda seratus rupiah. [...] Anak-anak memang jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. ["Cerita Lupus"]

Apa yang dipaparkan di atas barangkali merupakan imbas dari kampanye "berbahasa yang baik dan benar" yang begitu dalam telah merasuki dunia pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan menengah.

**3. Bagaimana Keadaan Pengajaran Bahasa di Indonesia?**

Perbandingan kurikulum antarsekolah di sejumlah negara, sebagaimana yang terekam pada tabel berikut (Nier 1999: 33--34, yang dikutip oleh S. Belen (komunikasi pribadi)), memperlihatkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia masih berada di papan bawah, bahkan--secara keseluruhan--belum tampak ada tanda-tanda perubahan ke peringkat yang lebih tinggi (bandingkan Indonesia dengan India atau Filipina).

Tabel 1: ***Approaches to Curriculum Design***

| *Country* | *Approach* |
|---|---|
| Australia | 2 |
| China | 1 |
| Fiji | 1 |
| France | 1 --> 3,1 --> 2 (TVE) |
| Germany (Bavaria) | 3 |
| India | 1 --> 2 |
| Indonesia | 1 |
| Japan | 1 |
| Lao PDR | 3 |
| Malaysia | 3 |
| New Zealand | 2 |

| | |
|---|---|
| Philippines | 3 |
| Republic of Korea | 3,1 --> 2 |
| Sri Lanka | 1 --> 2 |
| Thailand | 2 |
| USA (New York State) | 3 |
| Uzbekistan | 2 --> 3 (TVE) |
| Vietnam | 1 --> 3 |

*Legend* : 1: *Content - based*
2: *Competence/outcome - based*
3: *Combination*
*TVE* : *Technical/Vocational Education*
: *Movement from – to –*

- *The content or topic based approach lists the topics or themes of the subject area or discipline. The listing is generally broad and includes the aims and objectives for the subject area.*
- *The competence or outcome – based approach to curriculum design defines the outcomes, usually as abilities or skills, that students are expected to achieve by the end of the period of study or period of schooling for the specific subject.*

Berikut ini sekadar gambaran keadaan pengajaran bahasa di Indonesia, keadaan yang masih berkutat pada segi "isi (pengetahuan)" atau *content based* (yang menuntut hafalan) itu, dan belum menampilkan kepedulian terhadap segi "kemampuan berbahasa" atau *competence-based*. Pertimbangkanlah contoh soal (7) dan (8), soal yang lazim dijumpai pada EBTANAS selama ini.

(7) Kalimat koordinatif yang tepat terdapat pada _____
a. Menteri Keuangan berjanji akan menuntut perusahaan asuransi

yang tidak memenuhi kewajibannya.

b. Terbukti teori tersebut justru mengacaukan penelitian yang kita buat.
c. Mereka pasti akan bermain sebaik-baiknya dan memberi perlawanan berat.
d. Jika nanti perekonomian rakyat telah kuat, secara otomatis pemerataan pun akan jalan.
e. Dia tidak ragu sedikit pun dalam menentukan pilihannya.

Senada dengan contoh soal (7), dapat dijumpai pula soal serupa mengenai "kalimat majemuk bertingkat", "kalimat elips", dan yang lain. Untuk menjawab soal-soal seperti itu, dari siswa cukup dituntut pengandalan pada daya hafal. Soal seperti ini tidak ada sangkut-pautnya dengan dapat tidaknya siswa menghasilkan (dengan menulis, berbicara) berbagai jenis kalimat dan secara tepat memakainya pada konteks yang beraneka ragam.

Soal (8) menguji tentang "penyusunan laporan, tetapi siswa yang dapat mengerjakan soal ini dengan sempurna, belum dapat dijamin bahwa akan dapat menghasilkan sebuah laporan yang baik. Segi isi atau pengetahuan yang dipersoalkan pada soal itu barulah merupakan salah satu dari "proses yang masih panjang" dari kegiatan menyusun sebuah laporan.

(8) Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh seseorang sebelum menyusun sebuah laporan, kecuali _____
   a. merumuskan masalah
   b. menentukan teori-teori pendukung
   c. merumuskan hipotesis
   d. mendesain penelitian atau percobaan
   e. melaksanakan eksperimen

Bagaimana meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia dari tahap *content-based* ke tahap *competence-based*? Sekadar contoh dipaparkan berikut ini. Kegiatan yang lazimnya terjadi selama ini ialah latihan (tata bahasa) seperti pada (9): siswa diminta merangkaikan kalimat (a) dan (b) sehingga menjadi satu kalimat saja.

(9) a. Rumah mungilnya terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan.
b. Rumah mungilnya kelihatan asri dan hijau.

Kedua kalimat itu, jika dirangkaikan dapat menghasilkan dua kemungkinan konstruksi.

(10) Rumah mungilnya, *yang kelihatan asri dan hijau*, terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan.

(11) Rumah mungilnya *yang terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan*, kelihatan asri dan hijau.

Kegiatan selama ini lazimnya berhenti sampai di situ, tidak dibawa ke pemakaian kalimat di dalam konteks yang lebih luas. Jika soal itu dikembangkan seperti pada contoh berikut, kegiatan ini tidak hanya membuat siswa makin memahami tata bahasa tetapi pengetahuan itu dapat juga dimanfaatkan untuk menerampilkan kemampuan menulis. Kedua kalimat itu, jika dipakai sebagai kalimat pertama sebuah paragraf, masing-masing akan memiliki arah pengembangan gagasan yang berbeda. Bandingkanlah (12) dan (13).

(12) **Rumah mungilnya**, yang kelihatan asri dan hijau, **terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan**. Tempatnya mudah dicapai, di pinggir jalan besar. Dari arah Yogyakarta, letak rumah itu di sebelah kiri jalan, kira-kira satu setengah kilometer dari desa gerabah. Di sepanjang satu setengah kilometer itu hanya rumah itulah yang berpekarangan luas dengan pohon yang tertata rapi.

(13) **Rumah mungilnya**, yang terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan, **kelihatan asri dan hijau**. Cukup kontras kalau dibandingkan dengan pemandangan bukit kapur kecil yang gersang di sekitarnya. Sebatang pohon mangga di depan rumahnya sedang berbuah lebat, sementara tanaman-tanaman bunga di sekelilingnya sedang berkembang meriah.

Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat melatih siswa supaya sampai ke penyadaran bahwa ada lebih dari satu kalimat yang dapat disusun untuk mengungkapkan isi gagasan yang sama. Rangkaikanlah kedua kalimat ini menjadi lebih dari satu kalimat.

(14) a. Lalat itu ompong.
b. Lalat tetap berbahaya bagi kita.

Hasil rangkaian dua kalimat pada (14) itu setidaknya-tidaknya dapat berupa empat kalimat berikut ini.

(15) a. Lalat yang ompong tetap berbahaya bagi kita.
b. Lalat itu ompong dan tetap berbahaya bagi kita.
c. Meskipun ompong, lalat tetap berbahaya bagi kita.
d. Lalat itu ompong meskipun tetap berbahaya bagi kita.

Tahap berikutnya ialah penyadaran bahwa kontekslah yang menentukan kalimat yang sesuai. Di antara empat kalimat pada (15) itu hanya satu kalimat saja yang cocok untuk dipakai sebagai kalimat awal pada paragraf berikut.

(16) _____. Aneka jenis kuman melekat di kaki, mulut, dan seluruh bagian tubuhnya. Kuman itu dapat pindah ke tempat-tempat yang diinjak atau dihinggapi lalat, bisa kue mangkok, permen, atau nasi.

**4. Tantangan Pengajaran Bahasa di Indonesia ke Masa Depan**

Untuk memberikan gambaran ke masa depan, berikut ini dipaparkan sebuah tabel yang merupakan rangkuman sejarah perkembangan pengajaran bahasa di dunia per dekade, dari 1950 s.d. 1990, hasil ringkasan yang dilakukan oleh Larsen-Freeman (1998). Perhatikan Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**
**A Summary of Trends in the Language Teaching Field by Decades From the 1950's to the 1990's**

| Decade | Language | Language Learning | Language Learner | Language Teaching |
|---|---|---|---|---|
| 1950's | Patterns | Habit Formation (Behaviorism) | Mimic | Dialogues<br>Pattern Practice<br>Drills |
| 1960's | Rules | Rule-formation (Cognitivism) | Cognitive being | Inductive and Deductive exercise |
| 1970's | a. Meaning | Emergent | Affective being | Extended Listening<br>Use of LI<br>Pseudo-concerts |
| | b. Use | Interactionism | Social being | Role Plays<br>Information Gaps<br>Problem-solving Tasks |
| 1980's | Texts/Medium | Experiential | Doer<br>Strategist | Whole Language<br>Content-based<br>Communication and Learning Strategist |
| 1990's | Instrument of power | Dialogic | Political being | Critical Pedagogy<br>Participatory Approach<br>Problem Posing |

Pada tahun 1950-an bahasa dipandang sebagai seperangkat pola. Proses pemelajaran bahasa menuntut penyerapan pola-pola itu melalui proses pembentukan kebiasaan. Siswa membeo atau menirukan perilaku kebahasaan yang modelnya diberikan oleh guru. Karena yang ditekankan adalah bahasa lisan, kegiatan mengajar berupa dialog, latihan pola, dan tubian yang berbagai macam.

Pada tahun 1960-an bahasa tidak dipandang sebagai manifestasi dari perilaku manusia, tetapi sebagai sistem yang dikuasai oleh kaidah. Yang terjadi pada proses pemelajaran bahasa ialah siswa menyimpulkan kaidah berdasarkan apa yang mereka dengar atau temui, dengan memanfaatkan kemampuan kognitif mereka. Pada proses ini guru membantu

siswa dengan menyediakan kegiatan latihan berdasarkan struktur induktif dan deduktif.

Pada tahun 1970-an pengajaran bahasa tidak lagi merupakan proses yang berpusat pada bahasa tetapi pada siswa, dengan limpahan perhatian pada alam afektif dan emosional mereka. Guru membantu siswa untuk mengatasi perasaan negatif. Siswa memerlukan rasa aman. Sugesti positif dapat memacu usaha siswa untuk menguasai bahasa asing. Siswa hendaknya jangan dipaksa berbicara sebelum mereka merasa siap untuk itu. Bahasa yang dipelajari itu akan tumbuh dengan sendirinya (secara alami) melalui kegiatan siswa melibatkan diri dalam kegiatan berbahasa yang bermakna dan dapat dipahami.

Kecenderungan lain yang tumbuh pada dekade ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pemelajar bahasa adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial siswa memiliki kebutuhan untuk bertindak dengan bahasa serta menggunakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar bahasa bukanlah belajar pola dan kaidah, melainkan belajar apa yang sesuai untuk mengatakan sesuatu kepada siapa dan kapan. Sebagai makhluk sosial, siswa belajar melalui kegiatan berinteraksi dengan siswa lain.

Pada tahun 1980-an dekade ini menampilkan cara baru memandang bahasa: bahasa terdiri atas teks-teks. Bahasa tidak diajarkan dalam wujud keping-keping, tetapi dalam wujud yang utuh sehingga siswa memperoleh pengalaman pribadi berhadapan dengan teks yang otentik. Belajar ialah mengalami; pemelajaran terjadi melalui kegiatan berbuat sesuatu, siswa terlibat langsung di dalam kegiatan, siswa berhadapan langsung dengan teks yang tujuan dan isinya bermanfaat bagi mereka.

Hal lain yang muncul pada dekade ini ialah kesadaran bahwa siswa memiliki strategi belajar yang berbeda-beda. Siswa diajar strategi belajar dan strategi komunikasi sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian sebagai pemelajar. Sekolah bukan lagi pemberi pengetahuan, melainkan merupakan tempat pelatihan bagaimana memperoleh, memproses, dan mengait ke pengetahuan.

Pada tahun 1990-an kesadaran akan banyaknya dimensi pada diri pemelajar bahasa makin tumbuh pada dekade ini, dengan mengakui kebutuhan politik pemelajar bahasa. Guru dianjurkan membantu siswa menghadapi keadaan yang meminggirkan atau mengimpit mereka. Bahasa dianggap sebagai alat kekuatan yang dapat membekali mereka apabila

mereka terpinggirkan atau hak-hak mereka diabaikan oleh pihak yang berada di atas angin di dalam ketakseimbangan kekuatan politik. Apabila persoalan mengenai ketakseimbangan kekuatan yang menyangkut siswa dapat diidentifikasi, dialog diarahkan untuk memecahkan persoalan melalui rencana kegiatan.

Setelah mengamati peta perkembangan pengajaran bahasa selama beberapa dekade itu, pertanyaannya sekarang ialah bagaimana keadaan pengajaran bahasa Indonesia, yang *content-based* itu, jika dimasukkan ke dalam peta tersebut. Di dalam peta itu pengajaran bahasa di Indonesia masih mempraktikkan keadaan pada masa tahun 1960-an, sebuah pengajaran yang mengandalkan kemampuan kognitif, menghafalkan kaidah-kaidah kebahasaan.

Sebenarnya Kurikulum 1984 sudah mencoba melangkah ke perkembangan pada dekade 1970-an. Upaya ini dipertajam dan diperjelas pada Kurikulum 1994. Lebih dari itu, Kurikulum 1994 mencoba masuk ke perkembangan pada dekade 1980-an.

Akan tetapi, itu semua baru menyangkut usaha "mengejar" atau "membarui" di tingkat "kurikulum". Jumlah persoalan yang dihadapi dunia pengajaran bahasa di Indonesia masih membentang panjang. Agar gebrakan pembaruan itu akhirnya dapat sampai ke ruang-ruang kelas, sampai ke kegiatan belajar-mengajar siswa di sekolah dasar dan menengah (juga di perguruan tinggi), sekurang-kurangnya ada tiga tantangan yang mengundang perhatian dan pemikiran bersama. Pertama, bagaimana menyampaikan atau memasarkan isi atau gagasan pembaruan yang sudah tertuang pada Kurikulum 1994 kepada para guru sehingga mereka memahami gagasan pembaruan itu? (Salah satu hambatan berat yang dihadapi dalam proses penyebaran gagasan pembaruan di tingkat kurikulum ini ialah keadaan sebagian besar dari guru-guru kita yang kurang pemahamannya terhadap media tulis, dan masih lebih mengandalkan pada penjelasan secara lisan.) Tantangan kedua ialah bagaimana mengusahakan supaya para penulis buku teks juga memahami isi Kurikulum 1994 dan dapat menerapkannya pada buku yang mereka tulis. Tantangan ketiga, yang tersulit untuk dilaksanakan, ialah bagaimana mengajak para guru untuk membarui peranan dan sikapnya di dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas.

Keadaan pengajaran bahasa yang dipetakan pada Tabel 2 membawa

konsekuensi perubahan pada diri para guru di dalam konteks belajar-mengajar di ruang kelas. Perhatikan Tabel 3 berikut, yang dikutip dari Larsen-Freeman (1998).

**Tabel 3**
**The Changing Roles of Language Teachers**
**From the 1950's to the 1990's**

| Decade | Language Teacher |
|---|---|
| 1950's | Model, Conductor |
| 1960's | Linguist |
| 1970's | Counselor, Facilitator |
| 1980's | Collaborator, Language Trainer |
| 1990's | Advocate, Acvtivist |

Sikap dan peranan guru yang diharapkan di dalam mengajar bahasa kait-mengait dengan perkembangan pengajaran bahasa seperti yang terpetakan pada Tabel 2. Pada dekade 1950-an guru diharapkan berperanan sebagai "model" atau "dirigen" di kelas. Tugasnya mengoreksi kesalahan dan melaksanakan latihan pola-pola kalimat melalui tubian. Pada dekade 1960-an peranan guru adalah sebagai "linguis" (orang yang tahu kaidah bahasa), pada dekade 1970-an guru menjadi konselor (orang yang dapat memahami perasaan siswa) dan bertindak sebagai "fasilitator" (dari kerja kelompok kecil), pada dekade 1980-an guru menjadi "kolaborator" (bekerja sama dengan siswa dalam mempelajari bidang studi yang disampaikan dalam bahasa asing) dan pelatih (strategi), pada dekade 1990-an guru berperanan sebagai "advocate", "activist".

**5. Perenungan**

Gambaran tentang keadaan pengajaran bahasa di Indonesia yang dipaparkan di atas menyuarakan betapa sudah mendesaknya diayunkan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan pengajaran bahasa di Indonesia, jika kita bersungguh hati hendak mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman di masa depan. Untuk dekade 1990-an ini,

bertolak dari pandangan bahwa bahasa adalah *instrument of power* (periksa kembali Tabel 2), kelas bahasa Indonesia dituntut untuk dapat melahirkan manusia-manusia yang dapat berbahasa (berbicara dan menulis) seperti Amien Rais. Ini suatu cita-cita yang tak mungkin dapat terwujud, apabila kegiatan pengajaran bahasa di Indonesia masih seperti yang lazim berlaku pada tahun 1960-an.

Di dalam pembinaan bahasa, pendekatan "otoriter" dalam pemasyarakatan bahasa baku kiranya perlu dibarui. Pendekatan seperti itu menumbuhkan sikap merendahkan ragam tak baku. Sikap negatif terhadap ragam tak baku justru dapat menjadi bumerang bagi usaha membuat orang cinta pada ragam baku dan dengan rela hati menggunakannya pada konteks yang sesuai. Suasana yang diperlukan bagi tumbuhnya kecintaan itu ialah suasana kesetaraan, suasana yang terbebas dari perlakuan "meninggikan" dan "merendahkan". Perhatian untuk mengembangkan "bahasa baku" dilakukan seiring dengan perlakuan yang sama pula pada "bahasa sehari-hari"; keduanya sama-sama kepentingannya dan kait-mengait peranannya.

Pembaruan ini diharapkan dapat mengimbas ke pengajaran bahasa di sekolah. Sekolah memang tidak mengajarkan ragam tak baku (atau ragam sehari-hari). Akan tetapi, sekolah jangan sampai mengharamkan kehadiran atau pemakaian ragam tak baku--di dalam kegiatan belajar-mengajar bahasa di kelas--sebagai batu loncatan bagi pengajaran bahasa baku (karena sekolahlah lahan utama bagi pengajaran bahasa baku).

Untuk meningkatkan pengajaran bahasa di kelas, pengembangan kurikulum di sekolah dasar dan menengah penyampaiannya ke sasaran, serta penerapannya sehingga menjadi kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas, menuntut dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Usaha ini seyogianya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi--terutama--juga menjadi kepedulian perguruan tinggi. Setakat ini yang berlangsung barulah keterlibatan atau kepedulian individu-individu dari perguruan tinggi dan belum sampai ke keterlibatan formal kelembagaan. Konkretnya, kurikulum yang berlaku di sekolah dasar dan menengah harus menjadi bahan kuliah wajib di program pendidikan guru dan program linguistik di perguruan tinggi, bahkan seyogianya juga menjadi bahan penelitian pada lembaga-lembaga yang berkecimpung di bidang bahasa.

Di tempat inilah setiap kali kurikulum memperoleh bahasan akademik, baik berupa kritikan maupun saran-saran perbaikan ke arah masa depan. Dengan demikian, kita bersama dapat maju satu langkah lagi karena kritikan dan saran tentang kurikulum tidak lagi hanya tertuangkan di media masa atau media elektronik saja, tetapi juga di dunia akademik.

## Daftar Pustaka


Alwi, Hasan *et al.* 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kaswanti Purwo, Bambang. 1997. "Ihwal Bahasa Tak Baku: Bahasa yang Baik dan Tidak Benar?", *Atma nan Jaya* 10.3 (Desember 1997), 49—63.

-------. 1998. "Laporan Penelitian Pengembangan Soal-soal Berdasarkan Kurikulum 1994: Bidang Studi Bahasa Indonesia", Pusat Pengujian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

-------. 1999. "Perkembangan Pengajaran Bahasa" dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed.). *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 200—210.

Larsen-Freeman, Diana. 1998. "Expanding Roles of Learners and Teachers in Learner-Centered Instruction" dalam Willy A. Renandya dan George Jacobs (ed.) *Learners and Language Learning*. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Nier, [...]. 1999. *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo, [....].

Sulaiman, Julia. 1994. *Aktif Berbahasa Indonesia 1B*. Jakarta, BPK Penabur.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Rabu, 10 November 1999
Pukul : 11.15--12.15
Pemakalah : Bambang Kaswanti Purwo
Judul Makalah : Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa
Pemandu : Dendy Sugono
Pencatat : Suwadji

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Hasan Alwi, Pusat Bahasa

   Berkaitan dengan penafsiran pengertian bahasa yang baik dan benar, bagaimanakah pendapat pemakalah apabila dibuatkan pula tata bahasa lisan?

2. H. Suparno, Universitas Negeri Malang

   Saya tidak rela apabila dikatakan bahwa pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia baru sampai pada tingkat model pengajaran tahun 60-an. Beban guru sangatlah berat. Kelasnya besar dan mereka juga harus dapat menunjukkan hasil yang baik ketika pelaksanaan Ebtanas. Yang penting bukan kurikulumnya, melainkan realisasi pengajarannya.

3. D.P. Tampubolon, Universitas Sumatra Utara, Medan

   Sebagai bahan ajar harus ada keseimbangan antara bahasa baku dan bahasa sehari-hari. Saya setuju dengan istilah *instrument of power* yang dimaksudkan pemakalah, tetapi saya tidak setuju dengan istilah itu yang berlaku pada masa Orde Baru. Mutu pendidikan yang ingin dicapai hendaknya sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pemakai bahasa. Pendidikan sebenarnya adalah jasa sehingga harus sesuai dengan tuntutan pemakai jasa. Sebaiknya tempat pendidikan bahasa itu diserahkan kepada Diknas saja.

4. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
   Berkaitan dengan konsepsi *content based* yang dikemukakan pemakalah, seyogianya guru bahasa Indonesia mahir berbahasa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi siswa. Beban guru sangat berat apabila harus mengajarkan semua ragam bahasa yang ada. Saya mengusulkan agar yang diajarkan itu hanyalah bahasa baku.

5. Soenardji, Universitas Negeri Semarang
   Diusulkan agar bahan pengajaran sastra memanfaatkan karya-karya penulis besar yang sudah terkenal, sedangkan bahan pengajaran bahasa ditentukan jumlah kosakata dasar yang diperlukan. Bahan ajar yang berupa bahasa sehari-hari hendaknya diambil sebagai sampel saja. Bagaimana dengan LKS (lembar kerja siswa) yang ada di sekolah-sekolah itu?

6. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
   Pemakaian ungkapan *di mana* atau *yang mana* dan yang sejenis, yang katanya sebagai pengaruh bahasa Eropa, sejak dulu sudah ada. Bagaimana kalau hal itu diterima saja dan kemudian dibuatkan tata bahasanya?

7. Mansoer Pateda, IKIP Gorontalo
   Dengan tujuan peningkatan mutu, bahan ajar sebaiknya dilihat dari bawah, kebutuhan anak-anak itu apa. Saya setuju dengan bahan bahasa sehari-hari.

8. Adi Sunaryo, Pusat Bahasa
   Istilah baku itu rupanya didasarkan pada segi formal dan non-formal. Sebaiknya dibedakan antara baku lisan dan baku tulis.

9. I Wayan Bawa, Universitas Udayana, Denpasar
   Bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi?

**B. Jawaban**

1. Apabila hal itu dilakukan, pengertian bahasa yang baik dan benar perlu dirumuskan kembali pula.

2. Saya hanya ingin melihat kenyataan itu. Meskipun kurikulumnya sudah diperbaharui, pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia, menurut pengamatan saya, kenyataannya seperti itu.

3. Bahasa sehari-hari yang dijadikan bahan ajar itu berfungsi sebagai pijakan bagi siswa untuk dapat memahami bahasa itu.

4. Bermacam-macam ragam bahasa itu hanya dipakai sebagai pijakan bagi siswa untuk memahami bahasa baku.

5. Usul penanya tentang karya-karya besar sebagai bahan ajar dapat direkomendasikan dalam rumusan seminar. Tentang LKS, itu sebagai imbas dari konsepsi *content based*.

6. Kita serahkan hal itu kepada Pusat Bahasa. Bagaimana nanti argumennya, kita dapat memberikan dukungan.

7. (di bagian lain sudah ada jawaban)

8. (tidak dijawab secara langsung)

9. Tidak ada jawaban konkret/langsung. Akan tetapi, ketika berbicara tentang kerja sama secara kelembagaan untuk masa depan pengajaran bahasa Indonesia, masalah kurikulum, misalnya, dapat dijadikan bahan kuliah di perguruan tinggi.

# PENGAJARAN SASTRA DAN PEMASYARAKATAN SASTRA

**Budi Darma**
IKIP Surabaya

## 1. Mutu Pengajaran Sastra Indonesia/Daerah

Pendapat umum menyatakan, bahwa mutu pengajaran sastra rendah.

a. *Faktor Penghambat Keberhasilan Pengajaran Sastra Indonesia/Daerah*

(1) Masyarakat menganggap sastra tidak menarik dan tidak bermanfaat. Sebagai anggota masyarakat, dengan demikian, siswa dan guru memiliki sikap yang sama terhadap sastra. Guru-guru bidang studi lain dan juga, dalam hal-hal tertentu, Kepala Sekolah, sebagai pencerminan keadaan masyarakat, juga menganggap pengajaran sastra tidak penting.

(2) Siswa tidak tertarik pada pengajaran bahasa Indonesia/daerah, dan ketidak-tertarikan mereka membawa dampak pula pada pengajaran sastra Indonesia/daerah. Menurut siswa, bahasa Indonesia tidak perlu dipelajari sebab mereka sudah mampu mempergunakan bahasa Indonesia di masyarakat. Guru-guru bidang studi lain dan, dalam hal-hal tertentu, Kepala Sekolah, juga menganggap bahwa bahasa Indonesia mudah.

(3)Mutu calon guru Bidang Studi Bahasa (dan sastra Indonesia/daerah) tidak baik.

(4) Minat baca siswa dan guru kurang.

(5) Kemampuan menulis siswa dan guru kurang.

(6) Minat media massa terhadap sastra Indonesia/daerah tidak banyak. Karena itu kebanyakan media massa menolak untuk memuat karya sastra, masalah sastra, dan berita mengenai sastra. Kekurangpedulian media massa terhadap sastra mau tidak mau akan membantu menciptakan sikap apatis terhadap pengajaran sastra.

(7) Sastra sendiri, pada hakikatnya, sulit dimengerti oleh pembaca pada umumnya, dan karena itu juga sulit dimengerti oleh guru dan siswa

(8) Pendidikan massal

Karena minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan meningkat, pendidikan di Indonesia sudah menjadi pendidikan massal. Dalam praktik, di antara tiga prioritas pendidikan, kuan titas selalu dijadikan nomor

satu. Kualitas dan relevansi dengan pasaran kerja, yaitu dua prioritas lain, dapat digeser-geser sesuai dengan keadaan.

a. Siswa "dipaksa" naik kelas dan "dipaksa" lulus

Karena acuan pendidikan massal adalah kuantitas, dan karena itu kelas selalu penuh, maka jumlah siswa yang tidak naik kelas dan yang tidak lulus selalu ditekan. Akibatnya, mutu siswa yang naik kelas dan mutu siswa yang lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun ke lapangan kerja mau tidak mau menurun. Siswa, sementara itu, juga tahu bahwa bagaimana pun juga mereka akan naik kelas dan akan lulus. Karena itu, semangat belajar mereka tidak terpacu.

b. Guru kurang mampu menguasai kelas

Lepas dari akibat keberhasilan KB pada tahun 1970-an, dalam praktik guru masih harus berhadapan dengan kelas-kelas besar sehingga guru kurang mampu menguasai kelas. Peserta dalam kelas pelajaran sastra, sementara itu, sebagaimana diakui oleh WS Rendra, sebaiknya tidak melebihi 15 orang.[1]

(9) Hubungan personal guru dengan siswa kurang

Juga karena jumlah siswa terlalu besar, hubungan personal antara guru dan siswa menjadi sangat kurang sehingga guru tidak mungkin memantau hasil kerja siswa dengan baik. Menurut Taufiq Ismail dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1998 di Jakarta, sementara itu, pelajaran sastra, termasuk apresiasi sastranya yang paling baik adalah memperbanyak jam mengarang dan membaca. Dengan adanya pendidikan massal, tidak mungkin guru mengoreksi karangan setiap siswa.

(10) Simpul-simpul kurikulum

Kendati kurikulum 94 sudah bagus, simpul-simpul yang berada di balik kurikulum itu sendiri menyebabkan guru terpaksa melaksanakan kurikulum tersebut dengan kaku.[2] Ada kesan, dalam melaksanakan kurikulum guru tidak diminta untuk mengajak siswa memahami sastra, tetapi untuk lulus. Dalam praktik, dengan demikian, titik-berat pengajaran sastra bukan afeksi, melainkan kognisi.

(11) Dampak situasi ekonomi

*Pada guru*: Karena penghasilan guru tidak baik, guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Dengan demikian, mau tidak mau, konsentrasi pikiran dan perhatian guru terganggu. Dalam pengajaran sastra yang baik, apalagi kalau anjuran Taufiq Ismail untuk memberi tekanan pada pelajaran mengarang dapat diterima, guru harus selalu mengoreksi hasil karangan siswanya dengan teliti.

*Pada sponsor*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan sastra tidak mungkin mendatangkan keuntungan. Karena itu, sponsor tidak tertarik untuk menjadi sponsor atau pengayom segala kegiatan sastra. Tipisnya minat sponsor untuk mengayomi sastra mau tidak mau ikut menciptakan sikap apatis terhadap pengajaran sastra.

*Pada siswa*: Karena sastra tidak menjanjikan pasaran kerja yang baik, siswa tidak tertarik untuk belajar sastra dan melanjutkan studi ke jurusan/fakultas sastra. Akibatnya, mereka yang belajar sastra di jurusan/fakultas sastra bukan merupakan bibit unggul. Kalau mereka nanti bekerja di lapangan kerja yang ada hubungannya dengan sastra, khususnya dalam pengajaran sastra, sumbangan mereka mungkin justru tidak menguntungkan pengajaran sastra.[3]

(12) Budaya pop

Hakikat budaya pop adalah enak ditonton, enak dibaca, dan enak didengar. Budaya pop--sebagaimana yang tampak dalam sinetron, musik hiburan, dan bacaan pop--memang menawarkan kehidupan yang santai. Ciri-ciri budaya pop, yaitu serba menyenangkan, ringan, dan santai, dengan sendirinya menggusur minat siswa dari sastra yang bukan pop ke sastra pop.[4]

b. *Faktor Penunjang Keberhasilan Pengajaran Sastra Indonesia/Daerah*

Pada hakikatnya, faktor penunjang tidak terletak pada masyarakat dan juga tidak terletak pada suasana kehidupan pada umumnya, tetapi pada kesenangan atau kesadaran para pribadi. Masyarakat dan suasana kehidupan pada umumnya, pada hakikatnya, tidak memberi tempat pada sastra. Mereka yang memberi tempat pada sastra, tidak lain, adalah pribadi-pribadi, dan jumlahnya sedikit, dan kalau perlu bergerak melawan arus. Media massa yang terlalu memberi hati pada sastra, misalnya, tiras-

nya terancam turun. Penerbit-penerbit yang terlalu memberi hati pada sastra ternyata juga terancam kebangkrutan.

Pribadi-pribadi ini bisa bergerak sendiri-sendiri, bisa bergerak melalui lembaga, bisa juga terlibat dalam sistem dan mempengaruhi sistem yang menguntungkan sastra. Kalau mereka sudah masuk ke dalam sistem, maka mereka muncul dalam lembaga. Inilah mereka, dan lembaga-lembaga tempat mereka menyalurkan kesenangan dan kepedulian mereka terhadap sastra:

(1) Di antara sekian banyak pihak yang apatis terhadap sastra, masih ada juga pihak-pihak yang peduli terhadap sastra, misalnya individu anggota masyarakat, individu guru, dan individu siswa. Langsung atau tidak, mereka memberi dampak pada minat terhadap sastra, dan mau tidak mau mereka juga memberi dampak pada pengajaran sastra. Namun, karena jumlah mereka tidak banyak, dan mereka tinggal bertebaran di berbagai kawasan, kekuatan mereka tidak besar.

(2) Badan-badan Pemerintah yang peduli terhadap perkembangan sastra Indonesia/daerah, yaitu Pusat Bahasa di Jakarta, balai-balai bahasa dan taman-taman budaya di berbagai kawasan di Indonesia.

(3) Majalah sastra.

(4) Media massa, khususnya koran.

**2. Pemasyarakatan Sastra Indonesia/Daerah**

Pendapat umum menyatakan, bahwa pemasyarakatan sastra Indonesia/daerah kurang baik.

a *Faktor Penghambat Pemasyarakatan Sastra Indonesia/Daerah:*

(1) Sastra, bagi masyarakat pada umumnya, bukan merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memasyarakatkan sastra tidak akan mendapat sambutan yang baik.

(2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan sastra tidak mendatangkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pemasyarakatan sastra kurang ditunjang oleh sponsor atau pengayom.

(3) Dengan alasan sama, yaitu tidak mendatangkan keuntungan ekonomi, media massa pada umumnya kurang bergairah dalam memasyarakatkan sastra.

(4) Sastra pada umumnya sulit dimengerti sehingga itu sulit dimasyarakatkan.

(5) Harga buku sastra mahal; kurang tersedia di toko-toko buku dan juga di perpustakaan-perpustakaan, khususnya di kota-kota kecil.

b. *Faktor Penunjang Keberhasilan Pemasyarakatan Sastra Indonesia/ Daerah*

Sama halnya dengan faktor penunjang keberhasilan pengajaran sastra, faktor penunjang keberhasilan pemasyarakatan sastra juga terletak pada kesenangan dan kepedulian pribadi-pribadi.

Pribadi-pribadi ini juga bisa bergerak sendiri-sendiri, bisa bergerak melalui lembaga, bisa juga terlibat dalam sistem dan mempengaruhi sistem yang menguntungkan pemasyarakatan sastra. Kalau mereka sudah masuk ke dalam sistem, mereka muncul dalam lembaga. Sebagaimana halnya dalam faktor yang menunjang keberhasilan pengajaran sastra, dan di lembaga-lembaga inilah tempat mereka menyalurkan kesenangan dan kepeduliannya terhadap sastra.

(1) Di antara sekian banyak pihak yang apatis terhadap sastra, masih ada juga pihak-pihak yang peduli terhadap sastra, misalnya individu-individu anggota masyarakat, individu guru, dan individu siswa. Langsung atau tidak, mereka memberi dampak pada minat terhadap sastra, dan mau tidak mau mereka juga memberi dampak pada pengajaran sastra. Namun, karena jumlah mereka tidak banyak, dan mereka tinggal bertebaran di berbagai kawasan, kekuatan mereka tidak besar.

(2) Badan-badan Pemerintah yang peduli terhadap perkembangan sastra Indonesia/daerah, yaitu Pusat Bahasa di Jakarta, balai-balai bahasa dan taman-taman budaya di berbagai kawasan di Indonesia.

(3) Majalah sastra.

(4) Media massa, khususnya koran.

**3. Lembaga/Pihak yang Dapat Membantu Peningkatan Mutu Pengajaran Sastra Indonesia/Daerah dan Pemasyarakatan Sastra Indonesia/Daerah:**

(1) Pusat Bahasa untuk sastra Indonesia, dan balai-balai bahasa untuk sastra Indonesia dan sastra daerah

(2) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya, untuk pe-

masyarakatan sastra Indonesia dan daerah, baik di forum Indonesia maupun forum internasional melalui paket-paket wisata.

(3) Departemen Luar Negeri, khususnya untuk pemasyarakatan sastra Indonesia di luar negeri melalui jalur diplomasi kebudayaan (sebagaimana dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah di luar negeri, antara lain *The British Council* dan *Goethe Institut*).

(4) Pemerintah daerah, khususnya dalam rangka otonomi daerah. Dalam soal keuangan, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membina SD dan pengajaran serta pemasyarakatan sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah; dapat dilakukan lewat SD melalui paket-paket sastra yang sudah disederhanakan.

Kecuali melalui SD, pemerintah daerah juga bertindak sebagai sponsor dewan-dewan kesenian, sanggar-sanggar sastra, dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah di atas SD.

(5) Dewan-dewan kesenian, yaitu Dewan Kesenian Jakarta, dewan kesenian daerah Tingkat I, dan dewan kesenian daerah Tingkat II. Secara rutin, kendati kecil, sebenarnya dewan-dewan kesenian sudah mendapat dana, dan dengan adanya otonomi daerah, intensitas dan frekuensi kegiatan sastra dapat ditambah.

(6) Majalah-majalah sastra.

(7) Media massa.

(8) Perguruan tinggi.

**4. Kebijakan untuk Peningkatan Mutu Pengajaran Sastra Indonesia/ Daerah dan Pemasyarakatan Sastra Indonesia/Daerah:**

(1) Memperkokoh kedudukan, harkat, dan martabat bahasa dan sastra Indonesia/daerah lewat amandemen UUD 45.

(2) Memperkokoh kedudukan, harkat, dan martabat bahasa dan sastra Indonesia/daerah lewat undang-undang kebudayaan, yang pada tahun 1998 sudah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud, kemudian dimintakan saran dari masyarakat mengenai perbaikan konsepnya melalui berbagai jalur, antara lain BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional). Kendati struktur Depdikbud sudah berubah, dan perubahan ini membawa dampak pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan mungkin juga pada BPPN, rancangan undang-undang kebudayaan sebaiknya terus dilakukan.

(3) Menekankan unsur afeksi dan apresiasi dan mengurangi penekanan pada unsur kognisi dalam kurikulum.

(4) Memberi perhatian lebih pada pelajaran mengarang tanpa mengganggu struktur kurikulum secara keseluruhan.

(5) Memasyarakatkan sastra dengan jalan mencantumkan potret/gambar sastrawan besar yang sudah wafat pada uang dan prangko.

(6) Memasyarakatkan sastra dengan jalan memberi nama jalan dengan nama sastrawan besar yang sudah wafat di kawasan-kawasan terhormat (nama beberapa sastrawan memang sudah dipergunakan untuk nama jalan, tetapi umumnya pada kawasan-kawasan yang kurang terhormat).

(7) Memberi penghormatan kepada sastrawan besar, baik yang masih hidup maupun yang sudah almarhum, dengan anugerah yang memiliki nilai tinggi.

(8) Menambah frekuensi kegiatan sastra berupa seminar, lokakarya, penataran, lomba menulis, lomba membaca, dan lain-lain melalui berbagai lembaga, khususnya di kota-kota kecil.

(9) Menambah pasokan buku-buku dan bacaan-bacaan sastra, misalnya majalah sastra, ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan di luar sekolah sampai ke tingkat kecamatan.

## Catatan

[1] Pengakuan Rendra dalam percakapan tidak resmi, menjelang tampil sebagai salah-seorang pembicara dalam Seminar Nasional Bahasa dan Sastra, UNESA, Surabaya, 30 Oktober 1999 mengatakan bahwa pada waktu dia masih sekolah di SMU (dulu SMA) Solo, sekolah dan guru berkali-kali minta maaf kepada siswa, karena ternyata dalam kelas terdapat 17 siswa, padahal seharusnya paling banyak 15 siswa.

[2] Dari 100 pengisi angket pada Seminar Nasional Bahasa dan Sastra, UNESA, 30 Oktober 1999, 15 pengisi angket menyatakan kurikulum 1994 sudah bagus. Selebihnya, yaitu 85 pengisi angket, tidak memberi komentar mengenai kurikulum itu sendiri. Namun, 20 pengisi angket memberi komentar mengenai simpul-simpul di belakang kurikulum 1994: guru harus melaksanakan kurikulum sedemikian rupa agar siswa lulus, dan bukan agar siswa memahami sastra dengan baik.

[3] Kendati "Guru Gagal Mengajarkan Sastra yang Mencerdaskan." **Kompas**, 28 Oktober 1998, hlm. 9, hanya menyorot tamatan LPTK, pada hakikatnya di luar LPTK pun, dan juga di SMU, keadaannya sama.

[4] Budi Darma. "Sastra Mutakhir Kita." Seminar Nasional Bahasa dan Sastra, UNESA, 30 Oktober 1999, dikutip **Kompas**, "Sastra Pop Tidak Terikat Gender." 2 November 1999, hlm. 21

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Rabu, 10 November 1999
Pukul : Pukul 13.15--14.15
Judul Makalah : Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra
Penyaji Makalah : Budi Darma
Pemandu : Nafron Hasjim
Pencatat : S.R.H. Sitanggang

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Mulyo Seto, LKBN Antara

   Menurut hemat saya, siswa SLTP dan SLTA kurang senang pada sastra. Mengapa? Buku sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka kurang menarik dibandingkan dengan buku sastra yang diterbitkan oleh penerbit swasta seperti Pustaka Jaya. Oleh karena itu, agar siswa senang pada karya sastra, buku sastra hendaknya dikemas demikian rupa sehingga menarik dan dapat bersaing dengan cerita/sastra anak-anak yang berasal dari negara lain.

2. Chaedar Alwasilah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

   Dapatkah Anda memberikan penjelasan mengapa ada pasang surut kehadiran pengarang sastra? Pada masa awal perkembangan sastra Indonesia, para sastrawan lebih banyak berasal dari Sumatra, tetapi akhir-akhir ini lebih banyak dari Pulau Jawa. Benarkah itu?

3. Sabarti Achadiah, Universitas Negeri Jakarta

   Apresiasi hendaknya ditanamkan sejak dini, misalnya melalui peran orang tua dalam keluarga. Untuk itu, selain para orang tua, para tokoh masyarakat perlu dibekali pengetahuan apresiai sehingga mereka memiliki pengalaman bersastra. Buku bacaan dan buku yang dibacakan juga perlu disediakan.

4. D.P. Tampubolon, Universitas Sumatra Utara, Medan

   Saya setuju atas usul kebijakan yang Anda ajukan. Di samping

itu, saya ingin menambahkan dua hal berikut ini. Pertama, dalam pendidikan humaniora agar lebih ditumbuhkan kecerdasan emosional, yang selama ini cenderung lebih ditekankan pada pendidikan rasio. Kedua, agar moral membaca karya sastra siswa berkembang, pelajaran *teknik membaca cepat* perlu diajarkan di sekolah, mulai sekolah dasar kelas enam sampai sekolah lanjutan tingkat atas.

5. Basuki Suhardi, Universitas Indonesia, Depok

Saya ingin menambahkan usul Pak Tampubolon. Karya-karya sastra yang "berat" (jumlah halamannya banyak) hendaknya dibuatkan ringkasannya (versi ringkas) dan bahasanya disederhanakan agar siswa yang membacanya dapat memahaminya dengan baik. Buku-buku sastra hasil saduran itu dibuatkan berjenjang sesuai dengan kemampuan siswa di SD dan SLTA.

6. Mansoer Pateda, IKIP Gorontalo

Para penerbit hendaknya jeli melihat peluang dalam menerbitkan karya sastra, misalnya dengan menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Apresiasi sastra yang diajarkan di sekolah (sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi) memang tidak untuk melahirkan sastrawan. Namun, secara ideal, kalau memungkinkan, melalui pelajaran apresiasi sastra itu dapat "dilahirkan" sastrawan baru. Hal lain yang perlu adalah penerbitan cerita rakyat, misalnya dongeng, hendaknya lebih digalakkan karena dalam cerita dongeng banyak terkandung pendidikan budi pekerti.

7. Soenardji, Universitas Negeri Semarang

Saya setuju atas usul Pak Budi Darma. Namun, ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Saya kira, kita memerlukan buku yang mirip dengan *Grammar of Value* yang dapat memandu pendidikan apresiasi sastra. Apresiasi sastra yang alami juga diperlukan untuk pendidikan apresiasi sastra yang mengacu pada *multy ears* (seperti pada pelajaran IPA).

Untuk keperluan apresiasi sastra, kita perlu belajar dari pengalaman seorang ibu yang mendendangkan karya sastra pada anak-anaknya ketika masih kecil. Untuk itu, cerita yang hidup di tengah-

tengah masyarakat seperti "Hang Tuah", "Ande-Ande Lumut", dan "Pronocitro" hendaknya diangkat dan diolah demikian rupa sehingga tidak kalah dengan bacaan yang berasal dari negara lain misalnya seperti "Satria Baja Hitam" dan "Doraemon".

**B. Jawaban**

1. Saya sependapat dengan Anda. Namun, yang penting adalah bagaimana cara memayarakatkan karya sastra itu. Saya kira, kita perlu membina hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga/yayasan yang menaruh perhatian pada sastra. Kegiatan bengkel sastra atau temu sastra antara sastrawan dan siswa dapat dimanfaatkan untuk tujuan itu.

2. Memang benar apa yang Anda katakan. Jika jumlah sastrawan dari Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sastrawan yang berasal dari Sumatra sekarang ini karena sastrawan di Pulau Jawa, selain lebih dekat pada kekuasaan, juga karena fasilitas yang tersedia.

3. Apa yang Anda usulkan memang baik, dan dapat saya terima.

4. Pendidikan kecerdasan emosional memang perlu ditingkatkan sehingga setara dengan pendidikan iptek. Hal itu dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan undang-undang kebudayaan.

5. Usul Anda menarik dan dapat saya terima. Karya sastra yang tergolong "berat" itu perlu disederhanakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa atau pembacanya.

6. Cerita dongeng memang banyak mengandung pendidikan moral atau nilai-nilai budi pekerti. Untuk menerbitkan karya sastra, selain mengupayakan peran pemerintah daerah setempat, para penerbit pun perlu didekati agar bersedia menerbitkan karya sastra. Sebaliknya, para penulis harus mengupayakan agar karangannya bagus dan layak jual.

7. Saya setjuju, mudah-mudahan usul Anda itu dapat diterima sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan sastra. Selain, itu saya kira, perlu juga disusun bacaan sastra berupa antologi sastra yang berwibawa seperti *Gema Tanah Air* (H.B. Jassin).

# BAHASA KORAN, RADIO, DAN TELEVISI PERLU PEMBENAHAN MENYELURUH

**Djafar H. Assegaff**
Pemimpin Redaksi Harian *Media Indonesia*
dan Kepala Pekabaran RCTI

Hampir seperempat abad yang lalu, saya pernah diminta untuk menyajikan makalah dalam suatu pertemuan bahasa. Makalah yang saya sajikan adalah mengenai bahasa Indonesia di media massa. Saat itu saya mengemukakan hal-hal yang sangat memprihatinkan mengenai bahasa di media massa, yang umumnya keluar dari kaidah-kaidah bahasa baku, dan mengemukakan kurangnya penaatan kalangan pers dan media massa terhadap penggunaan ejaan yang disempurnakan dan tanda baca.

Bahkan, bagi kalangan pers, mereka menganggap makalah tadi telah menjatuhkan vonis bahwa "pers adalah perusak penggunaan bahasa baku Indonesia". Namun, hampir semua kalangan pers menganggap pernyataan yang saya kemukakan di makalah sebagai suatu "terapi kejutan" karena sejak saat itu media-media besar mulai memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Bahkan beberapa media yang ingin meningkatkan mutu isi, mulai mempergunakan "redaktur bahasa".

Bagaimanakah keadaannya sekarang setelah hampir seperempat abad itu berlalu? Secara terus terang saya harus mengatakan bahwa media massa, yakni surat kabar, radio, dan televisi tidak berkembang lebih bagus dalam penggunaan bahasa, malah sebaliknya bahasa pers, radio, dan televisi mengalami penurunan dalam mutu penggunaan bahasa Indonesia yang baku.

Bahasa media massa sudah menjadi "bahasa gado-gado" karena begitu banyaknya masuk istilah-istilah bahasa asing, terutama Inggris. Suatu hal yang menyedihkan karena sejak 28 Oktober 1928, setiap tahun kita memperingati hari Sumpah Pemuda, di mana kita diingatkan kembali kepada pemakaian bahasa Indonesia yang baik. Sejak saat itu usaha memperkaya kosakata Indonesia, dan memperkaya khazanah istilah asing yang diindonesiakan dalam ilmu pengetahuan serta memungut kata-kata asing yang sudah diindonesiakan terus dilaksanakan.

Di manakah letak kesalahan tadi? Barangkali jawabannya adalah karena kelemahan pada redaktur penyunting untuk dapat memperbaiki setiap kesalahan dan kemudian mencoba mencari padanan kata-kata asing yang menyerbu masuk ke dalam bahasa pers. Radio dan televisi jauh lebih buruk lagi karena para "reporternya" dalam siaran langsung tidak mempunyai waktu yang banyak sehingga sampai-sampai nama-nama negara disebut dalam singkatan bahasa asingnya. Misalnya, sekali waktu dalam siaran berita televisi disebutkan "UK" dalam lafal fonetik Inggris, hanya untuk menyebut negara Inggris.

Siaran radio dalam siaran remaja dan eksekutif muda sudah menjadi bahasa gado-gado karena ia ingin menunjukkan kemahirannya dalam bahasa Inggris, bahasa dunia yang dalam abad global ini merayap merusak bahasa baku Indonesia. Bahkan bukan hanya itu, siaran radio untuk remaja telah mengumbar "sikap berbahasa santai", dan kadang-kadang dengan nada seloroh yang kumuh pula. Misalnya, akronim-akronim "kutilang darat" dan "sersan" yang umumnya menimbulkan tertawa dan kesantaian yang memang disyaratkan dalam media elektronik yang oleh kalangan ahli media disebut "media akrab".

Dengan mengemukakan hal ini penyaji makalah tidaklah ingin mengembangkan "puritenisme bahasa", tetapi bagaimana kita tetap memelihara bahasa Indonesia yang baku, tetapi komunikatif. Tidak pula berarti kita harus memusuhi bahasa asing. Namun, yang telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia patut sekali kita pergunakan.

Penulis yang kemudian duduk pula dalam komisi istilah dan bahkan oleh Pusat Bahasa pernah dijadikan Ketua Proyek Penyusunan Kamus Jurnalistik, merasakan betapa sia-sianya pekerjaan komisi istilah tadi, kalau masyarakat pengguna bahasa mengabaikannya karena kemalasan semata. Akibatnya, kalangan intelektual kita berbahasa dalam bahasa gado-gado, tak ubahnya dengan bangsa dalam peradaban meztizo yang lebih bangga karena bahasanya bercampur dengan bahasa asing.

Mengapa masyarakat intelektual dan peringkat pemimpin kita berbahasa gado-gado, barangkali sebabnya mudah dilihat kepada kompensasi rasa rendah diri. Jika mereka tidak mencampur bahasanya dengan kata-kata bahasa asing, akan tampak mereka bukan dari kalangan terpelajar. Sama halnya dahulu di masa tahun lima puluhan, pengumuman di Bandara Kemayoran meskipun menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ucap-

annya kebelanda-belandaan. Sesuatu yang menyakitkan telinga, tetapi merupakan manifestasi dari rasa rendah diri yang dibungkus dalam ucapan sinyo dan noni Belanda. Sama halnya sekarang dengan iklan dari perabot rumah tangga yang datang dari Swiss yang menggunakan model orang Swiss yang berbahasa Indonesia dengan aksen Swiss yang kental. Juga tidak pula boleh kita lupakan iklan "Kosong Kosong Delapan" yang diucapkan lelaki dan wanita Jepang dalam bahasa Indonesia dengan aksen Jepang yang tidak dapat menyebut "l". Merdu, menarik dan sungguh kreatif iklannya, tetapi ia dapat merusak "ucapan" bahasa Indonesia.

Di Jepang, Nihon Hosho Kyiokai mengeluarkan kamus panduan ucapan bahasa Jepang untuk memberi tuntunan kepada seluruh penyiar radio, agar tidak salah ucapan kata-kata Jepang dari ujung utara ke selatan. Demikian pula di beberapa negara Eropa yang, meskipun sudah bersatu, tetap mempertahankan bahasa bakunya masing-masing.

Sekali lagi bukan penulis ingin membangkitkan puritenisme dalam berbahasa Indonesia, tetapi semata-mata kita harus menyadari bersama bahwa perkembangan bahasa kita sungguh memprihatinkan. Sekaligus penulis ingin pula mengingatkan kembali betapa banyak keputusan yang telah diambil, yang isinya adalah untuk mendorong penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia di buminya sendiri. Di antaranya Keputusan Gubernur DKI tentang nama-nama *real estate* yang harus disebutkan dalam bahasa Indonesia, demikian juga nama-nama bangunan.

Sekarang, marilah beralih ke bidang sastra karena bukankah dalam sastra kita jumpai penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan indah. Namun, apa lacur, buku-buku sastra tidak lagi mendapat tempat di hati para pembaca. Kalangan Ikapi menyebut bahwa buku-buku sastra yang diterbitkan tirasnya tidak sampai 3000 dan itu pun memerlukan waktu sampai dua atau tiga tahun baru habis. Kita tidak perlu menutup mata, konon kabarnya ada buku yang sampai dicetak ulang 21 kali dari seorang pengarang wanita yang baru saja muncul. Suatu kekecualian yang tidak dijadikan apologi dalam kelesuan penerbitan buku-buku sastra.

Majalah-majalah sastra dan budaya, hanya saru dua yang masih terbit dan tirasnya kecil kalau tidak akan dikatakan "seperti kerakap di atas karang". Lembar-lembar budaya dan sastra dalam surat kabar tidak lagi menarik seperti dahulu, dan bahkan tidak lagi diasuh oleh kalangan sastra dengan nama besar. Tidaklah hal ini juga harus menjadikan masyarakat

bahasa menyadarinya dan mencari akar di mana letak kelemahan ini.

Kalau di bidang sastra puisi banyak dijumpai dalam pertemuan-pertemuan yang dipenuhi oleh pembacaan puisi, hal ini lebih disebabkan oleh maraknya para "petinggi dan pejabat" negara yang karena "kebetulan" dan "arogansi kekuasaan" ingin disebut lembut karena ia dapat mendeklamasikan sajak. Sungguh tragis bila puisi kita dijadikan sebuah sarana untuk popularitas murah. Penulis teringat dalam malam pembacaan sajak, ketika pengusaha Hasyim Ning almarhum harus membaca sajak. Ia membaca sajak yang digubahnya yang diberinya judul "Uang". Penulis sudah lupa, tetapi sajak tadi jelas menyindir kalangan seniman.

Tibalah kita kepada bagian yang terakhir, yakni apakah upaya yang nyata kalangan media massa untuk kembali menyadari penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Tiada lain adalah pembinaan yang berkesinambungan dari Pusat Bahasa terhadap para redaktur penyunting, dan jika perlu juga mendidik para penyunting bahasa. Bahkan lembar istilah-istilah baru dari komisi istilah (jika masih ada) untuk dikirimkan setiap minggu ke media massa agar disebarluaskan.

Suatu upaya yang sangat penting adalah pertemuan para ahli bahasa dengan penanggung jawab siaran radio dan televisi untuk mencari upaya mengurangi dan jika mungkin mencegah masuknya "bahasa gado-gado" dalam siaran radio dan televisi. Bahkan pendidikan pada redaktur, penyunting, reporter, dan penyiar radio untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dengan ucapan yang baik pula.

Untuk meningkatkan dan memasyarakatkan sastra Indonesia, barangkali baik diusahakan dorongan terhadap penerbitan lembar sastra dalam harian-harian di Indonesia. Majalah-majalah sastra harus disubsidi agar majalah tadi dapat hidup dan para seniman pengasuhnya mampu hidup dengan layak. Upaya ini haruslah merupakan kebijakan bahasa yang harus diambil karena bahasa Indonesia yang baku dan baik harus dipelihara.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

Hari, Tanggal : Rabu, 10 November 1999
Pukul : 14.15--15.15
Judul Makalah : Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh
Penyaji Makalah : Djafar H. Assegaff
Pemandu : Basuki Suhardi
Pencatat : Zainuddin Hakim

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Soenardji, Universitas Negeri Semarang
   Apakah pemakaian ejaan dalam penulisan dapat diprogramkan melalui komputer?

2. Adi Sunaryo, Pusat Bahasa
   a. Penggunaan bahasa Indonesia di sinetron sebenarnya lebih mengarah kepada bahasa Melayu dialek Jakarta. Sementara itu, Pusat Bahasa dianggap banyak orang diam saja.
   b. Ujian kemahiran berbahasa menurut hemat saya perlu dilaksanakan.

3. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok
   Saya tidak setuju dengan pandangan Bapak bahwa ujian kemahiran itu tidak perlu diteruskan. Menurut hemat saya, ini perlu diteruskan. Kalau terhadap orang Inggris memang tidak perlu.

4. Mulyo Seto, LKBN Antara
   Munculnya penggunaan bahasa gado-gado dalam media massa perlu disyukuri. Kita tidak perlu membendung gejala seperti itu, sebab dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris juga terjadi hal seperti itu.

5. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
   a. Kesalahan berbahasa yang muncul di media elektronik (TV) jauh lebih banyak dibanding dengan kesalahan yang muncul di media cetak. Apalagi jika dikaitkan dengan lafal. Hal ini dapat dimaklumi karena ucapan itu dipengaruhi oleh bahasa daerah.
   b. Apakah di TV ada petugas khusus yang bekerja untuk menilai naskah yang akan dibaca penyiar.

6. Mansoer Pateda, IKIP Gorontalo
   a. Organisasi profesi perlu diberi peran untuk ikut serta dalam pembinaan, terutama dalam mengatasi kesalahan berbahasa yang terjadi.
   b. Ada kesan bahwa wartawan itu bermain-main dengan bahasa. mungkin untuk mengelabui pembaca. Apakah di tempat Anda tidak ada upaya untuk mengatasi hal ini.
   c. MKDU bahasa Indonesia perlu diaktifkan kembali.

7. Hasan Alwi, Pusat Bahasa
   Selama ini upaya pembinaan bahasa dilakukan oleh Pusat Bahasa. Sekarang perlu dipikirkan adanya lembaga swasta yang diberi tugas untuk melaksanakan pembinaan tersebut.

8. Yayah B. Lumintaintang, Pusat Bahasa
   Saya tidak setuju dengan pandangan Bapak bahwa penggunaan bahasa di media massa tidak baik. Saya justru berpendapat sebaliknya walaupun tentu masih banyak hal yang perlu dibenahi.

**B. Jawaban**

1. Pengaturan pemakaian ejaan dalam komputer itu boleh-boleh saja asal diprogramkan dengan baik. Hanya saja hal ini harus ditopang dengan penguasaan materi yang diprogramkan itu.
2. Yang saya lihat sebenarnya adanya kekhawatiran munculnya hambatan karena ujian kemahiran itu.
3. Untuk Pak Asim, saya kira sama dengan jawaban saya tadi, yang jelas kita pilih yang terbaik.

4. Dalam hal pembinaan memang sudah saatnya dilibatkan pihak swasta. Seiring dengan itu yang harus dilakukan Pusat Bahasa adalah mengajak dan mengumpulkan para redaktur untuk membahas masalah ini. Bahkan, perlu dipikirkan adanya lembaga untuk pengembangan bahasa pers.

5. Saya setuju dengan pandangan Ibu, yang penting bagaimana kita harus berbuat untuk mengatasi masalah ini.

# PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN POLITIK BAHASA NASIONAL

**Hans Lapoliwa**
Pusat Bahasa

## 1. Pendahuluan

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (selanjutnya disingkat Pusat Bahasa) yang dibentuk pada bulan Mei 1975 sebagai penerus Lembaga Bahasa Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah kebahasaan yang menjadi garapan Pusat Bahasa bertalian dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan dalam batas tertentu, bahasa asing di Indonesia.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemerintah) yang mendasari kegiatan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra itu pada dasarnya merupakan politik bahasa nasional. Politik bahasa pada dasarnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan bahasa (Tollefson, 1991). Menyadari hal ini, Pusat Bahasa pada tahun 1975 mencoba merumuskan secara umum politik bahasa nasional. Namun, rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 ini belum pernah mendapat pengesahan sebagai politik bahasa nasional secara resmi.

Politik bahasa pada dasarnya dilandasi oleh visi (pemerintah) mengenai bahasa yang ada di dalam negeri, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam kaitan ini, maka berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia hendaklah dilaksanakan dengan berpedoman pada politik bahasa nasional dan diarahkan kepada upaya pewujudan visi kebahasaan dan kesastraan.

Makalah ini akan mencoba menyoroti peranan Pusat Bahasa dalam kaitannya dengan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia berdasarkan pokok-pokok kebijakan yang digariskan di dalam politik bahasa nasional. Pokok bahasan makalah ini meliputi:

(1) Kedudukan Pusat Bahasa dalam organisasi pemerintahan

(2) Tugas dan fungsi Pusat Bahasa di bidang kebahasaan dan kesastraan
(3) Upaya penyuksesan tugas/kewenangan Pusat Bahasa
(4) Pusat Bahasa dan kerja sama kelembagaan

**2. Kedudukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

Pusat Bahasa (selanjutnya disingkat Pusat Bahasa) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 yang kemudian diperbaiki dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022g/0/1980 (Pusat Bahasa, 1990). Menurut surat keputusan ini, Pusat Bahasa merupakan lembaga pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa (termasuk sastra) yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Jadi, Pusat Bahasa, menurut SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022g/0/1980 itu, merupakan lembaga pemerintah yang bersifat teknis yang berstatus sebagai eselon II di dalam hierarki struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam praktik, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022g/O/1980 itu sering ditafsirkan ganda. Sebagian orang beranggapan bahwa berbagai perkara yang bertalian dengan masalah kebahasaan dan kesastraan dapat dibicarakan/disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perkara-perkara yang di luar kebahasaan dan kesastraan dapat disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagian lagi beranggapan bahwa semua perkara, baik bersifat teknis maupun bersifat nonteknis, hendaklah disampaikan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perbedaan tafsiran ini jelas menghambat kelancaran kegiatan kebahasaan oleh Pusat Bahasa.

Sebagai lembaga pemerintah yang eselon II, Pusat Bahasa diperlengkapi dengan empat bidang teknis dan satu bagian tata usaha yang berstatus sebagai eselon III di dalam hierarki struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keempat bidang teknis itu adalah (1) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, (2) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, (3) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan (4) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di samping keempat bidang teknis

itu, Pusat Bahasa juga mempunyai beberapa unit pelaksana teknis di daerah yang disebut Balai Penelitian Bahasa. Pada tahun 1975, ketika Pusat Bahasa terbentuk sebagai perubahan Lembaga Bahasa Nasional, hanya terdapat tiga Balai Penelitian Bahasa. Dewasa ini telah terdapat 10 balai. Setiap bidang teknis dan balai (lama) mempunyai staf teknis antara 25--35 orang. Dari segi ketenagaan, jelas masih banyak tenaga yang kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan kebahasaan di seluruh Indonesia. Ini hanya dilihat dari sudut pandang kuantitas, belum berbicara tentang kualitas tenaga. Dilihat dari segi kewibawaan, status Pusat Bahasa sebagai eselon II di tingkat pusat dan status Balai Penelitian Bahasa di tingkat provinsi sebagai eselon III jelas tidak mendukung adanya apresiasi terhadap upaya-upaya pembinaan (dan pengembangan) bahasa dan sastra yang dilakukan oleh Pusat Bahasa atau Balai Penelitian Bahasa.

### 3. Tugas dan Fungsi Pusat Bahasa

Menurut SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022g/O/1980, Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Bahasa mempunyai fungsi:

(a) merumuskan kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa,
(b) melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa, serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah, dan
(c) melaksanakan urusan tata usaha Pusat.

Butir (a) fungsi Pusat Bahasa, menurut SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022g/O/1980 itu, jelas menyiratkan bahwa Pusat Bahasa bertugas menyiapkan konsep politik bahasa nasional yang harus mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum resmi menjadi politik bahasa nasional. Jika politik bahasa ditafsirkan sebagai perencanaan bahasa oleh pemerintah, maka setakat ini baru *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* produk Pusat Bahasa yang mendapat pengesahan dari pemerintah. Tentu saja, berbagai produk dan kegiatan lain di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dapat dianggap sebagai "bagian" politik bahasa karena Pusat Bahasa me-

rupakan lembaga pemerintah yang mendapat tugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022g/O/1980. Pengertian politik bahasa demikian itu tampaknya terlalu luas. Politik bahasa yang dianut di dalam makalah ini lebih merupakan *expressions of natural, common-sense assumptions about language in society* (Tollefson, 1991). Politik bahasa menurut pengertian terakhir ini sejalan dengan rumusan Politik Bahasa Nasional 1975, "... kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan ... di bidang kebahasaan." Rumusan mengenai asumsi-asumsi bahasa di Indonesia tentu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun begitu, pokok-pokok kebijakan untuk penanganan masalah kebahasaan di Indonesia tetap harus dituntun oleh visi kita (bangsa Indonesia) mengenai bahasa-bahasa yang ada di dalam masyarakat.

Fungsi Pusat Bahasa yang kedua (butir (b)) menuntut Pusat Bahasa untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra. Kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa itu dimaksudkan untuk menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Masalah kebahasaan itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa Indonesia, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah bahasa asing. Masalah kebahasaan itu perlu digarap secara teliti, berencana, dan berkesinambungan.

Penelitian bahasa Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern agar dapat memenuhi fungsinya sebagai bahasa negara, sarana komunikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana pendidikan, dan sarana pengembangan kebudayaan. Dalam rangka pemodernan bahasa Indonesia itu berbagai penelitian telah dilakukan untuk keperluan penyusunan berbagai buku pedoman kebahasaan seperti pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, kamus umum bahasa Indonesia, kamus-kamus istilah, tata bahasa baku, dan bahan-bahan penyuluhan. Penyediaan bahan-bahan kebahasaan itu tentu tidak secara serta-merta meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Upaya untuk membina para pemakai bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Sarana kebahasaan ini tidak akan ada maknanya tanpa diiringi usaha (kesungguhan) para pemakai bahasa. Penelitian sastra Indonesia ditujukan untuk mengembangkan sastra Indonesia, untuk meningkatkan mutu sastrawan dan karya-karya mereka. Hasil-hasil peneliti

an itu diharapkan akan mendorong peningkatan apresiasi sastra Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia.

Penelitian bahasa daerah diarahkan untuk pemeliharaan/perekaman bahasa-bahasa daerah agar tumbuh serasi dengan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi sumber utama pemekaran kosakata bahasa Indonesia dan, sebaliknya, bahasa Indonesia menjadi sumber utama pemekaran kosakata bahasa daerah sehingga dapat memenuhi berbagai fungsi kemasyarakatan yang diberikan kepada bahasa daerah yang bersangkutan. Kegiatan penelitian bahasa-bahasa daerah umumnya menghasilkan sketsa tata bahasa, dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, kamus (bilingual) bahasa daerah. Upaya pengembangan bahasa daerah sangat bergantung kepada masyarakat pendukung bahasa daerah yang bersangkutan. Umumnya hanya bahasa-bahasa daerah yang besar yang dikembangkan oleh masyarakat penuturnya. Peran Pusat Bahasa dalam hal pengembangan bahasa-bahasa itu lebih pada pemberian bantuan dana dan, dalam batas tertentu, bantuan tenaga ahli.

Penelitian sastra daerah dimaksudkan untuk mendorong perkembangan karya-karya sastra daerah. Melalui penyebaran hasil penelitian karya-karya sastra daerah itu diharapkan masyarakat luas umumnya dapat menikmati karya-karya sastra daerah dan, pada gilirannya, mendorong timbulnya saling pengertian di kalangan kelompok etnis yang berbeda.

Kebijakan penelitian yang menyangkut bahasa asing diarahkan agar pembinaan bahasa asing, sebagai sarana memasuki dunia pergaulan antarbangsa di bidang ilmu pengetahuan dan politik berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia.

Selain berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia yang disebutkan di atas, Pusat Bahasa juga melakukan kerja sama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam melalui wadah Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim). Kerja sama melalui Mabbim itu difokuskan pada upaya pengembangan istilah untuk bahasa Indonesia/Melayu. Kerja sama kebahasaan ini telah mendorong munculnya keinginan negara-negara anggota untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia/Melayu di dunia internasional, khususnya di ASEAN. Keinginan negara-negara Mabbim ini tentu akan memakan banyak tenaga dan dana serta waktu yang panjang sebelum menjadi kenyataan.

Sebagai hasil pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, bahasa Indonesia pada saat ini juga mulai banyak diminati dan dipelajari di berbagai tempat di luar negeri. Sebagai lembaga yang membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam perumusan kebijakan kebahasaan, Pusat Bahasa merasa berkewajiban melibatkan diri secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).

**4. Upaya Penyuksesan Tugas/Kewenangan Pusat Bahasa**

Untuk melaksanakan tugas Pusat Bahasa dalam upaya menangani permasalahan kebahasaan di Indonesia, Pusat Bahasa selama ini telah melaksanakan, antara lain, hal-hal berikut.

(a) menyusun program kegiatan
(b) membuat pedoman-pedoman teknis
(c) meningkatkan mutu tenaga kebahasaan
(d) melaksanakan penyuluhan
(e) menyelenggarakan forum-forum kebahasaan bagi ahli dan peminat bahasa dan sastra
(f) mengadakan kerja sama dengan berbagai instansi dan perorangan

a. Penyusunan program kerja secara terencana dan terarah berdasarkan skala prioritas tentu saja sangat diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa masalah kebahasaan di Indonesia melibatkan tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya ratusan. Sejalan dengan tuntutan pembangunan nasional pada masa Orde Baru, Pusat Bahasa sejak berdiri telah menyusun program kegiatan lima tahunan dan tahunan di bawah koordinasi Bappenas. Ini tidak berarti bahwa program lima tahunan (Repelita) dan program kegiatan tahunan itu telah memenuhi syarat-syarat program kebahasaan yang diharapkan. Dalam praktik, program kegiatan kebahasaan itu sering dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya oleh dua tiga orang saja. Alasan utamanya karena permintaan pengajuan rencana kegiatan biasanya mendadak di samping kenyataan bahwa tidak dimungkinkan untuk mengadakan kegiatan khusus untuk penyusunan program kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Untuk mencapai hasil yang memadai dari segi mutu, Pusat Bahasa

dengan bantuan tenaga-tenaga ahli dari sejumlah perguruan tingi telah berusaha membuat sejumlah pedoman seperti pedoman penelitian berbagai aspek bahasa dan sastra, pedoman penulisan laporan penelitian, pedoman penyusunan tata bahasa, pedoman penyusunan kamus istilah, dan pedoman penyusunan kamus bahasa daerah. Meskipun demikian, hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan, terutama di bidang penelitian, meminjam istilah Abdul Wahab (1999), masih berjalan di tempat. Ini berarti bahwa tenaga-tenaga kebahasaan dan kesastraan masih belum memadai entah dari segi mutu entah dari segi ketekunan.

c. Selain kedua hal di atas, sejak berdiri Pusat Bahasa telah berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kebahasaan. Luasnya cakupan tugas Pusat Bahasa sebagai lembaga yang menangani masalah kebahasaan di seluruh Indonesia tentu saja membutuhkan tenaga yang profesional dalam jumlah yang banyak. Secara ideal Pusat Bahasa harus mempunyai tenaga-tenaga ahli yang beragam. Di samping itu, juga perlu mempunyai tenaga-tenaga yang ahli dalam bahasa dan sastra bahasa daerah tertentu. Dalam kaitan dengan yang terakhir itu, Pusat Bahasa paling tidak harus memiliki staf ahli sekitar 600-an orang sesuai dengan jumlah bahasa daerah yang ada. Menurut catatan kepegawaian tenaga teknis yang berada di Pusat Bahasa termasuk ketiga balai penelitian bahasa yang ada baru berjumlah sekitar 200-an orang. Dari jumlah itu, belum satu pun yang bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli dalam bahasa daerah tertentu.

d. Upaya penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia oleh Pusat Bahasa selama ini dikelompokkan atas dua macam (1) upaya pengembangan dan (2) upaya pembinaan. Upaya pengembangan meliputi berbagai kegiatan yang bermuara pada sasaran pelestarian atau penyempurnaan bahasa sebagai sistem sandi dan sastra sebagai karya. Upaya pembinaan bermuara pada sasaran pembentukan dan penanaman sikap yang positif terhadap bahasa atau karya-karya sastra di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas itu, Pusat Bahasa telah melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan secara langsung dengan bersemuka atau melalui telepon dan secara tidak langsung melalui program televisi dan radio

dan terbitan-terbitan, seperti *Lembar Komunikasi*. Penyuluhan yang dilakukan Pusat Bahasa selama ini terfokus pada penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia.

Kelemahan utama pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini terletak pada kenyataan bahwa penyuluhan selama ini (kecuali penyuluhan melalui telepon dan surat) dilaksanakan bukan karena pesertanya menyadari perlunya mengikuti penyuluhan kebahasaan, tetapi lebih banyak dilakukan karena faktor di luar pribadi yang bersangkutan. Dengan kata lain, tugas penyuluhan yang pertama haruslah berusaha menyadarkan para pemakai bahasa bahwa mereka masih belum menguasai kaidah-kaidah bahasa dan pemakaian bahasa yang disuluhkan dan bahwa mereka perlu membaca karya-karya sastra dalam bahasa itu karena di dalamnya terdapat berbagai nilai yang indah.

Di masa mendatang, Pusat Bahasa perlu memanfaatkan berbagai sarana untuk penyebarluasan produk-produk Pusat Bahasa secara khusus. Pusat Bahasa perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti internet dan laman (*homepage*) Pusat Bahasa untuk keperluan kegiatan penyuluhan.

e. Penyelenggaraan pertemuan kebahasaan menyediakan forum bagi para ahli dan peminat bahasa untuk bertukar pikiran mengenai masalah kebahasaan. Sejak Pusat Bahasa berdiri telah banyak pertemuan kebahasaan yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa, baik yang bertaraf nasional maupun yang bertaraf internasional.

Di antara pertemuan kebahasaan pada taraf nasional yang penting adalah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia setiap 5 tahun. Putusan-putusan Kongres Bahasa Indonesia itu telah menjadi masukan penting bagi Pusat Bahasa untuk penanganan masalah kebahasaan di Indonesia. Di samping kongres itu, terdapat lagi sejumlah seminar dan konferensi yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa walaupun tidak secara periodik. Pertemuan-pertemuan kebahasaan itu telah memungkinkan sebagian besar peserta meningkatkan mutu pengetahuan mereka.

Penyelenggaraan pertemuan kebahasaan yang bersifat internasional seperti konferensi bahasa-bahasa Austronesia dan ASANAL lebih bertujuan untuk menunjukkan upaya pembinaan kerja sama

kebahasaan internasional. Meskipun begitu, kegiatan demikian telah merangsang sebagian tenaga-tenaga kebahasaan untuk mengembangkan diri terutama dalam penguasaan bahasa Inggris. Sayang bahwa kegiatan internasional demikian sudah lama tidak ada di Indonesia.

f. Dalam melaksanakan tugasnya selama ini, Pusat Bahasa telah berusaha membina kerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga maupun perorangan. Kerja sama tersebut dilakukan dalam berbagai kegiatan kebahasaan seperti penelitian, penyuluhan, dan penataran. Penelitian-penelitian bahasa dan sastra di daerah selama ini hampir seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi setempat. Penyuluhan-penyuluhan di daerah juga secara berangsur-angsur dipercayakan pelaksanaannya pada tenaga-tenaga di daerah.

Menyadari bahwa mutu hasil penelitian yang dilakukan di bawah koordinasi Pusat Bahasa pada umumnya masih jauh dari yang diharapkan, Pusat Bahasa telah menyelenggarakan serangkaian penataran kebahasaan dan kesastraan. Peserta penataran tersebut pada umumnya dari perguruan-perguruan tinggi. Melalui penyelenggaraan penataran itu, diharapkan akan diperoleh tenaga-tenaga kebahasaan yang lebih profesional dalam bidangnya dan, pada gilirannya, dapat membantu Pusat Bahasa dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan dengan hasil yang lebih baik.

Kelemahan utama program kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi iru adalah dasar kerja sama. Pada umumnya dilakukan hanya atas dasar saling percaya dalam arti bahwa kalau ada kemacetan di dalam pelaksanaan tugas, Pusat Bahasa tidak bisa berbuat lebih dari sekadar memberi teguran melalui surat.

**5. Pusat Bahasa dan Kerja Sama Kelembagaan**

Penanganan masalah kebahasaan di Indonesia berdasarkan politik bahasa nasional tentulah tidak hanya melibatkan Pusat Bahasa dan lembaga-lembaga kebahasaan yang ada karena bahasa tidak hanya terkait dengan pekerjaan para ahli dan peminat bahasa, tetapi menyangkut kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya, banyak lembaga di luar lem-

baga-lembaga kebahasaan yang berkepentingan di dalam penetapan politik bahasa nasional serta penanganan masalah kebahasaan pada umumnya. Sekadar contoh, upaya penertiban penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum yang gencar disuarakan beberapa tahun lalu melibatkan berbagai lembaga di luar lembaga kebahasaan, seperti Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Departemen Kehakiman, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Departemen Parpostel, dan Departemen Penerangan. Hasilnya, kita ketahui bersama--masih jauh dari yang kita harapkan. Kegagalan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kenyataan bahwa Pusat Bahasa sebagai lembaga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus eselon II kurang berwibawa untuk didengar oleh lembaga-lembaga luar yang nota bene mempunyai status yang lebih tinggi.

Di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, kerja sama kebahasaan antarlembaga ini terasa tidak berjalan lancar. Setakat ini terasa bahwa Pusat Bahasa tidak dapat ikut campur dengan pengajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia, di sekolah-sekolah. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, Pusat Bahasa perlu mulai mengambil langkah-langkah agar pada suatu ketika dapat berfungsi seperti British Council-nya Inggris. Dalam hal demikian tentu Departemen Luar Negeri mempunyai peranan yang besar sekali.

Untuk memudahkan upaya pembinaan kerja sama antarlembaga itu perlu diupayakan peningkatan kredibilitas Pusat Bahasa, baik melalui kinerjanya maupun melalui peningkatan mutu stafnya.

**6. Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut.

a. Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia perlu melibatkan banyak pihak. Untuk itu, perlu ada kerja sama antara Pusat Bahasa dan lembaga-lembaga lain.
b. Penanganan masalah kebahasaan di Indonesia memerlukan tenaga-tenaga terampil yang profesional. Karena itu, Pusat Bahasa harus berusaha meningkatkan mutu ketenagaan, baik melalui penerimaan pega

wai baru maupun melalui penataran/pendidikan lanjutan tenaga yang ada.

c. Untuk bisa membina kerja sama kelembagaan yang baik, hendaklah diupayakan agar Pusat Bahasa mempunyai kredibilitas yang tinggi.
d. Kemajuan teknologi informasi hendaklah dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam penanganan masalah kebahasaan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Pusat Bahasa 1975. *Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.

----------. 1990. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Tollefson, James. 1991. *Planning Language, Planning Inequality*. London: Longman.

Wahab, Abdul. 1999. "Perkembangan Kajian Linguistik di Indonesia" makalah pada *Kongres Linguistik Nasional Ke-9*, Jakarta, 28--31 Juli 1999.

## LAPORAN PEMBAHASAN MAKALAH

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 10 November 1999 |
| Pukul | : | 15.30--16.30 |
| Judul Makalah | : | Pusat Pembinaan dan Pengembabangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional |
| Penyaji Makalah | : | Hans Lapoliwa |
| Pemandu | : | Zainuddin Taha |
| Pencatat | : | Djantera Kawi |

**Tanya Jawab**

**A. Pertanyaan**

1. Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
   a. Naskah laporan penelitian ditentukan 150 halaman. Ketentuan semacam ini kurang pas sebab jumlah halaman sangat bergantung pada objek yang diteliti. Diharapkan kebijakan ini ditinjau kembali.
   b. Bagaimana bentuk penelitian tentang bahasa asing.

2. H. K.M.A.M. Usop, Universitas Palangkaraya
   a. Sangat mendukung pendekatan *grounded research* pada penelitian sastra.
   b. Komisi istilah perlu diberdayakan kembali karena banyak istilah rancu yang bermunculan.

3. Nuril Huda, Universitas Negeri Malang
   a. Bagaimana status Pusat Bahasa pada masa yang akan datang?. Disarankan di bawah Presiden.
   b. Disarankan ada lembaga yang mengurusi bahasa Inggris di Pusat Bahasa.
   c. Diharapkan Pusat Bahasa difungsikan sebagai Pusat Data.

4. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok
   a. Mengapa kata politik dipakai pada Politik Bahasa Nasional?
   b. Ke mana Pusat Bahasa akan dicantolkan?

5. Basuki Suhardi, Universitas Indonesia, Depok

   Sebaiknya Pusat Bahasa berhubungan dengan lembaga lain seperti Departemen Luar Negeri dan lain-lain dalam rangka mempersiapkan lembaga BIPA

6. J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta
   a. Sebaiknya kegiatan Bulan Bahasa juga diisi dengan hal-hal yang berkenaan dengan bahasa dan sastra daerah.
   b. Nama Pusat Bahasa jika mungkin diubah dan ditingkatkan.
   c. Dalam penyuluhan bahasa sebaiknya jangan terlalu terfokus atau bersifat menyalahkan saja, sehingga peserta penyuluhan menjadi takut.
   d. Istilah laman (*homepage*) dari mana?
   e. Mana yang benar Departemen Perdagangan dan Perindustrian atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

7. A. Latief, Pusat Bahasa

   Perlu ada peningkatan kualitas ketenagaan agar diperoleh peningkatan.

**B. Jawaban**

1. a. Kebijakan tentang naskah laporan penelitian 150 halaman adalah dari proyek. Jadi bukan kebijakan Pusat Bahasa. Hal ini akan dikomunikasikan lebih lanjut.
   b. Penelitian tentang bahasa asing belum pernah. Yang ada baru survei tentang penggunaan bahasa asing di beberapa kota besar.

2. a. *Grounded research* diterima sebagai saran. Tentu disesuaikan dengan tujuan penelitian.
   b. Komisi istilah masih ada dengan nama Panitia Penyesuaian Istilah.

3. a. Status Pusat Bahasa terpulang pada Pemerintah.
   b. Bagian urusan pengajaran bahasa asing di Pusat Bahasa pernah ada, sekarang hilang.

c. Pusat informasi kebahasaan pernah diupayakan melalui hubungan orang perorang dan sekarang kurang aktif.

4. Istilah ini meneruskan istilah tahun 1975. Jika diganti dengan istilah lain tidak keberatan.

5. a. Cakupan tugas Pusat Bahasa memang bahasa Indonesia, dan bahasa daerah diurus oleh Balai Bahasa.
   b. Tentang peningkatan status Pusat Bahasa sangat setuju.
   c. Kesan menyalahkan dapat diterima.

6. Perluasan Pusat Bahasa seperti *British Counsil* dapat diterima.

7. Peningkatan kualitas penyuluhan yang berkaitan dengan ketenagaan dapat diatasi dengan bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain seperti universitas.

# RUMUSAN
# SEMINAR POLITIK BAHASA

Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 8--12 November 1999

Dengan mengacu (1) Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Seminar Politik Bahasa dalam sidang-sidangnya pada tanggal 8—12 November 1999 di Cisarua, Bogor, setelah mempertimbangkan:

1. Pidato Menteri Pendidikan Nasional,
2. Pidato Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;

dan setelah membahas makalah:

1. "Fungsi Politik Bahasa" oleh Hasan Alwi;
2. "Otoritarianisme dan Distorsi Bahasa" oleh Eep Saefulloh Fatah;
3. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah" oleh Mahsun;
4. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing" oleh Nuril Huda;
5. "Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah" oleh Edi Sedyawati;
6. "Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa" oleh Dédé Oetomo;
7. "Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Penelitian Sastra dan Pengajarannya" oleh Yus Rusyana;
8. "Pengajaran Bahasa Asing: Gambaran Nyata dan Beberapa Gagasan Kebijakan" oleh Fuad Abdul Hamied;
9. "Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana Pembangunan Bangsa" oleh Sugiyono dan A. Latief;
10. "Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa" oleh Bambang Kaswanti Purwo;
11. "Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra" oleh Budi Darma;
12. "Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh" oleh Djafar H. Assegaff;

13. "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional" oleh Hans Lapoliwa

mengambil simpulan yang dirumuskan sebagai berikut.

## A. UMUM

Kebijakan bahasa nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia hingga saat ini adalah hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1975. Setelah melalui kurun waktu hampir 25 tahun, kebijakan bahasa nasional (1975) itu perlu ditinjau kembali sesuai dengan tuntutan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dan tuntutan perubahan dunia internasional. Tuntutan-tuntutan perubahan itu timbul sebagai akibat kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa.

Dalam hubungan dengan bahasa Indonesia, diperlukan penyesuaian tertentu di dalam kebijakan bahasa nasional. Bahasa Indonesia lebih terbuka terhadap pengaruh teknologi informasi dan penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di dalam pergaulan internasional di Indonesia. Dalam hubungan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia ke arah pemerintahan otonomi daerah serta pentingnya pembinaan dan pelestarian budaya daerah, bahasa daerah perlu memainkan peran yang lebih besar dan, oleh karena itu, perlu memperoleh perhatian yang lebih luas dan mendalam. Meningkatnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik untuk keperluan pemerintahan maupun untuk keperluan dunia usaha, memerlukan perumusan kembali kedudukan dan fungsi bahasa asing itu serta pengajarannya di Indonesia.

Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 8--12 November 1999 merupakan salah satu langkah tindak lanjut untuk meninjau kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan diselenggarakan untuk memperkuat putusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 mengenai perlunya peningkatan kedudukan, fungsi, dan wewenang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

## B. PENGERTIAN DASAR

### 1. Kebijakan Bahasa Nasional

Politik bahasa nasional, yang selanjutnya disebut kebijakan bahasa nasional, adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Pengelolaan keseluruhan masalah bahasa itu memerlukan adanya satu kebjakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa-bahasa itu benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh.

### 2. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan.

### 3. Bahasa Daerah

Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

### 4. Bahasa Asing

Bahasa asing di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa serumpun Melayu. Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing.

### 5. Sastra Indonesia

Sastra Indonesia adalah karya sastra berbahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

**6. Sastra Daerah**

Sastra daerah adalah sastra berbahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

**7. Sastra Asing**

Sastra asing adalah sastra berbahasa asing dan merupakan bagian dari kebudayaan asing.

## C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA

### 1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijakan nasional di bidang kebahasaan adalah kedudukan dan fungsi bahasa. Yang dimaksud dengan *kedudukan bahasa* ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan *fungsi bahasa* ialah peran bahasa yang bersangkutan di dalam masyarakat pemakainya.

**a. Bahasa Indonesia**

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia dan bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang ter

tera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36: *Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.*

Di dalam kedudukannnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemerkaya bahasa dan sastra daerah.

**b. Bahasa Daerah**

Di dalam hubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, bahasa-bahasa di Indonesia, kecuali bahasa Indonesia, bahasa rumpun Melayu, dan bahasa asing, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia.

Bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.

Di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

**c. Bahasa Asing**

Di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing itu, baik yang digunakan dan diajarkan maupun yang digunakan tanpa diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tertentu,

tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa asing juga tidak bersaing dengan bahasa-bahasa daerah, baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing di Indonesia, bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu, berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa dan (2) sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia juga dapat memiliki fungsi lain. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang diutamakan sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Bahasa Arab juga berfungsi sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam. Apabila diperlukan, bahasa-bahasa asing lain juga dapat berfungsi sebagai sumber pemerkayaan perbendaharaan kata bahasa Indonesia.

## 2. Kedudukan dan Fungsi Sastra

Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkap pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia. Sastra daerah, yang di dalamnya telah direkam berbagai pengalaman yang berbeda, tetapi saling berinteraksi dan dalam beberapa hal saling mempengaruhi, telah ada dan berkembang jauh sebelum munculnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia dan daerah, baik yang lama maupun yang baru, tidak terlepas dari pengaruh dan pertemuannya dengan kebudayaan dan sastra asing, khususnya sastra India, Arab, Persia, dan sastra-sastra Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya, sastra Indonesia menjadi media ekspresi berbagai gagasan modern, pencerminan/pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru yang diilhami baik oleh sumber-sumber kebudayaan tradisi maupun oleh kebudayaan modern. Sastra daerah berperan sebagai fondasi kebudayaan daerah, bahkan kebudayaan Nusantara, sebagai alat memperkukuh budaya masyarakat di daerah, dan sebagai cermin pencarian jati diri masyarakat yang bersangkutan. Sastra asing merupakan salah satu sumber inspirasi bagi pengarang dan salah satu sumber untuk mengenal budaya asing.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan dan fungsi sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing dapat dirumuskan sebagai berikut.

**a. Sastra Indonesia**

Perasaan dan cita-cita nasional Indonesia telah diekspresikan oleh pengarang Indonesia dalam bentuk puisi, roman, dan drama sebelum Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan terus-menerus diutarakan dalam karya mereka setelah perang kemerdekaan. Oleh karena itu, sastra Indonesia sebagai bagian kebudayaan nasional berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya dalam upaya ikut memupuk kesadaran sejarah serta semangat dan solidaritas kebangsaan.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra Indonesia mempunyai fungsi untuk (1) menumbuhkan rasa kenasionalan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) merekam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

**b. Sastra Daerah**

Sastra daerah merupakan bukti historis kreativitas masyarakat daerah. Sehubungan dengan itu, sastra daerah sebagai salah satu bagian kebudayaan daerah berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang di dalamnya terekam antara lain pengalaman estetik, religius, atau sosial politik masyarakat etnis yang bersangkutan.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra daerah mempunyai fungsi untuk (1) merekam kebudayaan daerah dan (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan.

**c. Sastra Asing**

Sastra asing yang merupakan bagian kebudayaan asing berkedudukan sebagai salah satu sumber inspirasi dan sumber pemahaman terhadap sebagian karya sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sastra asing, terutama sastra India, Arab, Persia, Eropa, dan Amerika, akan sangat membantu upaya pengembangan sastra di Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai sumber inspirasi dan sumber pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sastra Indonesia dan daerah, sastra asing mempunyai fungsi sebagai (1) pendorong penciptaan karya sastra di Indonesia, (2) sarana untuk lebih memahami sebagian sastra di Indonesia, (3) bahan kajian sastra bandingan, dan (4) penambah wawasan mengenai kebudayaan asing.

## D. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia ialah usaha-usaha yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

### 1. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan ialah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan.

#### a. Pengajaran

1) *Bahasa Indonesia (Termasuk BIPA)*

Pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

a) pengembangan kurikulum bahasa Indonesia;
b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa.

*2) Bahasa Daerah*

Pengajaran bahasa daerah ditujukan untuk meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya. Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

a) pengembangan kurikulum bahasa daerah;
b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa

dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
c) pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
d) pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai;
e) penyediaan program pendidikan bahasa daerah di jenjang pendidikan tinggi setempat;
f) penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan pada jenjang pendidikan dasar.

*3) Bahasa Asing*

Pengajaran bahasa asing ditujukan kepada upaya penguasaan dan pemakaian bahasa asing, terutama untuk pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam menyikapi persaingan bebas pada era globalisasi, agar lebih banyak orang Indonesia yang mampu memanfaatkan informasi dalam bahasa asing. Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing dilakukan melalui kegiatan berikut:

a) pengembangan kurikulum bahasa asing;
b) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam era global dan dengan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
c) pengembangan tenaga pengajar bahasa asing yang profesional;
d) pengembangan sarana pengajaran bahasa asing yang memadai;
e) pemanfaatan teknologi informasi dalam bahasa asing.

Sesuai dengan sifat dan jenis pendidikan, pengajaran bahasa asing ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan. Mata pelajaran bahasa asing pilihan hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 90 jam dalam satu tahun ajaran. Dalam hubungan dengan pengajaran bahasa asing, ada tiga kelompok bahasa asing yang perlu diperhatikan.

a) Bahasa Inggris
   (1) Pengajaran bahasa Inggris dapat diberikan mulai di sekolah dasar dengan syarat kesiapan sekolah yang benar-benar memadai.
   (2) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama ditekankan pada penguasaan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk dikembangkan di pendidikan yang lebih tinggi.

(3) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat atas ditekankan pada perluasan pengetahuan dengan pengutamaan keterampilan.
(4) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan tinggi ditekankan pada pemantapan keempat keterampilan bahasa (berbicara, mendengar, membaca, menulis) agar lulusan perguruan tinggi mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan intensif. Dalam hubungan itu, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mata kuliah tertentu (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi).
(5) Pemanfaatan penutur (asli) bahasa Inggris untuk pengajaran bahasa Inggris di Indonesia hendaknya didasarkan pada kebutuhan.

b) Bahasa Arab
(1) Bahasa Arab diberikan sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah yang berasaskan Islam.
(2) Di sekolah yang tidak berasaskan Islam bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah.
(3) Pada jenjang pendidikan tinggi bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata kuliah.

c) Bahasa Asing Lain
Selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa asing lain dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

**b. Pemasyarakatan**

*1) Bahasa Indonesia*

Pemasyarakatan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan sikap postif masyarakat (terutama kalangan pemerintahan dan kelompok profesi) terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga harus menjangkau kelompok yang belum dapat berbahasa Indonesia agar berperan lebih aktif dalam

upaya menciptakan masyarakat yang lebih maju. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan pada upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan dengan tidak meninggalkan kekayaan bahasa dan budaya Nusantara dengan tetap mengacu nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan melalui kegiatan berikut:

a) penentuan prioritas kelompok sasaran;
b) pengembangan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
c) pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya;
d) peningkatan kerja sama dengan semua pihak yang dapat memperlancar pemasyarakatan bahasa Indonesia di Indonesia;
e) peningkatan mutu tenaga pemasyarakatan;
f) pemanfaatan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia.

*2) Bahasa Daerah*

Pemasyarakatan bahasa daerah ditujukan pada upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa daerah dan penciptaan situasi yang kondusif dalam penggunaan bahasa daerah dengan mengacu nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa daerah dilakukan melalui kegiatan:

a) pemberian dorongan penerbitan berbahasa daerah;
b) pengikutsertaan tokoh masyarakat dan budayawan dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu;
c) peningkatan peran masyarakat (kelompok seniman tradisional) dalam memberikan informasi tentang penggunaan bahasa daerah.

**2. Pengembangan**

Yang dimaksud dengan pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

**a. Penelitian**

*1) Bahasa Indonesia*

a) Penelitian dalam berbagai aspek bahasa Indonesia perlu dilakukan

untuk kepentingan peningkatan mutu bahasa Indonesia.

b) Penelitian berbagai bidang pemakaian bahasa Indonesia perlu dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

*2) Bahasa Daerah*

a) Penelitian berbagai aspek bahasa daerah perlu dilakukan untuk kepentingan perekaman (inventarisasi) bahasa-bahasa daerah.

b) Penelitian berbagai aspek bahasa daerah dan pemakaiannya perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu bahasa daerah yang dipelihara oleh penuturnya.

*3) Bahasa Asing*

a) Penelitian terhadap bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian terhadap bahasa asing dapat dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa Indonesia.

b) Penelitian pengajaran bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu pengajarannya.

**b. Pembakuan**

*1) Bahasa Indonesia*

Pembakuan bahasa Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia serta diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif. Pembakuan itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan

a) pedoman,
b) kamus bahasa dan kamus bidang ilmu,
c) tata bahasa,
d) bahan pemasyarakatan bahasa.

*2) Bahasa Daerah*

Pembakuan bahasa daerah dilakukan dengan memperhatikan keinginan masyarakat pendukungnya guna menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat pendukungnya. Pembakuan itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan

a) pedoman,
b) kamus bahasa,
c) tata bahasa.

**c. Pemeliharaan***

*1) Bahasa Indonesia*

a) Pemeliharaan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan dinamis.
b) Pemeliharaan bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan perkembangan sosiokultural dan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik bangsa Indonesia.

*2) Bahasa Daerah*

a) Pemeliharaan bahasa daerah terutama ditujukan pada bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya.
b) Pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang terancam punah perlu diprioritaskan.

## E. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTRA

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan sastra adalah usaha-usaha yang diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sastra Indonesia dan daerah, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia dan daerah, serta memanfaatkan sastra asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

### 1. Pembinaan

Yang dimaksud dengan pembinaan ialah upaya untuk meningkatkan mutu apresiasi sastra. Upaya itu meliputi pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.

---

*)Sebagian peserta berpendapat kata pelestarian lebih cocok

**a. Pengajaran**

Tujuan pengajaran sastra pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang selama ini berlaku, tidak mungkin tercapai karena sampai saat ini pengajaran sastra merupakan bagian sangat kecil dari pengajaran bahasa. Di samping itu, ketersediaan guru dengan kelayakan yang memadai pun sangat terbatas. Oleh karena itu, metode pengajarannya sering kurang tepat, sementara pemanfaatan bahan ajar yang tersedia belum dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pengajaran sastra hendaknya

1) tidak lagi merupakan bagian dari pengajaran bahasa;
2) didukung dengan pengadaan guru yang berkelayakan mengajarkan sastra;
3) didukung ketersediaan karya sastra yang memadai di sekolah;
4) diupayakan agar sastrawan atau tokoh kritik sastra, baik lokal maupun nasional, lebih banyak dimanfaatkan, antara lain, melalui kegiatan tatap muka dengan guru sastra dan siswa.
5) didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

**b. Pemasyarakatan**

1) *Sastra Indonesia*

Pemasyarakatan sastra Indonesia dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia sebaiknya menjangkau kelompok yang belum mampu berbahasa Indonesia dengan baik seiring dengan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan untuk menunjang keberhasilan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan sastra Nusantara, antara lain, mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan sastra Indonesia hendaknya mempertimbangkan hal berikut.

a) Untuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia, penerbitan karya sastra perlu digalakkan, antara lain lewat edisi karya sastra yang disederhanakan untuk siswa pendidikan dasar. Selain itu, berbagai cara dapat ditempuh, misalnya memperkenalkan sastrawan terkemuka, antara lain melalui pengguna-

an gambar sastrawan besar pada uang, perangko, kalender, buku ajar, dan buku tulis.

b) Pemasyarakatan sastra tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra Indonesia, ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.

c) Pemasyarakatan sastra Indonesia dalam dunia internasional juga dapat dilaksanakan dengan mendorong keikutsertaan dan/atau penampilan sastrawan, kritikus, dan tokoh sastra Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.

d) Pemasyarakatan sastra hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat.

2) *Sastra Daerah*

Pemasyarakatan sastra daerah ditujukan pada upaya peningkatan kesadaran akan peran sastra daerah dalam kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Dalam hubungan itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya ditujukan pada penciptaan situasi yang memungkinkan sastra daerah tetap hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan nilai budaya daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut.

a) Pemasyarakatan sastra daerah dalam masyarakat Indonesia dapat dilakukan, antara lain, dengan menerjemahkan karya-karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia.

b) Pemasyarakatan sastra daerah tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra daerah ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.

c) Pemasyarakatan sastra hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan

tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat.

**c. Pemberdayaan**

Pemberdayaan sastra ditujukan kepada pemantapan kedudukan dan peningkatan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Dengan mantapnya kedudukan dan meningkatnya fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat, diharapkan karya sastra yang bermutu akan lahir di tengah masyarakat yang sadar sastra.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern upaya tersebut makin dirasakan penting dan mendesak karena hingga saat ini kegiatan bersastra dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat makin lemah. Sehubungan dengan kenyataan itu, komponen utama kehidupan sastra, yakni sastrawan, karya sastra, dan masyarakat, perlu lebih mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Karya sastra bermutu lebih mungkin tercipta jika penciptanya dapat berkarya dalam situasi dan suasana yang baik (memungkinkan lahirnya karya yang bermutu). Kebebasan berekspresi, perlindungan hak cipta, dan penghargaan yang memadai, antara lain, merupakan prasyarat lahirnya sastra yang bermutu. Dukungan masyarakat luas yang berupa apresiasi sastra akan merangsang pertumbuhan sastra yang lebih subur dan bermutu. Dengan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan, antara lain, melalui hal-hal berikut.

1) Sastrawan perlu memperoleh perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang baik dari masyarakat.
2) Kritik sastra perlu disebarluaskan sehingga masyarakat dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan karya sastra.
3) Karya sastra yang bermutu yang belum dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti siswa pendidikan dasar, perlu disesuaikan sedemikian rupa agar dapat lebih mudah mereka serap.
4) Apresiasi sastra masyarakat luas perlu diberdayakan, antara lain, melalui pengembangan komunitas sastra.
5) Peningkatan sarana kehidupan sastra, seperti publikasi dan dokumentasi sastra, komunitas sastra, dan pusat-pusat kegiatan sastra perlu lebih diperhatikan.

Kesadaran masyarakat akan peran sastra dalam kehidupan masyarakat modern perlu digalakkan. Dalam hal ini media massa dan pendidikan sekolah akan sangat membantu menumbuhkan kesadaran itu. Peran serta pemerintah dalam mendukung terbentuknya masyarakat sadar sastra dapat diwujudkan, antara lain melalui penyediaan fasilitas, seperti perpustakaan keliling dan keringanan harga buku, yang memungkinkan karya sastra yang bermutu dapat dibaca/dibeli oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

**2. Pengembangan**

Yang dimaksud dengan pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu sastra agar dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi, pencerminan dan pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru, dan sebagai sarana peningkatan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Upaya pengembangan sastra itu meliputi penelitian dan pemeliharaan.

**a. Penelitian**

Komunitas sastra Indonesia dan komunitas sastra daerah merupakan satu komunitas sastra se-Indonesia. Komunitas sastra se-Indonesia merupakan pula bagian dari komunitas sastra yang lebih luas, seperti komunitas sastra Asia Tenggara, komunitas sastra Asia, dan komunitas sastra dunia. Terhadap komunitas sastra seperti itu perlu dilakukan penelitian yang lebih terencana dan terarah.

Kehidupan sastra Indonesia dan sastra daerah tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing. Untuk memahami sastra Indonesia dan sastra daerah yang lebih baik, perlu pula dilakukan penelitian terhadap sastra asing yang relevan. Penelitian sastra itu dilakukan juga untuk pengembangan teori sastra dan peningkatan mutu karya sastra.

*1) Sastra Indonesia*

Penelitian sastra Indonesia dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang sastra Indonesia, termasuk sejarah sastra (sastrawan, tokoh sastra, aliran dalam sastra, dan sebagainya), serta peran sastra dalam kaitannya dengan upaya pengembangan bahasa Indonesia.

*2) Sastra Daerah*

Penelitian sastra daerah ditujukan kepada pemerolehan informasi

tentang setiap sastra daerah dan keseluruhan sastra daerah se-Indonesia sebagai satu komunitas sastra. Penelitian tersebut dapat dilakukan, antara lain, melalui telaah perbandingan, telaah kesejarahan, dan telaah tipologi sastra dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah setempat dan Pemerintah Pusat.

*3) Sastra Asing*

Penelitian sastra asing dilakukan untuk lebih memahami sastra Indonesia dan sastra daerah, terutama yang telah mengalami kontak dengan sastra asing. Selain itu, penelitian sastra asing juga dapat dimanfaatkan untuk memacu peningkatan mutu karya sastra Indonesia dan sastra daerah. Sastra asing yang diteliti ialah sastra klasik India, Arab, dan Persia serta sastra modern seperti sastra Eropa, sastra Amerika, dan sastra Asia.

**b. Pemeliharaan**

Pemeliharaan karya sastra, yang selama ini dikenal sebagai pelestarian sastra lama, adalah upaya yang ditujukan agar generasi baru Indonesia dapat memahami, menghayati karya sastra tersebut, terutama pesan yang terkandung di dalamnya, baik karya sastra Indonesia maupun karya sastra daerah, lama ataupun baru. Pemahaman terhadap karya sastra akan lebih mudah dicapai jika suatu generasi dapat mengalami peristiwa kehidupan sastra itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan karya sastra dapat dilakukan melalui pemeliharaan tradisi bersastra di masyarakat, seperti pemeliharaan sastra lisan, pembacaan (pengembangan) naskah lama, dan penuturan dongeng.

## F. SARANA

Yang dimaksud dengan sarana dalam kaitannya dengan kebijakan bahasa nasional ialah kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sarana itu sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut.

**1. Ketentuan Perundang-undangan**

Hingga saat ini undang-undang tentang kebahasaan belum ada. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan tentang kebijakan bahasa nasional dirasakan makin diperlukan. Hal ini sangat penting untuk menjamin

keterikatan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

**2. Organisasi**

Pusat Bahasa merupakan organisai Pemerintah yang diberi tanggung jawab mengelola kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Akan tetapi, mengingat kedudukan Pusat Bahasa selama ini sebagai instansi pemerintah eselon II di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka kewenangan dan kewibawaannya menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mengherankan hasil pengelolaannya selama ini belum memuaskan. Dalam hubungan ini, pada berbagai pertemuan kebahasaan terutama sejak Kongres Bahasa Indonesia III tahun 1978 hingga Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 ketepatan kedudukan dan fungsi Pusat Bahasa sebagai Eselon II di Departemen Pendidikan Nasional selalu dipertanyakan. Dengan kata lain, Pusat Bahasa selalu direkomendasikan agar menjadi lembaga pemerintah nondepartemen (informasi lebih lengkap akan dibahas tersendiri di bawah judul "kelembagaan").

**3. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia**

Pembangunan bangsa atau pembangunan nasional akan lebih terjamin keberhasilannya jika seluruh warga negara Indonesia ikut berpartisipasi aktif. Partisipasi itu sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap rencana pembangunan yang ada. Mengingat pembangunan nasional itu disusun dalam bahasa Indonesia, sedangkan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia anggota masyarakat sangat beragam, bahkan ada yang masih buta bahasa Indonesia, maka tentulah usaha pertama yang perlu dilakukan ialah meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia para warga masyarakat itu melalui jalur pendidikan nasional, pelatihan, penataran, penyuluhan, dan sebagainya. Hal tersebut perlu ditempuh agar tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, jabatan, profesi, dan lain-lain yang akan dilakukannya. Tingkat kemahiran berbahasa Indonesia ini perlu pula dipersyaratkan kepada tenaga kerja asing pada umumnya. Berdasarkan keperluan itu, terutama dalam globalisasi, ketersediaan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia merupakan suatu keharusan yang perlu segera diupayakan agar warga

negara Indonesia dapat lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih baik.

**4. Jaringan Informasi**

Iptek tidak akan mungkin berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh informasi yang baik mengenai keadaan yang ada. Demikian pula halnya dengan bahasa dan sastra. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang memungkinkan orang untuk memperoleh, menghimpun, dan menyebarluaskan informasi tersebut merupakan suatu keharusan. Dalam hubungan ini, perpustakaan yang modern dan canggih merupakan salah satu mata jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang diperlukan.

**5. Penerjemahan**

Sejarah telah membuktikan bahwa Jepang dapat menjadi negara maju dalam waktu yang relatif singkat, antara lain karena memiliki program nasional penerjemahan yang berhasil. Berdasarkan perhitungan dari berbagai segi, program penerjemahan ternyata relatif lebih murah jika dibandingkan dengan program lain untuk tujuan yang sama, seperti program pendidikan untuk para sarjana dan masyarakat luas untuk menguasai bidang ilmu dan bahasa asing yang diperlukan itu. Oleh karena itu, program nasional penerjemahan yang telah dirintis pada tahun 1970-an perlu ditata ulang dengan perencanaan yang lebih mantap. Penerjemahan juga sangat diperlukan untuk memperkenalkan bangsa dan budaya Indonesia di dunia internasional melalui terjemahan karya sastra Indonesia dan daerah.

**6. Penghargaan**

Jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, seperti lingkungan hidup, olahraga, dan manajemen, prestasi dalam bidang bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, hampir-hampir terlupakan untuk diberi penghargaan. Penghargaan yang layak dari Pemerintah dan masyarakat terhadap prestasi dalam bidang bahasa dan sastra itu akan mendorong lahirnya karya-karya yang lebih besar. Dalam bidang karya-karya besar sering dianggap sebagai pencerminan bangsa yang besar. Di sam

ping itu, karya-karya besar akan merangsang masyarakat untuk lebih mencintai bahasa dan sastra.

**7. Kerja Sama**

Agar dapat mengembangkan dan memutakhirkan kajian bahasa dan sastra di Indonesia, Pusat Bahasa hendaknya dapat menggalang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Pusat Bahasa juga perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah dan organisasi profesi serta instansi yang berhubungan dengan upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra.

**8. Sumber Daya Manusia**

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Pusat Bahasa harus mempunyai sistem pengembangan profesionalisme peneliti bahasa dan sastra di Indonesia secara menyeluruh. Pusat Bahasa tidak hanya bertanggung jawab dalam mengembangkan profesionalisme karyawan-karyawannya, tetapi juga sumber daya kebahasaan lain yang menyebar di berbagai institusi di Indonesia. Untuk itu, Pusat Bahasa hendaknya memanfaatkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga diklat yang tepat untuk kualifikasi yang diperlukan.

## G. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menyangkut badan atau organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah serta asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

**1. Lembaga Pemerintah**

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara khusus untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia terdiri atas lembaga kebahasaan tingkat pusat (nasional) dan lembaga kebahasaan tingkat daerah.

**a. Lembaga Kebahasaan Tingkat Pusat**

Lembaga kebahasaan tingkat pusat mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia dan berfungsi

1) melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
2) mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
3) merumuskan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
4) mengembangkan sistem informasi kebahasaan;
5) mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan berbagai pihak yang relevan, terutama lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi profesi.
6) memantau pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing.

**b. Lembaga Kebahasaan Tingkat Daerah**

Lembaga kebahasaan tingkat daerah mempunyai tugas untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di daerah dengan fungsi

1) melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di daerah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
2) melaksanakan pengembangan dan/atau pembinaan bahasa dan sastra daerah;
3) mengembangkan sistem informasi kebahasaan di daerah.

**c. Lembaga Kebahasaan di Luar Negeri**

Lembaga kebahasaan di luar negeri merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani masalah bahasa dan sastra Indonesia (dan daerah) di luar negeri dan berfungsi

1) menyebarluaskan informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah kepada masyarakat luar negeri;
2) menyelenggarakan dan/atau memantau pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing di luar negeri;
3) mengembangkan kerja sama kebahasaan dengan pihak asing;
4) memperkenalkan budaya bangsa melalui kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

**2. Lembaga Nonpemerintah**

Lembaga nonpemerintah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan, antara lain, ialah organisasi profesi.

Organisasi profesi adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan kesamaan profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, dan Himpunan Penerjemah Indonesia, terutama Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Masyarakat Linguistik Indonesia, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Organisasi-organisasi itu berkewajiban membantu dalam bidang kebahasaan dan kesastraan:

a. melakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan pokok-pokok kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan;
b. memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa dan sastra;
c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga bahasa di tingkat pusat dan daerah.

# JADWAL SIDANG
# SEMINAR POLITIK BAHASA

| Hari, Tanggal | Waktu | Topik | Riang |
|---|---|---|---|
| Selasa,<br>9 November 1999 | 09.00--10.00 | Pembukaan | |
| | 10.00-11.00 | Sidang I<br>Fungsi Politik Bahasa<br>Pemakalah : Hasan Alwi<br>Pemandu : Andi Mappi Sammeng<br>Pencatat : Junaiyah H.M. | Bromo A |
| | 11.00--12.00 | Sidang II<br>Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia<br>Pemakalah : Eep Saefulloh Fatah<br>Pemandu : Chaedar Alwasilah<br>Pencatat : Ebah Suhaebah | Bromo A |
| | 12.00--13.00 | Istirahat/Makan Siang | |
| | 13.00--14.00 | Sidang III<br>Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah<br>Pemakalah : Mahsun<br>Pemandu : Yayah B. Lumintaintang<br>Pencatat : Sutiman | Bromo A |
| | 14.00--15.00 | Sidang IV<br>Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing<br>Pemakalah : Nuril Huda<br>Pemandu : I Wayan Bawa<br>Pencatat : S.R.H. Sitanggang | Bromo A |
| | 15.00--15.15 | Istirahat/Kudapan | |
| | 15.15--16.15 | Sidang V<br>Kedudukan dan Fungsi Sastra Indonesia dan Daerah<br>Pemakalah : Edi Sedyawati<br>Pemandu : Nafron Hasjim<br>Pencatat : Sri Sayekti | Bromo A |

| Hari, Tanggal | Waktu | Topik | Ruang |
|---|---|---|---|
| | 16.15--19.00 | **Istirahat/Makan Malam** | |
| | 19.00--20.00 | Sidang VI<br>Penelitian Bahasa<br>Pemakalah : Dede Oetomo<br>Pemandu : Husni Mu'adz<br>Pencatat : Slamet Riyadi Ali | Bromo A |
| Rabu,<br>10 November 1999 | 08.00--09.00 | Sidang VII<br>Penelitian Sastra<br>Pemakalah : Yus Rusyana<br>Pemandu : A. Rozak Zaidan<br>Pencatat : Zainuddin Hakim | Bromo A |
| | 09.00--10.00 | Sidang VIII<br>Pengajaran Bahasa Asing<br>Pemakalah : Fuad Abdul Hamied<br>Pemandu : Suseno Kartomihardjo<br>Pencatat : Junaiyah H.M. | Bromo A |
| | 10.00--10.15 | Istirahat/Kudapan | |
| | 11.15--12.15 | Sidang IX<br>Penyusunan Sarana Uji Kemahiran Berbahasa<br>Pemakalah : Sugiyono/A. Latief<br>Pemandu : Soenardji<br>Pencatat : Amris Nura | Bromo A |
| | 12.15--14.15 | Sidang X<br>Peningkatan Mutu Pengajaran Sastra<br>Pemakalah : Budi Darma<br>Pemandu : Nafron Hasjim<br>Pencatat : S.R.H. Sitanggang | Bromo A |
| | 14.15--15.15 | Sidang XII<br>Peningkatan Mutu Pemasyarakatan Bahasa<br>Pemakalah : D.H. Assegaff<br>Pemandu : Basuki Suhardi<br>Pencatat : Sutiman | Bromo A |
| | 15.15--15.30 | Istirahat/Kudapan | |

| Hari, Tanggal | Waktu | Topik | Ruang |
|---|---|---|---|
| | 15.30--16.30 | Sidang XIII<br>Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kebahasaan<br>Pemakalah : Hans Lapoliwa<br>Pemandu : Zainuddin Taha<br>Pencatat : Djantera Kawi | Bromo A |
| | 16.30--19.00 | Istirahat/Makan Malam | |
| Rabu,<br>10 November 1999 | 19.00--22.00 | Sidang Kelompok A<br>Ketua : A. Latief<br>Sekretaris : Chaedar Alwasilah<br>Pencatat : Sutiman | Bromo A |
| | 19.00--22.00 | Sidang Kelompok B<br>Ketua : Soenardji<br>Sekretaris : H. Suparno<br>Pencatat : Ebah Suhaebah | |
| | 19.00--22.00 | Sidang Kelompok C<br>Ketua : Yus Rusyana<br>Sekretaris : Nafron Hasjim<br>Pencatat : Sri Sayekti | |
| | 19.00--22.00 | Sidang Kelompok C<br>Ketua : D.P. Tampubolon<br>Sekretaris : Sugiyono<br>Pencatat : Slamet Riyadi Ali | |
| Kamis,<br>11 November 1999 | 08.00--10.00 | Sidang Kelompok (Lanjutan) | Bromo A |
| | 10.00--10.15 | Istirahat | |
| | 10.15--12.15 | Sidang Kelompok (Lanjutan) | Bromo A |
| | 12.15--13.15 | Istirahat/Makan Siang | |
| | 13.15--14.15 | Sidang Kelompok (Lanjutan) | Bromo A |
| | 14.15--15.15 | Istirahat | |
| | 15.15--16.30 | Sidang Kelompok (Lanjutan) | Bromo A |
| | 16.30--19.00 | Istirahat/Makan Malam | |

| Hari, Tanggal | Waktu | Topik | Ruang |
|---|---|---|---|
| | 19.00--<br>21.00 | Sidang Kelompok (Lanjutan) | Bromo A |
| Jumat,<br>12 November 1999 | 08.00--<br>10.00 | Sidang Tim Perumus | Bromo A |
| | 10.00--<br>10.15 | Istirahat | |
| | 10.15--<br>12.15 | Sidang XIV<br>Perumusan Hasil Seminar<br>Pemandu : Hasan Alwi<br>Pencatat : Junaiyah H.M. | Bromo A |
| | 12.15--<br>13.00 | Penutupan | |

# PESERTA DAN PANITIA

## A. Peserta

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hans Kawulusan | Jalan Melawai II No. 59<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| 2. | Prof. Dr. Sabarti Akhadiah | FBS Universitas Negeri Jakarta<br>Rawamangun<br>Jakarta 1320 |
| 3. | Prof. Dr. H.A.S. Natabaya | Badan Pembinaan Hukum Nasional<br>Departemen Kehakiman<br>Jalan Mayjen Sutoyo<br>Cililitan<br>Jakarta Timur |
| 4. | Prof. Dr. Sardjono Jatiman | Jalan Daksinapati Barat III No. 1<br>Rawamangun<br>Jakarta Timur |
| 5. | Dr. Abdul Hadi W.M. | Universitas Paradina Mulya<br>Gedung Bina Sentana, Kompleks Bidakara<br>Jalan Gatot Subroto 71--73<br>Jakarta Selatan |
| 6. | Prof. Dr. D.P. Tampubolon | Jalan Dr. Sumarsono 62/58<br>Kompleks USU<br>Medan |
| 7. | Dr. Abdul Gani Asyik, M.A. | FKIP Universitas Syiah Kuala<br>Darussalam 23111<br>Banda Aceh |
| 8. | Prof. Dr. Zainuddin Taha | Fakultas Pasca Sarjana<br>Universitas Negeri Makassar<br>Kampus Gunungsari Baru<br>Ujung Pandang |

| | |
|---|---|
| 9. Prof. Dr. Mansoer Pateda | Jalan Ahmad Yani 58<br>Gorontalo |
| 10. Prof. K.M.A. M. Usop, M.A. | FKIP Universitas Palangkaraya<br>Kampus Unpar, Tunjung Nyaho<br>Jalan Yos Sudarso<br>Kotak Pos 2/PL KUP<br>Palangkaraya |
| 11. Prof. Dr. I Wayan Bawa | Fakultas Sastra Universitas Udayana<br>Jalan Nias No. 13<br>Denpasar |
| 12. Dr. Husni Mu;adz | FKIP Universitas Mataram<br>Jalan Pemuda 62<br>Mataram |
| 13. Drs. Andi Mappi Sammeng | Departemen Pariwisata dan Kesenian<br>Jalan Merdeka Barat<br>Jakarta Pusat |
| 14. Drs. J.D. Parera | FBS Universitas Negeri Jakarta<br>Rawamangun<br>Jakarta Timur |
| 15. Atika Satiri | Jalan Prapanca Bawah B No. 13<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
| 16. Dr. Asim Gunarwan | Fakultas Sastra<br>Universitas Indonesia<br>Depok |
| 17. dr. Sugito Wonodirekso | Fakultas Kedokteran<br>Universitas Indonesia<br>Jalan Salemba Raya<br>Jakarta Pusat |
| 18. Dr. Chaedar Alwasilah | FBS Universitas Pendidikan Indonesia<br>Jalan Dr. Setiabudi No. 229<br>Bandung |

| | |
|---|---|
| 19. Prof. Dr. Soeseno Kartomihardjo | Fakultas Pasca Sarjana<br>Universitas Negeri Malang<br>Jalan Surabaya 6<br>Malang 65145 |
| 20. Dr. Soenardji | FBS Universitas Negeri Semarang<br>Kampus Sekaran<br>Gunungpati<br>Semarang |
| 21. Dr. Basuki Suhardi, M.A. | Fakultas Sastra<br>Universitas Indonesia<br>Depok |
| 22. Drs. Amris Nura | Balai Bahasa Padang<br>Simpang Alai, Cupak Tangah<br>Padang |
| 23. Drs. Suwadji | Balai Bahasa Yogyakarta<br>Jalan I Dewa Nyoman Oka 34<br>Yogyakarta |
| 24. Dr. H. Suparno | Jalan Teluk Banyu Biru 15<br>Malang |
| 25. Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum. | Balai Bahasa Ujung Pandang<br>Jalan Sultan Alaiuddin Km 7<br>Tala Salapang<br>Ujung Pandang |
| 26. Dr. Djantera Kawi | Kompleks Pondok Indah No. 7<br>Banjar Masin |
| 27. Kenedi Nurhan | Harian *Kompas*<br>Jalan Palmerah Selatan<br>Jakarta Selatan |
| 28. Mulyo Seto | Redaksi Budaya LKBN Antara<br>Jalan Merdeka Selatan |

**B. Panitia**

a. *Panitia Pengarah*

Ketua : Dr. I Gusti Ngurah Anom (Direktur Jenderal Kebudayaan)

Sekretaris : Dr. Hasan Alwi (Kepala Pusat Bahasa)

Anggota :
1. Prof. Dr. Fuad Hasan
2. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri
3. Prof. Dr. Amran Halim
4. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
5. Drs. Lukman Ali
6. Prof. Dr. Edi Sedyawati
7. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono
8. Prof. Dr. Taufik Abdullah
9. Prof. dr. Mien A. Rifai
10. A. Latief, M.A.
11. Dr. S. Effendi
12. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.
13. Dr. Yayah B. Lumintaintang
14. Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.A.

b. *Panitia Pelaksana*

Ketua : Dr. Hasan Alwi (Kepala Pusat Bahasa)

Sekretaris : Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A.

Anggota :
1. Drs. Adi Sunaryo, M.Hum.
2. Dr. Dendy Sugono
3. Drs. Hasjmi Dini
4. Dr. Nafron Hasjim
5. Dra. Atika Sja'rani
6. Drs. Slamet Riyadi Ali
7. Dra. Junaiyah H.M., M.Hum.
8. Drs. Sutiman, M.Hum.

Sekretariat :
1. Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum.
2. Dra. Sri Sayekti
3. Drs. Djamari
4. Sartono, S.Sos.
5. Sartiman
6. Sarwono
7. Endang Sulistiyanti
8. Sujatmo
9. Sarnata
10. Ajip Sjarifudin

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA